



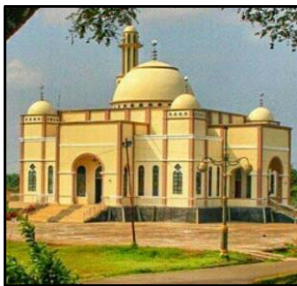
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

P-RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021



*Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
"Merakyat"*



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kel. Rano, Muara Sabak Barat
Telp. (0740) 7370006 Website : www.tanjabtimbkab.go.id



H. ROMI HARIYANTO, SE

Bupati Tanjung Jabung Timur

Periode: 2016-2021



H. ROBBY NAHLIYANSYAH
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
Periode 2016-2021



MUHAMMAD ARIS, S.Kom
(KETUA DPRD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MARKABAN
(WAKIL KETUA I DPRD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



ABDUL GAFUR, SE
(WAKIL KETUA II DPRD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;
- b. bahwa untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan capaian program pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) diubah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku selama periode Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021 terdiri dari 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- i. BAB IX PENUTUP

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Februari 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL, S.IP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (1-1/2019)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.1 Maksud.....	I-6
1.4.2. Tujuan..	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografis	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3. Topografi	II-3
2.1.1.4. Geologi.....	II-3
2.1.1.5. Hidrologi	II-4
2.1.1.6. Klimatologi.....	II-6
2.1.1.7. Penggunaan Lahan.....	II-7
2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-8
2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.1.2. Aspek Demografis	II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-13
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-15
2.2.1.3. Struktur Ekonomi	II-16
2.2.1.4. PDRB per kapita	II-17
2.2.1.5. Inflasi	II-18
2.2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio)	II-19
2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	II-19
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	II-22
2.2.2.2. Angka melek huruf.....	II-23
2.2.2.3. Angka pendidikan yang ditamatkan.....	II-23
2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar	II-25
2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni	II-26
2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-27

	2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah	II-28
	2.2.2.8. Angka Usia Harapan Hidup	II-29
	2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-30
	2.2.3.1. Jumlah grup kesenian	II-30
	2.2.3.2. Jumlah klub olahraga	II-31
	2.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.....	II-31
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-32
	2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-32
	2.3.1.1 Pendidikan	II-32
	2.3.1.2. Kesehatan	II-34
	2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-37
	2.3.1.4. Perhubungan	II-41
	2.3.1.5. Kependudukan dan catatan sipil	II-42
	2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-43
	2.3.1.7. Ketenagakerjaan	II-45
	2.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II-46
	2.3.1.9. Penanaman Modal.....	II-47
	2.3.1.10. Perpustakaan.....	II-48
	2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-49
	2.3.2.1. Pertanian	II-49
	2.3.2.2. Peternakan	II-51
	2.3.2.3 Perkebunan	II-52
	2.3.2.4. Kehutanan	II-54
	2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral.....	II-55
	2.3.2.6. Kelautan dan Perikanan	II-56
	2.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan.....	II-56
2.4	Aspek Daya Saing	II-60
	2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-60
	2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita	II-60
	2.4.1.2. Nilai Tukar Petani	II-60
	2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-61
	2.4.2.1. RTRW	II-61
	2.4.2.2. Jenis dan jumlah bank dan cabang	II-62
	2.4.2.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, penginapan/hotel	II-63
	2.4.2.4. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.....	II-63
	2.4.2.5. Rasio ketersediaan daya listrik	II-64
	2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-65
	2.4.3.1. Kriminalitas	II-65
	2.4.3.2. Demo	II-65
	2.4.3.3. Perizinan	II-66
	2.4.3.4. Jumlah pajak dan retribusi daerah.....	II-66
	2.4.3.5. Perda yang mendukung iklim usaha	II-67

2.4.4.	Sumberdaya Manusia	II-67
2.4.4.1.	Rasio Ketergantungan.....	II-67
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-4
3.1.1.1.	Pendapatan Daerah	III-4
3.1.1.2.	Proporsi Sumber Pendapatan	III-28
3.1.1.3.	Realisasi Belanja Daerah.....	III-29
3.1.2.	Neraca Daerah	III-46
3.1.2.1.	Analisis Neraca	III-46
3.1.2.2.	Analisis Rasio Keuangan.....	III-54
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-55
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-56
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-57
3.3	Kerangka Pendanaan	III-59
3.3.1.	Analisis Belanja	III-59
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-61
3.3.2.1.	Rencana Anggaran Pendapatan Daerah	III-61
3.3.2.2.	Rencana Anggaran Belanja Daerah	III-65
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1.	Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	IV-2
4.1.2.	Permasalahan Perekonomian Daerah	IV-3
4.1.3.	Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM.....	IV-4
4.1.4.	Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan	IV-4
4.1.5.	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	IV-5
4.2	Isu Strategis	IV-6
4.2.1.	Isu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	IV-6
4.2.2.	Isu Strategis Perekonomian Daerah	IV-6
4.2.3.	Isu Strategis terkait dengan peningkatan SDM.....	IV-7
4.2.4.	Isu - isu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik	IV-7
4.2.5.	Isu - isu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	IV-7
4.2.6.	Isu - isu strategis Global, Nasional dan Regional.....	IV-8
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi Daerah.....	V-1
5.2	Misi Daerah	V-1
5.3	Delapan Pilar Utama	V-2
5.4	Tujuan dan Sasaran.....	V-2
5.4.1.	Tujuan Pembangunan Daerah	V-2

5.4.2. Sasaran Pembangunan Daerah	V-5
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-2
6.3 Prioritas Pembangunan	VI-16
6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-17
6.5 Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD	VI-21
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	X-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-2
Tabel II.2.	Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)	II-5
Tabel II.3.	Rata-rata Iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sekitarnya	II-6
Tabel II.4.	Luas Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha)	II-7
Tabel II.5.	Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031	II-8
Tabel II.6.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2017	II-10
Tabel II.7.	Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	II-11
Tabel II.8.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2017	II-14
Tabel II.9.	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 - 2017	II-19
Tabel II.10.	Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2017	II-19
Tabel II.11.	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015	II-36
Tabel II.12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-45
Tabel II.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-46
Tabel II.14.	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-47
Tabel II.15.	Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-49
Tabel II.16.	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produktivitas Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2013 - 2017	II-49
Tabel II.17.	Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-52
Tabel II.18.	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2013 - 2017	II-52
Tabel II.19.	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-53
Tabel II.20.	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2013 - 2017	II-54
Tabel II.21.	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016	II-54
Tabel II.22.	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013 - 2017	II-56
Tabel II.23.	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-60

Tabel II.24.	Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-62
Tabel II.25.	Perkembangan Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-63
Tabel II.26.	Jumlah Hotel / Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-63
Tabel II.27.	Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-64
Tabel II.28.	Indeks Kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2017	II-65
Tabel II.29.	Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017I	II-65
Tabel II.30.	Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-66
Tabel II.31.	Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-66
Tabel III.1.	Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2017.....	III-2
Tabel III.2.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-5
Tabel III.3.	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017	III-28
Tabel III.4.	Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2015	III-30
Tabel III.5.	Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-48
Tabel III.6.	Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015	III-54
Tabel III.7.	Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-57
Tabel III.8.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017 (Dalam Jutaan).....	III-58
Tabel III.9.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021.....	III-60
Tabel III.10.	Proyeksi Pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah)	III-62
Tabel III.11.	Share Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (%).....	III-64
Tabel III.12.	Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah)	III-66
Tabel III.13.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah).....	III-69

Tabel III.14.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rupiah)	III-71
Tabel V.1.	Penajaman dan Penggabungan Beberapa Tujuan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021	V-3
Tabel V.2.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021	V-6
Tabel VI.1.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021	VI-5
Tabel VI.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021	VI-9
Tabel VI.3.	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021	VI-22
Tabel VII.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	VII-2
Tabel VII.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	VII-3
Tabel VIII.1.	Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021.....	VIII-2
Tabel VIII.2.	Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran	I-5
Gambar II.1.	Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	II-12
Gambar II.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB – ADHK) Tahun 2012 – 2016	II-13
Gambar II.3.	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2017	II-15
Gambar II.4.	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2017	II-16
Gambar II.5.	Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	II-17
Gambar II.6.	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2017	II-18
Gambar II.7.	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2012-2017 (persen)	II-18
Gambar II.8.	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Tahun 2013 - 2017	II-20
Gambar II.9.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-21
Gambar II.10.	IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017.....	II-22
Gambar II.11.	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-23
Gambar II.12.	Tingkat Kelulusan SD / Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-24
Gambar II.13.	Tingkat Kelulusan SMP / sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-24
Gambar II.14.	APK SD / sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-25
Gambar II.15.	APK SMP / sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-26
Gambar II.16.	APM SD / sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-26
Gambar II.17.	APM SMP/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-27
Gambar II.18.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017	II-28
Gambar II.19.	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017	II-29

Gambar II.20.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-30
Gambar II.21.	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-30
Gambar II.22.	Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-31
Gambar II.23.	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-31
Gambar II.24.	Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun Tahun 2013 - 2017	II-32
Gambar II.25.	Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun Tahun 2013 - 2017	II-33
Gambar II.26.	Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-33
Gambar II.27.	Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-34
Gambar II.28.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-34
Gambar II.29.	Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-35
Gambar II.30.	Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-36
Gambar II.31.	Jumlah Balita (0 - 3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-37
Gambar II.32.	Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2016	II-37
Gambar II.33.	Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-38
Gambar II.34.	Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-39
Gambar II.35.	Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2017	II-40
Gambar II.36.	Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-40
Gambar II.37.	Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-41
Gambar II.38.	Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-42
Gambar II.39.	Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2013 - 2017	II-42

Gambar II.40.	PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (Akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-43
Gambar II.41.	PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-43
Gambar II.42.	Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-44
Gambar II.43.	Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-44
Gambar II.44.	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-47
Gambar II.45.	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2017	II-48
Gambar II.46.	Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-48
Gambar II.47.	Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-50
Gambar II.48.	Perkembangan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2013 - 2017	II-50
Gambar II.49.	Jumlah dan Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-51
Gambar II.50.	Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012 - 2016.....	II-55
Gambar II.51.	Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2012 - 2016.....	II-56
Gambar II.52.	Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-57
Gambar II.53.	Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.....	II-57
Gambar II.54.	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2013 - 2017	II-58
Gambar II.55.	Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2013 - 2017.....	II-58
Gambar II.56.	Perkembangan Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013 - 2017.....	II-59
Gambar II.57.	Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2013 - 2017.....	II-59
Gambar II.58.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-64
Gambar III.1.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-6
Gambar III.2.	Nilai Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-7
Gambar III.3.	Perkembangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017	III-8
Gambar III.4.	Nilai Efektivitas PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017.....	III-9
Gambar III.5.	Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017.....	III-10

Gambar III.6.	Nilai Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-10
Gambar III.7.	Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-11
Gambar III.8.	Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-12
Gambar III.9.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-13
Gambar III.10.	Nilai Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-14
Gambar III.11.	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-15
Gambar III.12.	Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-16
Gambar III.13.	Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-16
Gambar III.14.	Nilai Efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-17
Gambar III.15.	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2010-2017	III-18
Gambar III.16.	Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-19
Gambar III.17.	Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-20
Gambar III.18.	Nilai Efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-21
Gambar III.19.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-22
Gambar III.20.	Nilai Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-23
Gambar III.21.	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-23
Gambar III.22.	Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-24
Gambar III.23.	Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-25
Gambar III.24.	Nilai Efektivitas Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-26
Gambar III.25.	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-27
Gambar III.26.	Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2017	III-27
Gambar III.27.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-31

Gambar III.28.	Nilai Efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-32
Gambar III.29.	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-33
Gambar III.30.	Nilai Efektivitas Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-33
Gambar III.31.	Perkembangan Belanja Pegawai Daerah Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-34
Gambar III.32.	Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-35
Gambar III.33.	Perkembangan Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-36
Gambar III.34.	Nilai Efektivitas Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-36
Gambar III.35.	Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-37
Gambar III.36.	Nilai Efektivitas Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-38
Gambar III.37.	Perkembangan Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-38
Gambar III.38.	Nilai efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-39
Gambar III.39.	Perkembangan Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-40
Gambar III.40.	Nilai Efektivitas Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-40
Gambar III.41.	Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-41
Gambar III.42.	Nilai Efektivitas Belanja Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-42
Gambar III.43.	Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-42
Gambar III.44.	Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-43
Gambar III.45.	Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-44
Gambar III.46.	Nilai Efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-44
Gambar III.47.	Perkembangan Belanja Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-45
Gambar III.48.	Nilai Efektivitas Belanja Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2017	III-46

B

A

B

I

PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 yang dilantik pada tanggal 12 April 2016. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 - 2025, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 disusun secara terintegrasi dan komprehensif dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan strategis dalam mengimplementasikan visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025 khususnya untuk periodisasi tahun ketiga dari 20 tahunan RPJPD tersebut. Oleh karena itu, materi strategi, kebijakan dan program yang termuat dalam RPJMD ini sangat berarti untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Materi yang termuat dalam RPJMD harus berkualitas guna mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka dalam perjalanannya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodir beberapa perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan ideal dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJMD ini Selain menjabarkan, dan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai rujukan dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. RPJMN dengan RPJMD

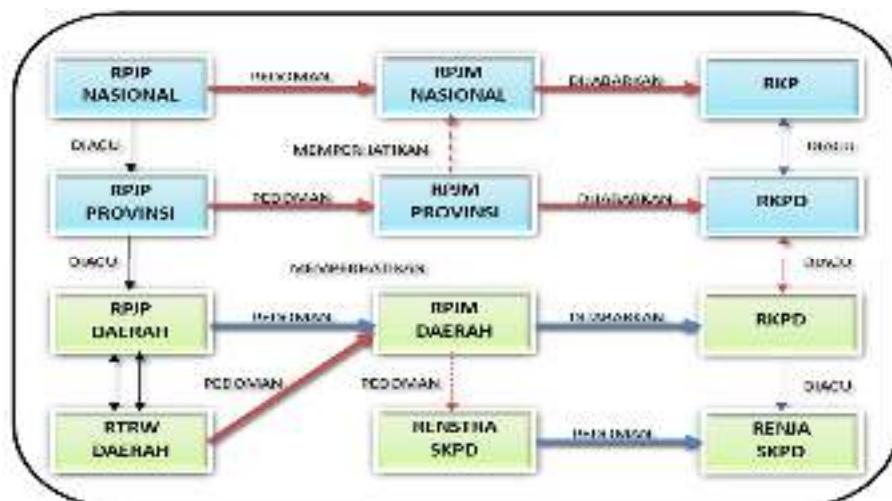
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. RPJMN 2015 - 2019 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Timur dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 - 2021 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan rinci bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1

Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 adalah untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah, dan terintegrasi sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan juga sebagai acuan dalam penentuan program daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berjenjang.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2016 - 2021;
2. Menyiapkan acuan resmi bagi seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar perangkat daerah, antar pemerintah kabupaten/kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat;

4. Mempermudah pengukuran dan pengevaluasian kinerja dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah;
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), guna terwujudnya kondisi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.4.1 Maksud
 - 1.4.2 Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1. Aspek Geografis
 - 2.1.2. Aspek Demografis
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
 - 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
- 2.4 Aspek Daya Saing
 - 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
 - 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
 - 2.4.4. Sumberdaya Manusia

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Analisis Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.1.1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup
 - 4.1.2. Permasalahan Perekonomian Daerah
 - 4.1.3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM
 - 4.1.4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan
 - 4.1.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- 4.2 Isu Strategis
 - 4.2.1. Isu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup
 - 4.2.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah

- 4.2.3. Isu Strategis terkait dengan peningkatan SDM
- 4.2.4. Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik
- 4.2.5. Isu-Isu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- 4.2.6. Isu-Isu strategis Global, Nasional dan Regional

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi Daerah
- 5.2 Misi Daerah
- 5.3 Delapan Pilar Utama
- 5.4 Tujuan dan Sasaran
 - 5.4.1. Tujuan Pembangunan Daerah
 - 5.4.2. Sasaran Pembangunan Daerah

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 6.3 Prioritas Pembangunan
- 6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 6.5 Program Lintas Bidang dan Lintas Perangkat Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan

B

A

B

II

Gambaran

Umum

Kondisi

Daerah

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas wilayah 5.445,0 Km².

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan atau perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
JUMLAH		20	73	5.445,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8 - 9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Sebaran desa/kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada di sekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara dan antara 103°23' - 104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat terhambat sampai terhambat sehingga menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (Bench Mark) BK 63. Tinggi muka air disajikan pada Tabel 2.2.

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesearangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai kelulusan 10 - 5 s/d 10 - 2 m/h dan material kasar antara 10 - 1 s/d 10 - 2 m/h. Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang.

2. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan.

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, menempati sebagian kecil daerah penyelidikan.

Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 akuifer sebagai berikut :

- Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.

- Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batulanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan relatif sempit.

2.1.1.5. Hidrologi

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadikan daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh.

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometrik sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai permukiman dan lahan pertanian.

A. Pasang Air Laut

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang besar.

- Pasang Kecil (Pasang perbani)
- Pasang Besar (Pasang purnama)

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, *neap-tide*) pasang surut di kawasan perencanaan berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan selama pasang besar (pasang purnama, *spring-tide*) pasang surut menjadi diurnal, dengan hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air terendah (*tidal range*) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada pasang besar. Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10 - 30 cm lebih tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus.

B. Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hampir tidak ada fluktuasi pasang yang terjadi di sebelah hulu (Simpang).

Tabel II.2.
Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)

Sungai & Lokasi	Jarak dr Muara Sungai	Pasang Surut	Musim Hujan				Musim Kemarau			
			Pasang	Rata ²	Surut	Range	Pasang	Rata ²	Surut	Range
Sungai Batanghari										
Pertemuan	61 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,90	+ 1,00	+ 1,50	+ 2,40	+ 1,50	+ 0,30	+ 2,10
Berbak		Rata ²	+ 2,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 1,10	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,50	+ 1,70
		Perbani	+ 2,20	+ 1,90	+ 1,50	+ 0,70	+ 2,10	+ 1,50	+ 0,90	+ 1,20
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30										
Pertemuan	41 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,60	+ 0,20	+ 2,30	+ 2,40	+ 1,30	- 0,40	+ 2,80
Pamusiran		Rata ²	+ 2,30	+ 1,60	+ 0,50	+ 1,80	+ 2,20	+ 1,30	- 0,10	+ 2,30
		Perbani	+ 2,20	+ 1,60	+ 1,00	+ 1,20	+ 2,10	+ 1,30	+ 0,50	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10										
Sungai Pamusiran										
Pamusiran	31 km	Purnama	+ 2,30	+ 1,50	+ 0,00	+ 2,30	+ 2,20	+ 1,20	- 0,60	+ 2,80
AWLR		Rata ²	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,00	+ 1,20	- 0,30	+ 2,30
		Perbani	+ 2,10	+ 1,50	+ 1,80	+ 1,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 0,30	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80										
Sungai Berbak										
Nipah	0 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,30	- 0,80	+ 3,30	+ 2,40	+ 1,10	- 0,10	+ 3,50
Panjang		Rata ²	+ 2,30	+ 1,30	- 0,40	+ 2,70	+ 2,20	+ 1,10	- 0,70	+ 2,90
		Perbani	+ 2,20	+ 1,30	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,10	+ 1,10	+ 0,00	+ 2,10

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 - 2031

C. Kualitas Air dan Rembesan Air Laut

Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sungai Berbak, Sungai Batanghari, dan Sungai Pemusiran serta saluran-saluran drainase/irigasi. Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan antara bulan September - Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik dipakai untuk irigasi tanaman.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 - 279 mm dan curah bulan kering 68 - 106 mm. Suhu udara rata-rata 22,9 - 31,4° Celsius. Kelembaban udara 78 - 81 persen pada bulan Desember - Januari dan 73 persen pada bulan September.

Berdasarkan Zona Agroklimat B 1 dengan 8 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) dan 2 bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm) berturut-turut. Bulan basah terjadi pada bulan Oktober - April, sedangkan bulan kering terjadi mulai bulan Juni - Agustus. Rata-rata iklim di wilayah perencanaan dan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3.
Rata-rata Iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sekitarnya

NO	BULAN	UNSUR IKLIM					Kec. Angin (Knot)
		CH (MM)	HH (HR)	Suhu(°C)	Hum (%)	Lama Penyinaran (%)	
1	Januari	205.2	16	22.8	86.3	3.62	2.82
2	Februari	174.9	14	22.69	84.6	4.02	2.58
3	Maret	174.9	19	22.82	85.7	3.55	2.63
4	April	280	18	23.25	84.9	4.43	2.11
5	Mei	190.5	16	23.35	84.8	4.79	2.1
6	Juni	97.5	11	23.04	83.3	5.28	2.29
7	Juli	87.2	9	22.65	82.6	5.38	2.77
8	Agustus	112.4	11	22.71	80.5	4.97	3.08
9	September	123.3	11	22.65	81.5	4.05	2.88
10	Oktober	122.3	16	22.72	84.3	4.24	2.18
11	November	139.5	20	22.89	84.9	3.32	2.36
12	Desember	239.5	21	23.03	86	3.48	2.75
Rata - Rata		162.3	15.17	22.89	84.12	4.26	2.55

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 - 2031

A. Curah Hujan

Sepanjang tahun 2008, semua wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai curah hujan tahunan sekitar 2.000 - 3.000 mm, dimana 8 - 10 bulan basah, 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 - 279 mm dan bulan kering 68 - 106 mm.

B. Penyinaran Matahari

Rata-rata penyinaran matahari bulanan adalah 32,50 % dengan lama penyinaran tertinggi sebesar 43 % terjadi pada bulan Mei dan Juni, penyinaran terendah sebesar 20 % terjadi pada bulan Maret dan umumnya penyinaran matahari berkisar antara 6 - 8 jam perhari.

C. Temperatur Udara

Sepanjang tahun 2008, udara rata-rata 25,90°C - 27,40°C, dengan temperatur tertinggi tercatat sebesar 32,60° C yang terjadi pada bulan Juni, terendah tercatat sebesar 20,10° C terjadi pada bulan Februari.

D. Kelembaban Udara

Sepanjang tahun 2008, kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada Bulan September.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas lahan kawasan lindung dan budidaya. Luas hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 225.047,6 Km². penggunaan terbesar adalah untuk Taman Nasional Berbak. Luas hutan dan penggunaannya per kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4.
Luas Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha)

No	Kecamatan	Luas Kawasan Hutan Tetap				
		Kawasan suaka alam hutan bakau pantai timur	Kawasan pelestarian TN Berbak	Tahura sekitar tanjung	Kawasan perlindungan Hutan lindung	Kawasan perlindungan Hutan lindung gambut
1	Mendahara	757,00	-	-	-	-
2	Mendahara Ulu	-	-	-	-	12.476
3	Geragai	-	-	-	-	5.245
4	Dendang	-	-	-	-	6.027
5	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-
6	Muara Sabak Timur	1.654,00	-	-	-	-
7	Kuala Jambi	326,45	-	-	-	-
8	Rantau Rasau	-	-	3.995,00	-	-
9	Berbak	-	10.000	-	-	-
10	Nipah Panjang	1.389,15	-	-	-	-
11	Sadu	-	128.242	-	-	-
Jumlah		4.126,60	138.242	3.995,00	-	23.748

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.8.Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan strategis Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Muara Sabak Barat;
2. Kawasan strategis Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
3. Kawasan strategis Perindustrian di Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Kawasan strategis Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
5. Kawasan strategis Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
7. Kawasan strategis provinsi dan kabupaten berupa rencana pengembangan Kawasan Ekonomi di Kecamatan Sadu.

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi meliputi kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai. Kawasan strategis dan klasifikasinya serta lokasi wilayah untuk tahun 2011 - 2031 disajikan pada Tabel II.5.

Tabel II.5.
Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031

No.	Kawasan Strategis	Klasifikasi Kawasan Strategis	Lokasi	Potensi Pengembangan
1	Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Muara Sabak Barat & Kecamatan Muara Sabak Timur	• Pengembangan Permukiman • Perdagangan Dan Jasa
2	Kawasan Industri Pertambangan Geragai	Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	• Kecamatan Geragai	• Pertambangan Minyak dan Gas • Perdagangan Dan Jasa
3	Kawasan Pelabuhan Muara Sabak	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Muara Sabak Barat	• Transportasi • Perdagangan dan Jasa
4	Kawasan Perindustrian Muara Sabak Barat	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Muara Sabak Barat	• Transportasi • Industri • Perdagangan dan Jasa
5	Kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Rantaurasau	• Perkebunan • Pertanian
6	Kawasan Nipah Panjang dan sekitarnya	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Nipah Panjang	• Perikanan • Industri Maritim
7	Kawasan Ekonomi Ujung Jabung	Pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Sadu	• Industri • Pelabuhan Nasional

Sumber : RTRW Kab.Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

- 1) ***Kawasan rawan banjir luapan air sungai dan gelombang pasang dan banjir ROB*** yang lokasinya terletak di beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Berbak, Kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Mendahara Ilir, Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur.
- 2) ***Kawasan rawan bencana kebakaran pemukiman*** terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kuala Jambi, Dendang, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai dan Sadu.
- 3) ***Kawasan Rawan Bencana Abrasi Tebing Sungai / Pantai*** terletak di Kecamatan Berbak, Mendahara, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi.
- 4) ***Kawasan Rawan Bencana Angin Badai Puting Beliung*** terletak di Kecamatan Kuala Jambi, Berbak, Nipah Panjang, Mendahara dan Sadu
- 5) ***Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan*** terletak di 11 kecamatan.

2.1.2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 bertambah sebanyak 1.461 jiwa dari 215.316 jiwa pada tahun 2016 menjadi 216.777 jiwa pada tahun 2017 atau dengan laju pertumbuhan 0,68 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2017 sebesar 39,81 jiwa/km² dan sex ratio 105,56.

Data pada tabel II.6 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	2016				2017					
	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Mendahara	13.350	12.810	26.160	104,22	28,71	13.405	12.838	26.243	104,42	28,79
Mendahara Ulu	9.256	8.178	17.434	113,18	45,72	9.527	8.410	17.937	113,28	47,04
Geragai	12.084	10.614	22.698	113,85	79,54	12.215	10.721	22.936	113,94	80,38
Dendang	7.649	7.372	15.021	103,76	31,41	7.662	7.372	15.034	103,93	31,44
Sabak Barat	8.826	8.360	17.186	105,57	68,27	8.979	8.499	17.478	105,65	69,43
Sabak Timur	15.735	15.558	31.293	101,14	76,27	15.773	15.569	31.342	101,31	76,39
Kuala Jambi	7.354	7.153	14.507	102,81	120,37	7.399	7.185	14.584	102,98	121,01
Rantau Rasau	11.951	11.396	23.347	104,87	65,56	12.042	11.462	23.504	105,06	66,00
Berbak	5.067	4.830	9.897	104,91	50,89	5.076	4.831	9.907	105,07	50,95
Nipah	12.919	12.637	25.556	102,23	108,89	12.943	12.637	25.580	102,42	108,99
Sadu	6.284	5.933	12.217	105,92	6,71	6.297	5.935	12.232	106,10	6,72
Jumlah	110.475	104.481	215.316	105,37	39,54	111.318	105.459	216.777	105,56	39,81

Sumber : BPS dan Data dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2017

Dari tabel diatas terlihat dimana kepadatan penduduk pada tahun 2017 (39,81/Km²) meningkat dari tahun 2016 (39,54/Km²). Tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 121,01/Km², sementara tingkat kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Sadu sebesar 6,72/ Km².

Selanjutnya, struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga kelompok yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0 - 14 tahun yang jumlahnya mencapai 59.993 jiwa atau sekitar 27,65 persen dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15 - 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 146.050 jiwa atau 67,37 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif yaitu yang berumur dari 65 - 75+ mencapai 10.794 Jiwa atau sebesar 4,98 persen dari total jumlah penduduk. Pengelompokan umur penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin dan rasionya disajikan pada Tabel II.7.

Tabel II.7.
Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2017

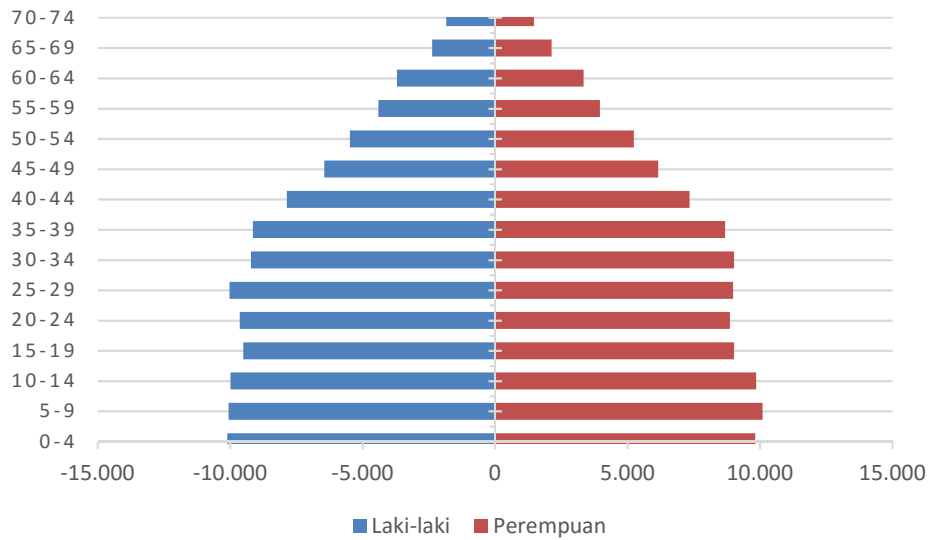
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0-4	10.110	9.821	19.931	102,94
5-9	10.060	10.096	20.156	99,64
10-14	9.983	9.863	19.846	101,22
15-19	9.505	9.025	18.530	105,32
20-24	9.639	8.867	18.506	108,71
25-29	10.023	8.984	19.007	111,57
30-34	9.207	9.028	18.235	101,98
35-39	9.140	8.690	17.830	105,18
40-44	7.858	7.347	15.205	106,96
45-49	6.450	6.165	12.615	104,62
50-54	5.482	5.240	10.722	104,62
55-59	4.405	3.958	8.363	111,29
60-64	3.697	3.340	7.037	110,69
65-69	2.372	2.132	4.504	111,26
70-74	1.837	1.469	3.306	125,05
75+	1.550	1.434	2.984	108,09
JUMLAH	111.318	105.459	216.777	105,56

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5 - 19 tahun) mencapai 8,55 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) jumlahnya mencapai 37.036 jiwa atau sebesar 17,08 dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1.
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) *Expansive*, bila sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) *Constructive*, bila penduduk yang berada pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur di atasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) *Stationary*, bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “*expansive*”. Dalam bentuk piramida ini akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan angka kelahiran rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur di atasnya terutama umur 15 - 29 tahun dimana pada kelompok perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk kelompok usia subur yang berpotensi pada peningkatan total kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir masih belum begitu stabil, hal ini ditunjukkan dengan masih berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2015, dimana ADHB mencapai minus sebesar 6,04 persen dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 9,84 persen. Kondisi perekonomian kembali membaik pada tahun 2016, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yaitu sebesar 4,16 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2017 disajikan pada Gambar II.2.

Gambar II.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) Tahun 2012 - 2016



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Berbeda dari tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang ditopang oleh 17 sektor kategori ekonomi tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 13,32 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,54 persen; Real Estate sebesar 8,80 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,06 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,69 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,47 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,03 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,40 persen; Jasa lainnya sebesar 5,39 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,32 persen, sedangkan 5 kategori lainnya hanya tumbuh dibawah 5 persen termasuk kategori pertambangan dan penggalan sebagai penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen. Tabel II.8. menunjukkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada periode tahun 2012 - 2017

Tabel II.8.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2012 - 2017

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,52	5,14	9,67	5,62	8,94	6,47
B	Pertambangan dan Penggalan	0,21	2,42	5,35	-0,53	-0,31	0,87
C	Industri Pengolahan	18,09	10,90	-0,70	2,68	1,08	1,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,53	13,77	10,61	9,73	5,07	2,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,28	0,25	2,85	4,53	5,11	2,64
F	Konstruksi	10,37	24,09	4,40	2,66	6,54	13,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	10,18	11,56	13,11	12,61	7,80
H	Transportasi dan Pergudangan	5,82	8,84	7,83	3,62	7,74	8,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	7,50	16,19	9,57	10,27	10,54
J	Informasi dan Komunikasi	5,08	5,57	10,46	6,05	9,91	7,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,44	9,95	5,93	3,23	8,95	5,40
L	Real Estate	4,54	5,45	1,70	4,17	8,23	8,80
M,N	Jasa Perusahaan	3,61	1,66	5,38	6,83	7,67	5,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	3,21	12,29	9,39	5,44	4,55
P	Jasa Pendidikan	3,21	3,97	2,46	5,02	8,59	6,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,04	9,24	15,26	13,43	9,76	6,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,18	4,67	5,45	6,78	7,83	5,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,78	4,57	5,81	1,81	2,70	3,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		5,74	7,76	8,48	6,57	8,78	7,44

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

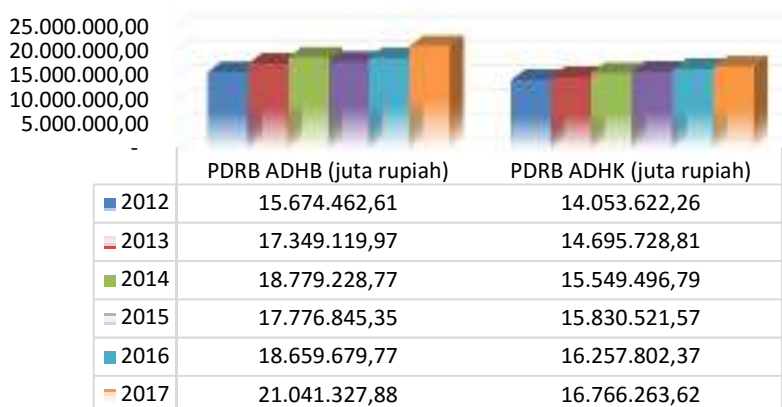
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 dengan migas yaitu sebesar Rp. 18.659,68 miliar naik sebesar Rp. 2.381,6 miliar menjadi Rp. 21.041,3 miliar pada tahun 2017. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas tahun 2017 sebesar Rp. 16.766,26 miliar meningkat sebesar Rp. 508,46 miliar dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 16.257,80 miliar. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp. 9.381,29 miliar pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp. 919,29 miliar dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 8.461,99 miliar. Untuk PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 5.640,84 miliar meningkat sebesar Rp. 419,77 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 6.060,61 miliar. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2017 tersaji pada Gambar II.3. dan II.4.

Gambar II.3.

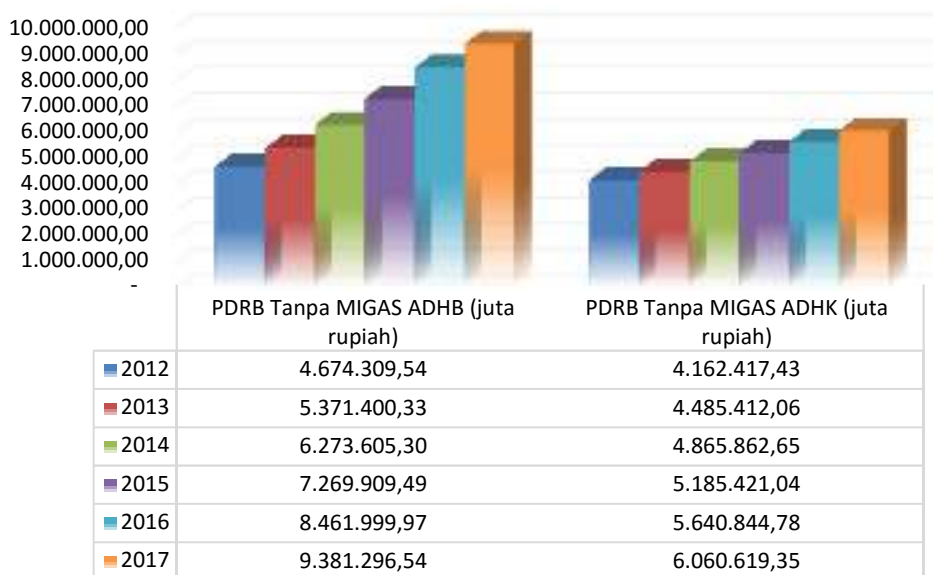
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan Migas Tahun 2012 - 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

Gambar II.4.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012 - 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

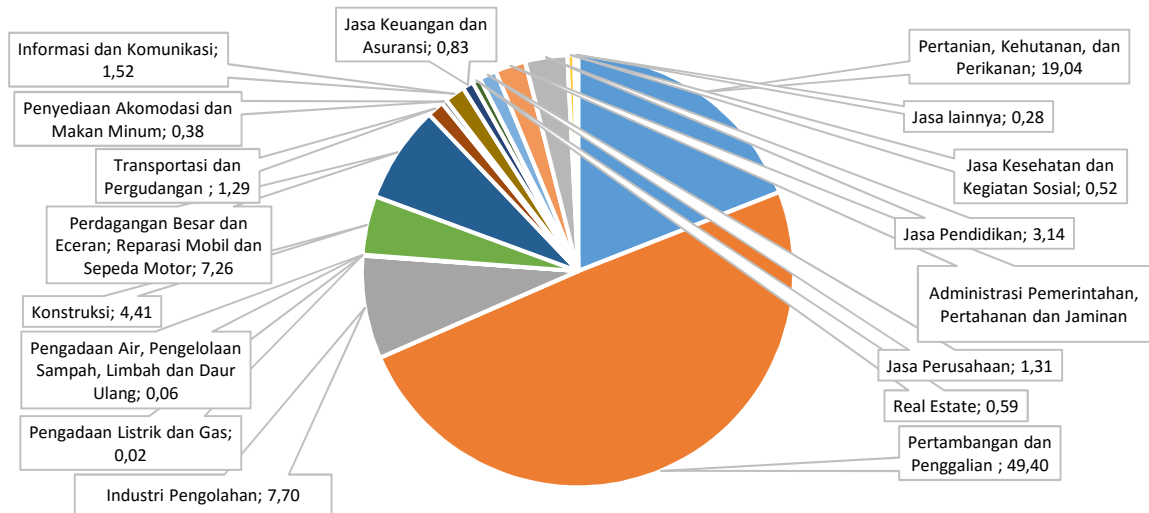
2.2.1.3. Struktur Ekonomi

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 49,40 persen, urutan kedua yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,04 persen, urutan ketiga yaitu kategori industri pengolahan sebesar 7,70 persen, urutan keempat yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,26 persen, dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 4,41 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB. Gambar II.5. menunjukkan struktur ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017.

Gambar II.5.

Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017



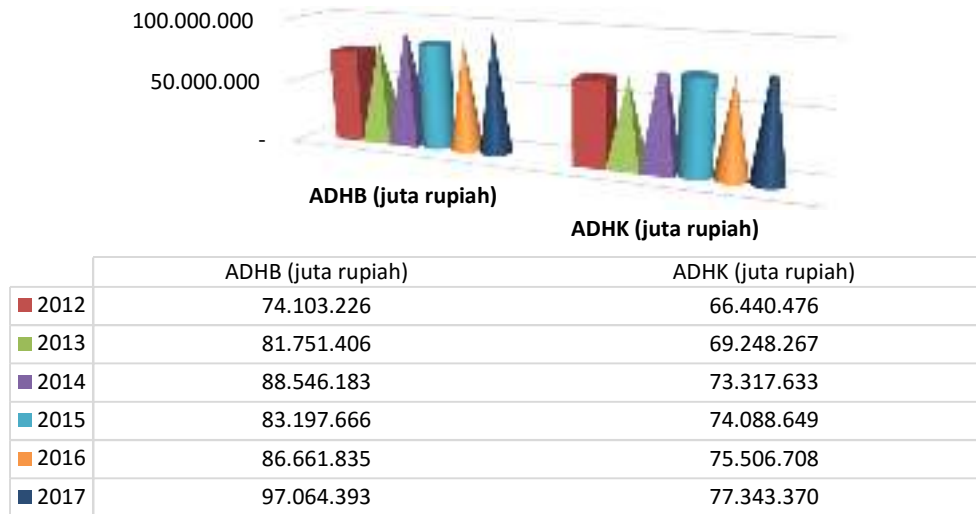
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (data diolah)

2.2.1.4. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

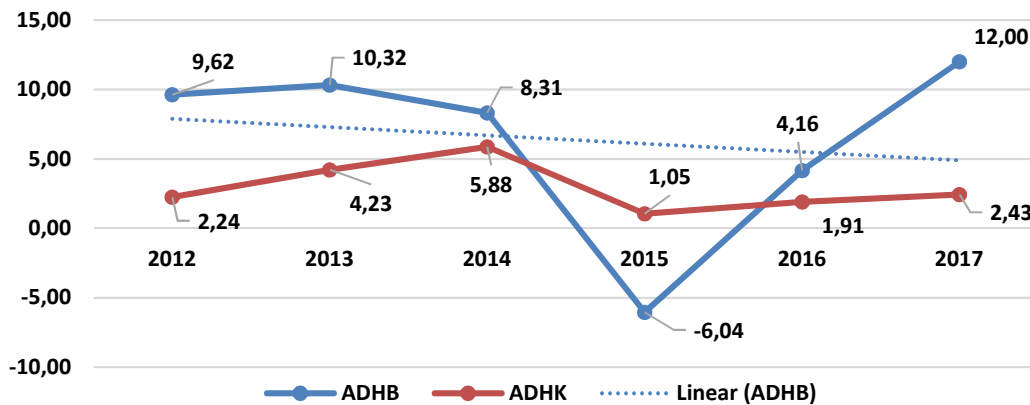
PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif diperiode 2012 - 2017, namun jika dilihat pertumbuhan per tahun, ada perlambatan pada tahun 2015 (ADHB) sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2017 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 97.064.393,00 naik sebesar 12 persen dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 86.661.835,00, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 77.343.370,00. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. PDRB per kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2012 - 2017 disajikan pada Gambar II.6. dan untuk grafik laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2012 - 2017 tersaji pada Gambar II.7.

Gambar II.6.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012 - 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (data diolah)

Gambar II.7.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2012 - 2017 (persen)



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018(diolah)

2.2.1.5. Inflasi

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang.

Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi. Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012 = 100 dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi, dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inflasi bulanan di Kota Jambi tahun 2014 - 2017 tersaji pada Tabel II.9.

Tabel II.9.

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 - 2017

NO	INFLASI	2014	2015	2016	2017
1	Desember	2,61	0,91	0,36	1,52
2	Desember (Tahun Kalender)	8,72	1,37	4,54	2,61
3	Desember terhadap Desember (year on year)	8,72	1,37	4,54	2,68

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengatur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Data pada Tabel II.10. disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2013 - 2017.

Tabel II.10.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Gini Ratio	0,27	0,33	0,27	0,26	0,27

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

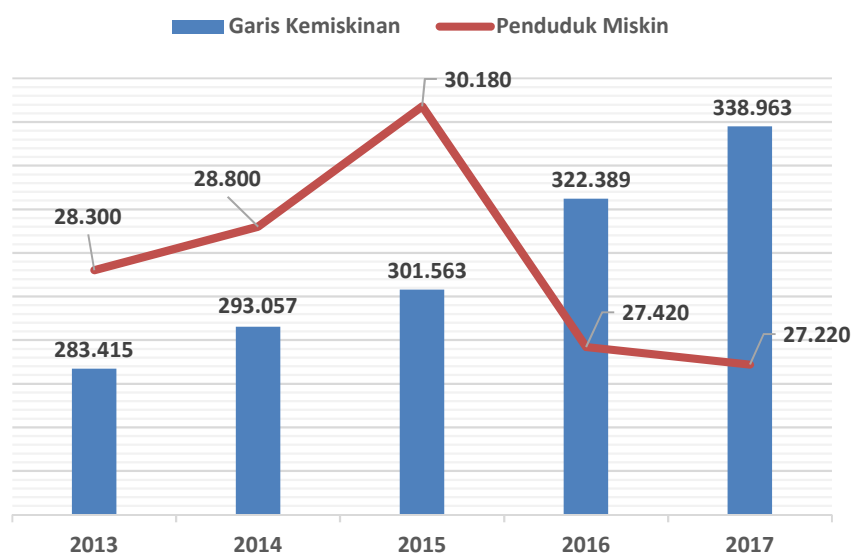
2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami penurunan, dari sebanyak 28.300 jiwa menjadi sebanyak 27.220 jiwa, Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2013 berjumlah Rp. 283.415,00 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi Rp. 338.963,00. Grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.8.

Gambar II.8.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

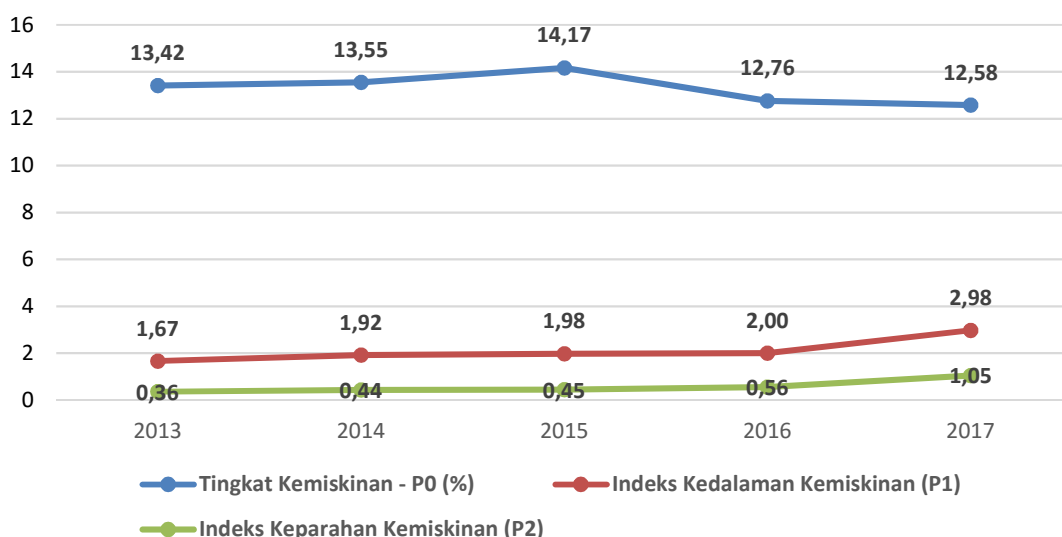


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar II.9.

Gambar II.9.
Indeks Kedalaman dan Keparahhan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

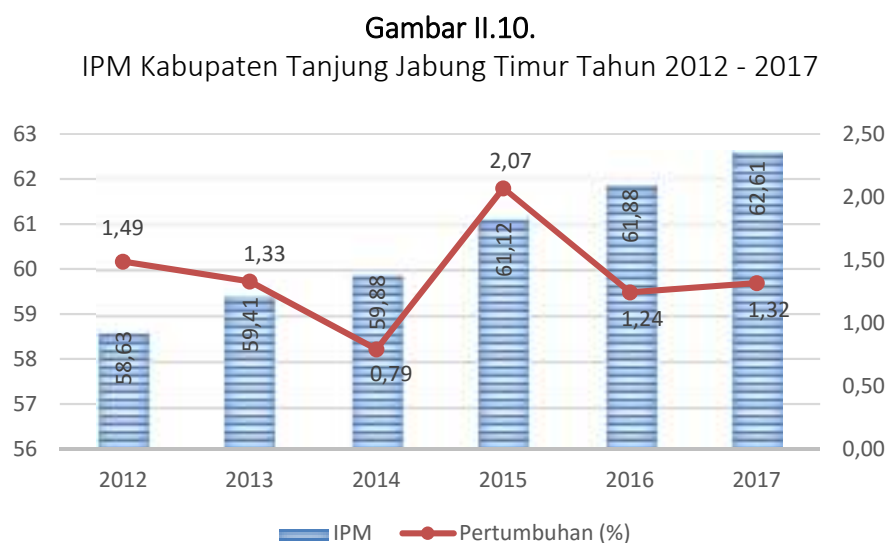
Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) berfluktuatif meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2017. dimana pada tahun 2013, P1 berada di posisi 1,67 persen kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 2,98 persen. Demikian pula Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) naik dari 0,36 tahun 2013 menjadi 1,05 pada tahun 2017. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

UNDP menyempurnakan metode IPM dengan metode baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Gambar II.10. menunjukkan angka IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2017.

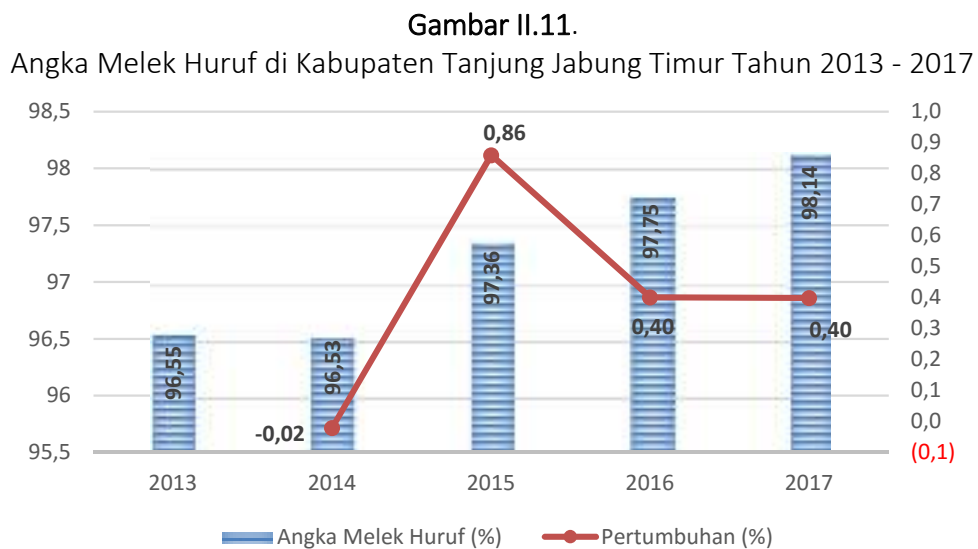


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berada di posisi angka 58,63 kemudian terus mengalami peningkatan secara nyata tiap tahunnya hingga pada tahun 2015 menjadi 61,12 dengan pertumbuhannya mencapai 2,07 persen dan kemudian di tahun 2017 menjadi 62,61 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,32 persen pertahun.

2.2.2.2. Angka melek huruf

Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun belakangan ini selalu naik setiap tahun. Jika pada tahun 2013, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 96,55 persen meningkat menjadi sebesar 98,14 persen di tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,45 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,86 persen dan terendah pada tahun 2014 yaitu minus 0,02 persen. Gambar II.11. menunjukkan angka melek huruf dan pertumbuhannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.



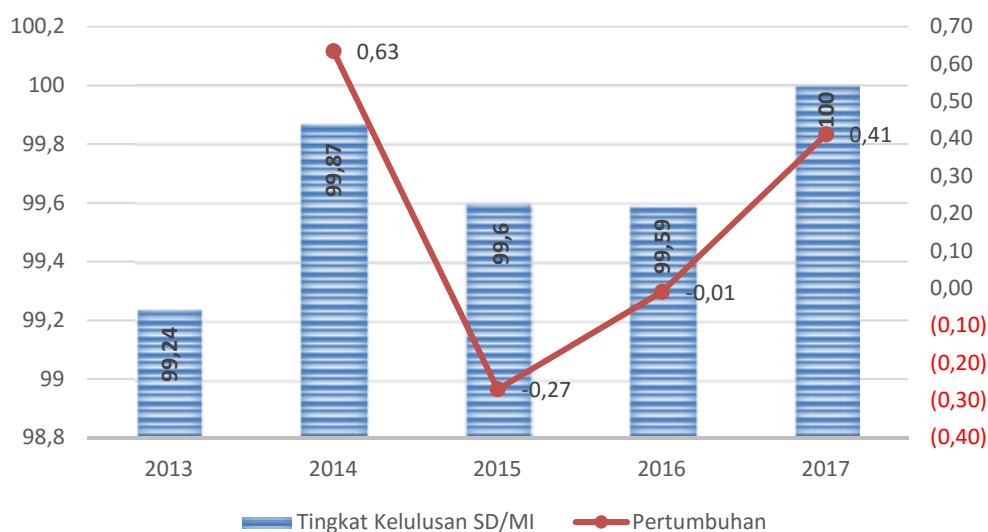
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.2.3. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung stabil namun telah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Jika pada tahun 2013 tingkat kelulusan SD/ sederajat sebesar 99,24 persen akhirnya pada tahun 2017 berhasil mencapai 100 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir dari tahun 2013 - 2017 adalah sebesar 0,19 persen per tahun. Tingkat kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 tersaji pada Gambar II.12.

Gambar II.12.

Tingkat Kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

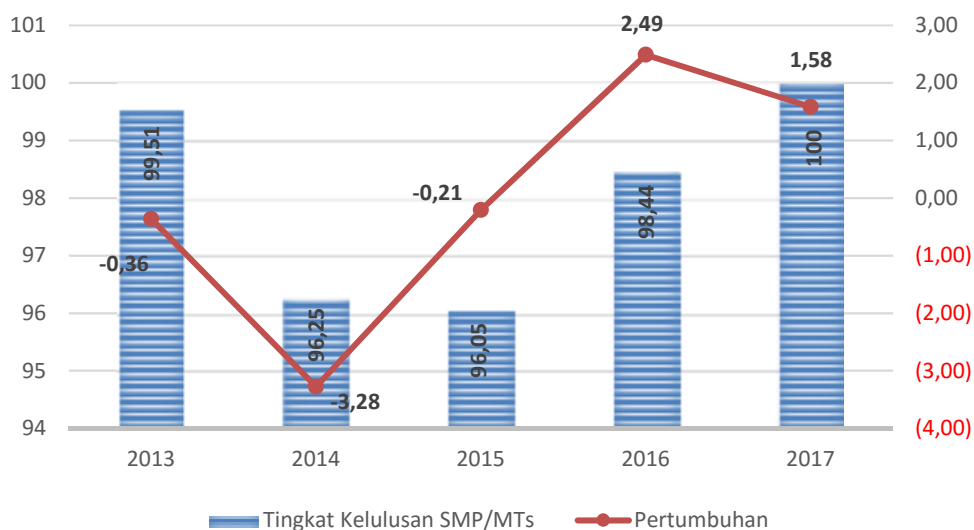


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tingkat kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/ sederajat sebesar 99,51 persen pada tahun 2013, kemudian mencapai 100 persen pada tahun 2017. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,15 persen per tahun. Tingkat kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 tersaji pada Gambar II.13.

Gambar II.13.

Tingkat Kelulusan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

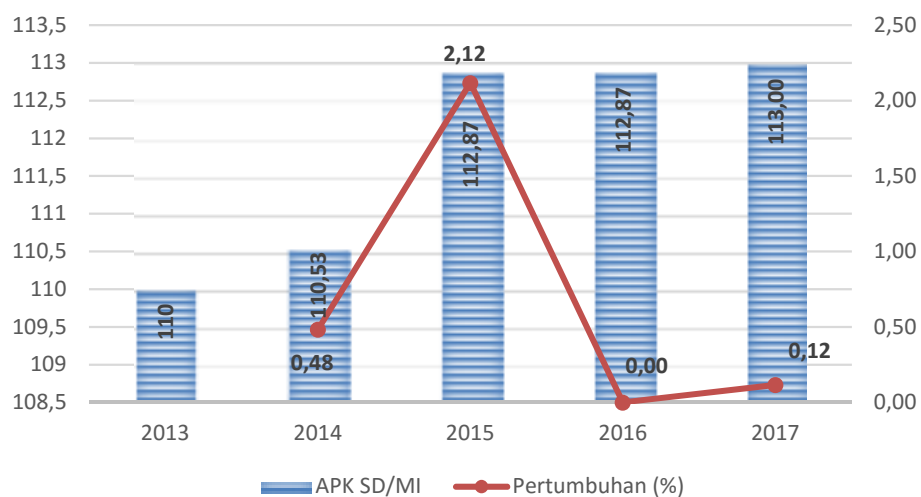


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SD/ sederajat dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.14.

Gambar II.14.
APK SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



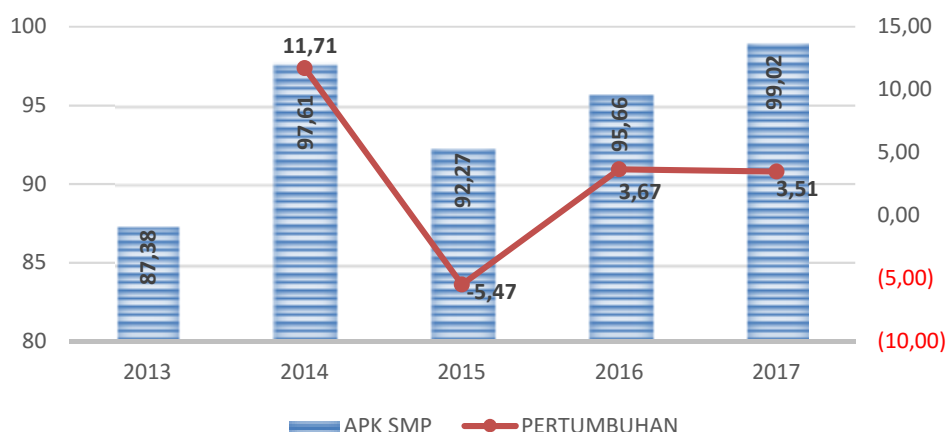
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meningkat. Hal ini terlihat dari gambar II.14 dimana pada tahun 2013 APK SD/ sederajat sebesar 110 persen mengalami peningkatan menjadi 113 persen pada tahun 2017.

Berbeda dengan APK SD, untuk APK SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013 - 2017 terus naik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 APK SMP/ sederajat hanya sebesar 87,38 persen mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,02 persen pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,36 persen. Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SMP/ sederajat dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.15.

Gambar II.15.

APK SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



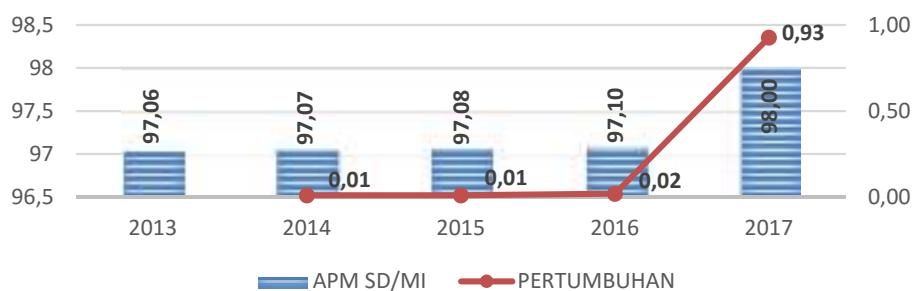
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 - 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Gambar II.16. menunjukkan APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017.

Gambar II.16.

APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

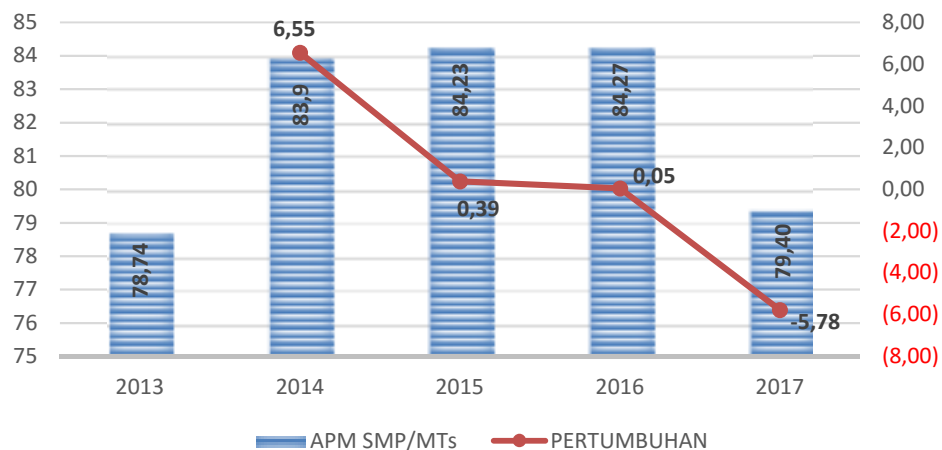


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur peridotahun 2013 - 2017 selalu meningkat setiap tahunnya. Jika tahun 2013 mencapai sebesar 97,06 persen naik menjadi sebesar 98 persen pada tahun 2017. Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun.

Sedangkan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama mengalami fluktuasi kemudian menurun. Adapun capaian APM SMP/ sederajat sebesar 83,90 persen tahun 2013 berfluktuasi hingga tahun 2017 menurun menjadi sebesar 79,40 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun dengan rata-rata 0,30 persen per tahun. APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.17.

Gambar II.17.
APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

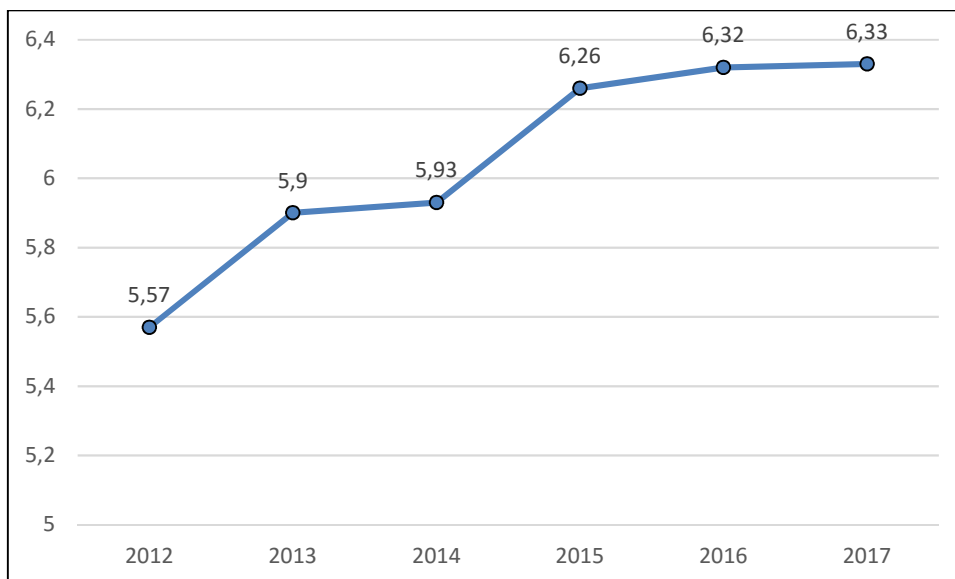
Pada Periode Tahun 2012 - 2017, angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar 5,57 tahun meningkat menjadi 6,33 tahun pada tahun 2017. Peningkatan persentase angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2012 – 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata 3,69 persen setiap tahunnya.

Rata-Rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Upaya percepatan ini juga

pelu segera diimplementasikan karena lama sekolah yang hanya 6,33 tahun berarti rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya sampai sekolah kelas 6 SD sampai 1 SLTP.

Gambar II.18.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

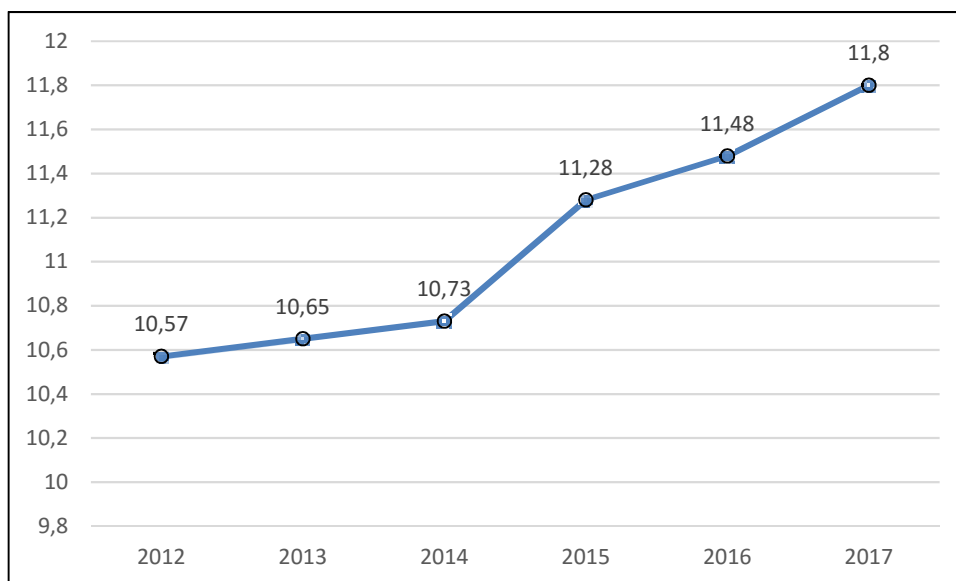
2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Periode Tahun 2012 – 2017 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar 10,57 tahun meningkat menjadi 11,8 tahun pada tahun 2017. Peningkatan persentase Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2012 – 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,98 persen setiap tahunnya.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 sebesar 11,8 tahun. Artinya, secara rata-rata anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,8 tahun atau setara dengan SLTA kelas 3 (menamatkan SLTA).

Gambar II.19.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017



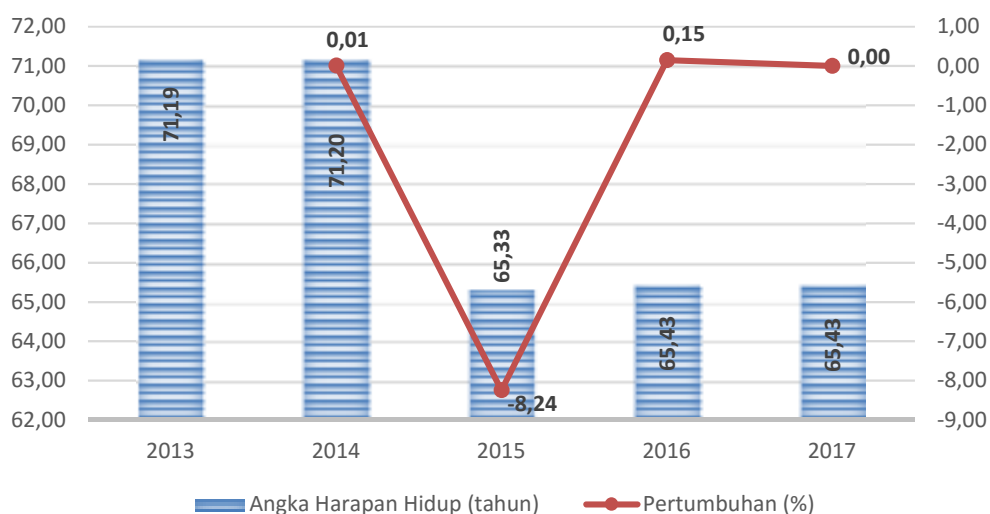
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.2.8. Angka usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat kecenderungan meningkat pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 - 2017. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 71,19 tahun pada tahun 2013 menurun menjadi 65,43 tahun pada tahun 2017. Angka harapan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.20.

Gambar II.20.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

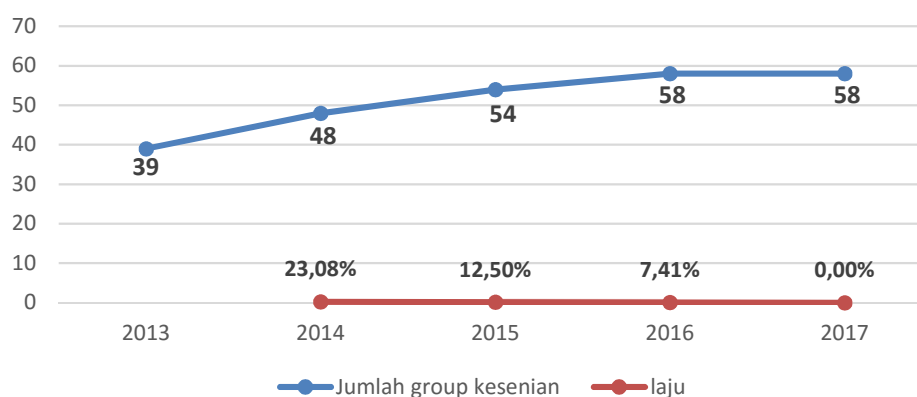
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat 48 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk naik menjadi sebanyak 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian di tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 10,75 persen. Gambar II.19. menunjukkan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

Gambar II.21.

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

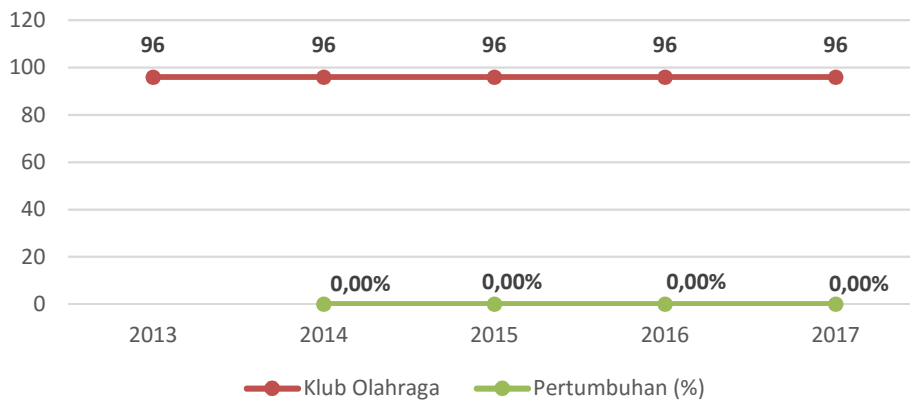


Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.2.3.2. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013 - 2017 tidak mengalami pertumbuhan dan cenderung stagnan pada jumlah 96, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar II.20.

Gambar II.22.
Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013 - 2017 juga mengalami stagnan seperti klub olahraga. Dimana pada tahun 2013 - 2015 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk adalah sebanyak 12 gedung. Kemudian pada tahun 2016 bertambah 5 gedung menjadi 17 gedung sehingga mengalami peningkatan sebesar 41,67 persen. Data jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.21.

Gambar II.23.
Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Rasio sekolah sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013 - 2017 mengalami fluktuatif hingga akhirnya naik, dimulai pada tahun 2013 mencapai 92,59 persen kemudian meningkat hingga mencapai angka 94,93 persen pada tahun 2017. Gambar II.22. menunjukkan rasio sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2013 - 2017.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk 13 - 15 tahun juga cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013-2017. Gambar II.23. menunjukkan angka rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai angka 66,82 persen di tahun 2013 dan menurun hingga mencapai angka 56,90 persen pada tahun 2017.

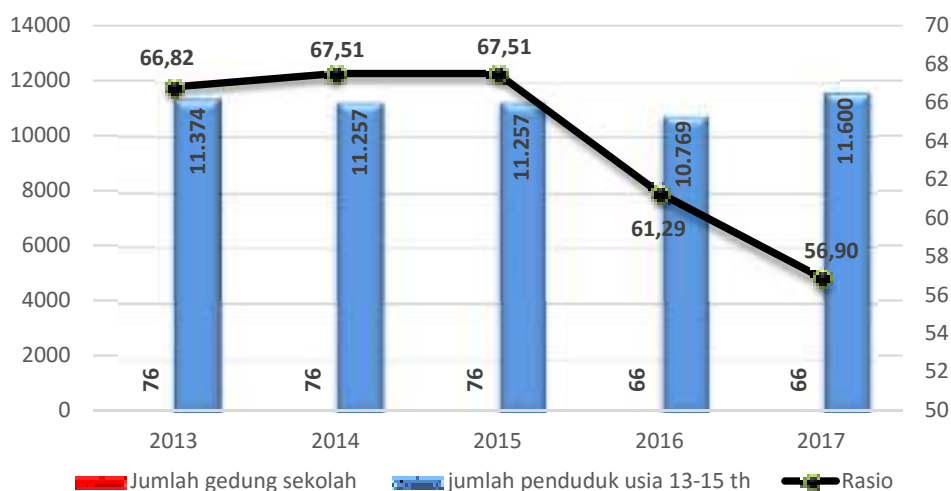
Gambar II.24.
Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.25.

Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun
Tahun 2013 - 2017

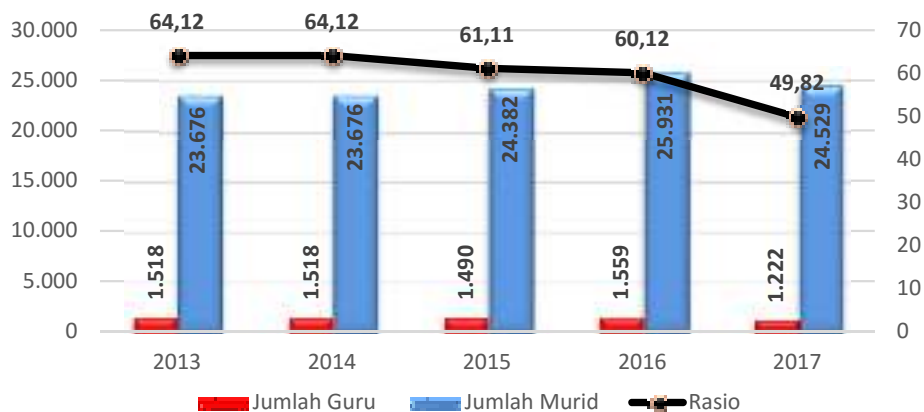


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013 – 2017 diperoleh angka rata-rata sebesar 59,86 persen. Rasio guru terhadap murid SD/ sederajat periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar II.24.

Gambar II.26.

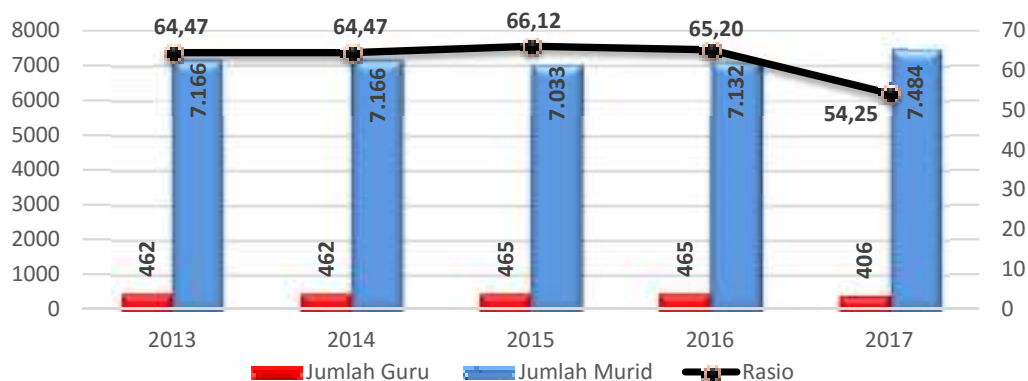
Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sementara itu untuk rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013 - 2017 diperoleh angka rata-rata sebesar 62,90 persen. Rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat periode tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.25.

Gambar II.27.
Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menurunkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup selama 5 tahun belakangan ini (tahun 2013 - 2017). Gambar II.26. menunjukkan angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 22,69 dari 1.000 kelahiran hidup dan berhasil diturunkan menjadi 20,43 dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Terjadi kenaikan angka kematian bayi sebesar 9,40 persen hingga menjadi 22,35 dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dan kemudian angka kematian bayi berhasil diturunkan menjadi 21,29 dari 1.000 kelahiran hidup di tahun 2016 dan 20,24 dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Laju penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup selama 5 tahun terakhir yaitu diperoleh rata-rata sebesar minus 2,56 persen per tahun.

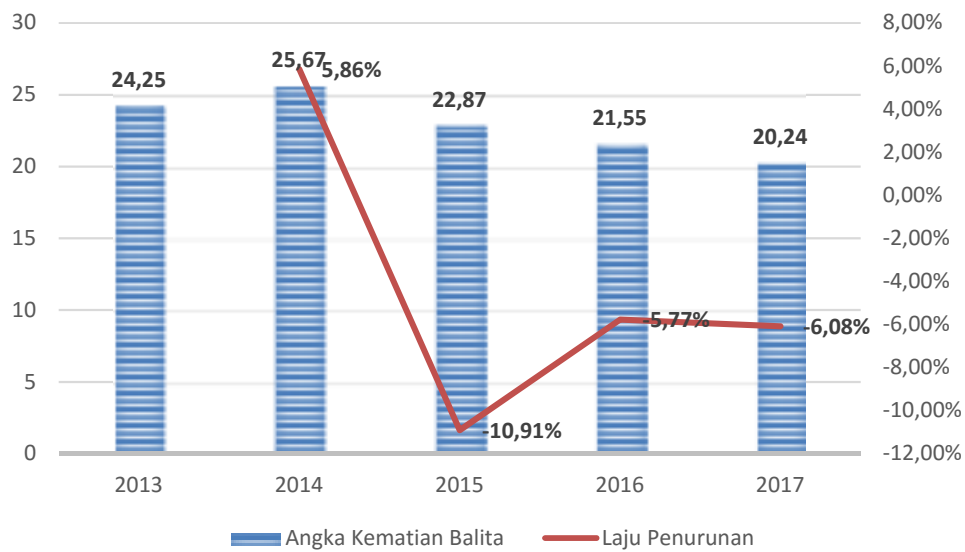
Gambar II.28.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Angka kematian balita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 berhasil diturunkan hingga mencapai angka 20,24 yang mana pada tahun 2014 angka kematian bayi berada pada level angka tertinggi selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 yaitu 25,67. Upaya yang dilakukan dari program dan kegiatan dinas kesehatan, telah dapat menekan angka kematian balita tersebut pada tahun 2017. Angka kematian balita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.27.

Gambar II.29.
Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah dapat dilihat pada Tabel II.11.

Tabel II.11.

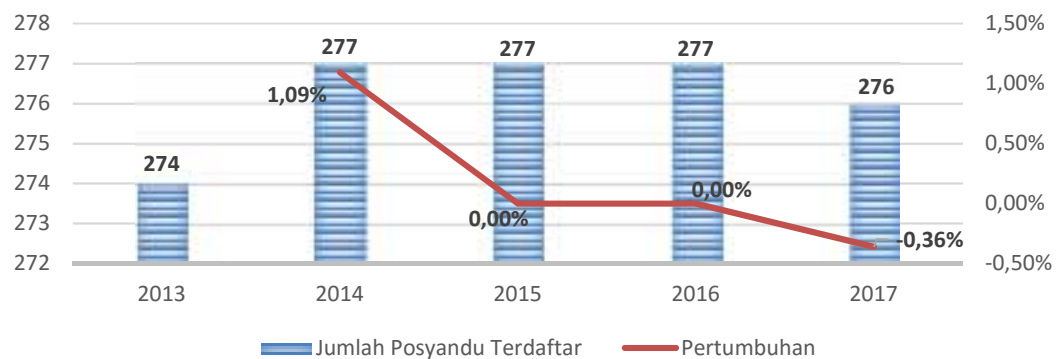
Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bed Occupation Rate (%)	28,08	31,98	32,33	23,23	38,58
Average Length of Stay (Hari)	3	2	3	2	3
Bed Turn Over (Kali)	36	33	42	31	46
Turn Over Interval (Hari)	7	6	5	9	4
Net Death Rate (%)	0,73	0,22	1	1,19	1,19
Gross Death Rate (%)	2,15	1,47	2,43	3,69	4,27
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	44	44	45	54	54
Jumlah Kematian (Jiwa)	35	26	46	60	100
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	12.469	11.833	10.745	10.368	14.575
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.771	1.811	2.097	1.729	2.567
Jumlah Penduduk yang sakit (jiwa)	110.822	137.562	146.674	171.315	
Pertumbuhan (%)	142,01	24,13	6,62	16,80	-100,00

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

Gambar II.30.

Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



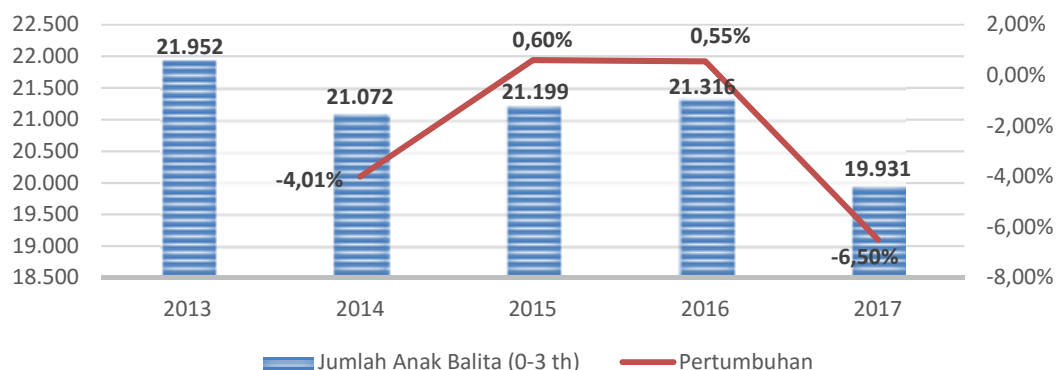
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.28. menunjukkan posyandu yang terdaftar di dinas kesehatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 274 unit posyandu. Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 1,09 persen menjadi sebanyak 277 unit, sedangkan pada tahun 2014 - 2016 jumlah posyandu tidak berubah dan tetap di angka 277 unit, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah posyandu mengalami penurunan sebesar 0,36 persen menjadi 276 unit.

Gambar II.29. menunjukkan jumlah anak balita yang berusia 0 - 3 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 berjumlah 21.592 balita, selanjutnya di tahun 2014 menurun 4,01 persen menjadi 21.072 balita. Tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan masing-masing 0,60 persen menjadi 21.199 balita dan 0,55 persen menjadi 21.316 balita. Tahun 2017 jumlah balita menurun sebesar 6,50 persen menjadi 19.931 balita. Rata-rata pertumbuhan balita setiap tahun nya selama 5 tahun sebesar minus 2,34 persen.

Gambar II.31.

Jumlah Balita (0 - 3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

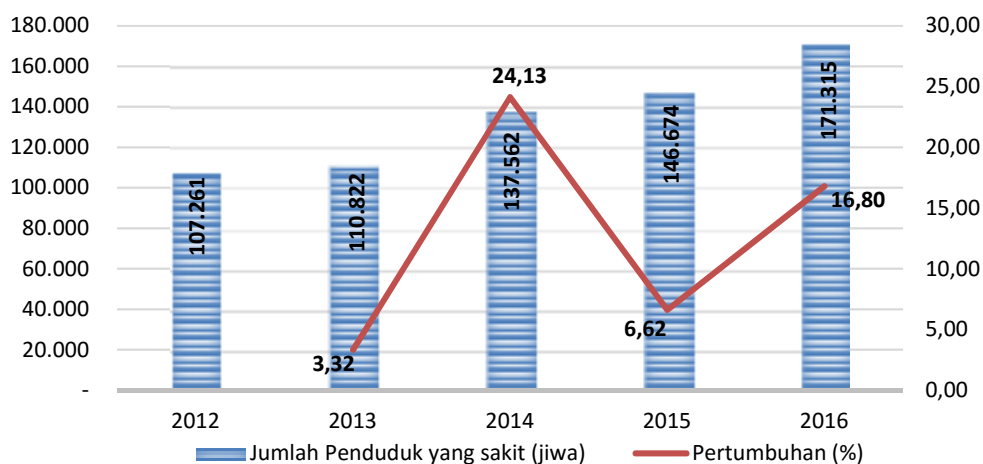


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.30. menerangkan bahwa pada tahun 2012 penduduk yang sakit berjumlah 107.261 orang dan terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, hingga pada tahun 2016 jumlah orang sakit sebanyak 171.315 orang dengan rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 12,72 persen per tahun.

Gambar II.32.

Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

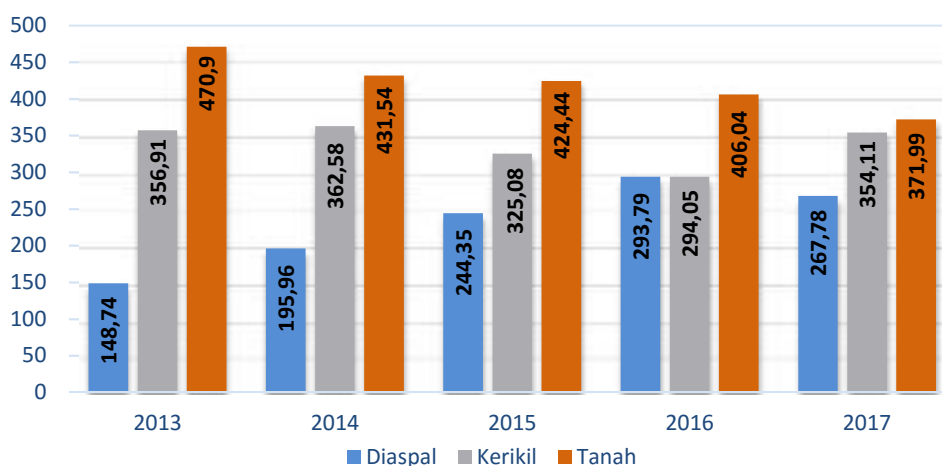
Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas keinfrastrukturan, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 antara lain : 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah; 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat; 3) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek; dan 4) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman pedesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan konstruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang. Gambar II.31. menunjukkan data tentang perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 - 2017.

Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata perkembangan sepanjang 198,77 km per tahun. Jalan aspal pada tahun 2013 hanya sepanjang 148,74 km, kemudian meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 267,78 km, atau rata-rata sebesar 16,96 persen per tahun. Sementara panjang jalan kerikil pada tahun 2013 sepanjang 356,91 km kemudian jalan kerikil turun menjadi 354,11 km pada tahun 2017, atau rata-rata sebesar 0,53 pertahun.

Gambar II.33.

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

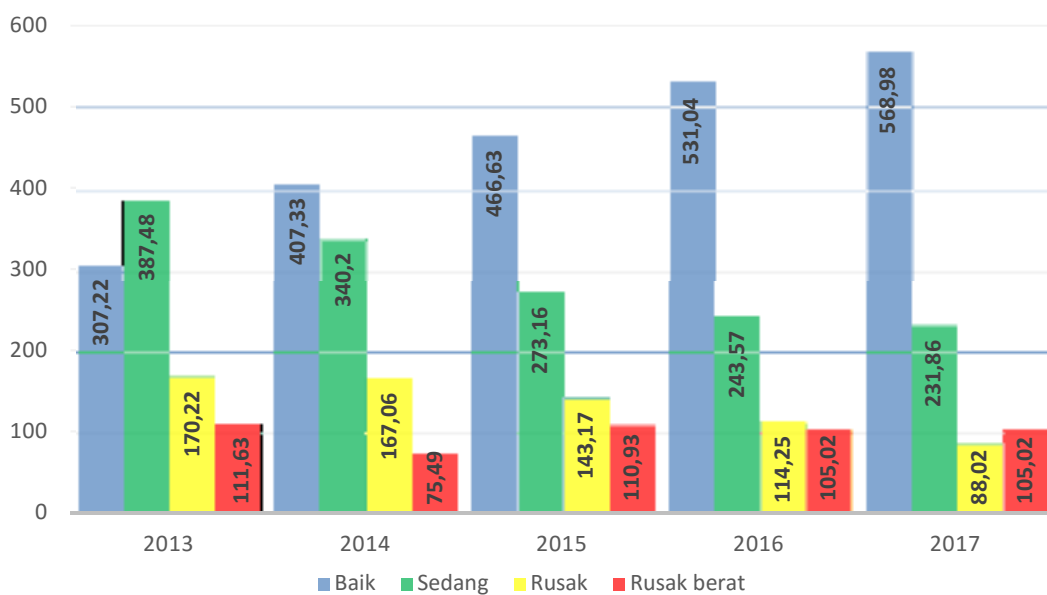


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Penanganan jalan dan jembatan memang menjadi sangat sentral apabila tidak mampu dilaksanakan. Hal tersebut akan berakibat terhadap aktifitas barang dan orang akan menjadi terhambat, untuk mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul, maka kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang (Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001).

Gambar II.34.

Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



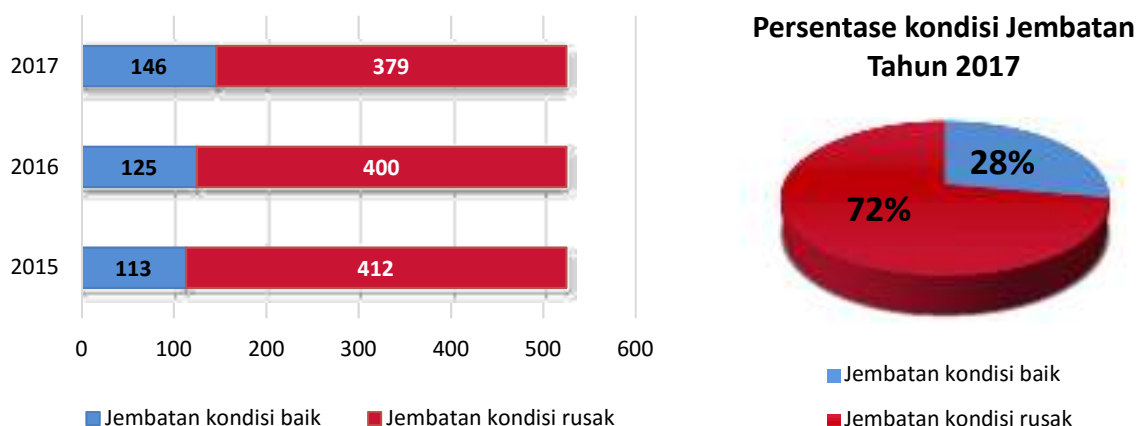
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Hingga tahun 2017, kondisi jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami peningkatan kualitas dengan capaian sepanjang 800,84 Km (568,98 km baik dan 231,86 km sedang) jika dibandingkan dari tahun 2013 yang hanya sepanjang 694,70 km (307,22 km baik dan 387,48 km sedang), sehingga selama 5 tahun peningkatan kondisi jalan mantap rata-rata sebesar 3,67 persen atau sepanjang 106,14 km.

Sebaliknya dengan kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada kondisi awal tahun 2013 sepanjang 170,22 km, mengalami penurunan di tahun 2017 hingga menjadi 88,02 km atau berkurang sepanjang 82,20 km. Untuk kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 mengalami kerusakan sepanjang 111,63 km dan menurun menjadi 105,02 km atau sepanjang 6,61 km di tahun 2017. Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung jabung Timur tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.32.

Gambar II.35.

Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2017



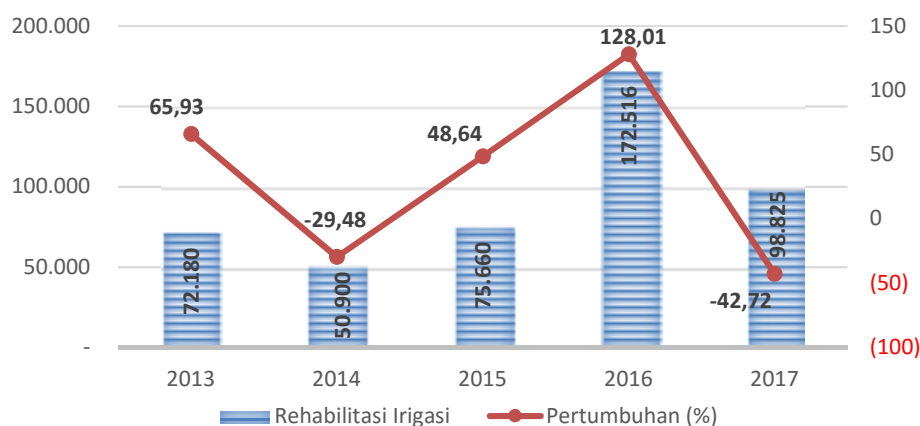
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.33. menunjukkan data jumlah jembatan dari tahun 2015 - 2017 yang telah dibangun tidak bertambah yaitu sebanyak 525 unit. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya peningkatan kualitas jembatan yang telah dibangun. Pada tahun 2015 hanya terdapat 113 unit jembatan dalam kondisi baik dan pada tahun 2017 jumlah jembatan dalam kondisi baik menjadi sebanyak 146 unit, sehingga ada penurunan angka jumlah jembatan dalam kondisi rusak dari tahun 2015 sebanyak 412 unit menjadi 379 unit pada tahun 2017. Secara persentase jembatan yang baik sebesar 28 % dan yang rusak sebesar 72 % pada tahun 2017.

Kondisi rehabilitasi irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari Gambar II.34. yang menunjukkan data awal rehabilitasi irigasi di tahun 2013 sepanjang 72.180 meter dengan kondisi pertumbuhan sebesar 65,93 persen. Kondisi akhir di tahun 2017 sepanjang 98.825 meter dengan kondisi pertumbuhan minus 42,72 persen.

Gambar II.36.

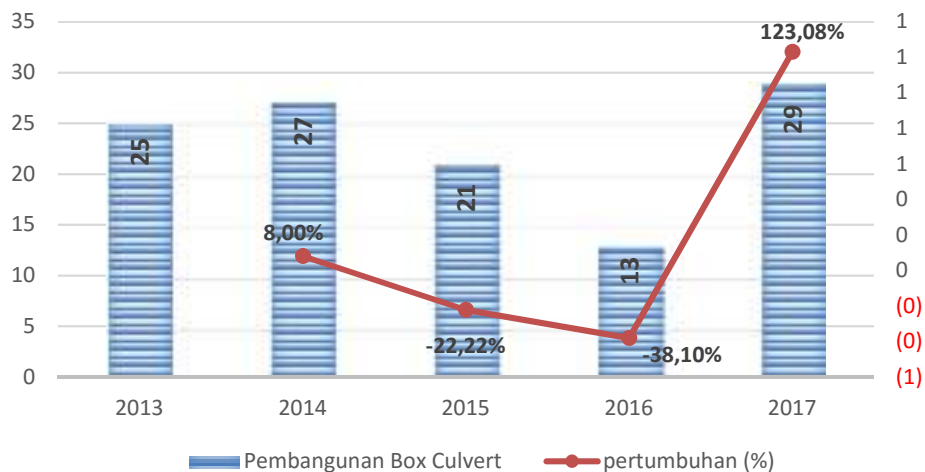
Jumlah Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pembangunan Box Culvert yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 - 2017 juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebanyak 25 unit, tahun 2014 sebanyak 27 unit, tahun 2015 sebanyak 21 unit, tahun 2016 sebanyak 13 unit dan terakhir di tahun 2017 sebanyak 29 unit sebagaimana tersaji pada Gambar II.35.

Gambar II.37.
Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

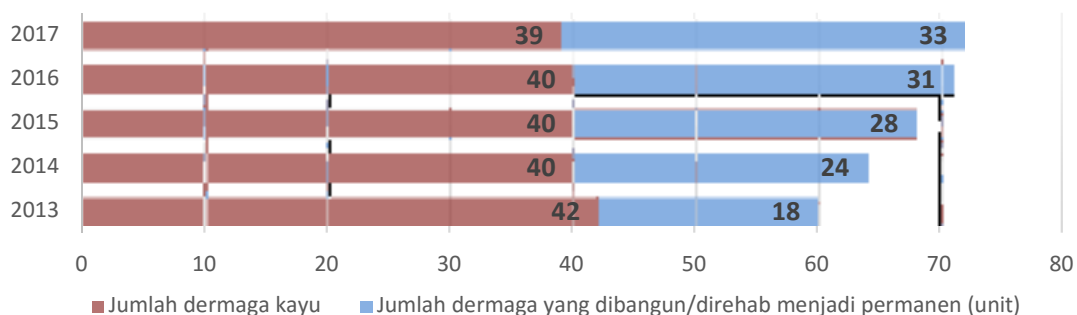
2.3.1.4. Perhubungan

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian.

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017, diiringi oleh Bergeraknya angka komposisi jumlah dermaga kayu yang menurun dan jumlah dermaga permanen yang semakin meningkat. Pada Tahun 2013 jumlah dermaga sebanyak 60 unit, terus meningkat pada tahun 2017 sampai menjadi 72 unit dengan angka rata-rata pertumbuhan jumlah dermaga sebesar 4,68 persen. Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga, jika tahun 2013 hanya terdapat 18 unit dermaga permanen meningkat menjadi 33 unit pada tahun 2017. Perkembangan sektor dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.36.

Gambar II.38.

Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



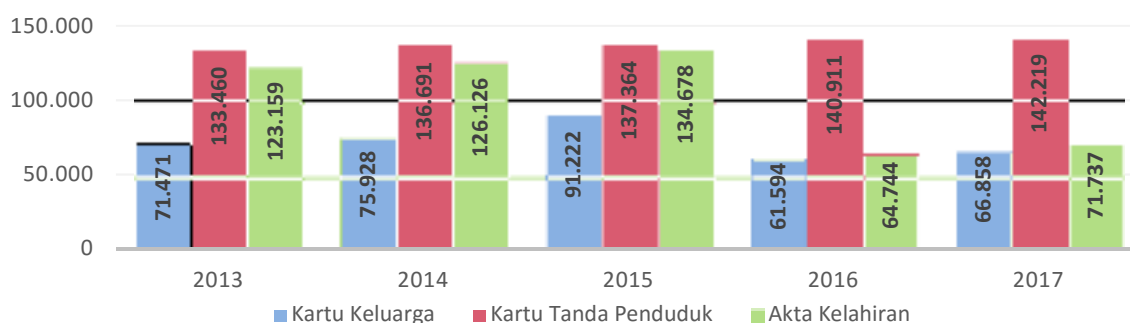
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak tahun 2013 hingga 2017, realisasi KK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sebesar 71.471 KK yang kemudian pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 66.858 KK.

Gambar II.39.

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2013 - 2017



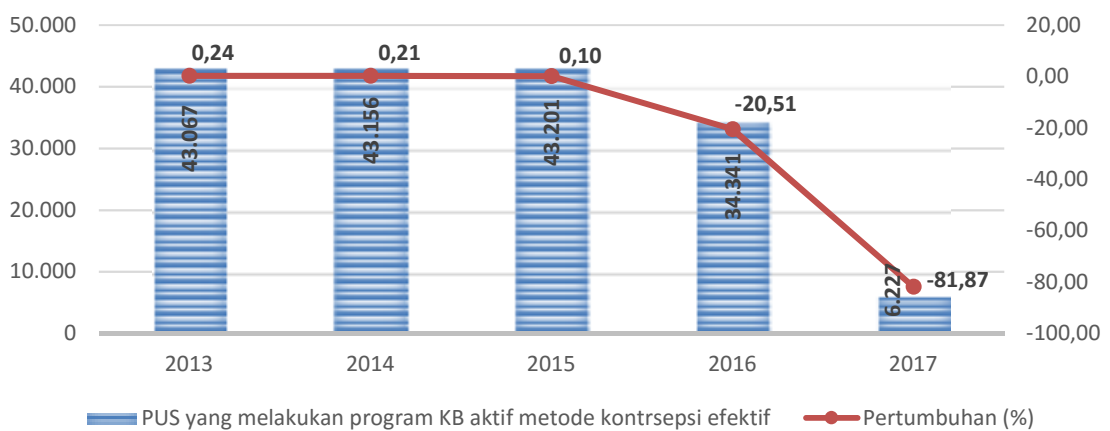
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebanyak 133.460 KTP, 136.691 KTP pada tahun 2014, 137.364 di tahun 2015, 140.911 KTP di tahun 2016 dan terakhir di tahun 2017 menjadi 142.219 KTP. Untuk pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kondisi fluktuatif, kenaikan terjadi pada periode tahun 2013 - 2015, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan dan sedikit meningkat pada tahun 2017. Realisasi pembuatan KK, KTP dan akta kelahiran di kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 disajikan pada Gambar II.37.

2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Gambar II.38. menunjukkan bahwa pelayanan keluarga berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 berjumlah 169.992 akseptor.

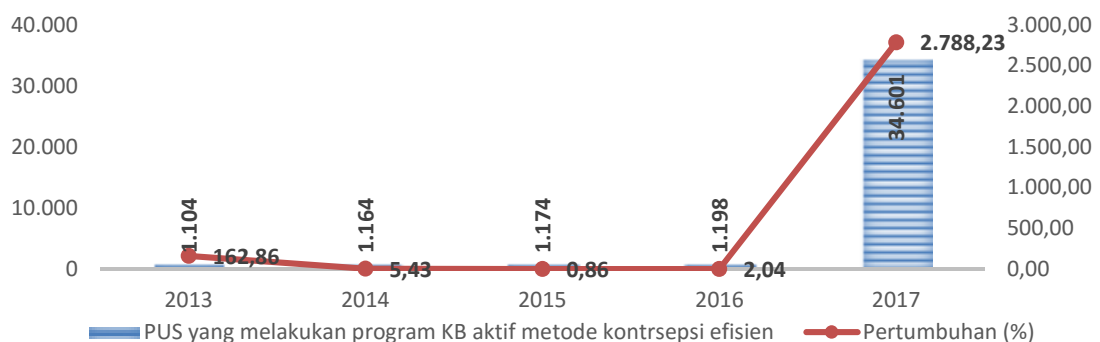
Gambar II.40.
PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efektif (Akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 berjumlah 39.241 akseptor. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.39.

Gambar II.41.
PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017.

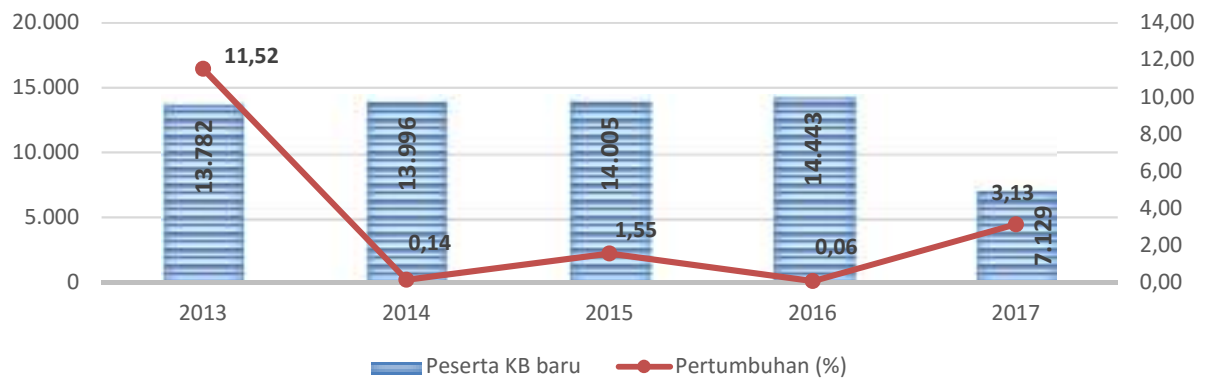


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Untuk jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 berjumlah 63.355 akseptor, dimana pada periode tahun 2013 - 2016 peserta KB baru cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 14.443 jiwa di tahun 2016 dan di tahun 2017 jumlah peserta KB baru mengalami penurunan hampir sebesar 50 persen menjadi 7.129 jiwa. Gambar II.40. menunjukkan data peserta KB baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

Gambar II.42.

Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

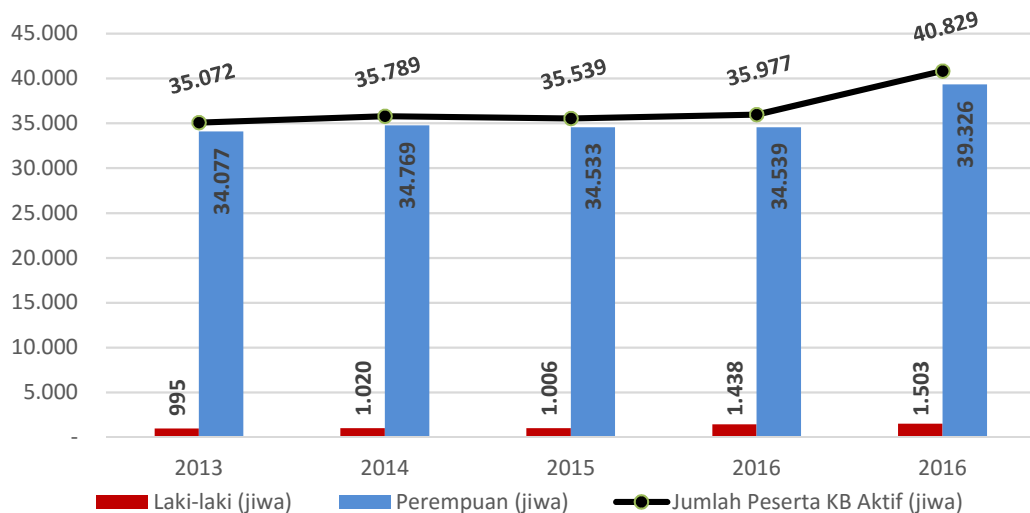


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya cenderung meningkat dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,04 persen pertahun. Pada tahun 2013 sebanyak 35.072 jiwa dan terus meningkat menjadi 40.829 jiwa di tahun 2017 dengan peserta masih didominasi oleh peserta perempuan. Gambar II.41. menunjukkan peserta program KB aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

Gambar II.43.

Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

2.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017 berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Pada tahun 2013 TPAK sebesar 64,75 persen yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,97 persen pada tahun 2017, akan tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 68,18 persen, sedangkan pada tahun 2016, BPS Provinsi Jambi tidak melaksanakan survey TPAK. TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 yang mencapai sebesar 75,97 persen tersebut merupakan capaian tertinggi diantara 11 kabupaten/kota dan diatas capaian Provinsi Jambi yang sebesar 67,52 persen. Ini artinya tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan lebih mudah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan kata lain angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 disajikan pada Tabel II.12.

Tabel II.12.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAMBI	62.66	65.59	66.14	67.54	67.52
KERINCI	69.32	67.60	71.39	-	69.46
MERANGIN	60.90	63.60	64.63	-	69.82
SAROLANGUN	66.05	66.76	70.50	-	70.08
BATANGHARI	65.25	64.22	63.82	-	64.39
MUARO JAMBI	58.09	61.19	61.13	-	62.30
TANJUNG JABUNG TIMUR	64.75	70.30	68.18	-	75.97
TANJUNG JABUNG BARAT	59.43	66.83	67.12	-	70.24
TEBO	63.23	72.75	71.97	-	70.61
BUNGO	64.89	66.09	63.80	-	65.89
KOTA JAMBI	60.80	62.39	64.04	-	64.06
KOTA SUNGAI PENUH	61.37	65.41	67.03	-	66.05

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018(diolah)

Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tinggi akan tetapi tidak dibarengi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini lebih dikarenakan variabel angkatan kerja masih banyak pada status angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tabel II.13. menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017.

Tabel II.13.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
KERINCI	7.13	4.44	3.67	-	3.26
MERANGIN	6.01	2.55	5.38	-	4.10
SAROLANGUN	3.64	4.13	4.53	-	2.25
BATANGHARI	5.94	5.69	3.38	-	3.57
MUARO JAMBI	2.78	4.36	5.40	-	5.39
TANJUNG JABUNG TIMUR	3.53	1.73	1.44	-	2.36
TANJUNG JABUNG BARAT	4.90	1.34	2.68	-	3.07
TEBO	0.73	3.86	1.94	-	1.98
BUNGO	4.38	6.34	2.98	-	4.89
KOTA JAMBI	7.44	10.13	7.32	-	5.55
KOTA SUNGAI PENUH	5.12	10.81	8.18	-	4.14
PROVINSI JAMBI	4.84	5.08	4.34	4	3.87

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018(diolah)

2.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah seperti pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.

Pada periode tahun 2013-2017, jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 40 Unit. Sementara jumlah Koperasi Non KUD cenderung meningkat yaitu dari 257 unit pada tahun 2012 menjadi 261 unit pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 2,32 persen. Tabel II.12. menunjukkan data KUD dan Non KUD yang aktif maupun tidak aktif serta anggotanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017.

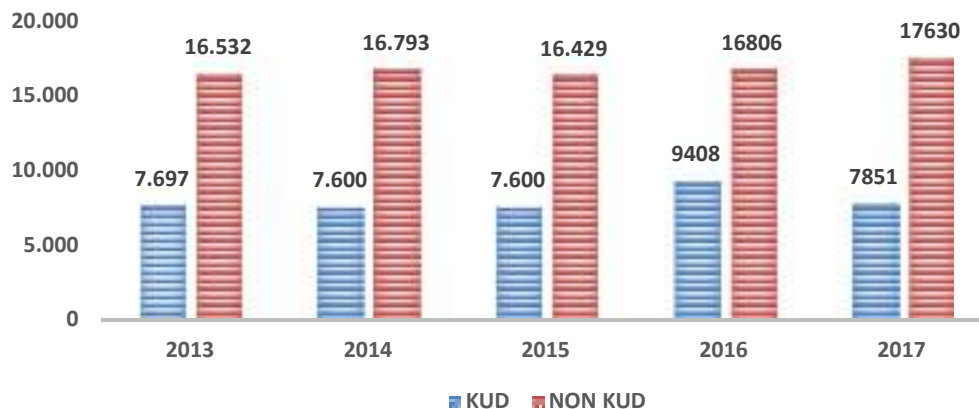
Tabel II.14
Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017

TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2013	41	256	3	125	38	131	7.697	16.532
2014	41	246	9	107	32	139	7.600	16.793
2015	41	240	8	104	33	136	7.600	16.429
2016	41	261	2	103	39	158	9.408	16.806
2017	40	265	1	155	39	110	7.851	17.630

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2018

KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami pengurangan sebanyak 1 unit KUD, sehingga tersisa 40 unit KUD dan hanya terdapat 1 unit KUD yang aktif. Akan tetapi, jumlah anggota KUD meningkat menjadi sebanyak 154 orang pada tahun 2017. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan koperasi non KUD yang selalu meningkat setiap tahunnya, baik dari jumlah, kondisi maupun jumlah anggotanya sebagaimana tersaji pada Gambar II.42.

Gambar II.44.
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017

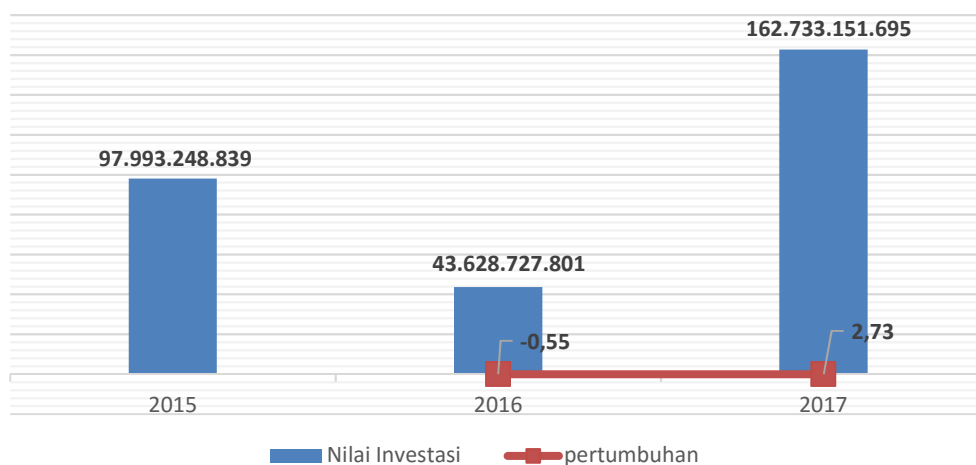


Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2018

2.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2015 - 2017 cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan naik rata-rata 1,04 persen. Gambar II.43. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilai investasi sebesar Rp.97.993.248.839 dan sempat menurun di tahun 2016, akan tetapi di tahun 2017 nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 162.733.151.695.

Gambar II.45.
 Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2017

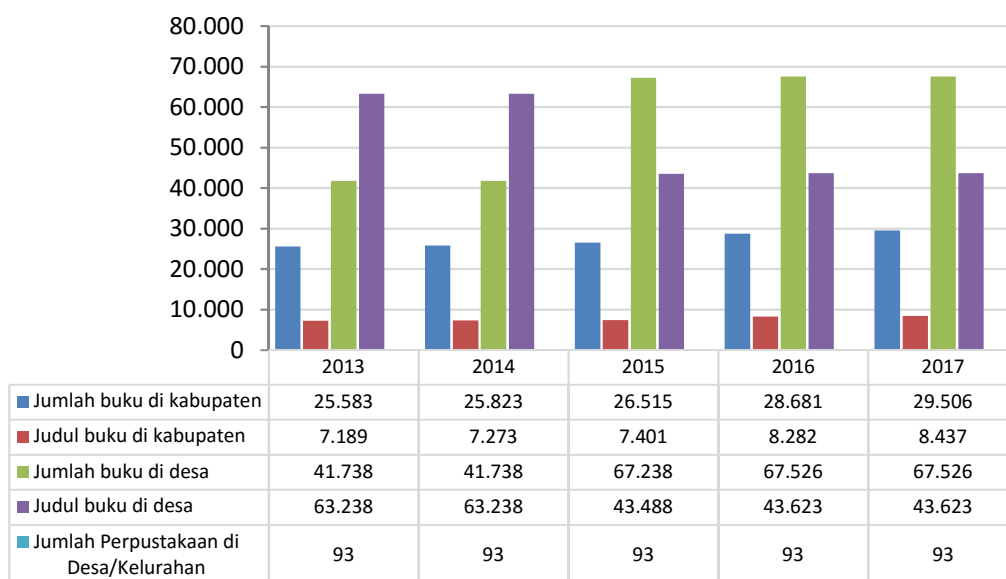


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2018

2.3.1.10. Perpustakaan

Jumlah buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode tahun 2013 - 2017. Sedangkan jumlah buku di desa pada tahun 2014 sebanyak 41.738 buku yang kemudian meningkat menjadi 67.238 buku di tahun 2015 dan pada tahun 2016 - 2017 jumlah buku di desa sebanyak 67.526. Perkembangan koleksi buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar II.44.

Gambar II.46.
 Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Hasil produksi dari sektor pertanian pada periode tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan, kecuali untuk komoditas padi yang mengalami penurunan produksi sebesar 4,13 persen di tahun 2017 dan komoditas jagung sebesar 6,04 persen. Penyebab dari menurunnya produksi kedua komoditas pangan unggulan tersebut dikarenakan oleh faktor iklim cuaca yang tidak menentu selama tahun 2017 sehingga menyulitkan para petani untuk bercocok tanam. Jumlah produksi pada sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.15.

Tabel II.15.

Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

Jenis	Produksi hasil Pertanian (tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi (ton)	102.692	104.090	75.109	90.052	86.337
Jagung (ton)	1.795	4.000	9.239	13.950	13.108
Kedelai (ton)	408,45	1.265	1.028	1.356	1.413
Kacang Tanah (ton)	99	116	66	99	113
Kacang Hijau (ton)	69	40	20	24	25
Ubi Kayu (ton)	4.494	3.686	6.388	5.523	6.052
Ubi Jalar (ton)	962	936	674	1.167	672

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel II.16. menunjukkan data mengenai program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun (GERTAK TANPA DUSTA) pada tahun 2016 - 2017 yang berhasil merealisasikan target panen sebesar 100 persen, akan tetapi produktivitasnya mengalami sedikit penurunan di tahun 2017.

Tabel II.16.

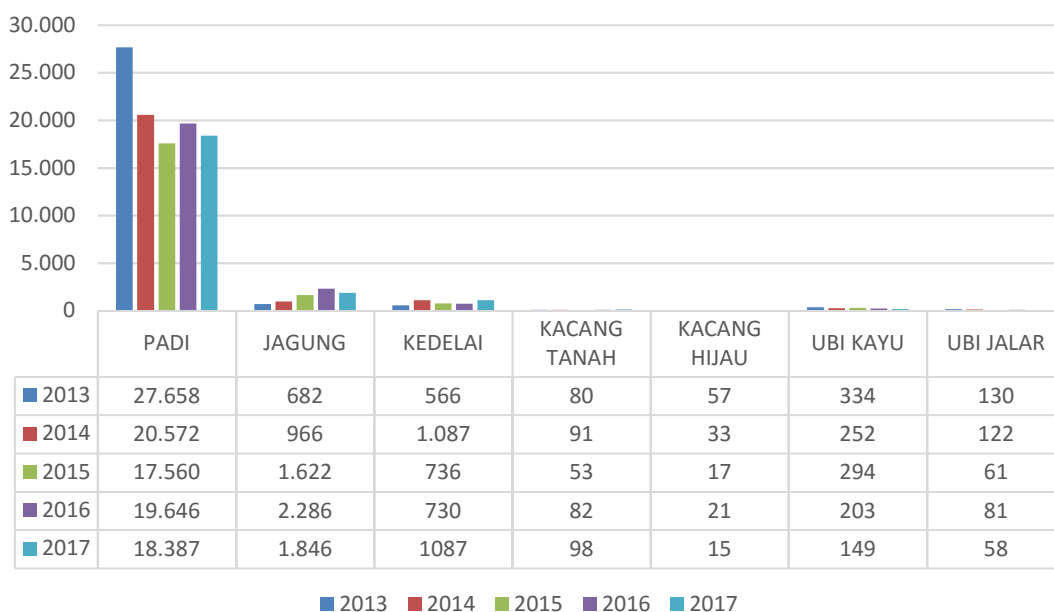
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produktivitas
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2013 - 2017

Tahun	Gerakan Serentak Tanam Padi 2 Kali Setahun		
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Produktivitas (Ha)
2013	1.845	1.792	3,85
2014	1.500	1.386	4,27
2015	1.500	473	35,08
2016	1.500	1.500	39.83
2017	1700	1700	39.49

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.47.

Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

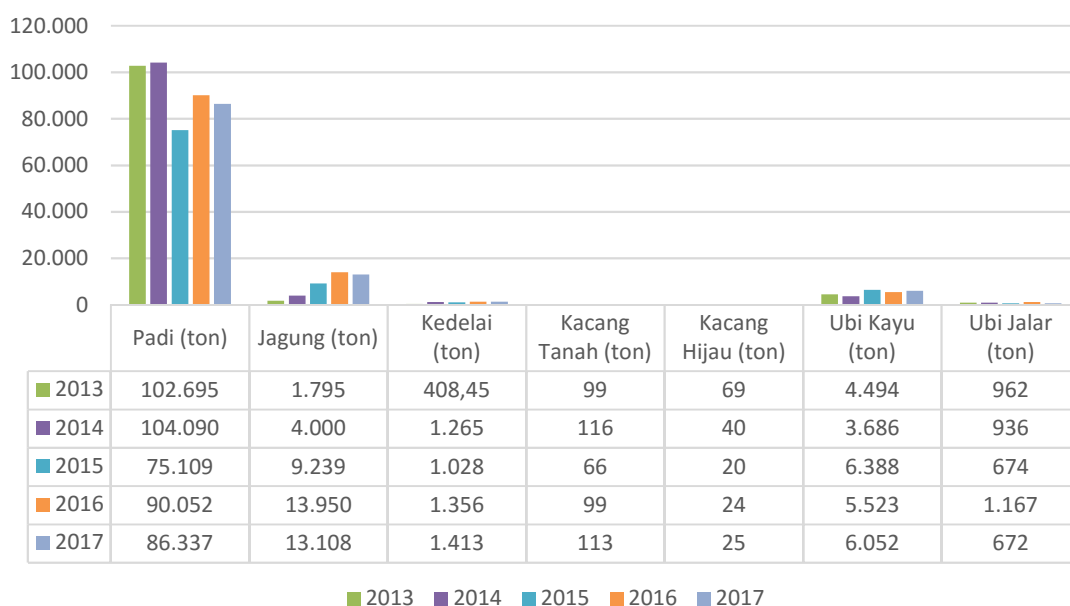


Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.45. menunjukkan data luas tanam pada komoditi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017, terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan luas tanam yaitu komoditi padi, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan untuk komoditi jagung, kedelai dan kacang tanah mengalami peningkatan luas tanam.

Gambar II.48.

Perkembangan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2013 - 2017



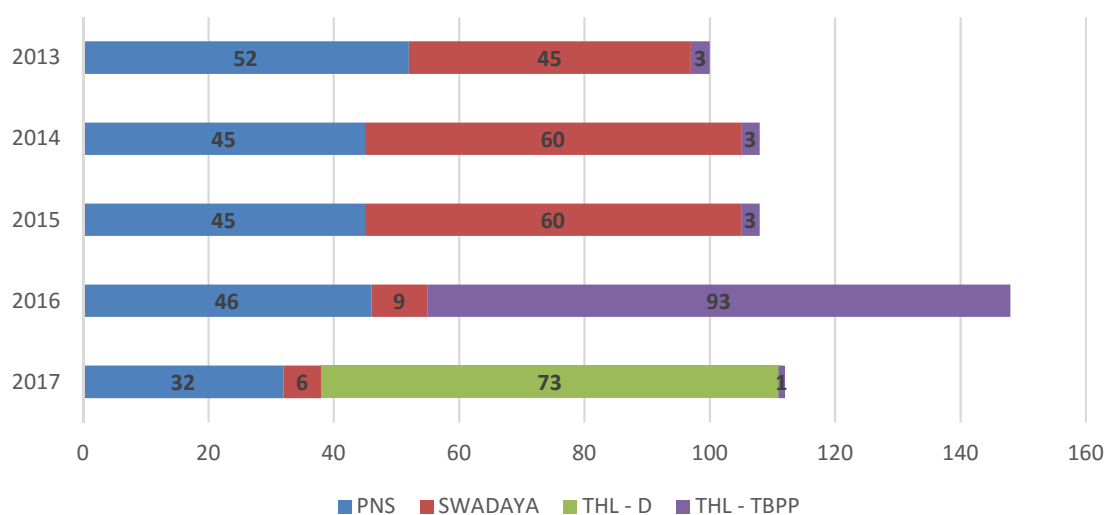
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Perkembangan produksi komoditi pertanian pada periode tahun 2013 - 2017 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.46. menunjukkan bahwa pada tahun 2017, terdapat 4 (empat) komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu komoditi jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kemudian juga terdapat 3 (tiga) komoditi yang mengalami penurunan produksi yaitu komoditi padi, kacang hijau dan ubi jalar.

Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2013 - 2017 terdiri dari PNS, Swadaya, THL - D dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP). Jumlah penyuluh pada tahun 2016 sebanyak 148 penyuluh dan di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 36 penyuluh hingga menjadi 112 penyuluh. Gambar II.47. menunjukkan jumlah dan status penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

Gambar II.49.

Jumlah dan Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak cenderung mengalami penambahan yang positif. Jika pada tahun 2013 jumlah populasi ternak hanya sebanyak 1.905.924 ekor dan di tahun 2017 jumlah populasi ternak meningkat signifikan menjadi sebanyak 4.112.640 ekor. Pertumbuhan populasi ternak tertinggi pada ternak jenis ayam petelur pada tahun 2014 sebesar 1.325 persen sedangkan populasi yang terendah adalah jenis ternak ayam pedaging pada tahun 2015 - 2016 sebesar 61 persen. Data populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 tersaji pada Tabel II.17.

Tabel II.17.

Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	12.268	14.406	16.961	18.518	19.244
Kerbau	107	89	58	85	85
Kambing	34.743	39.993	38.379	40.198	41.073
Domba	143	99	93	51	51
Ayam Buras	1.707.709	2.510.563	3.408.462	3.629.402	3.817.768
Itik	44.859	42.841	31.407	33.502	25.457
Ayam Pedaging	101.992	151.250	59.425	22.990	36.131
Ayam Petelur	4.103	58.452	47.000	172.831	172.831
Jumlah	1.905.924	2.817.693	3.601.785	3.917.577	4.112.640

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.2.3. Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode tahun 2013 - 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah luas lahan perkebunan hanya seluas 110.176 Ha dan mengalami penambahan luas lahan sebanyak 4.783 Ha menjadi 112.912 Ha di tahun 2017. Peningkatan luas lahan ini terjadi pada komoditi kelapa sawit, kakao, pinang dan kopi robusta, sedangkan untuk komoditi lainnya cenderung mengalami penurunan luas lahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perkembangan luas lahan komoditi perkebunan pada periode tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.18.

Tabel II.18.

Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2013 - 2017

Komoditi	Luas Lahan (Ha) Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Karet	7.750	7.750	7.763	7.824	7.755
Kelapa Sawit	31.209	33.381	33.489	33.620	33.702
Kelapa Dalam	58.620	58.715	58.676	58.609	58.521
Kelapa Hibrida	69	69	69	69	66
Lada	59	54	51	46	42
Kakao	355	357	369	384	400
Pinang	8.846	8.846	8.894	8.950	9.095
Kopi Robusta	3.259	3.259	3.246	3.232	3.323
Kemiri	9	9	9	9	8
Jumlah	110.176	112.440	112.566	112.743	112.912

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Perkembangan produksi untuk komoditi perkebunan selama periode tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan pada hampir seluruh komoditi. Hasil produksi dari komoditi kelapa sawit pada tahun 2014 mengalami peningkatan hasil produksi menjadi 45.841 ton atau meningkat sebesar 18,96 persen dari tahun sebelumnya, yang kemudian disusul oleh pertumbuhan komoditi karet pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 19,26 persen. Sedangkan penurunan hasil produksi terjadi pada komoditi pinang tahun 2014 sebesar minus 52,51 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan komoditi unggulan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbesar ada pada komoditi karet dengan rata-rata sebesar 33,16 persen setiap tahunnya, sedangkan untuk rata-rata penurunan produksi terbesar dalam kurun waktu yang sama ada pada komoditi pinang yaitu sebesar minus 36,55 persen per tahun. Tabel II.19. menunjukkan perkembangan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017.

Tabel II.19.
Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

Komoditi	Produksi (Ton) Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Karet	2.673	2.842	2.852	3.058	3.647
Kelapa Sawit	38.535	45.841	44.879	45.739	47.806
Kelapa Dalam	50.254	51.013	50.820	51.117	51.398
Kelapa Hibrida	49	59	54	54	54
Lada	7	11	10	9	14
Kakao	126	167	167	173	212
Pinang	5.793	2.751	2.745	2.945	3.207
Kopi Robusta	1.027	1.053	1.049	1.048	1.237
Kemiri	2	3	2	2	4

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Jumlah petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,60 persen. Peningkatan rata-rata terbesar pada petani kelapa sawit yaitu 12,16 persen, dari 10.230 orang pada tahun 2013 meningkat menjadi 11.474 orang pada tahun 2017. Perkembangan jumlah petani pada komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.20.

Tabel II.20.

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2013 - 2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017
	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)
Karet	5.264	5.264	5.266	5.281	5.263
Kelapa Sawit	10.230	11.318	11.357	11.399	11.474
Kelapa Dalam	22.848	22.848	22.821	22.783	22.743
Kelapa Hibrida	45	45	45	45	45
Lada	794	784	780	754	752
Kakao	673	677	690	692	688
Pinang	8.390	8.390	8.409	8.464	8.524
Kopi Robusta	2.456	2.456	2.448	2.435	2.426
Kemiri	31	31	31	31	27
Jumlah	50.731	51.813	51.847	51.884	51.942

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.2.4. Kehutanan

Luas kawasan hutan secara keseluruhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012 - 2013 yaitu seluas 248.174 Ha. Luas hutan tersebut sejak tahun 2014 berkurang sebesar minus 17,91 persen menjadi 203.721,98 Ha yang disebabkan oleh berkurangnya luas kawasan pelestarian Tahura sekitar tanjung, hutan produksi tetap, dan Taman Nasional Berbak (TNB), sementara itu untuk kawasan suaka alam hutan bakau pantai timur dan hutan lindung gambut mengalami penambahan luas. Luas hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2016 disajikan pada Tabel 2.19. Pada periode tahun 2012 - 2016, luas kawasan pelestarian Tahura sekitar tanjung jauh berkurang (minus 32,98 persen) yaitu dari 3.995 Ha pada tahun 2012-2013 menjadi 2.677,63 Ha pada tahun 2014 - 2016. Kemudian luas hutan produksi berkurang minus 30,21 persen yaitu dari 78.356 Ha pada tahun 2012 - 2013 menjadi 54.686,75 Ha pada tahun 2014 - 2016. Selanjutnya Taman Nasional Berbak (TNB) sepanjang 5 (lima) tahun belakangan ini luas lahannya semakin berkurang dari 138.244 Ha pada tahun 2012 menjadi seluas 116.605 Ha di tahun 2014 atau berkurang sebesar minus 15,65 persen.

Tabel II.21.

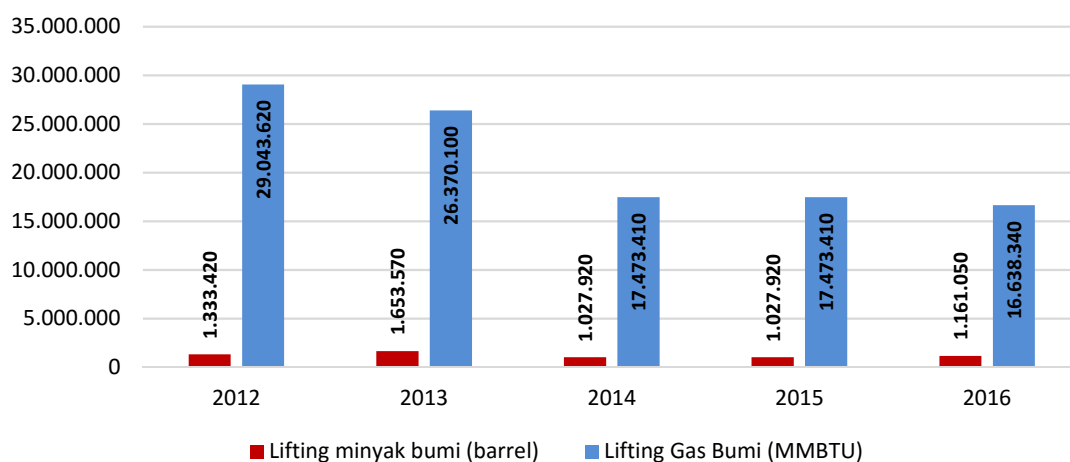
Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016

JENIS HUTAN/KAWASAN	2012	2013	2014	2015	2016
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur (Ha)	3.829,00	3.829,00	4.129,60	4.129,60	4.129,60
Taman Nasional Berbak (Ha)	138.244,00	138.244,00	116.604,80	116.604,80	116.604,80
Kawasan Pelestarian Tahura sekitar Tanjung (Ha)	3.995,00	3.995,00	2.677,63	2.677,63	2.677,63
Hutan Lindung Gambut (Ha)	23.750,00	23.750,00	24.288,33	24.288,33	24.288,33
Hutan Produksi Tetap (Ha)	78.356,00	78.356,00	54.686,75	54.686,75	54.686,75
Hutan Produksi Konservasi (Ha)	-	-	1.334,87	1.334,87	1.334,87
J U M L A H	248.174,00	248.174,00	203.721,98	203.721,98	203.721,98

2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Selama kurun waktu tahun 2012 - 2016, capaian di bidang sumberdaya mineral berupa lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2012 lifting minyak bumi berjumlah 1.333.420 per barrel sempat mengalami peningkatan menjadi 1.653.570 per barrel pada tahun 2013, lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami penurunan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 terakhir menjadi 1.161.050 per barrel dan selama periode 5 tahun terakhir lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun sebesar minus 12,93 persen. Untuk lifting gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 5 tahun terakhir menurun sebesar minus 42,71 persen, dimana pada tahun 2012 lifting gas bumi sebesar 29.043.620 MMBTU yang mengalami penurunan menjadi 16.638.340 MMBTU di tahun 2016. Gambar II.48. menunjukkan hasil produksi bidang sumberdaya mineral di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2016.

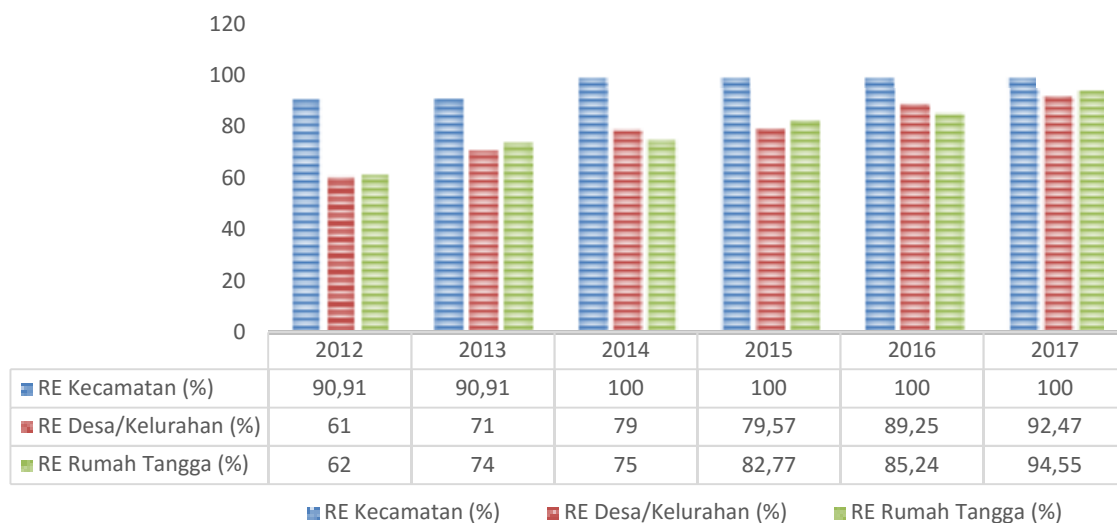
Gambar II.50.
Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012 - 2016



Sumber : Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, 2017

Ratio Electricity rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 37,48 persen yaitu dari 62 persen tahun 2012 menjadi 85,24 persen tahun 2016. Sedangkan ratio electricity desa naik dari 61 persen tahun 2012 menjadi 89,25 persen tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 46,31 persen. Untuk ratio electricity kecamatan mengalami pertumbuhan 10 persen yaitu dari 90,91 persen tahun 2012 menjadi 100,00 persen tahun 2016. Ratio Electricity tingkat kecamatan, kelurahan dan rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada Gambar II.49.

Gambar II.51.
Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2012 - 2016



2.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 didominasi oleh ikan perairan laut yaitu 97,14 persen, sedangkan sisanya adalah ikan perairan umum sebesar 1,91 persen, kolam sebesar 0,45 persen, tambak dan keramba jaring apung sebesar 0,25 persen. Data jumlah produksi sektor perikanan tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.22.

Tabel II.22.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013 - 2017

NO	SUB SEKTOR	Tahun Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perairan Laut	25.430	24.964,50	25.792,20	23.087,00	23.380,00
2	Perairan Umum	685	859,80	888,30	319,00	459,80
3	Kolam	300	108	104,4	107,50	108,30
4	Tambak	512	308,1	142,7	140,90	60,40
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	200	550	67,5	67,25	60,40
Jumlah (Ton)		27.127,00	26.790,40	26.995,10	23.721,65	24.068,90

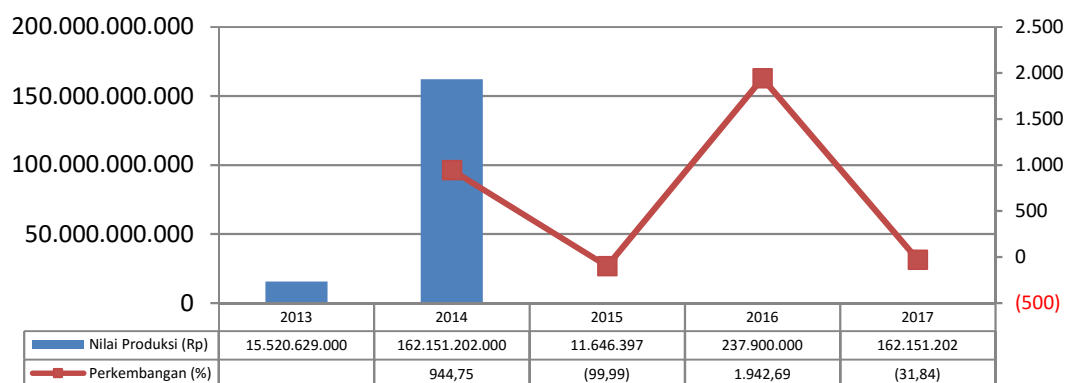
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan

Gambar 2.50. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017, nilai produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan yang cukup tajam, dimana pada tahun 2013 nilai produksi sebesar Rp.15.520.629.000 kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.162.151.202.000, akan tetapi pada tahun 2015 menurun menjadi Rp.11.646.397, kemudian pada tahun 2016 - 2017 menjadi Rp. 237.900.000 dan Rp.162.151.202.

Gambar II.52.

Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

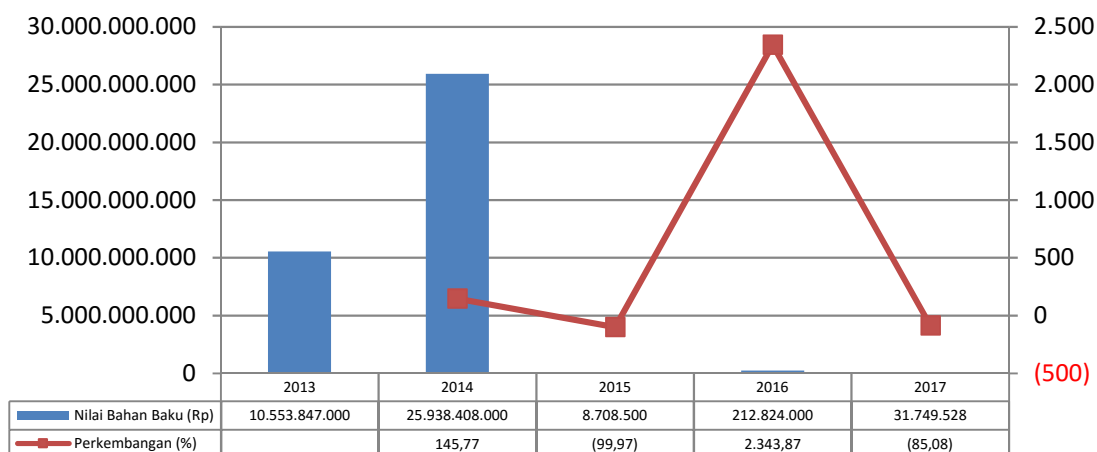


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Perolehan nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif secara signifikan, dimana pada tahun 2013 nilai bahan baku sebesar Rp.10.553.847.000, yang kemudian mengalami peningkatan sebesar 145,77 persen pada tahun 2014 dan kemudian menurun 99,97 persen di tahun 2015. Terjadi peningkatan di tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2017 menurun sebesar 85,08 persen. Gambar II.51. menunjukkan nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

Gambar II.53.

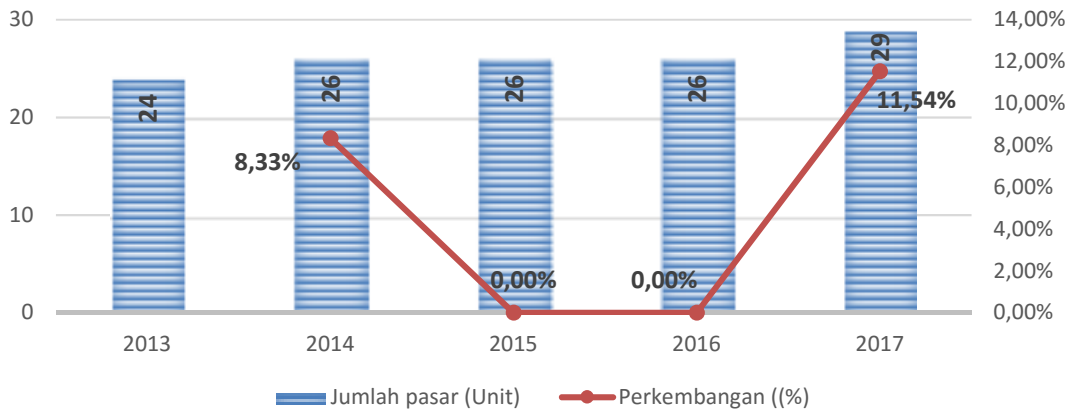
Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara keseluruhan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada tahun 2013 sebanyak 24 unit, kemudian terus meningkat menjadi 26 unit pasar di tahun 2014 - 2016, lalu meningkat kembali menjadi 29 unit pasar di tahun 2017. Perkembangan jumlah pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Gambar II.52.

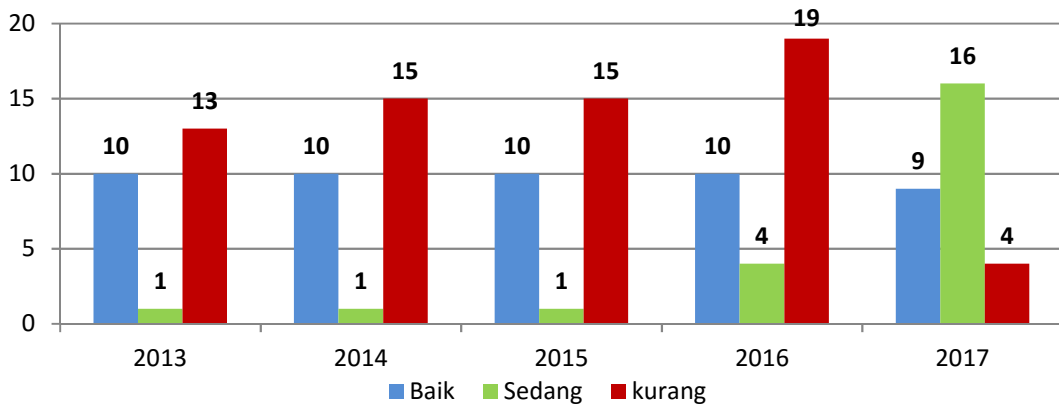
Gambar II.54.
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.53. menunjukkan perkembangan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dikatakan masih dalam kondisi yang sedang, dimana pada tahun 2013 kondisi pasar kurang sebanyak 13 unit pasar hingga pada tahun 2017 kondisi pasar yang kurang dapat ditekan hingga sebanyak 4 unit pasar.

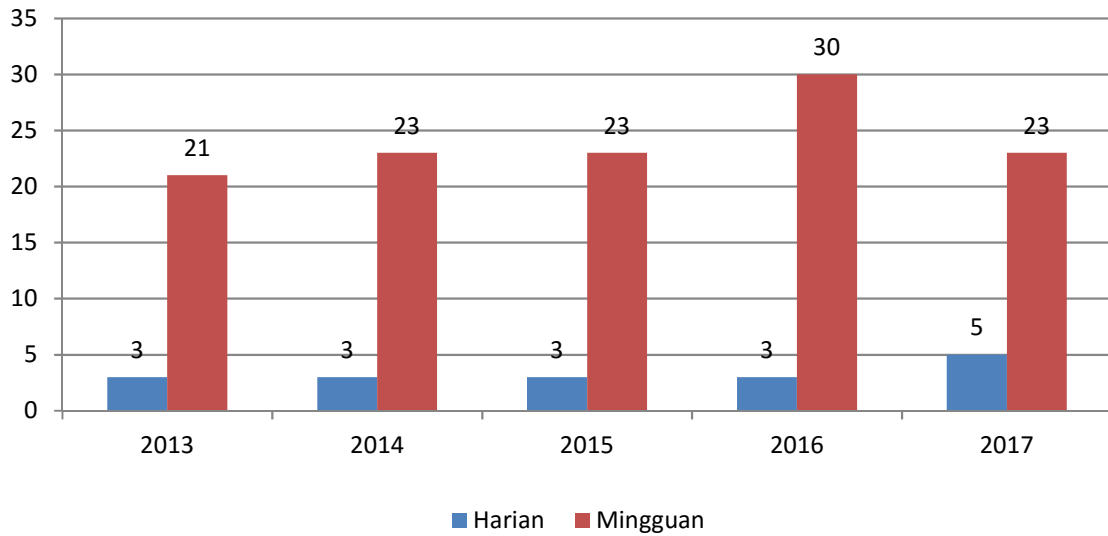
Gambar II.55.
Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Jenis pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dua jenis yaitu jenis pasar harian dan jenis pasar mingguan. Jenis pasar mingguan pada tahun 2013 - 2016 mengalami peningkatan kemudian menurun pada tahun 2017, sementara itu untuk jenis pasar harian yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 5 unit pasar dimana sebelumnya pada tahun 2013 - 2016 jumlah pasar harian hanya berjumlah 3 unit pasar. Gambar II.54. menunjukkan data perkembangan jumlah dan jenis pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

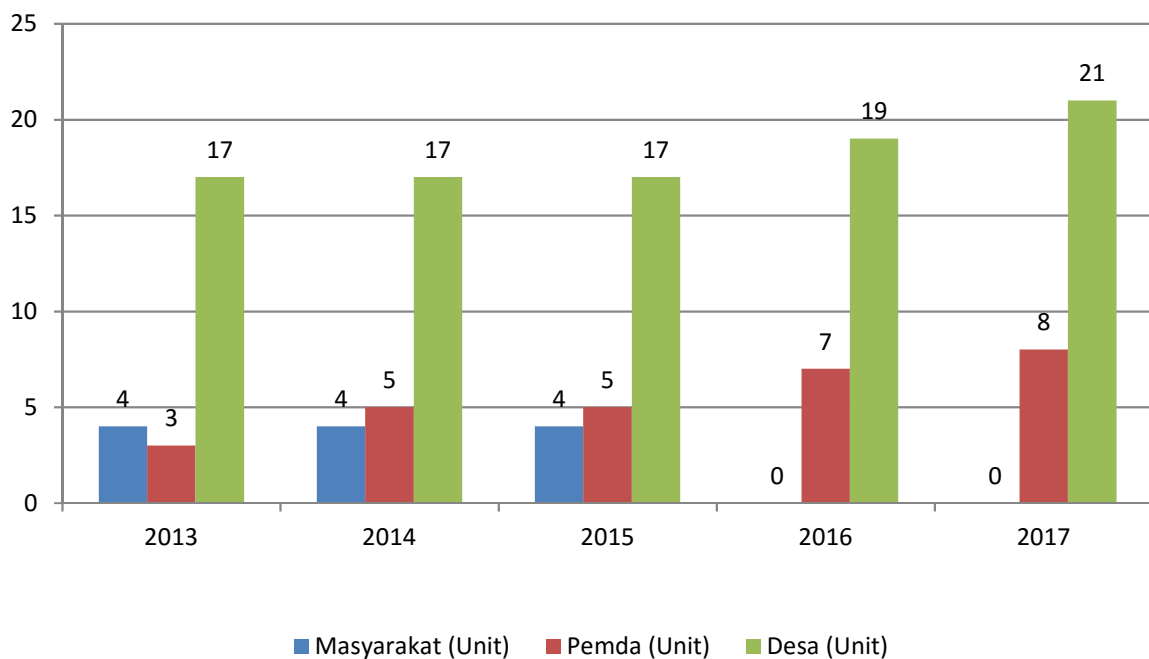
Gambar II.56.
Perkembangan Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar II.55. menunjukkan perkembangan kepemilikan pasar dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 yang didominasi oleh kepemilikan desa dimana pada tahun 2017 mencapai 21 unit, sementara kepemilikan pasar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengalami peningkatan dari berjumlah 3 unit pada tahun 2013 menjadi 8 unit pada tahun 2017.

Gambar II.57.
Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat konsumsi. Selama periode tahun 2013 - 2017, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran perkapita. Pengeluaran nominal per kapita untuk makanan meningkat dari Rp. 340.158 pada tahun 2013 menjadi Rp. 505.709 pada tahun 2017. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.23.

Tabel II.23.
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

No	Jenis	Rata-rata Pengeluaran Perkapita (RP/bulan)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Makanan	340.158	381.367	440.295	473.002	505.709

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (I_b). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi I_t yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Bila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan I_t , merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Melalui perbandingan antara kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

NTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan yang pada tahun 2017 mencapai sebesar 99,89 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031. Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur haruslah disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Arahan Kawasan strategis kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Strategis Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Muara Sabak Barat;
2. Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
3. Kawasan Strategis Perindustrian di Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Kawasan Strategis Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
5. Kawasan Strategis Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
6. Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten berupa Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kecamatan Sadu.

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi meliputi kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai.

2.4.2.2. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Perkembangan kantor bank baik bank milik pemerintah, bank pembangunan daerah maupun bank swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan. Untuk bank milik pemerintah pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 6 kantor, tahun 2016 hingga 2017 bertambah sebanyak 7 kantor sehingga menjadi 13 kantor, begitu juga dengan bank pemerintah daerah dan bank swasta yang bertambah masing-masing 1 (satu) kantor pada periode yang sama. Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel II.24.

Tabel II.24.
Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Perkembangan Bank				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Milik Pemerintah	6	7	7	13	13
2	Bank Milik Pemerintah Daerah	3	3	3	4	4
3	Bank Milik Swasta	1	1	1	2	2

Sumber : BKD kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4.2.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, penginapan/hotel,

Perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2013 - 2017 mengalami kecenderungan meningkat, yaitu dari 46 rumah makan pada tahun 2013 berkembang pada tahun 2017 menjadi 68 rumah makan. Data perkembangan restoran atau rumah makan disajikan pada Tabel II.25.

Tabel II.25.
Perkembangan Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Perkembangan Rumah Makan/Restoran				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Makan	46	52	56	62	68

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Kondisi restoran atau rumah makan mengalami perkembangan yang signifikan pada periode tahun 2013 - 2017, sebaliknya untuk jumlah hotel/penginapan mengalami kondisi stagnan, dimana jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 - 2017 berjumlah 6 (enam) unit. Tabel II.26. menunjukkan jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 - 2017.

TabellI.26.
Jumlah Hotel/Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Perkembangan Hotel/Penginapan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hotel/Penginapan	6	6	6	6	6

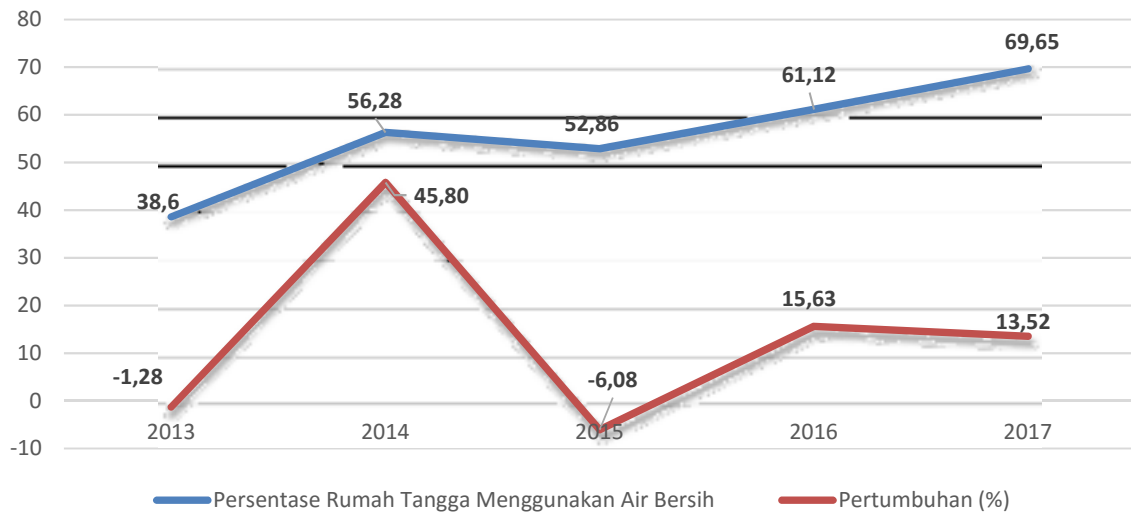
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

2.4.2.4. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktivitas. Sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dibangun UPTD SPAM guna memenuhi kebutuhan air minum. Deskripsi jumlah penduduk yang mendapat layanan air bersih dari beberapa sumber dapat dilihat pada Gambar II.56

Gambar II.58.
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4.2.5. Rasio ketersediaan daya listrik

Secara nasional, persentase rumah tangga yang sumber penerangannya bukan listrik selama periode 2013 - 2017 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan dalam penyediaan akses energi listrik, walaupun belum secara menyeluruh akses tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel II.26.

Tabel II.27.
 Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2013 - 2017

Tahun	Rasio Ketersediaan Listrik (%)
2013	88,89
2014	88,89
2015	88,89
2016	86,20
2017	86,20

Sumber : PLN Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Kriminalitas

Meskipun perkembangan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh dengan cepat, namun tindak pidana/kriminalitas justru berbanding terbalik. Dalam kurun waktu tahun 2015 - 2017 tindak pidana/kriminalitas menunjukkan trend yang menurun. Hal ini tergambar pada jumlah kejahatan yang terjadi. Kinerja aparat keamanan meningkat baik disisi preventif maupun persuasif, hal tersebut dapat dilihat dari angka kriminalitas yang tertangani sebesar 5,71 persen di tahun 2015 naik menjadi 7,84 persen pada tahun 2017. Indeks kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.28.

Tabel II.28.
Indeks Kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015 - 2017

NO	Kejahatan		Σ Penduduk	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Dilaporkan	Ditangani		
2015	237	122	213.670	5,71
2016	208	128	215.316	5,94
2017	207	170	216.777	7,84

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur 2018, diolah

2.4.3.2. Demo

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisir setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas ke pemerintahan. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan, selain daripada itu masyarakat juga dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib. Tabel II.29. menunjukkan bahwa selama tahun 2013 telah terjadi 6 kali unjuk rasa, tahun 2014 terjadi 1 kali unjuk rasa, tahun 2015 terjadi 4 kali unjuk rasa, tahun 2016 tidak terjadi unjuk rasa dan tahun 2017 telah terjadi 1 kali unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan selama ini merupakan aksi unjuk rasa damai, aspirasi yang disampaikan didominasi pada permasalahan sengketa lahan dan tapal batas.

Tabel II.29.
Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun	Jumlah Demo
1.	2013	6 Kali
2.	2014	1 Kali
3.	2015	4 Kali
4.	2016	0 Kali
5.	2017	1 Kali

Sumber : Dinas Satpol-PP Kab. Tanjung Jabung Timur

2.4.3.3. Perizinan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008, tentang OTK Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang kepada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana KPPT memiliki wewenang pelayanan perizinan secara terpadu. Melalui KPPT tersebut, waktu, tempat dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal lebih terpadu dan teratur. Waktu lamanya proses perizinan bervariasi antara 2 hingga 8 hari pengurusan dengan catatan persyaratan lengkap. Lama pengurusan perizinan terlama pada izin mendirikan bangunan selama 8 hari. Untuk lebih jelasnya lamanya proses perizinan perjenis izin dapat dilihat pada Tabel II.30.

Tabel II.30.
Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
3	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8 hari	8 hari	8 hari	8 hari	8 hari

Sumber : DPMPTT Kab. Tanjung Jabung Timur

2.4.3.4. Jumlah pajak dan retribusi daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pemerintah Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah sebanyak 11 jenis pajak dan 30 jenis retribusi. Jenis pajak dan jenis retribusi daerah yang dipungut oleh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersaji pada Tabel II.31.

Tabel II.31.
Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 - 2017

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Pajak daerah sebanyak 11 jenis pajak	1	Jasa Umum Sebanyak 14 Jenis retribusi
		2	Jasa Usaha sebanyak 11 jenis retribusi
		3	Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 5 jenis retribusi
Jumlah : 11 Jenis Pajak		Jumlah : 30 Jenis Retribusi	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.4.3.5. Perda yang mendukung iklim usaha

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan peraturan daerah yang mendukung iklim tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai pentingnya dukungan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pengusaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik yang prima dan memenuhi standar pelayanan minimum.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Data penduduk tahun 2017 menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 216.777 orang. Komposisi usia produktif berada antara 15 tahun dan dibawah 64 tahun. Jumlah penduduk kategori usia produktif tersebut berjumlah 146.050 orang.

Berdasarkan komposisi usia penduduk yang produktif tersebut, maka dapat dihitung pula rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan tersebut menggambarkan perbandingan antara usia tidak produktif (< 15 - > 64 tahun) dibandingkan usia produktif (> 15 - < 64 tahun). hasil perhitungan rasio tersebut menunjukkan besaran 48,43 persen. Ini berarti rasio ketergantungan kategori besar dimana usia tidak produktif kategori anak-anak sebanyak 59.933 orang dan kategori usia lanjut sebanyak 10.794 orang.

B

A

B

III

Gambaran
Keuangan
Daerah

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2011 – 2015 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi, demikian pula selama dua tahun pelaksanaan RPJMD. Berikut ini akan dijelaskan pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tahun 2016 - 2017).

Tabel III.1.
Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2017

No.	Uraian	TA. 2016	TA. 2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.091.271.329.948,85	1.080.986.057.747,43	(0,94)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	43.935.738.483,85	76.737.507.723,26	74,66
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.399.377.006,85	16.624.618.742,10	34,08
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.368.648.180,25	7.361.353.133,14	68,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.960.217.704,08	5.782.470.649,60	16,58
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	22.207.495.592,67	46.969.065.198,42	111,50
1.2	Dana Perimbangan	968.373.794.264,00	896.259.003.727,00	(7,45)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	169.194.985.646,00	192.017.565.563,00	13,49
1.2.2	Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	533.204.953.000,00	(0,12)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	265.349.302.618,00	171.036.485.164,00	(35,54)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.961.797.201,00	107.989.546.297,17	36,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	577.353.500,00	253.956.000,00	(56,01)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.086.019.701,00	38.985.907.297,17	29,58
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	48.298.424.000,00	60.169.683.000,00	24,58
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemda Lainnya	-	8.580.000.000,00	100,00

No.	Uraian	TA. 2016	TA. 2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1.064.104.883.813,00	1.047.184.788.991	(1,59)
2.1	Belanja Tidak Langsung	465.192.065.689,00	492.770.519.547,00	5,93
2.1.1	Belanja Pegawai	371.325.171.336,00	345.905.327.709,00	(6,85)
2.1.2	Belanja Bunga		-	
2.1.3	Belanja Subsidi		-	
2.1.4	Belanja Hibah	7.784.500.000,00	11.454.073.500,00	47,14
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.052.048.829,00	100.000.000,00	(90,49)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	1.745.432.551,00	1.808.534.248,00	3,62
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	82.687.473.589,00	132.503.600.870,00	60,25
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	597.439.384,00	998.983.220,00	67,21
2.2	Belanja Langsung	598.912.818.124	554.414.269.444	(7,43)
2.2.1	Belanja Pegawai	51.426.919.750,00	62.729.831.020,00	21,98
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	181.708.104.844,00	216.575.852.253,00	19,19
2.2.3	Belanja Modal	365.777.793.530,00	275.108.586.171,00	(24,79)
3	PEMBIAYAAN	59.665.842.982,16	85.332.294.118,01	43,02
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	61.665.842.982,16	86.832.294.118,01	40,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.665.842.982,16	86.832.294.118,01	40,81
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah (Pencairan dana KMK/KL)	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(25,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(25,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
3.2.5	Pemberian jaminan KMK/KL	-	-	

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

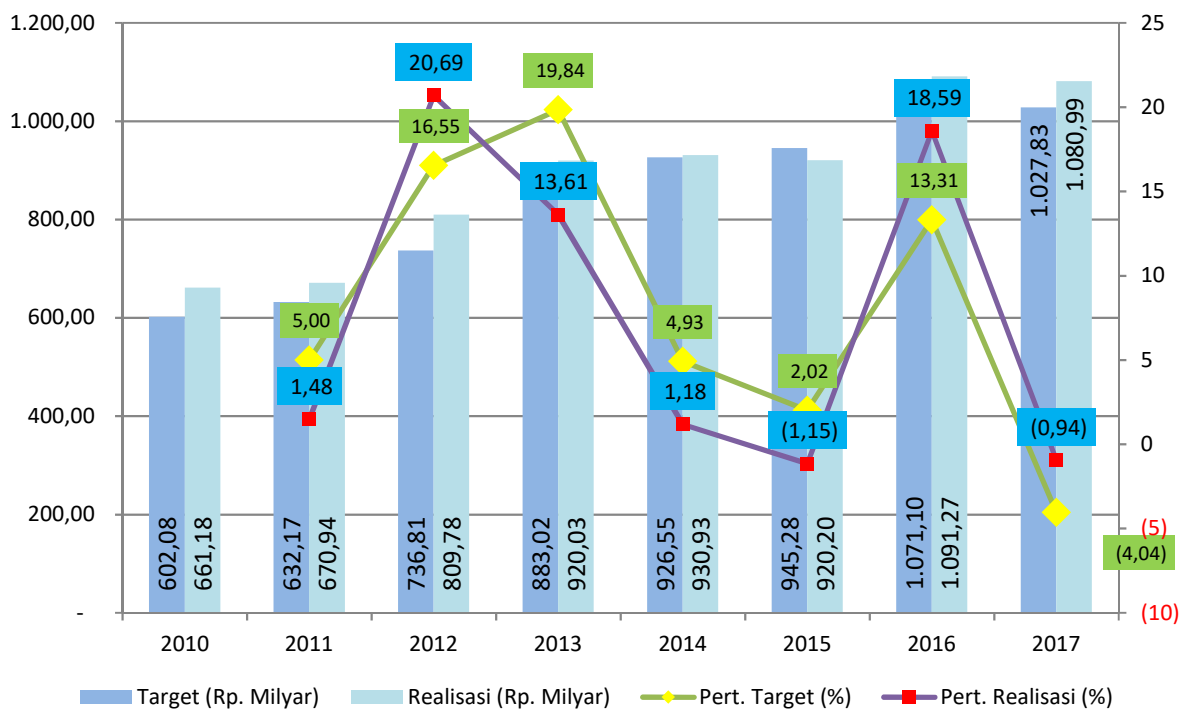
Tabel III.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur								Rerata Pertumb uhan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(%)
1	PENDAPATAN	661.184.042.185,38	670.938.350.147,01	809.779.871.301,94	920.026.975.865,58	930.925.671.945,79	920.195.435.375,63	1.091.271.329.948,85	1.080.986.057.747,43	7,64
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	19.772.307.234,38	24.622.955.360,01	29.435.684.059,85	30.612.747.171,73	33.711.081.095,75	38.473.606.893,30	43.935.738.483,85	76.737.507.723,26	23,03
1.1.1	Pajak daerah	1.805.703.198,00	2.847.686.871,00	6.183.757.883,00	8.391.970.234,00	11.411.828.633,86	10.176.304.119,17	12.399.377.006,85	16.624.618.742,10	41,66
1.1.2	Retribusi daerah	2.367.430.613,39	1.823.250.885,00	2.976.589.925,32	3.237.077.186,17	4.688.908.731,62	6.850.625.261,08	4.368.648.180,25	7.361.353.133,14	24,61
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.543.608.386,46	5.533.234.941,67	4.991.831.563,46	4.402.830.168,06	4.928.953.296,00	5.497.072.677,45	4.960.217.704,08	5.782.470.649,60	18,03
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	13.055.565.036,53	14.418.782.662,34	15.283.504.688,07	14.580.869.583,50	12.681.390.434,27	15.949.604.835,60	22.207.495.592,67	46.969.065.198,42	25,05
1.2.	Dana Perimbangan	591.416.852.603,00	583.381.446.944,00	718.684.301.091,00	809.458.361.816,00	784.452.859.939,00	733.466.795.933,00	968.373.794.264,00	896.259.003.727,00	7,07
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	302.412.416.603,00	293.517.536.944,00	343.891.598.091,00	371.005.809.816,00	312.157.563.939,00	191.245.874.933,00	169.194.985.646,00	192.017.565.563,00	-4,36
1.2.2	Dana alokasi umum	239.705.236.000,00	281.537.710.000,00	356.323.443.000,00	430.383.112.000,00	455.996.416.000,00	432.097.281.000,00	533.829.506.000,00	533.204.953.000,00	12,71
1.2.3	Dana alokasi khusus	49.299.200.000,00	8.326.200.000,00	18.469.260.000,00	8.069.440.000,00	16.298.880.000,00	110.123.640.000,00	265.349.302.618,00	171.036.485.164,00	109,35
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.994.882.348,00	62.933.947.843,00	61.659.886.151,09	79.955.866.877,85	112.761.730.911,04	148.255.032.549,33	78.961.797.201,00	107.989.546.297,17	16,58
1.3.1	Hibah	0,00	14.420.056.000,00	0,00	0,00	376.328.426,04	310.459.659,33	577.353.500,00	253.956.000,00	-21,89
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	17.722.574.656,00	22.863.128.683,00	22.405.099.498,09	24.954.532.000,00	36.438.380.485,00	36.203.188.890,00	30.086.019.701,00	38.985.907.297,17	13,78
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	32.021.002.692,00	25.650.763.160,00	33.553.153.320,00	44.302.499.000,00	64.947.022.000,00	107.341.384.000,00	48.298.424.000,00	60.169.683.000,00	17,77
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	251.305.000,00	0	5.701.633.333,00	10.698.835.877,85	11.000.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	8.580.000.000,00	-33,91

Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2016

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Gambar III.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



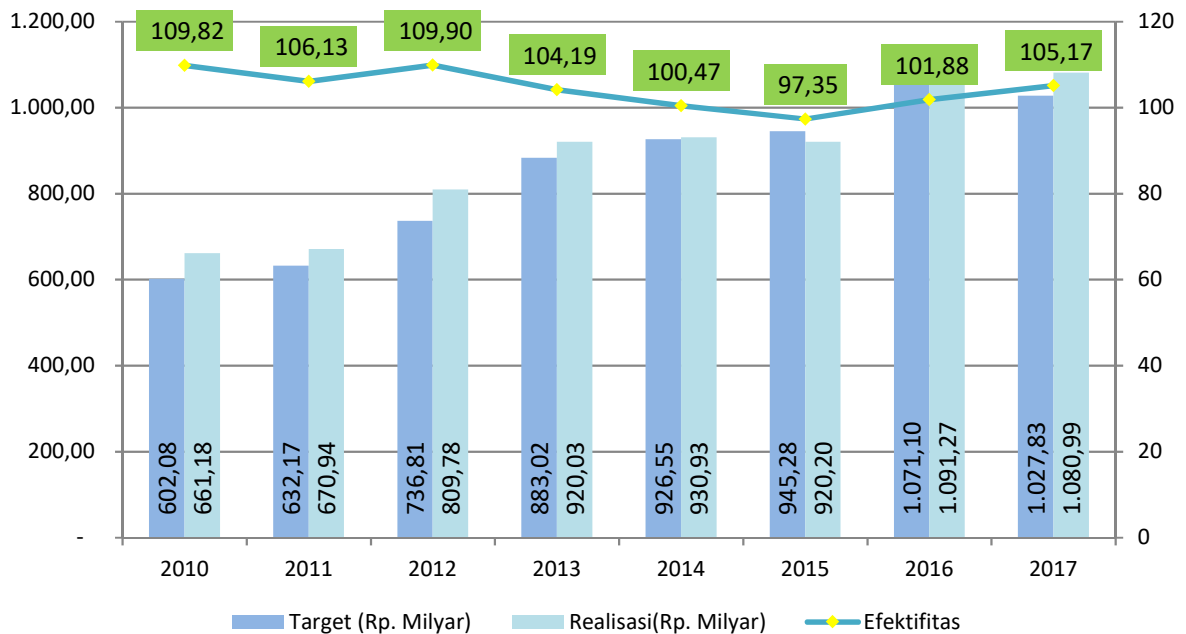
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahun selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Secara lebih rinci yaitu, pada tahun 2010, ditetapkan target penerimaan Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 602.083.041.000,00,00, Kemudian pada tahun 2017 target meningkat cukup besar, ditetapkan target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 1.027.830.341.140,00 atau meningkat 70,71 persen dengan pertumbuhan per tahun sebesar 8,23 persen.

Pada periode yang sama (7 tahun terakhir ini), realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus-menerus naik setiap tahunnya. Untuk lebih

rinci penjelasannya yaitu : Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 661.184.042.185,38,00, selanjutnya meningkat sampai tahun 2017 menjadi Rp. 1.080.986.182.003,43 atau naik sebesar 63,49 persen dengan pertumbuhan per tahun sebesar 7,64 persen.

Gambar III.2.
 Nilai Efektivitas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



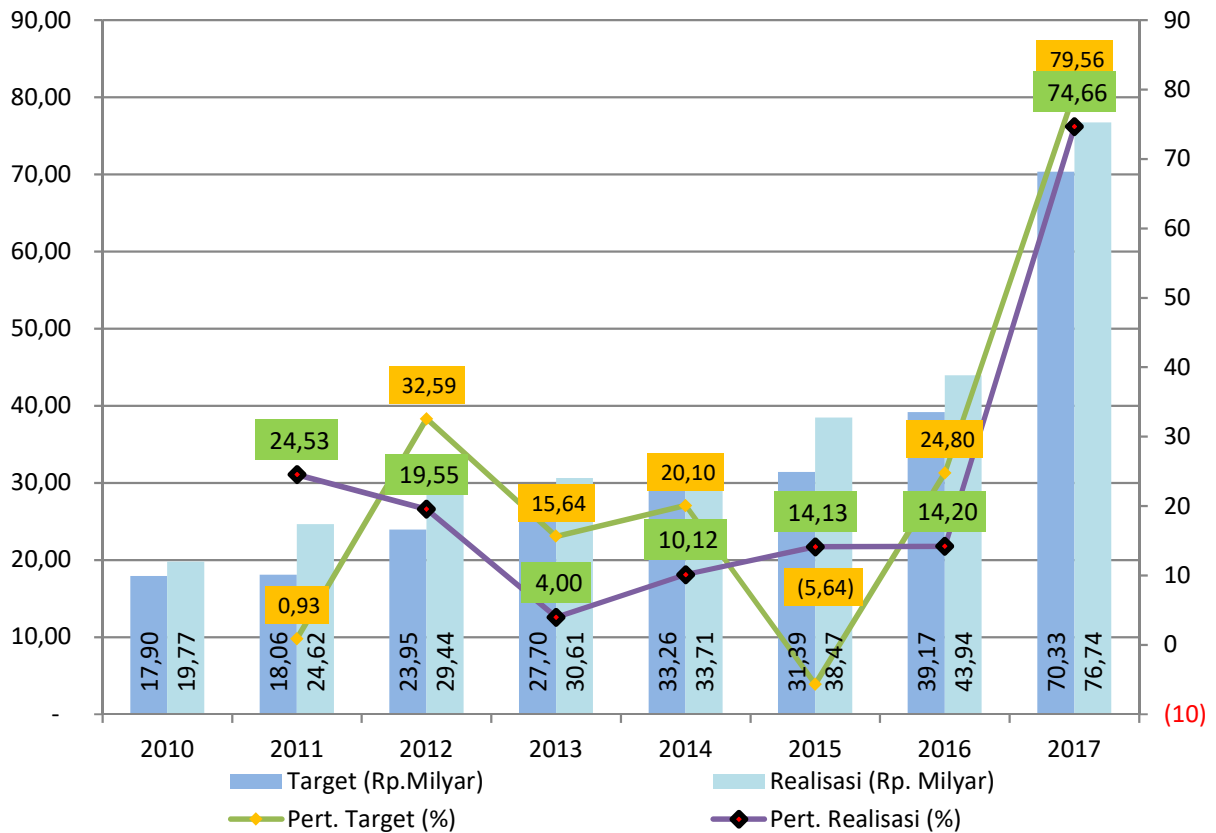
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Tingkat efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2010 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 104,36 persen per tahun.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar III.3.
Perkembangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2010 - 2017

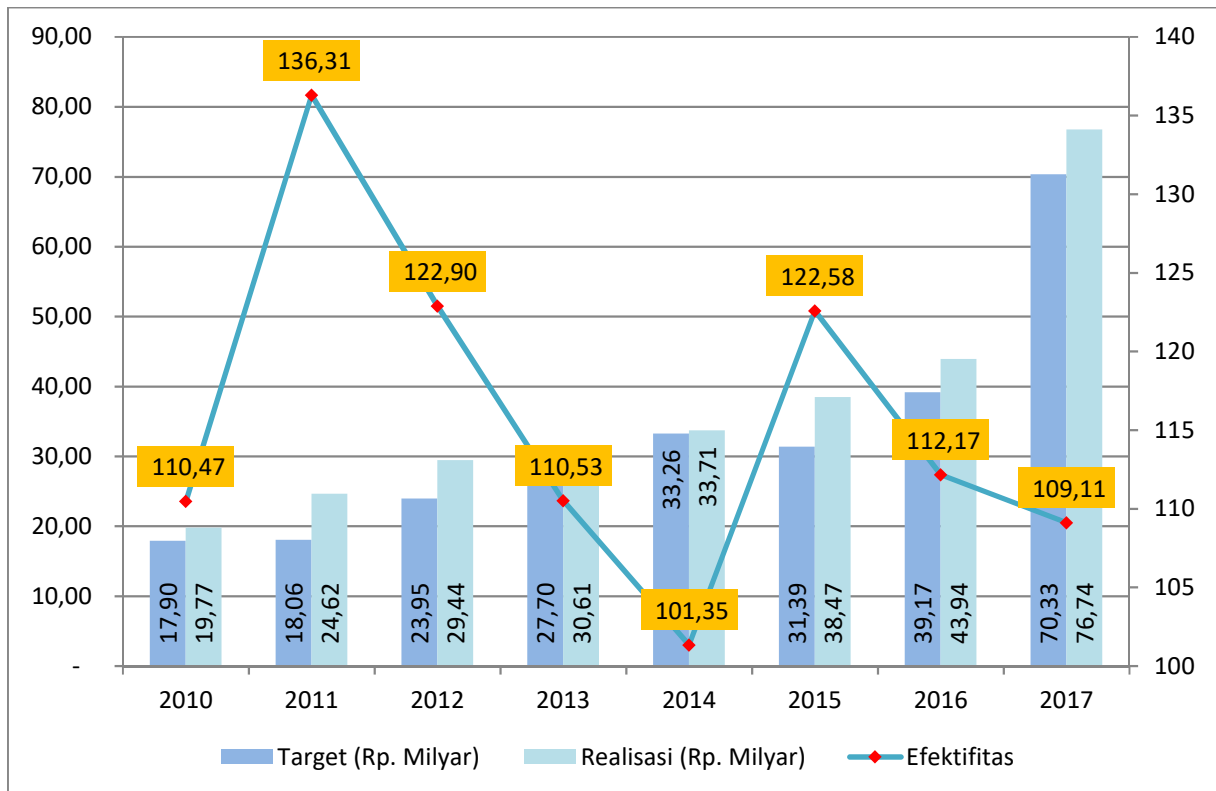


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2010 - 2015. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2010, ditetapkan target penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 17.897.765.739,00, selanjutnya mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 menjadi Rp. 70.328.011.797,00 atau meningkat 292,94 persen dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,99 persen.

Pada periode yang sama, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus meningkat setiap tahunnya, penjelasan yang lebih detail sebagai berikut : Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 19.772.307.234,38,00, dan meningkat sangat signifikan sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak Rp. 76.737.507.723,26 atau meningkat 288,11 persen. Berdasarkan data realisasi tersebut, maka rata-rata realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 23,03 persen per tahun.

Gambar III.4.
 Nilai Efektivitas PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Selama tahun 2010 - 2017 secara umum tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 115,68 persen per tahun.

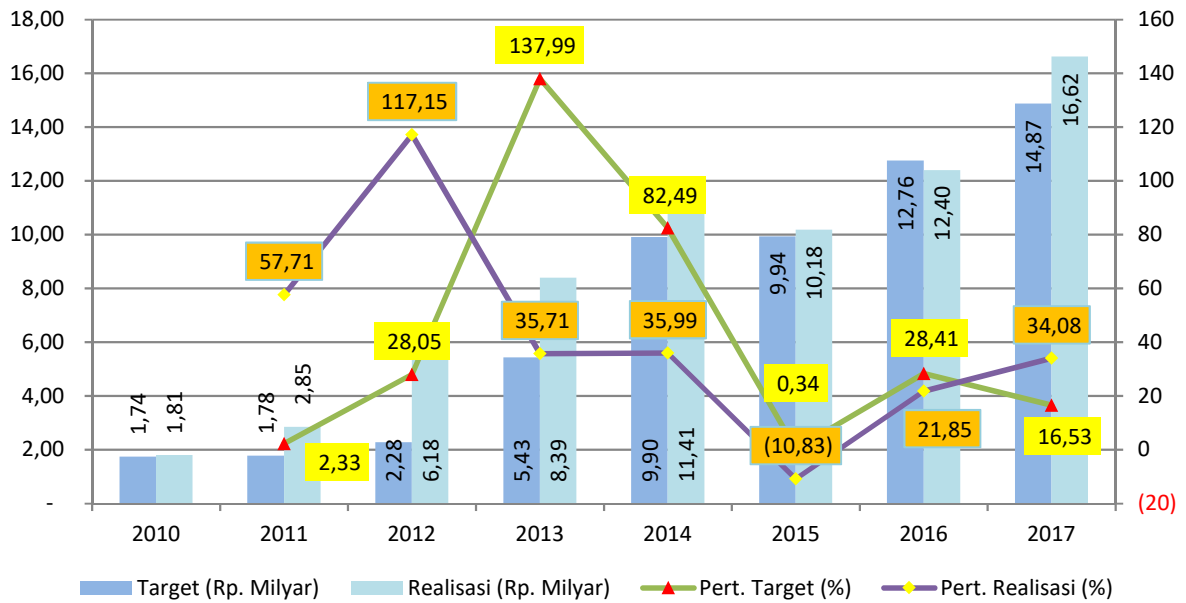
A.1. Pajak Daerah

Periode tahun 2010 - 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010 ditargetkan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.740.200.000,00, kemudian pada tahun 2017 target meningkat cukup besar, ditetapkan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 14.868.520.000,00 atau meningkat 754,41 persen. Adapun rata-rata target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 42,30 persen per tahun.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010- 2017 terus-menerus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak

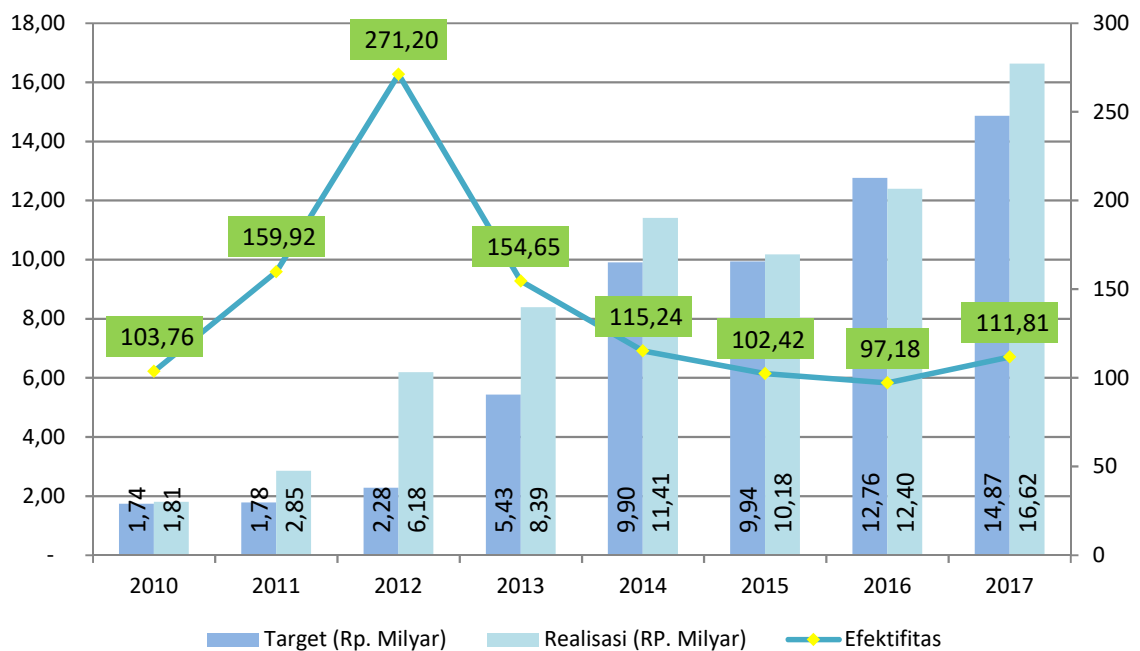
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 1.805.703.198,00 meningkat ditahun 2017 menjadi sebesar Rp. 16.624.618.742,10 atau meningkat 820,67 persen. Maka secara rata-rata realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 41,66 persen per tahun.

Gambar III.5.
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Gambar III.6.
Nilai Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



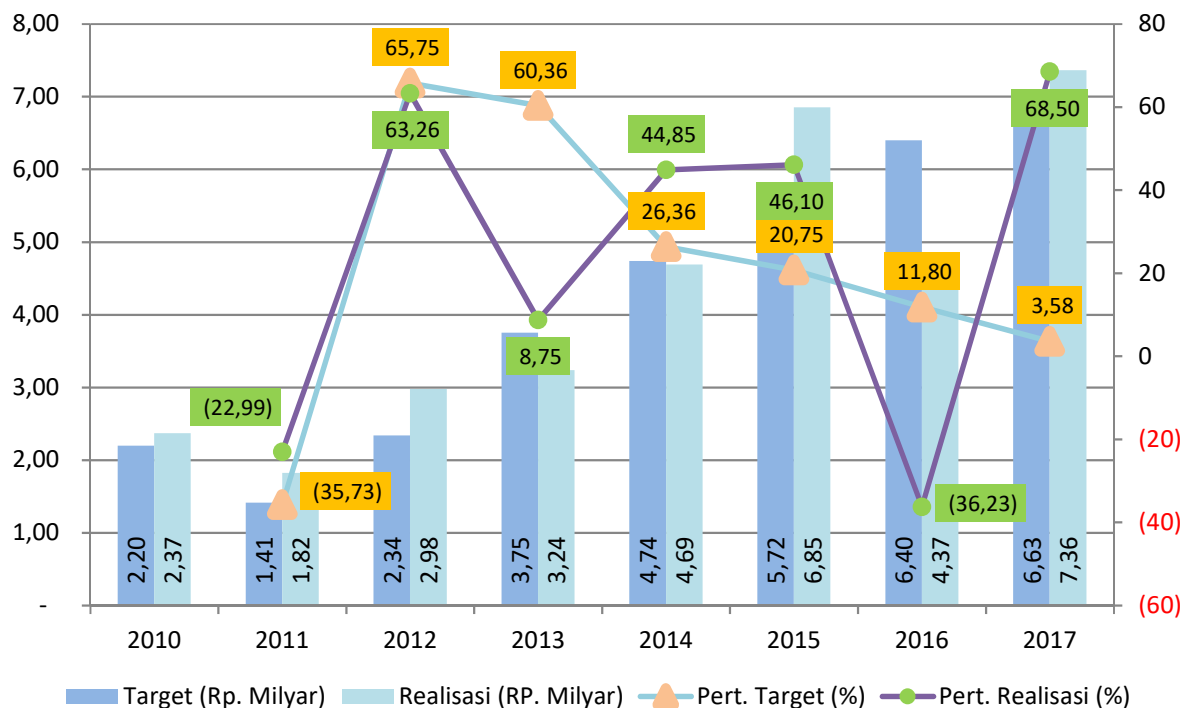
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun terakhir (2010 - 2017) secara keseluruhan sangat efektif. Berdasarkan data yang dihasilkan tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 139,52 persen dari target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

A.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 menetapkan target yang berbeda-beda, namun cenderung naik. Penjelasan secara detailnya yaitu: pada tahun 2010 target Retribusi Daerah ditetapkan berjumlah Rp. 2.195.750.000,00, kemudian pada tahun 2011 menurun sebesar minus 35,73 persen atau menjadi Rp. 1.411.290.000,00, selanjutnya target penerimaan Retribusi Daerah terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 6.628.071.758,00, atau yaitu naik sebesar 201,86 persen. Dengan demikian rata-rata target penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 21,84 persen per tahun.

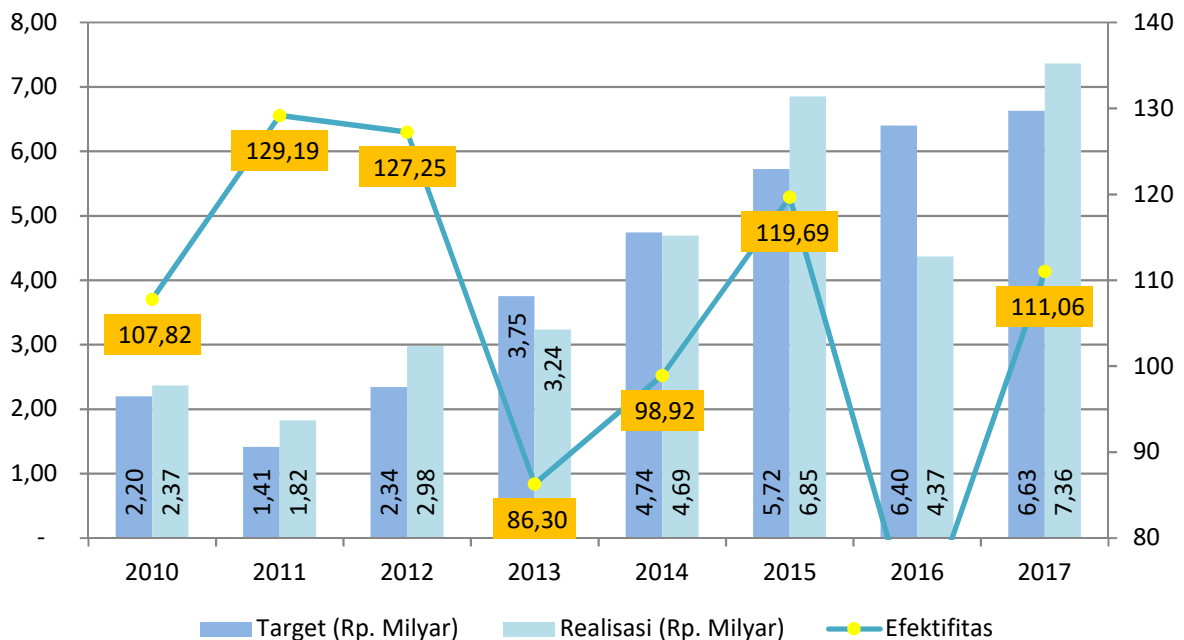
Gambar III.7.
Perkembangan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada periode yang sama, realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi trend peningkatan, kecuali pada tahun 2011. Deskripsi realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap tahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Retribusi Daerah berjumlah Rp. 2.367.430.613,39, kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar minus 22,99 persen sehingga menjadi sebesar Rp. 1.823.250.885,00,-. Selanjutnya realisasi penerimaan Retribusi Daerah meningkat sampai pada tahun 2017 menjadi Rp. 7.361.353.133,14. Secara rata-rata realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar 24,61 persen per tahun.

Gambar III.8.
 Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

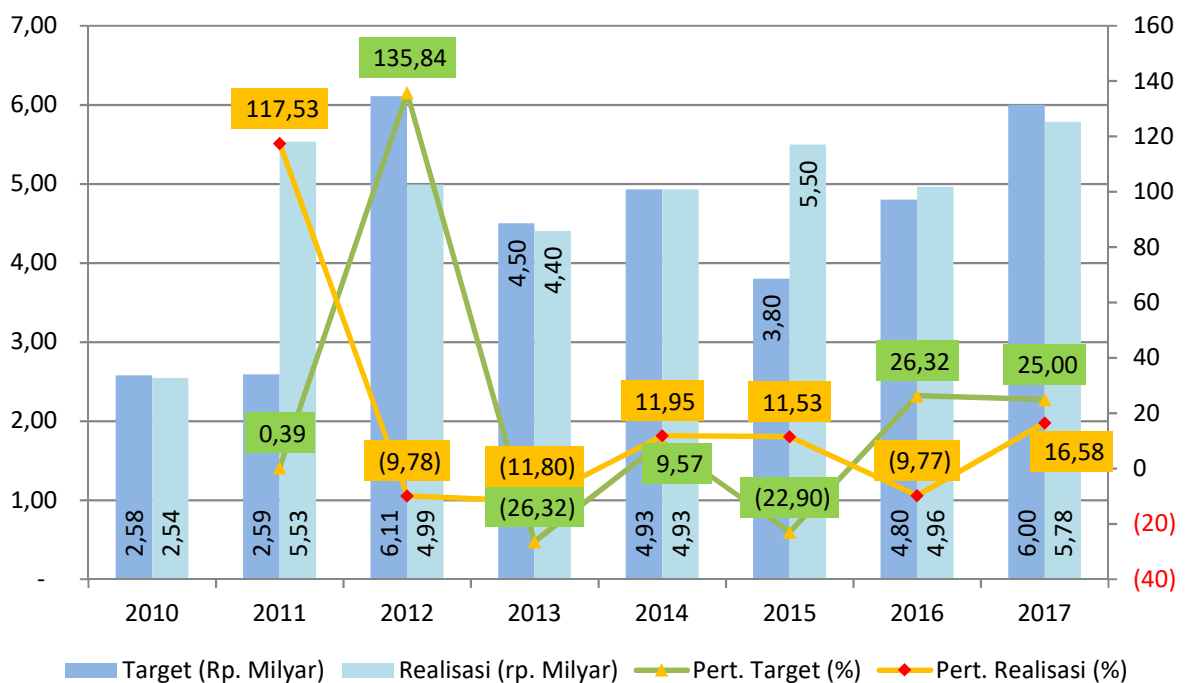
Secara umum tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun terakhir (2010 - 2017) sangat efektif dengan angka rata-rata sebesar 105,81 persen.

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Selama kurun waktu tahun 2010 - 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2010, target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berjumlah Rp. 2.579.000.000,00 kemudian pada tahun 2011 dan 2012 meningkat sampai sebesar 136,23 persen. Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi penurunan target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar minus 26,32 persen yaitu Rp. 4.498.606.053,06 Kemudian pada tahun 2017 target meningkat menjadi Rp. 6.000.000.000,00 atau meningkat sebesar minus 132,65 persen dari tahun 2010, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun naik sebesar 21,13 persen.

Gambar III.9.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2010 - 2017

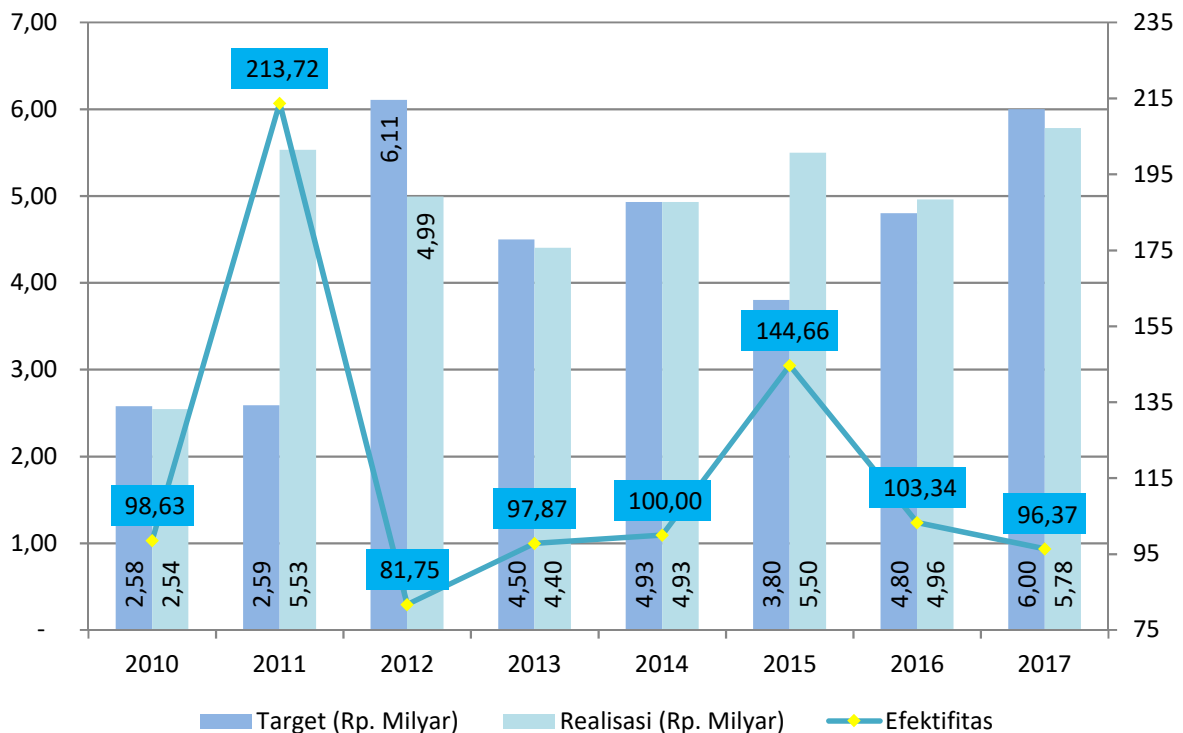


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada periode yang sama, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbeda-beda, lebih rinci penjelasannya yaitu : Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berjumlah Rp. 2.543.608.386,46. Pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 10,44 persen, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 4.402.830.168,06,- atau turun sebesar minus 11.80 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat sebesar 127,33 dari tahun 2010 atau menjadi Rp. 5.782.470.649,60. Berdasarkan capaian tersebut maka diperoleh rata-rata realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 18,03 persen per tahun.

Gambar III.10.

Nilai Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

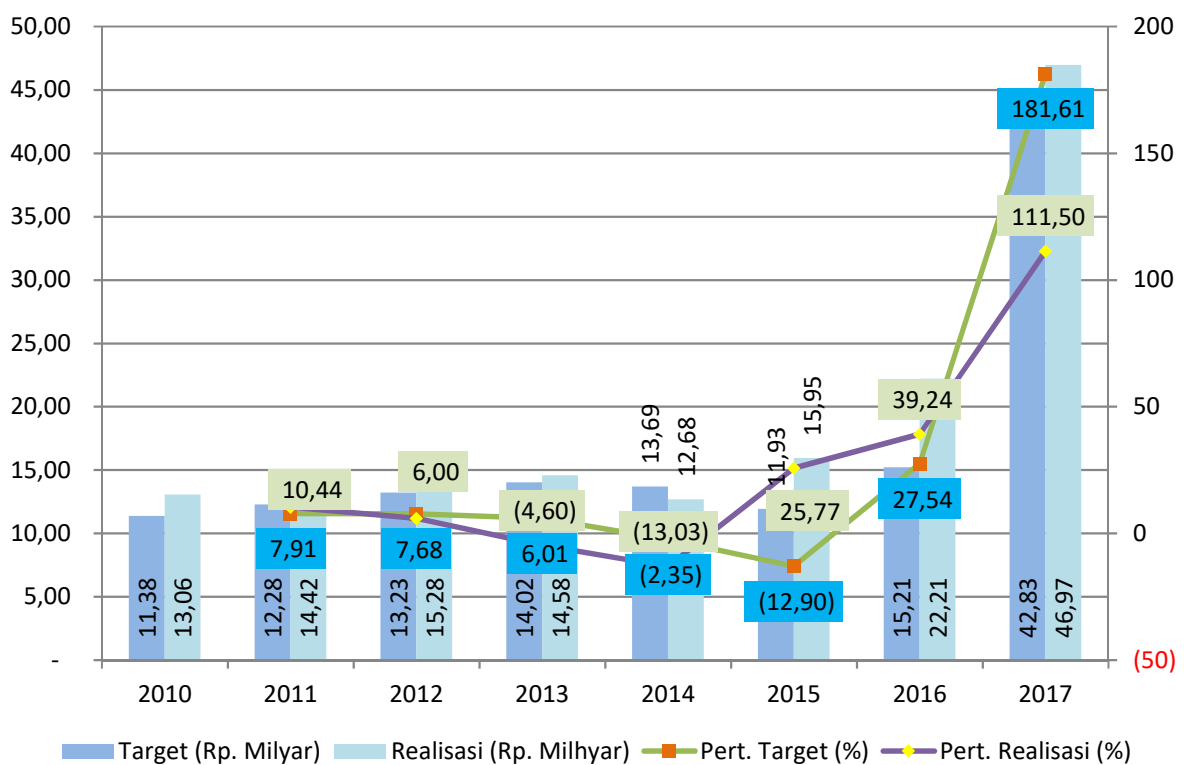
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan bisa dikatakan sangat efektif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 119,67 persen, namun ditahun 2010, 2012, 2013 dan 2017 tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

A.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2010 sampai 2015 selalu naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang turun masing-masing sebesar 2,35 persen dan 12,90 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 target lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Rp. 11.382.815.739,00 hingga akhirnya meningkat menjadi sebesar Rp. 42.831.420.039,00 pada tahun 2017 atau sebesar 276,28 persen dari tahun 2010. Target penerimaan dari jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh sebesar 30,78 persen per tahun.

Sementara itu, pada periode yang sama realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2017 realisasinya bervariasi. Pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 13.055.565.036,53 kemudian meningkat di tahun 2011 dan 2012 menjadi Rp. 15.283.504.688,07 atau meningkat 17,07 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 menurun menjadi Rp. 12.681.390.434,27 atau menurun sebesar minus 17,03 persen. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 15.949.604.835,60, hingga akhirnya tahun 2017 meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp. 46.969.065.198,42 atau meningkat sebesar 259,76 persen dari tahun 2010. Realisasi dari jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 25,05 persen per tahun.

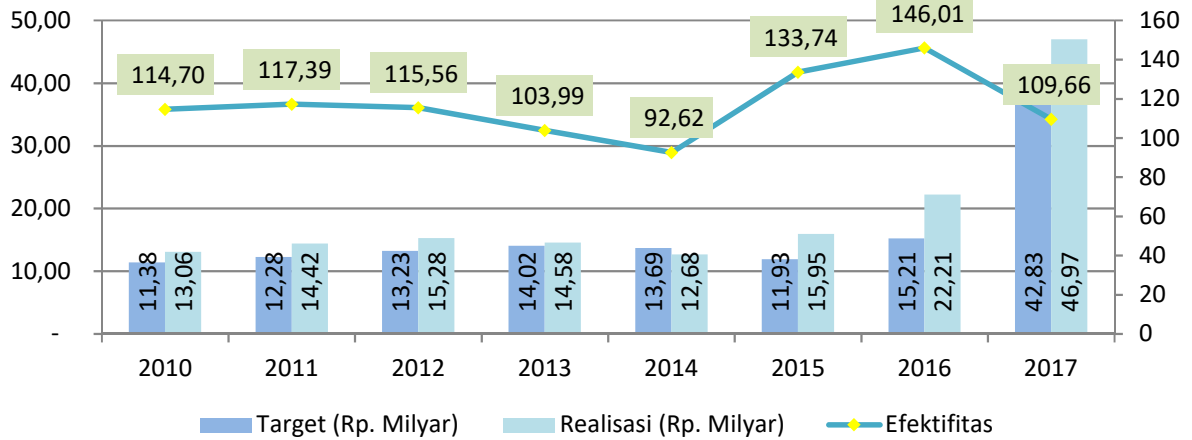
Gambar III.11.
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Rata-rata tingkat efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 117 persen selama periode tahun 2010 - 2017 sangat efektif, kecuali pada tahun 2014 dimana tingkat efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

Gambar III.12.
 Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

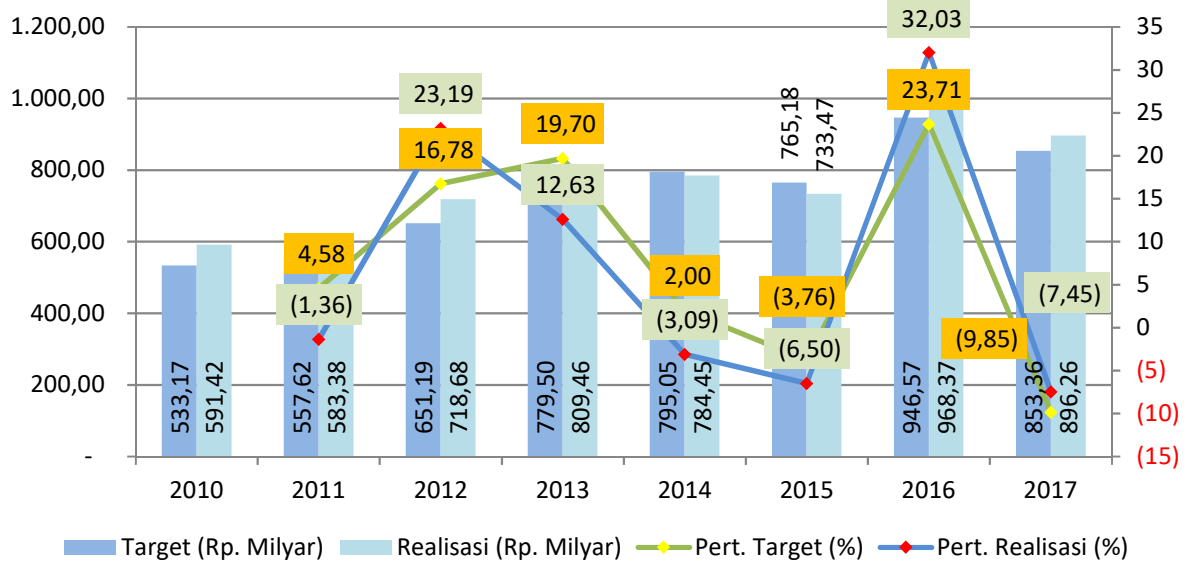


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

B. Dana Perimbangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2010 sampai 2017 menargetkan Dana Perimbangan selalu naik setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,76 persen dan 9,85 persen. Pada tahun 2010 target Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 533.173.995.413,00 kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 853.362.376.102,00. Secara rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 7,60 persen per tahun.

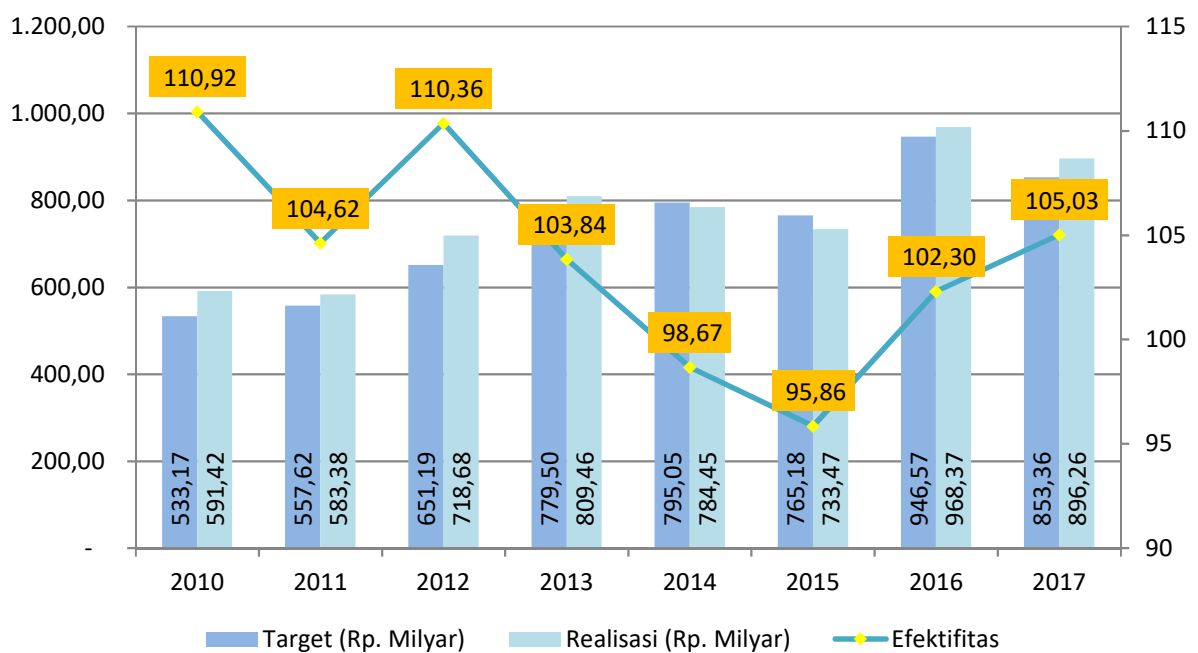
Gambar III.13.
 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada periode yang sama, penerimaan Dana Perimbangan realisasinya menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014, 2015 dan 2017. Pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 591.416.852.603,00, kemudian meningkat terus-menerus dari tahun 2011, 2012 dan 2013 menjadi sebesar Rp. 809.458.361.816,00, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 784.452.859.939,00 atau menurun sebesar minus 3,09 persen. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi Dana Perimbangan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 733.466.795.933,00, hingga tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 896.259.003.727,00 atau meningkat sebesar 51,54 persen dari tahun 2010. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh sebesar 7,07 persen per tahun.

Gambar III.14.
 Nilai Efektivitas Dana Perimbangan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



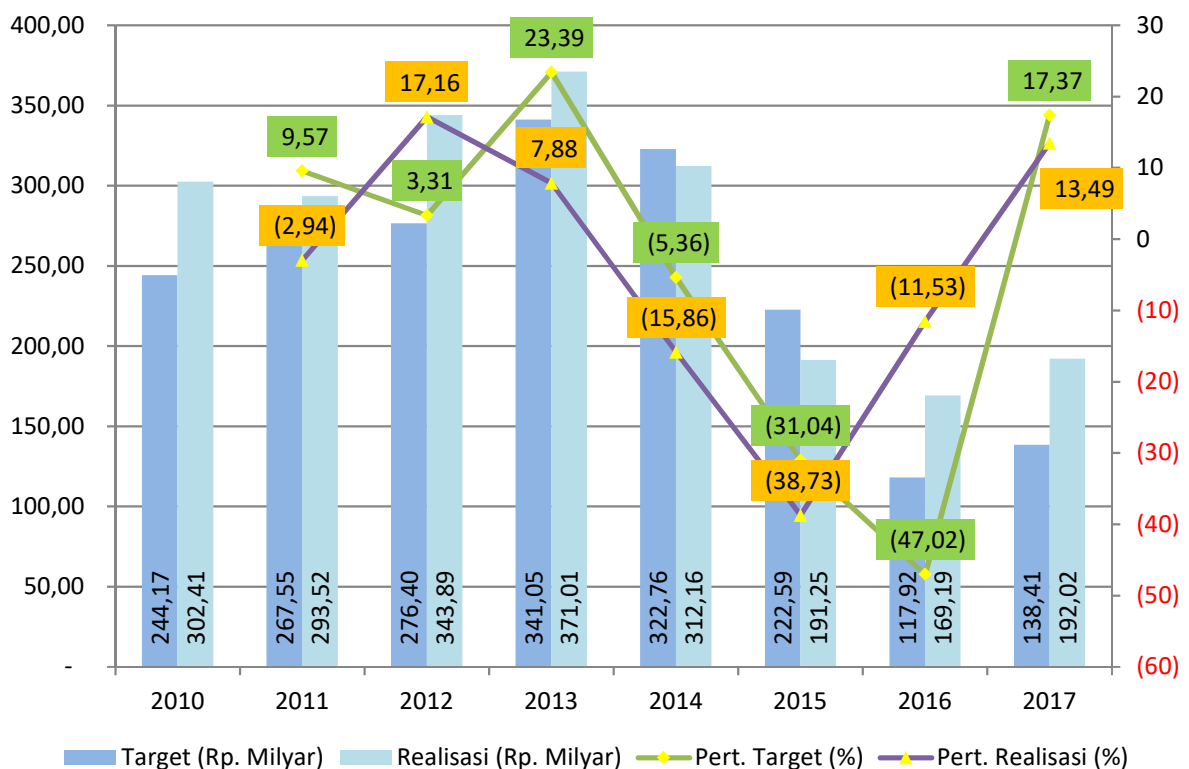
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Berdasarkan capaian target dan realisasi untuk Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2010-2017 secara umum setiap tahun sangat efektif dengan rata-rata sebesar 102,95 persen. Namun tahun 2014 dan tahun 2015 tingkat efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

B.1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010 - 2017 menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berfluktuatif setiap tahunnya, Pada tahun 2010 target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 244.169.559.413,00, selanjutnya terus-menerus setiap tahunnya sampai dengan tahun 2013 naik menjadi Rp. 341.049.327.845,90. Namun target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada tahun 2014 dan 2015 terus mengalami penurunan, yaitu Rp. 322.759.014.229,00 dan Rp. 222.590.441.104,48, sedangkan tahun 2016 dan 2017 ditetapkan masing sebesar Rp. 117.920.891.750,00 dan Rp. 138.406.582.102,00. Rata-rata target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 4,25 persen per tahun.

Gambar III.15.
Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2010 - 2017

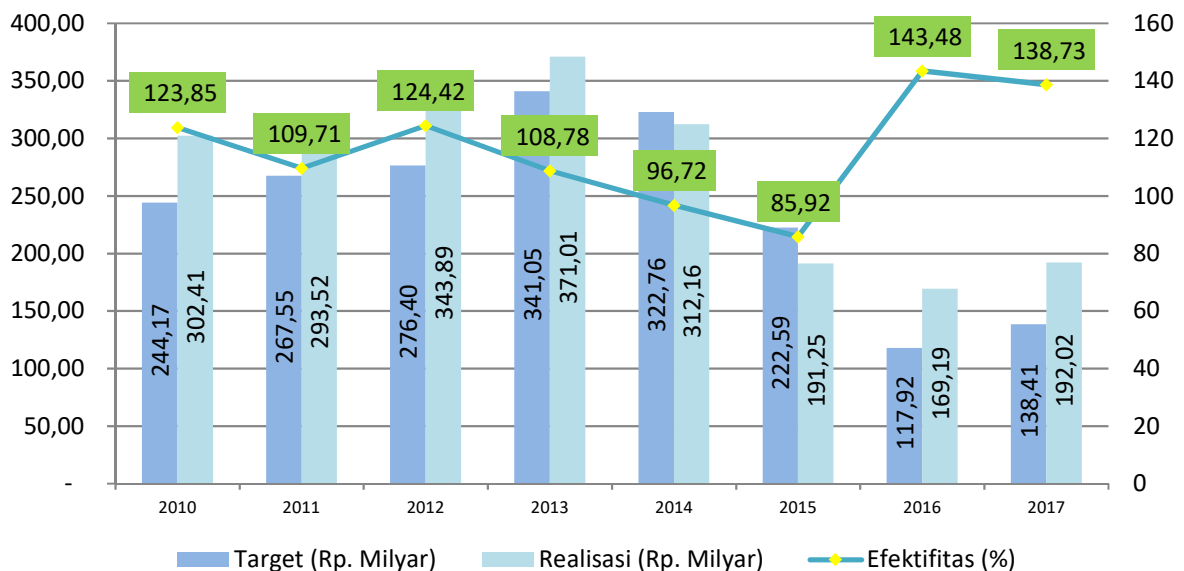


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Selanjutnya, pada tahun yang sama realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam kurun waktu tahun 2010 - 2017 berfluktuasi. Pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 302.412.416.603,00 kemudian pada tahun 2011 menurun sebesar minus 2,94

persen atau menjadi sebesar Rp. 293.517.536.944,00. Selanjutnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat sebesar 26,40 persen atau menjadi sebesar Rp. 343.891.598.091,00. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 312.157.563.939,00 dan Rp. 191.245.874.933,00 atau turun sebesar minus 48,45 persen, terakhir tahun 2016 dan 2017 menjadi sebesar Rp. 169.194.985.646,00 dan sebesar Rp. 192.017.565.563,00 atau sebesar minus 11,53 persen dan 13,49 persen. Berdasarkan hasil tersebut maka rata-rata realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 4,36 persen per tahun.

Gambar III.16.
 Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

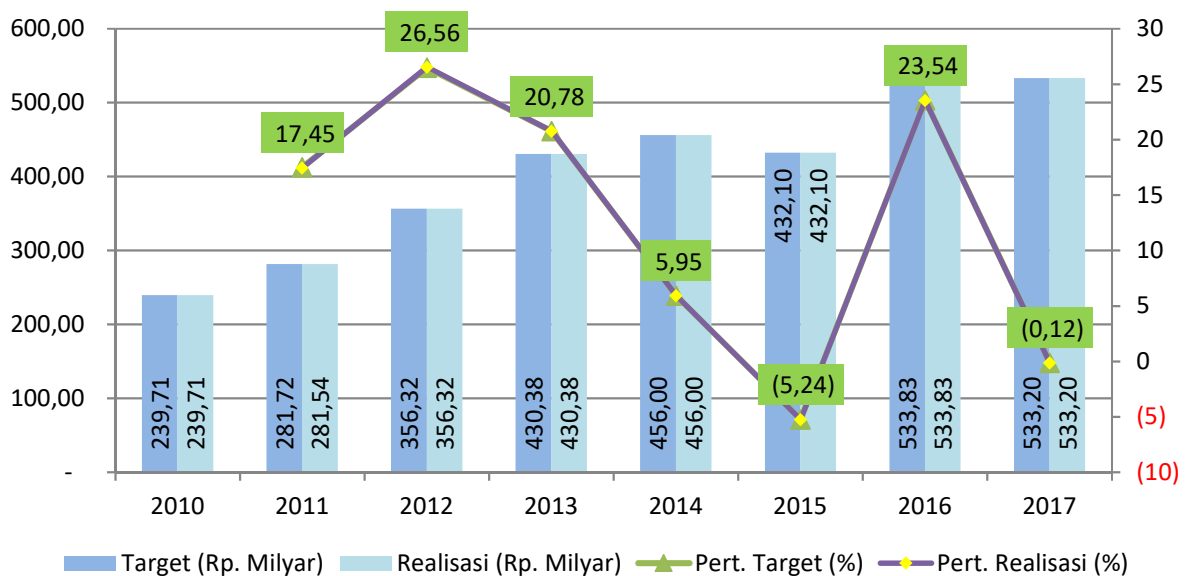
Selama 7 tahun terakhir penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat efektif setiap tahun. Jika dilihat hasil secara keseluruhan maka diperoleh tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rata-rata 115,38 persen. Namun pada tahun 2014 dan 2015 tingkat Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah efektif.

B.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu naik setiap tahunnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2010 target Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 239.705.236.000,00 terus meningkat sampai dengan tahun 2014 yaitu Rp 455.996.416.000,00. Dana Alokasi Umum tahun 2015 menurun menjadi Rp. 432.097.281.000,00. Pada tahun 2016 dan 2017 ditargetkan sebesar Rp. 533.829.506.000,00 dan Rp. 533.204.953.000,00. Berdasarkan data tersebut rata-rata target penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 12,70 persen per tahun.

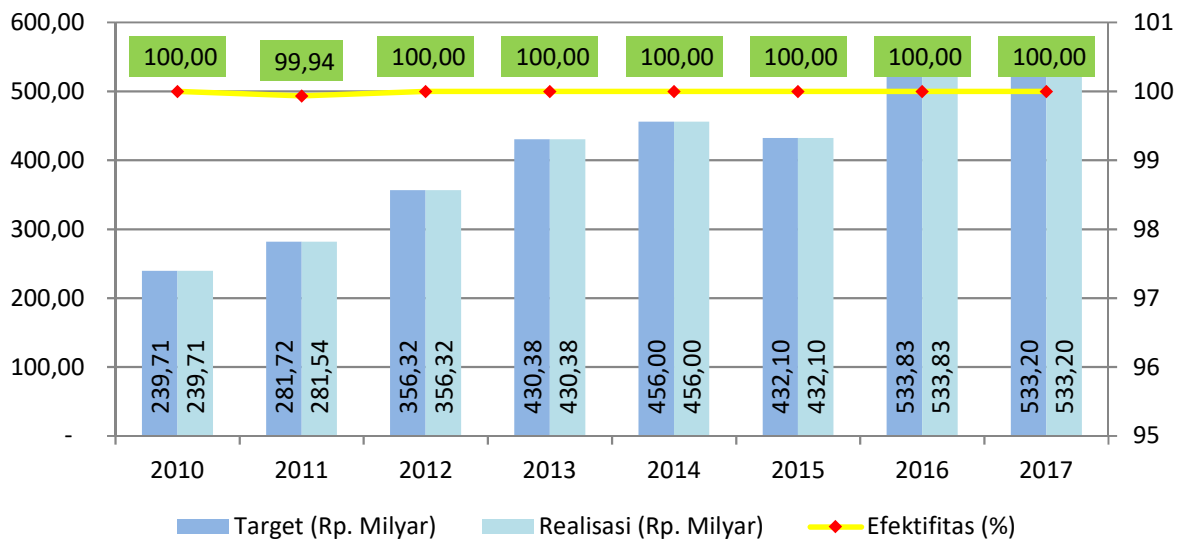
Gambar III.17.
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2010 Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 239.705.236.000,00, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2014 yaitu menjadi sebesar Rp 455.996.416.000,00. Namun terjadi penurunan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2015 menjadi Rp. 432.097.281.000,00. Untuk Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 533.829.506.000,00 dan Rp. 533.204.953.000,00. Rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 12,71 persen per tahun.

Gambar III.18.
 Nilai Efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU)
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

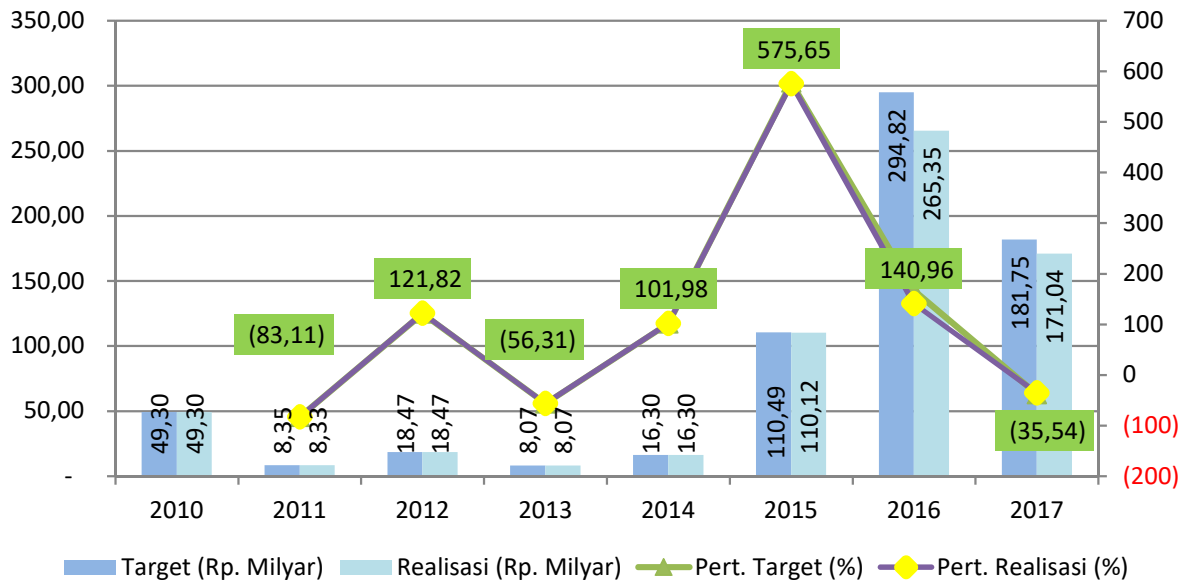
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penerimaan Dana Alokasi Umum, periode 2010-2015 secara umum efektif dengan rata-rata 99,99 persen dari tingkat efektivitas target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

B.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Periode tahun 2010 sampai 2014 target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur bervariasi. Pada tahun 2010 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 49.299.200.000,00, kemudian menurun cukup besar pada tahun 2011 menjadi Rp. 8.350.900.000,00 atau turun minus 83,06 persen. Selanjutnya tahun 2012 kembali meningkat menjadi Rp. 18.469.260.000,00, namun tahun 2013 terjadi penurunan kembali menjadi Rp. 8.069.440.000,00 atau menurun sebesar minus 56,31 persen. Selanjutnya tahun 2014 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 16.298.880.000,00 (101,98 persen). Pada tahun 2015 dan 2016 target Dana Alokasi Khusus melonjak naik sangat signifikan menjadi Rp. 110.489.220.000,00 dan Rp. 294.821.594.000,00, kemudian tahun 2017 kembali menurun menjadi sebesar Rp.

181.750.841.000,00. Rata-rata target penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik 112,88 persen per tahun.

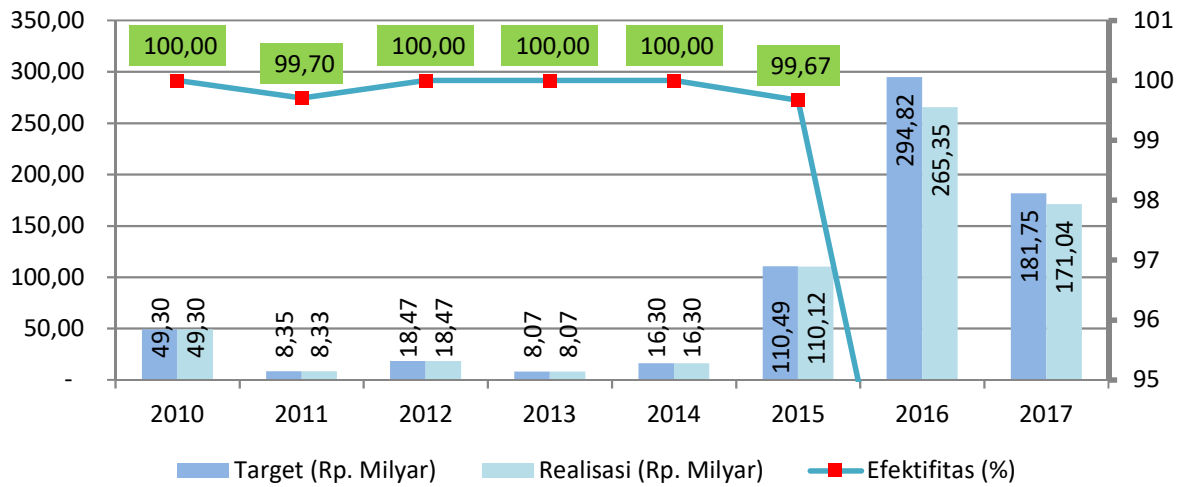
Gambar III.19.
Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pada periode yang sama, realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi. Pada tahun 2010 realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 49.299.200.000,00, kemudian menurun cukup besar pada tahun 2011 menjadi Rp. 8.326.200.000,00 dan pada tahun 2012 meningkat signifikan menjadi Rp. 18.469.260.000,00. Pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali turun minus 56,31 persen menjadi Rp. 8.069.440.000,00. Kemudian ditahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 16.298.880.000,00 atau naik sebesar 101,98 persen. Pada tahun 2015 realisasi Dana Alokasi Khusus melonjak naik sangat signifikan menjadi Rp. 110.123.640.000,00. Realisasi DAK Tahun 2016 merupakan tertinggi yang mencapai sebesar Rp. 265.349.302.618,00 akan tetapi tahun 2017 kembali turun sebesar minus 38,35 persen atau Rp. 171.036.485.164,00. Realisasi Dana Alokasi khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh 109,35 persen per tahun. Adapun tingkat efektivitas penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun terakhir 2010 - 2017, secara umum sebesar 99,64 persen.

Gambar III.20.
 Nilai Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK)
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

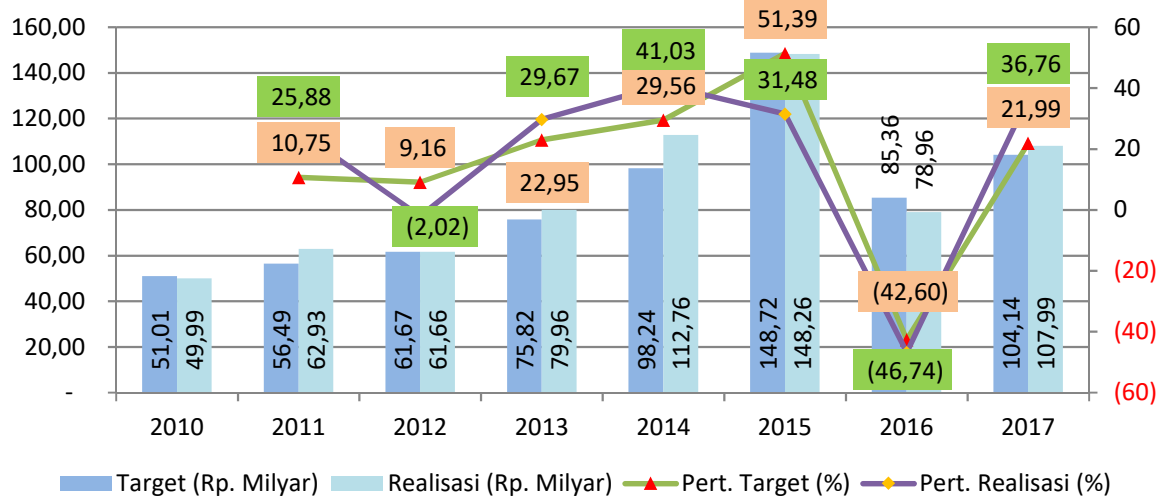


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah setiap tahunnya selama 7 tahun belakangan ini. Pada tahun 2010 target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp. 51.011.279.848,00 kemudian naik tahun 2015 menjadi Rp. 148.721.047.800,00. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 85.364.344.823,25 dan Rp. 104.139.953.241,00. Berdasarkan data tersebut target lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 14,74 persen per tahun.

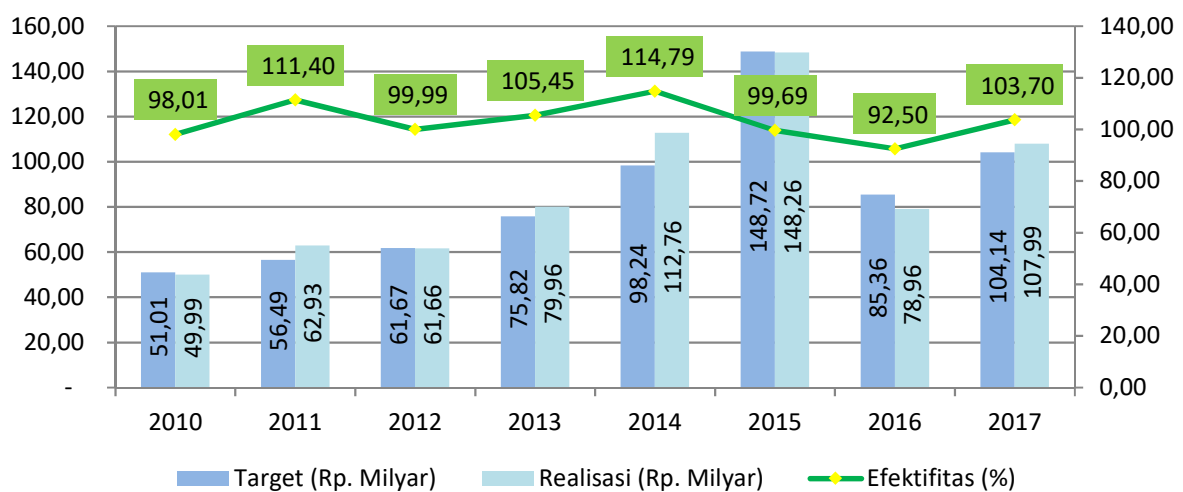
Gambar III.21.
 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Penerimaan yang bersumber dari lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terealisasi naik dari tahun ke tahun selama tahun 2010 - 2014. Bila pada tahun 2010 telah terealisasi sebesar Rp. 49.994.882.348,00 maka pada tahun 2017 meningkat 119,98 persen atau menjadi Rp. 107.989.546.297,17. Secara rata-rata realisasi lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah 16,58 persen per tahun.

Gambar III.22.
 Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Sementara itu, untuk tingkat efektivitas penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010 - 2017 secara umum efektif dengan rata-rata 103,93 persen. Kecuali pada tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

C.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbeda setiap tahunnya dimana selama kurun waktu 2010 - 2017 realisasi Pendapatan Hibah hanya terdapat pada tahun 2011 dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, sedangkan target pendapatan Hibah tidak pernah dialokasikan pada periode tersebut. Pada tahun 2011 pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 14.420.056.000,00, sementara pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -97,39 atau menjadi sebesar Rp. 376.328.426,04. Di tahun 2015 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp. 310.459.659,33 turun sebesar minus 17,50 persen, sedangkan pada

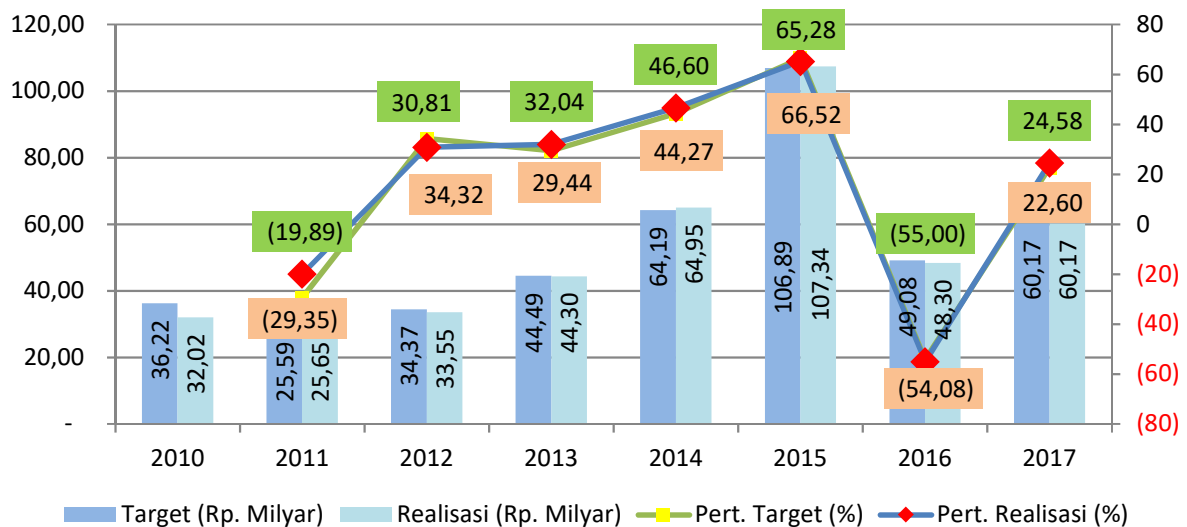
tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 577.353.500,00 dan Rp. 253.956.000,00 atau sebesar 46,23 persen dan minus 56,01 persen.

C.2. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010 - 2017 memiliki target yang fluktuatif. Pada tahun 2010 target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 36.220.286.947,00 tetapi terjadi penurunan ditahun 2011 sebesar Rp. 25.591.173.160,00 atau turun minus 29,35 persen. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 menjadi Rp. 106.885.508.000,00 akan tetapi kembali turun pada tahun 2016 - 2017 hingga menjadi sebesar Rp. 60.169.683.000,00 sehingga rata-rata target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 16,24 persen per tahun.

Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi. Pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 32.021.002.692,00 kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi Rp. 25.650.763.160,00. Selanjutnya pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp. 107.341.384.000,00 akan tetapi kembali turun pada tahun 2016 - 2017 hingga menjadi sebesar Rp. 60.169.683.000,00. Secara rata-rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 17,77 persen per tahun.

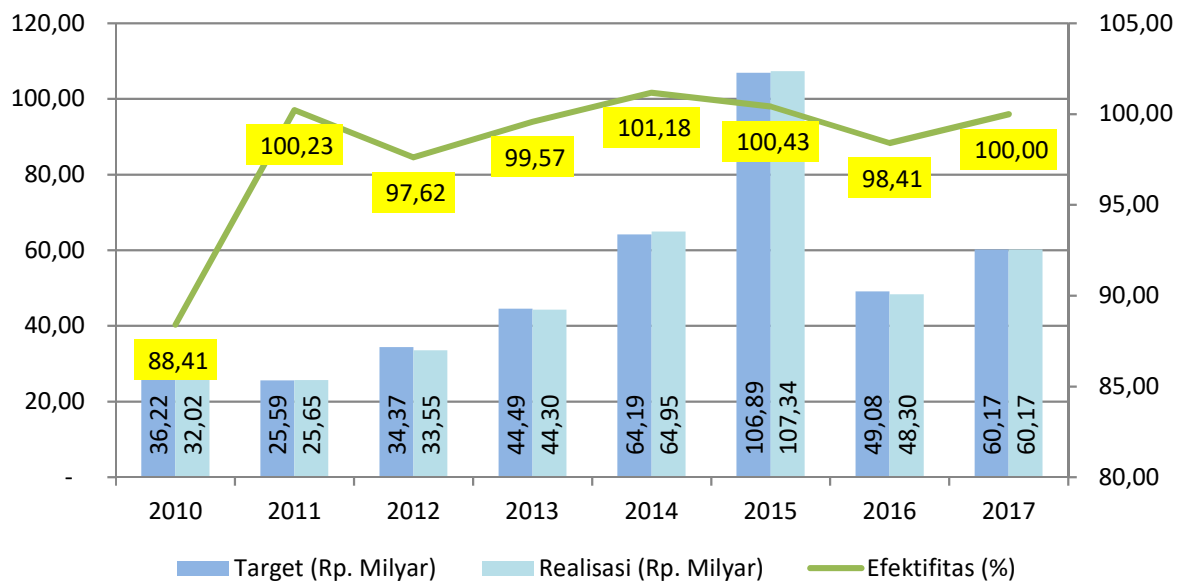
Gambar III.23.
Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Periode tahun 2010-2017 penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung secara keseluruhan untuk tingkat efektivitas adalah efektif setiap tahun. Sebagaimana hasil yang diperoleh yaitu rata-rata sebesar 99,63 persen per tahun.

Gambar III.24.
 Nilai Efektivitas Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

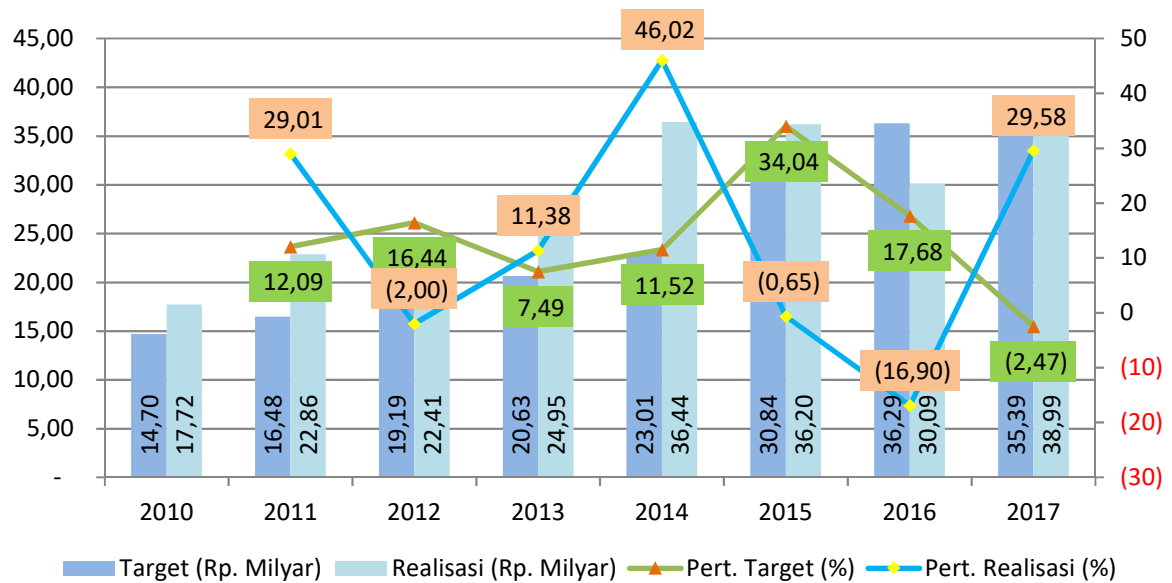
C.4. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 target sebesar Rp. 14.703.937.901,00 kemudian telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah meningkat sampai tahun 2017 menjadi Rp. 35.390.270.241,00 atau meningkat sebesar 140,69 persen dari target tahun 2010. Secara rata-rata target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 13,83 persen per tahun.

Begitu juga dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan selama tahun 2010 - 2017. Pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 17.722.574.656,00 dan pada tahun 2015 meningkat 119,98 persen atau menjadi Rp. 38.985.907.297,17. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh 13,78 persen per tahun.

Gambar III.25.

Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

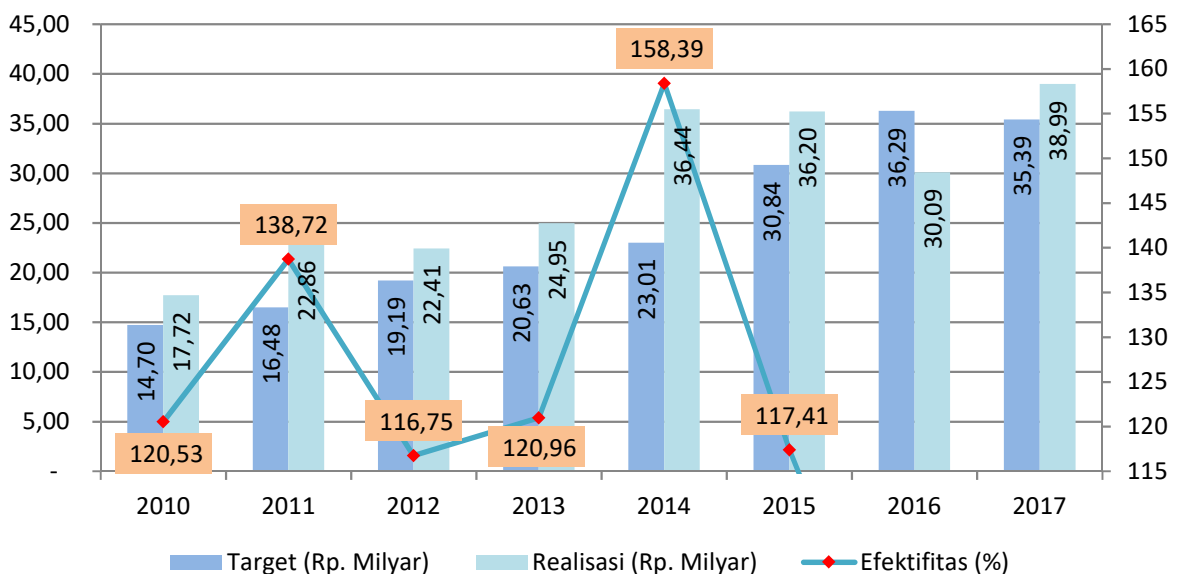


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Secara umum tingkat efektivitas Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat efektif dengan rata-rata 130,45 persen.

Gambar III.26.

Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

3.1.1.2 Proporsi Sumber Pendapatan

Tabel berikut dapat dilihat gambaran kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010 - 2017 dari sisi pendapatan daerah.

Tabel III.3
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur								Rerata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN									
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (%)	2,99	3,67	3,64	3,33	3,62	4,18	4,03	7,10	4,07
1.1.1.	Pajak daerah (%)	0,27	0,42	0,76	0,91	1,23	1,11	1,14	1,54	0,92
1.1.2.	Retribusi daerah (%)	0,36	0,27	0,37	0,35	0,50	0,74	0,40	0,68	0,46
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (%)	0,38	0,82	0,62	0,48	0,53	0,60	0,45	0,53	0,55
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah (%)	1,97	2,15	1,89	1,58	1,36	1,73	2,04	4,35	2,13
1.2.	Dana Perimbangan (%)	89,45	86,95	88,75	87,98	84,27	79,71	88,74	82,91	86,09
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak (%)	45,74	43,75	42,47	40,33	33,53	20,78	15,50	17,76	32,48
1.2.2.	Dana alokasi umum (%)	36,25	41,96	44,00	46,78	48,98	46,96	48,92	49,33	45,40
1.2.3.	Dana alokasi khusus (%)	7,46	1,24	2,28	0,88	1,75	11,97	24,32	15,82	8,21
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	7,56	9,38	7,61	8,69	12,11	16,11	7,24	9,99	9,84
1.3.1	Hibah (%)	0,00	2,15	0,00	0,00	0,04	0,03	0,05	0,02	0,29
1.3.2	Dana darurat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (%)	2,68	3,41	2,77	2,71	3,91	3,93	2,76	3,61	3,22
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus (%)	4,84	3,82	4,14	4,82	6,98	11,67	4,43	5,57	5,78
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya (%)	0,04	0,00	0,70	1,16	1,18	0,48	0,00	0,79	0,54
	Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Jika dilihat dari tabel diatas, dana perimbangan kontribusinya sangat mendominasi dari sumber-sumber pendapatan lainnya dimana secara rata-rata kontribusi dana perimbangan mencapai sebesar 86,09 persen dari total pendapatan daerah, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah secara rata-rata mencapai 9,84 persen dan selanjutnya Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata mencapai 4,07 persen.

Gambaran dari potret kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2010 - 2015 menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembiayaan dari pusat terus berfluktuatif menurun, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2016 - 2017.

3.1.1.3. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Total belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011 - 2017 terus mengalami peningkatan, tapi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011, total belanja yang dimilikinya senilai Rp 699.652.397.046,11 dan tahun 2012 menjadi Rp 813.068.768.097,00 serta tahun 2013 meningkat menjadi Rp 942.606.301.888,00. Kemudian tahun 2014 telah mencapai Rp 956.997.984.722,00 dan tahun 2015 total belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun menjadi Rp 924.517.421.065,75, sedangkan tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 dan Rp. 1.047.084.888.991,00.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah beserta deskripsinya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.4
Realisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

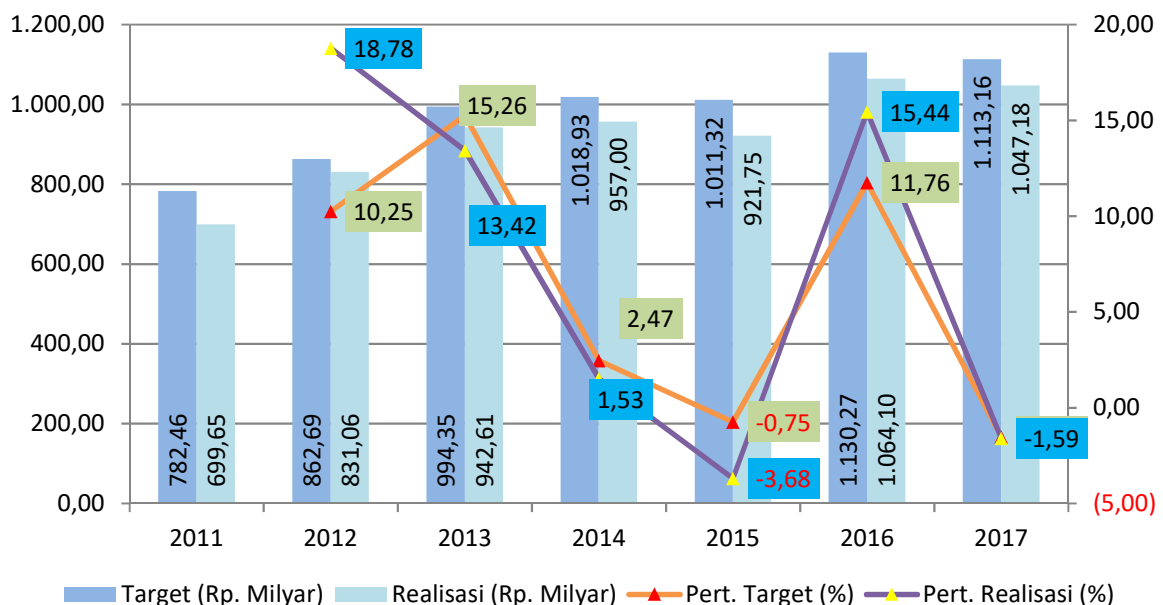
No	Uraian	Tahun							Growth (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A	Belanja Tidak Langsung								
1	Belanja Pegawai (gaji/TKD)	232.702.230.554,00	278.935.118.798,00	306.859.216.928,00	330.730.452.957,00	355.184.082.185,00	371.325.171.336,00	345.905.327.709,00	11,26
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	16.295.859.700,00	2.578.200.000,00	5.679.969.160,00	3.179.696.600,00	19.571.264.265,00	7.784.500.000,00	11.454.073.500,00	126,90
5	Belanja Bantuan Sosial	1.665.310.000,00	720.000.000,00	3.831.000.000,00	4.775.484.280,00	5.823.466.356,00	1.052.048.829,00	100.000,00	105,48
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	0	1.107.487.238,00	1.745.432.551,00	1.808.534.248,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol	27.442.285.038,00	27.642.502.912,00	29.363.295.174,00	36.061.569.813,00	56.708.210.348,00	82.687.473.589,00	132.503.600.870,00	21,76
8	Belanja tidak terduga	1.672.514.000,00	319.591.750,00	236.500.000,00	449.500.000,00	527.090.756,79	597.439.384,00	998.983.220,00	0,11
Jumlah Belanja tidak Langsung		279.778.199.292,00	310.195.413.460,00	345.969.981.262,00	375.196.703.650,00	438.921.601.148,79	465.192.065.689,00	492.670.619.547,00	265,51
B	Belanja Langsung								
1	Belanja Pegawai	27.289.357.550,00	37.288.645.192,00	44.848.303.225,00	45.876.669.596,00	48.362.579.619,75	51.426.919.750,00	62.729.831.020,00	16,16
2	Belanja Barang dan Jasa	115.700.779.526,11	148.263.429.210,00	187.545.931.936,00	197.139.294.257,00	160.262.910.298,78	181.708.104.844,00	216.575.852.253,00	10,26
3	Belanja Modal	276.884.060.678,00	317.321.280.235,00	364.242.085.465,00	338.785.317.219,00	276.970.329.998,43	365.777.793.530,00	275.108.586.171,00	1,04
Jumlah Belanja Langsung		419.874.197.754,11	502.873.354.637,00	596.636.320.626,00	581.801.281.072,00	485.595.819.916,96	598.912.818.124,00	554.414.269.444,00	27,46
Total		699.652.397.046,11	813.068.768.097,00	942.606.301.888,00	956.997.984.722,00	924.517.421.065,75	1.064.104.883.813,00	1.047.084.888.991,00	292,97

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari sajian tabel diatas tergambar bahwa pada belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2011 mencapai 83,17 persen dari total belanja tidak langsung. Lalu setiap tahunnya mengalami fluktuatif hingga tahun 2017 mencapai 70,21 persen dari total belanja tidak langsung.

Hal ini berbeda pada Belanja pegawai pada belanja langsung dimana belanja pegawai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini terlihat dimana belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 6,50 persen dari total belanja langsung pada tahun 2011. Kemudian terus berfluktuasi setiap tahunnya hingga mencapai 11,31 persen dari total belanja langsung pada tahun 2017. Sementara belanja barang dan jasa selama tahun 2011-2017 persentasenya terhadap total belanja langsung mengalami fluktuasi. Kondisi ini terlihat pada belanja barang dan jasa mendapat bagian sebesar 27,56 persen dari total belanja langsung pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 33,88 persen pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 33,00 persen kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 39,06 persen. Sedangkan belanja modal dinilai belum baik perkembangannya karena alokasi belanja modal mencapai 65,94 persen dari total belanja langsung tahun 2011. Lalu tahun 2017 menurun menjadi 49,62 persen dari total belanja langsung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

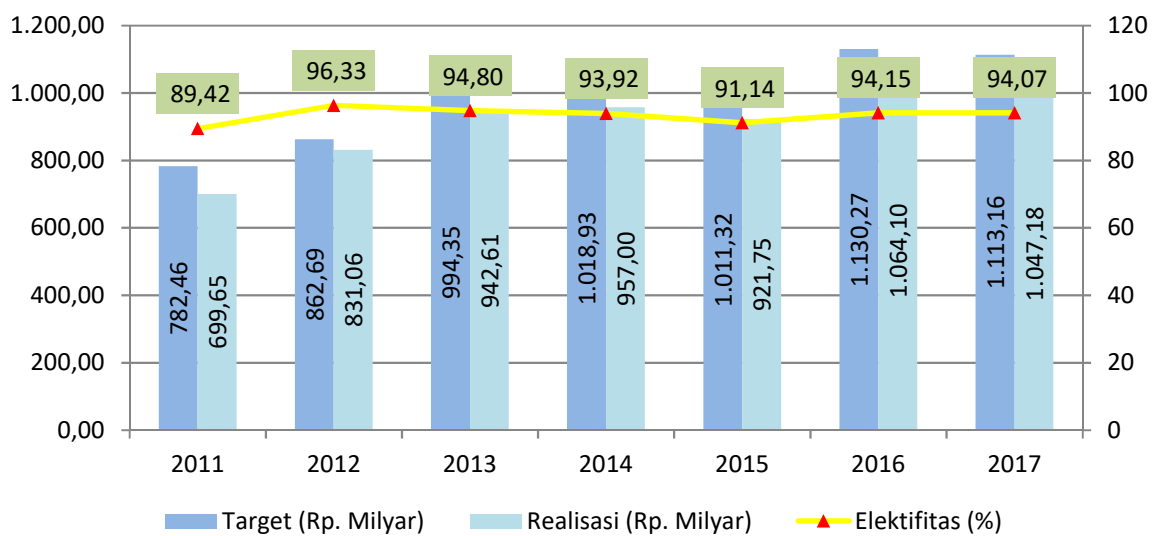
Gambar III.27.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada tahun 2011 - 2017, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp. 699.652.397.046,11, kemudian tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 1.047.184.788.980,00 atau meningkat 49,67 persen. Adapun capaian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara rata-rata meningkat 7,32 persen per tahun.

Gambar III.28.
 Nilai Efektivitas Belanja Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



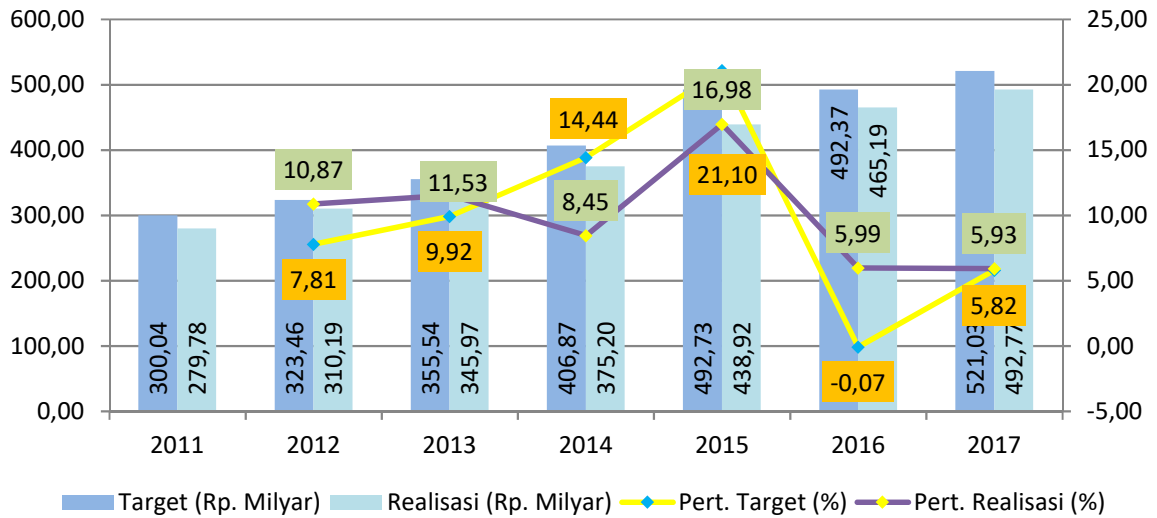
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Berdasarkan hasil dari target dan realisasi yang diperoleh mengenai Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 secara umum adalah efektif dengan rata-rata yang didapat sebesar 93,40 persen.

A. Belanja Tidak langsung

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2017 menetapkan target Belanja Tidak Langsung peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Adapun target pada tahun 2011 sebesar Rp. 300.042.754.590,00, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 521.032.253.696,24 atau meningkat 73,65 persen. Berdasarkan hal tersebut bahwa target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 9,84 persen per tahun.

Gambar III.29.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

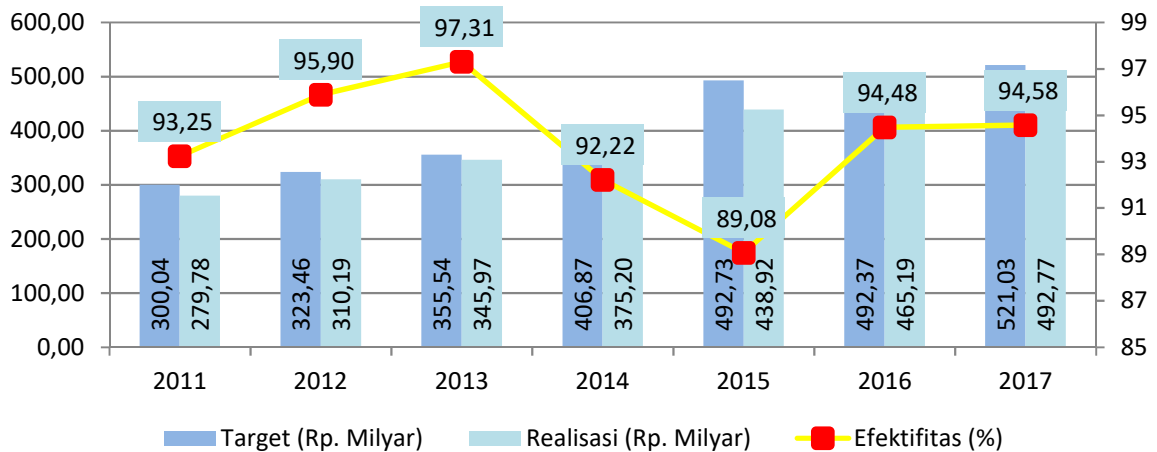


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Selanjutnya untuk realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun target Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 sebesar Rp. 279.778.199.292,00, selanjutnya tahun 2017 menjadi Rp. 492.770.519.536,00 atau sebesar 76,13 persen, dimana realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 9,96 persen per tahun.

Berdasarkan target dan realisasi dapat ditentukan tingkat efektivitas Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama periode 2011 - 2017 rata-rata efektivitas setiap tahunnya sebesar 93,83 persen.

Gambar III.30.
Nilai Efektivitas Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



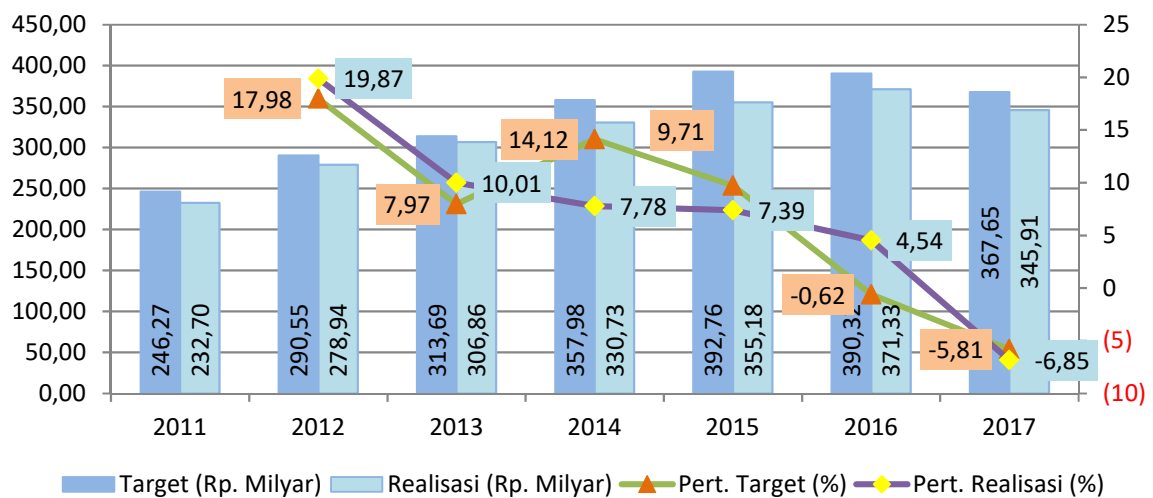
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

A.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pada tahun 2011-2017 Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya. Target Belanja Pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp. 246.273.038.590,00, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 367.654.563.438,04 atau naik 49,29 persen. Secara rata-rata target Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 7,22 persen per tahun.

Gambar III.31.
Perkembangan Belanja Pegawai Daerah Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017

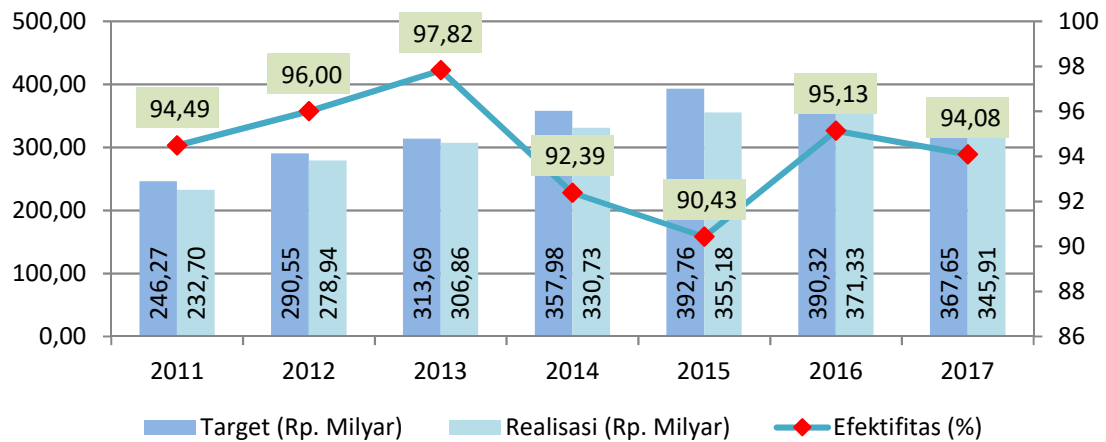


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada periode yang sama realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga naik setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 232.702.230.554,00 terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 345.905.327.709,00 atau naik 52,63 persen. Pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 7,13 persen per tahun. Rata-rata tingkat efektivitas Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011 - 2017 adalah 94,34 persen yaitu efektif.

Gambar III.32.

Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



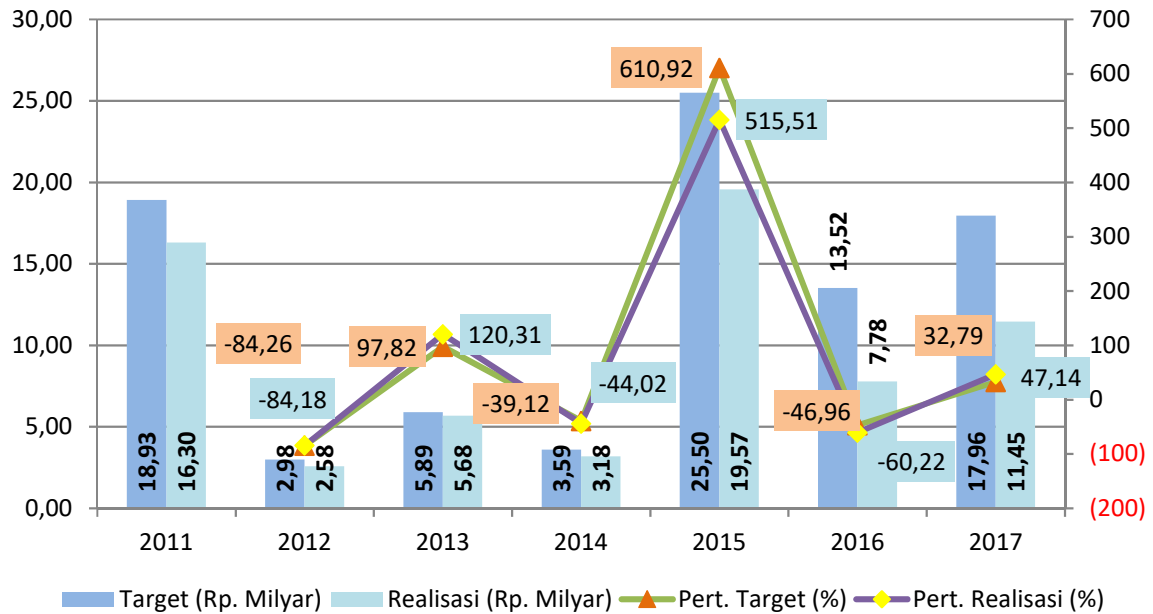
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

A.2. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Target Belanja Hibah periode tahun 2011 - 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur beragam setiap tahunnya, namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 18.925.574.000,00, sampai dengan tahun 2014 mencapai Rp. 3.586.532.100,00 atau menurun sebesar minus 81,05 persen kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sehingga menjadi Rp. 17.958.319.500,00 atau meningkat sebesar 400,72 persen. Maka rata-rata yang diperoleh untuk target Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 95,20 persen per tahun.

Selanjutnya pada periode yang sama, realisasi Belanja Hibah juga mengalami perbedaan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 16.295.859.700,00, kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 2.578.200.000,00. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi Rp. 5.679.969.160,00, pada tahun 2014 kembali menurun minus 44,02 persen atau menjadi Rp. 3.179.696.600,00. Tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 19.571.264.265,00 dan kembali turun menjadi sebesar Rp. 7.784.500.000,00 dan Rp. 11.454.073.500,00. Secara rata-rata realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 82,42 persen per tahun.

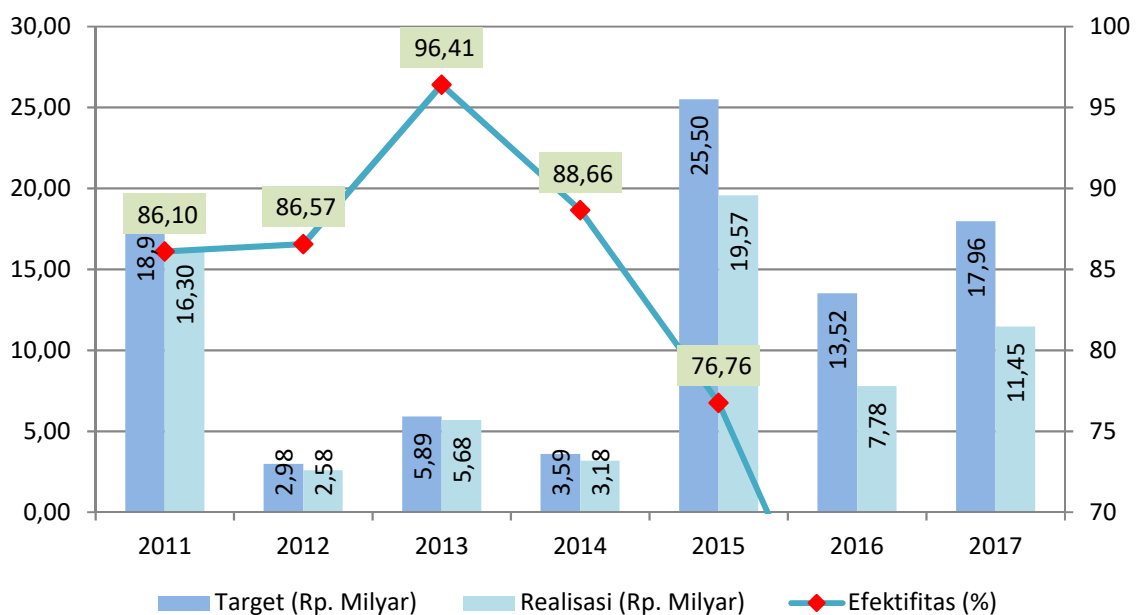
Gambar III.33.
Perkembangan Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Sementara itu, berdasarkan data target dan realisasi maka tingkat efektivitas Belanja Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan adalah cukup efektif setiap tahunnya yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dengan rata-rata 79,41 persen.

Gambar III.34.
Nilai Efektivitas Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



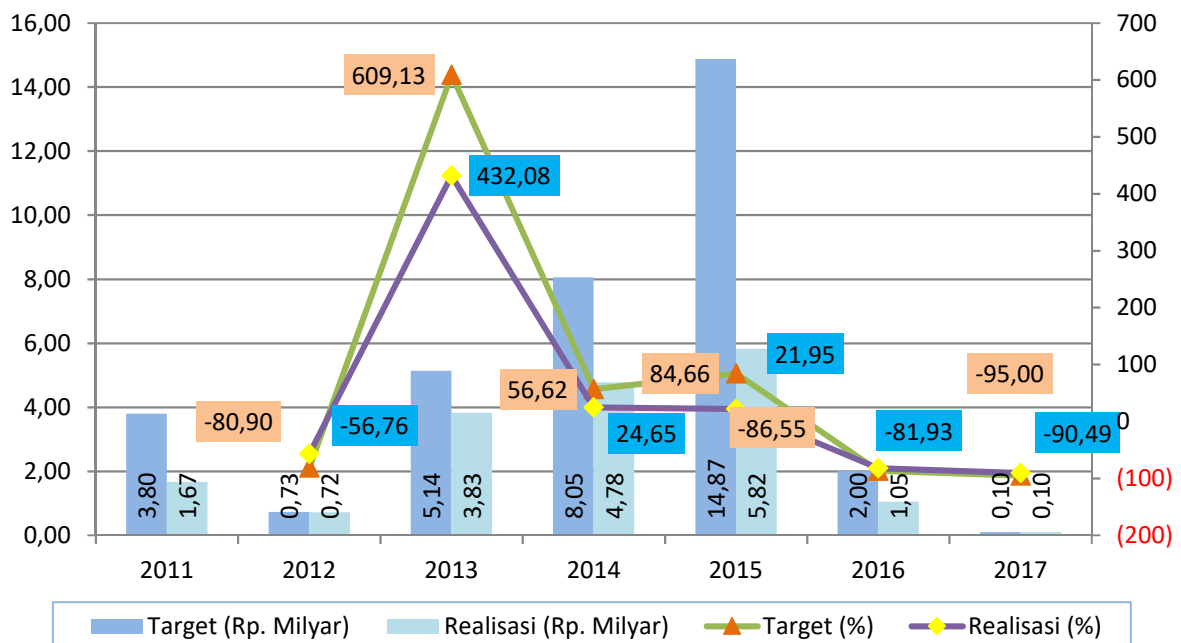
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

A.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2011 sampai dengan 2017 ditargetkan berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 target Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 100.000.000,00 menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 3.795.000.000. Secara rata-rata pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 81,33 persen per tahun.

Pada periode yang sama, realisasi belanja bantuan sosial daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga beru, realisasi Belanja Bantuan Sosial tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 5.823.466.356,00, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata- rata tumbuh sebesar 41,58 persen per tahun.

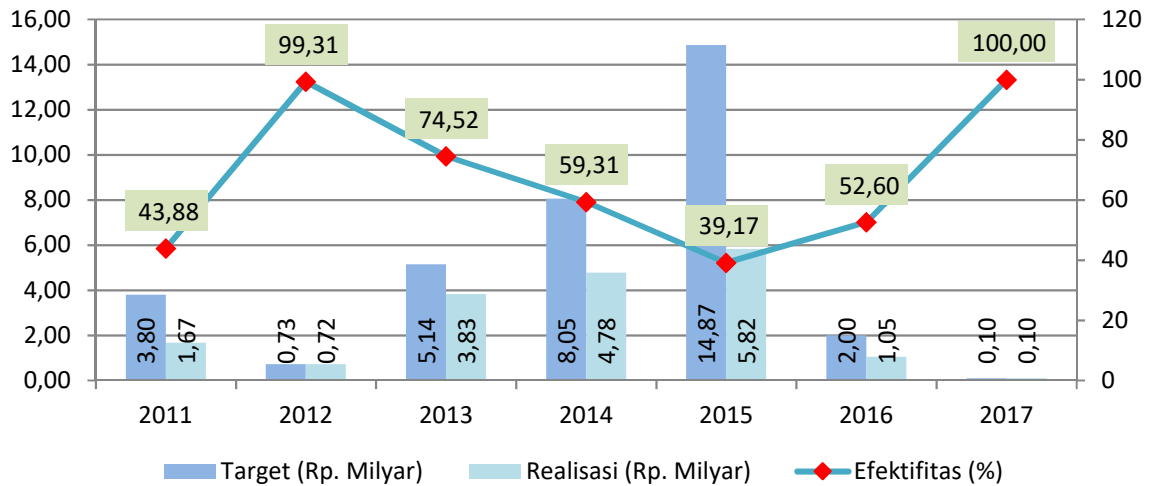
Gambar III.35.
Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tingkat efektivitas dari target dan realisasi secara umum adalah kurang efektif, dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 66,97 persen.

Gambar III.36.
 Nilai Efektivitas Belanja Bantuan Sosial Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

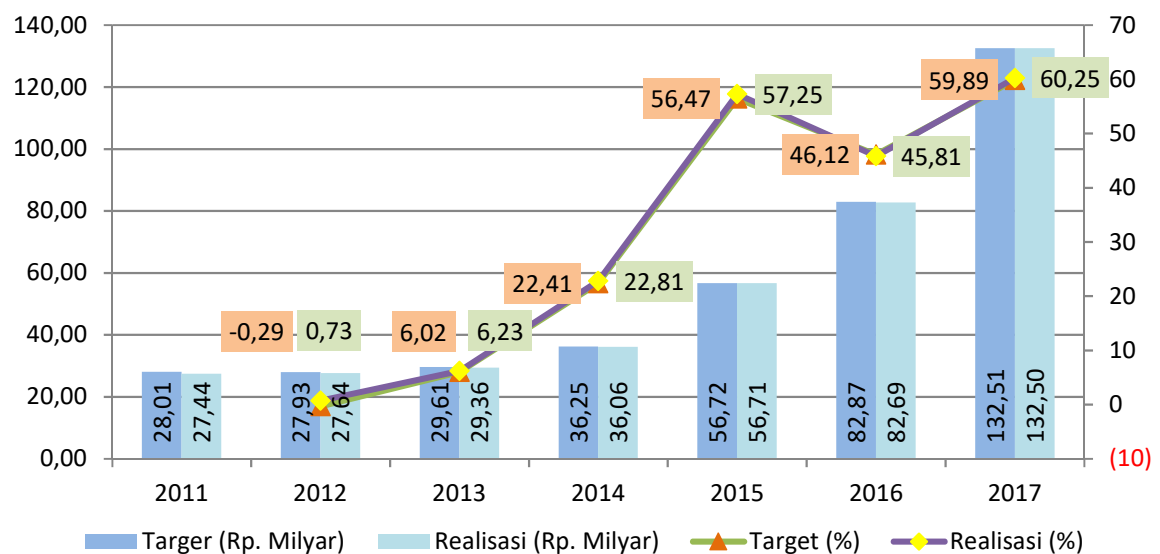


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

A.4. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2011 sampai dengan 2017 berfluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 target naik sebesar 373,03 persen dari tahun 2011. Secara rata-rata target Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 31,77 persen per tahun.

Gambar III.37.
 Perkembangan Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota
 dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

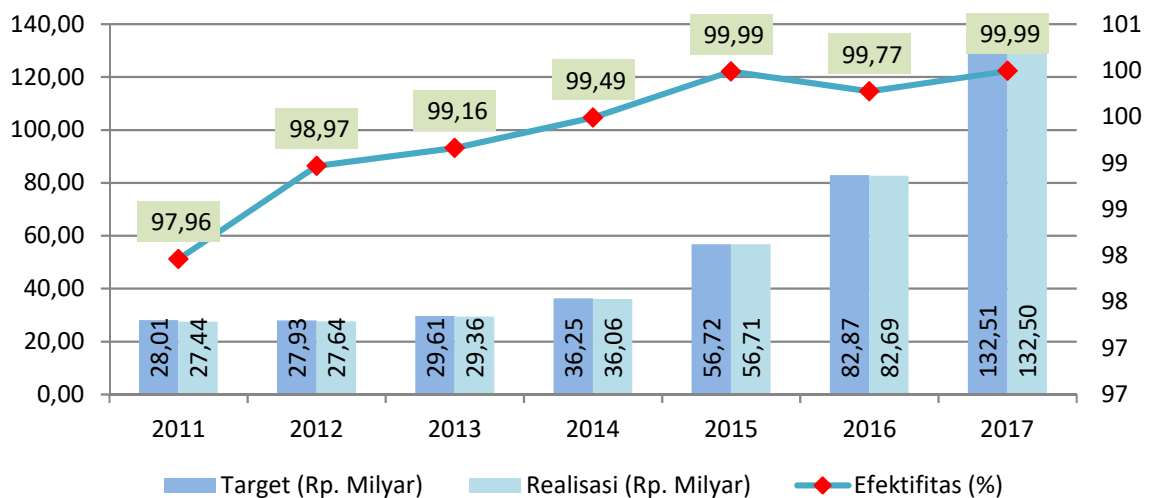


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Sedangkan realisasi target Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 meningkat mencapai Rp. 132.503.600.870,00 atau meningkat 382,84 persen dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp. 27.442.285.038,00. Kemudian secara rata-rata realisasi target Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 32,18 persen per tahun.

Gambar III.38.

Nilai efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

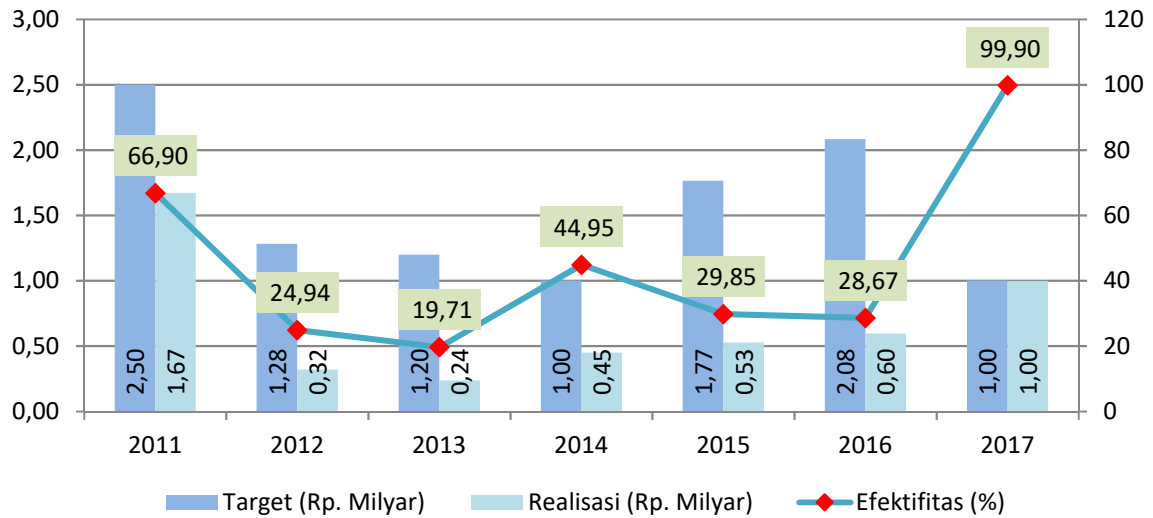
Tingkat efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011 - 2017 secara umum efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 99,33 persen.

A.5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan terus-menerus setiap tahunnya dengan titik alokasi terendah pada tahun 2014 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar minus 4,86 persen per tahun.

Gambar III.39.

Perkembangan Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



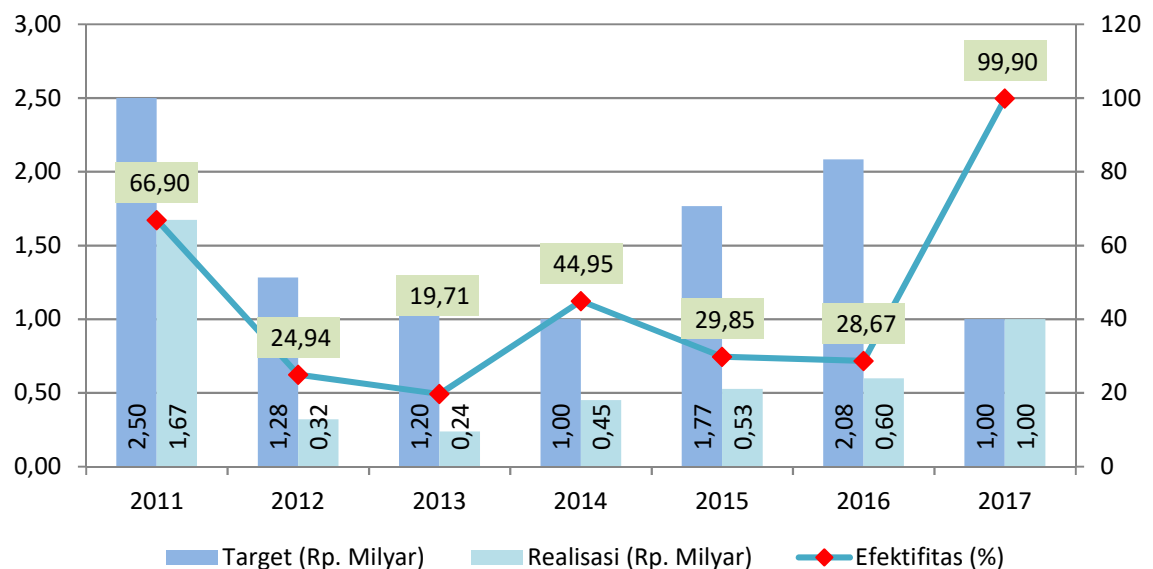
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar minus 40,27 persen dari tahun 2011 atau menjadi sebesar Rp. 998.983.220,00. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga per tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 13,50 persen.

Tingkat efektivitas Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2017 secara umum dengan rata-rata 44,99 persen.

Gambar III.40.

Nilai Efektivitas Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

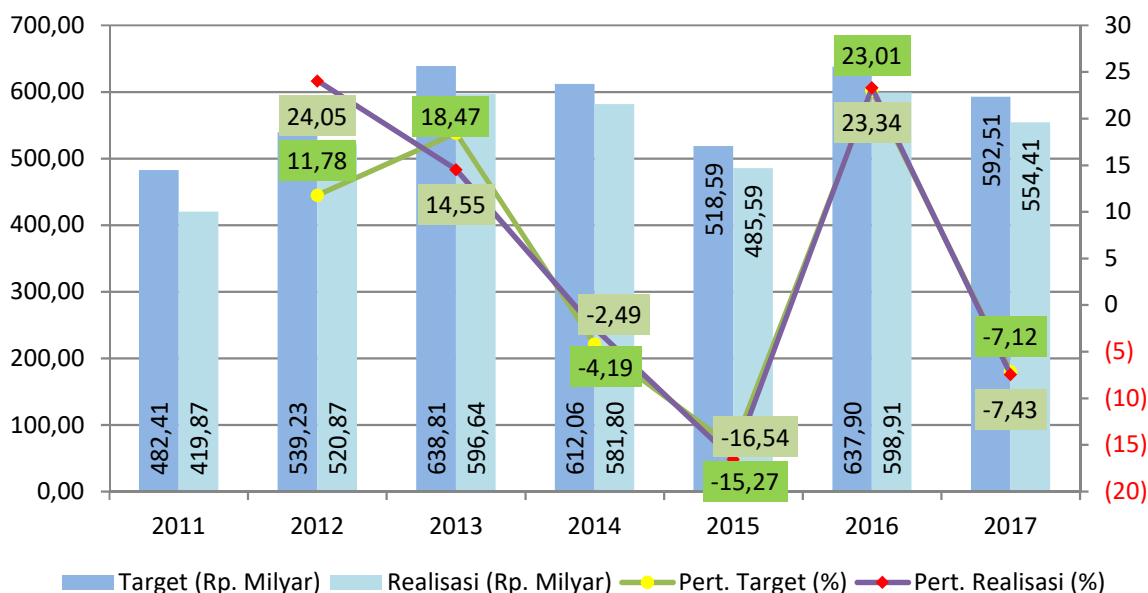


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target sebagai berikut pada tahun 2011 sebesar Rp. 482.414.422.690,00, kemudian Belanja Langsung targetnya meningkat terus setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 592.510.836.510,20. Secara rata-rata target Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 4,45 persen per tahun.

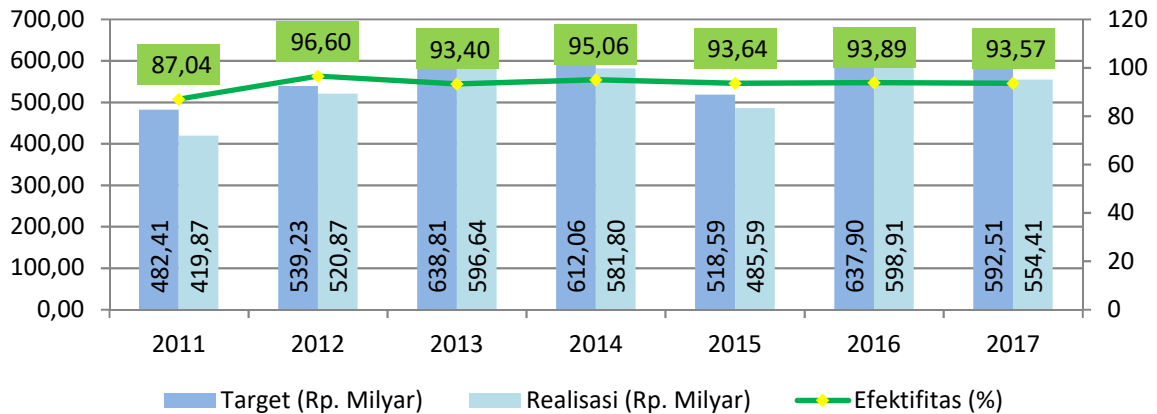
Gambar III.41.
Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 7 tahun terakhir berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 sebesar Rp. 419.874.197.754,11 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2013 menjadi Rp. 596.636.320.626,00. Kemudian ditahun 2014 mengalami penurunan sedikit (minus 2,49 persen) menjadi Rp. 581.801.281.072,00. Selanjutnya Tahun 2015 juga mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar minus 16,54. Tahun 2015 kembali meningkat sebesar 23,34 persen dari tahun 2015, akan tetapi tahun 2017 kembali turun dari tahun 2015 menjadi sebesar Rp.554.414.269.444,00 atau minus 7,43 persen. Berdasarkan data tersebut diperoleh rata-rata realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 5,91 persen per tahun.

Gambar III.42.
 Nilai Efektivitas Belanja Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2011 - 2017



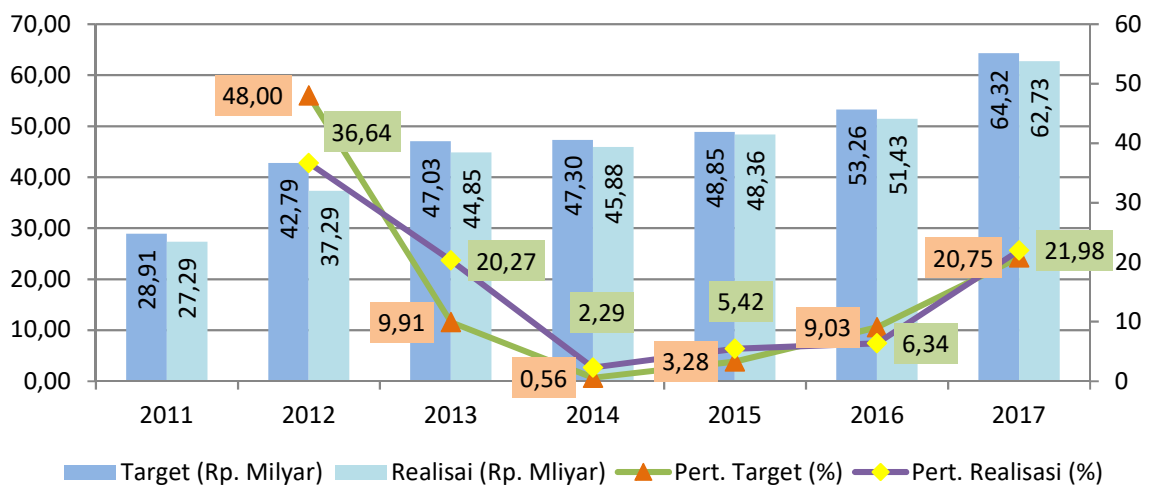
Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Selama periode tahun 2010 - 2017, berdasarkan target dan realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan dengan tingkat efektivitasnya. Secara umum nilai efektivitas Belanja Langsung rata-rata setiap tahun sebesar 93,31 persen.

B.1 Belanja Pegawai

Target Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Target pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 28.913.655.000,00, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi Rp. 64.318.953.464,71 atau meningkat sebesar 122,45 persen, dengan rata-rata tumbuh sebesar 15,26 persen per tahun.

Gambar III.43.
 Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017

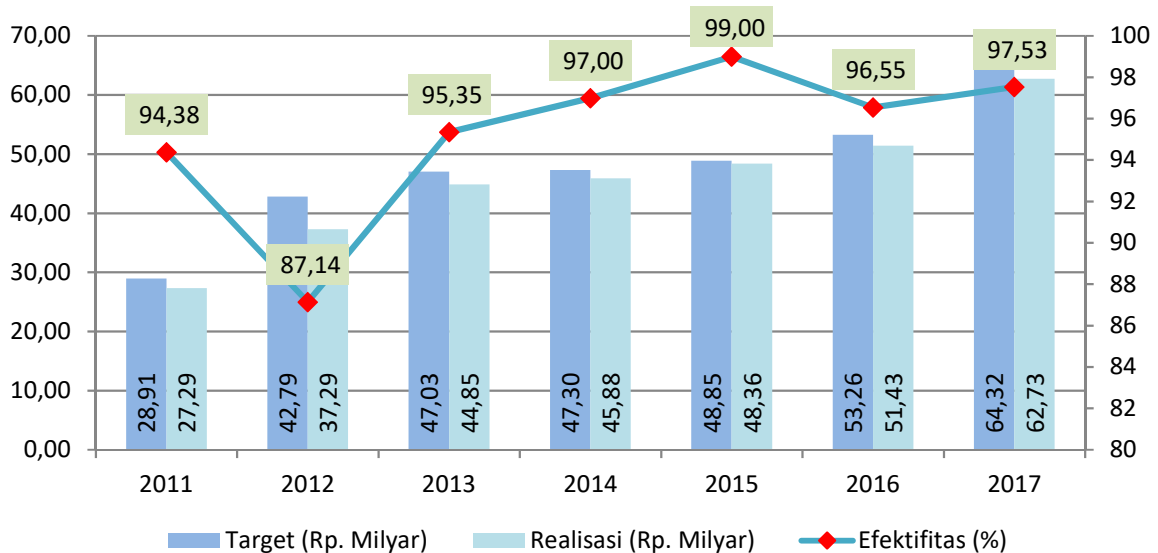


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 - 2017 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi Belanja Pegawai meningkat menjadi sebesar Rp. 62.729.831.020,00 dari tahun 2011 sebesar Rp. 27.289.357.550,00 atau meningkat sebesar 129,87 persen. Secara rata-rata realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 15,49 persen per tahun.

Tingkat efektivitas Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun terakhir (2011 - 2017) secara umum cukup efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 95,28 persen dari target dan realisasi Belanja Pegawai yang telah ditetapkan.

Gambar III.44.
Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017

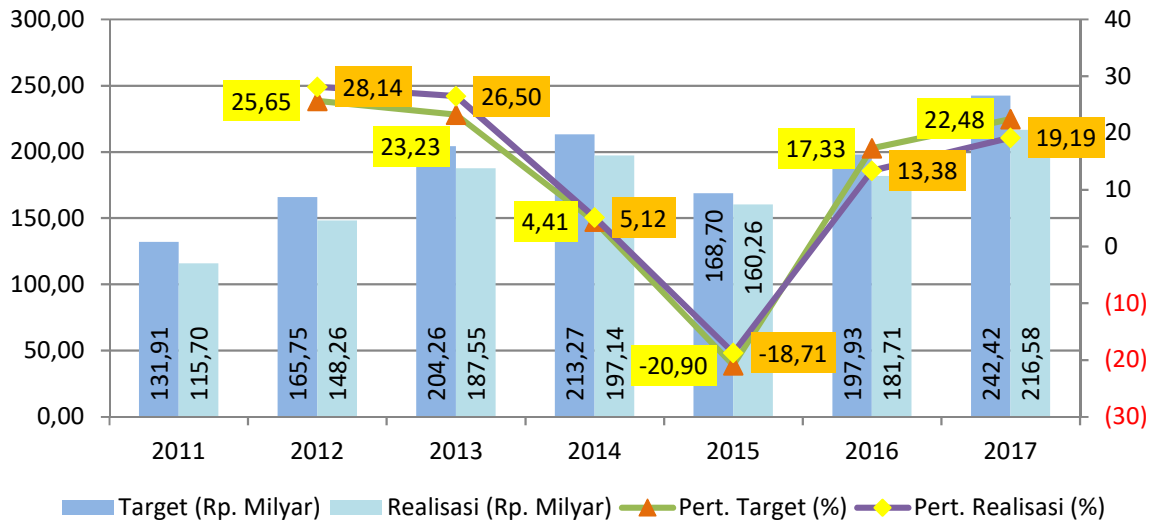


Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

B.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Target belanja Barang dan Jasa tahun 2014 meningkat sebesar 61,68 dari tahun 2011 atau sebesar Rp. 213.268.970.536,10. Tahun 2015 target Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar minus 20,90 persen kemudian naik kembali pada tahun 2016 dan 2017 sehingga terakhir menjadi sebesar Rp. 242.419.516.873,27 atau meningkat sebesar 83,78 persen dari tahun 2011. Rata-rata Pertumbuhan Target Belanja Barang dan Jasa per tahun sebesar 12,03 persen.

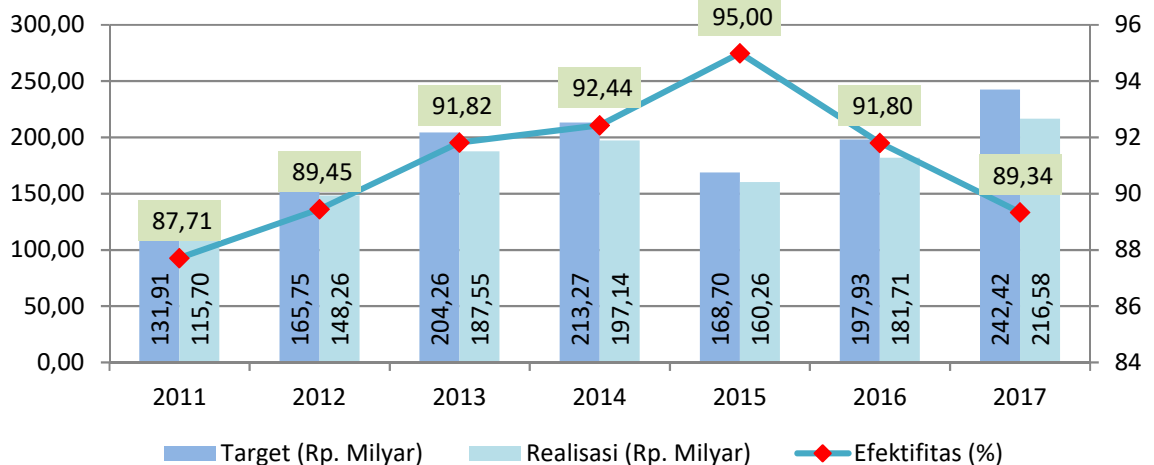
Gambar III.45.
Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Selanjutnya, realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 115.700.779.526,11 dan terus meningkat sampai tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 197.139.294.257,00 atau naik 70,39 persen. Tahun 2015 Realisasi Belanja Barang dan jasa turun menjadi minus 18,71 persen kemudian naik kembali pada tahun 2016 dan 2017 sehingga terakhir menjadi sebesar Rp. 216.575.852.253,00 atau meningkat sebesar 87,19 persen dari tahun 2011. Rata-rata realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 12,27 persen per tahun.

Gambar III.46.
Nilai Efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

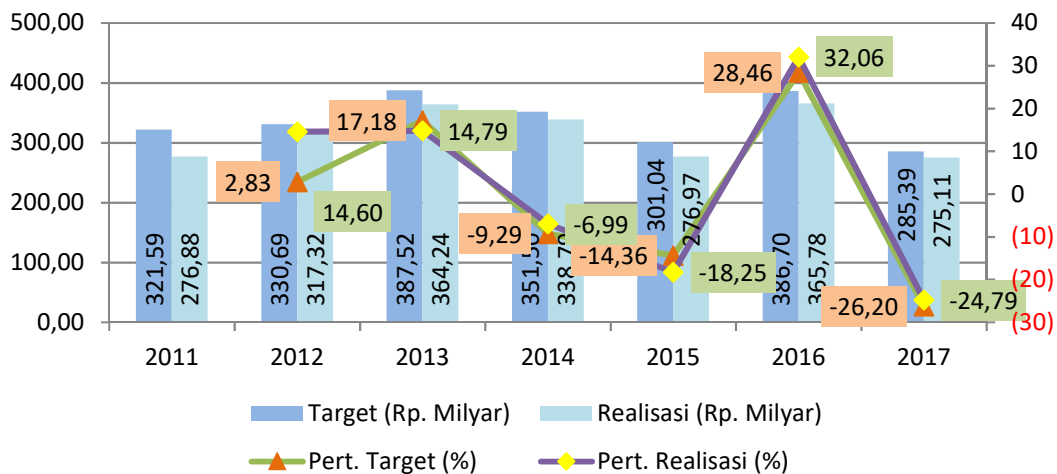
Tingkat efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun terakhir (2011 - 2017) secara umum efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 91,08 persen dari target dan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.

B.3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selama tahun 2011 - 2013 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan. Target Belanja Modal pada tahun 2011 sebesar Rp. 321.591.595.275,00, terus meningkat sampai dengan tahun 2013 cukup signifikan menjadi Rp. 387.516.709.049,40. Selanjutnya untuk target Belanja Modal tahun 2014 terjadi penurunan menjadi Rp. 351.498.229.360,05 atau menurun minus 9,29 persen. Tahun 2015 target Belanja Modal kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 301.040.395.723,00 atau minus 14,36 persen. Tahun 2016 kembali meningkat sebesar 28,46 persen atau Rp. 386.704.735.315,60, akan tetapi kembali turun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 285.391.911.223,79 atau sebesar minus 26,20 persen Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rata-rata Pertumbuhan target Belanja Modal turun sebesar minus 0,23 persen per tahun.

Gambar III.47.

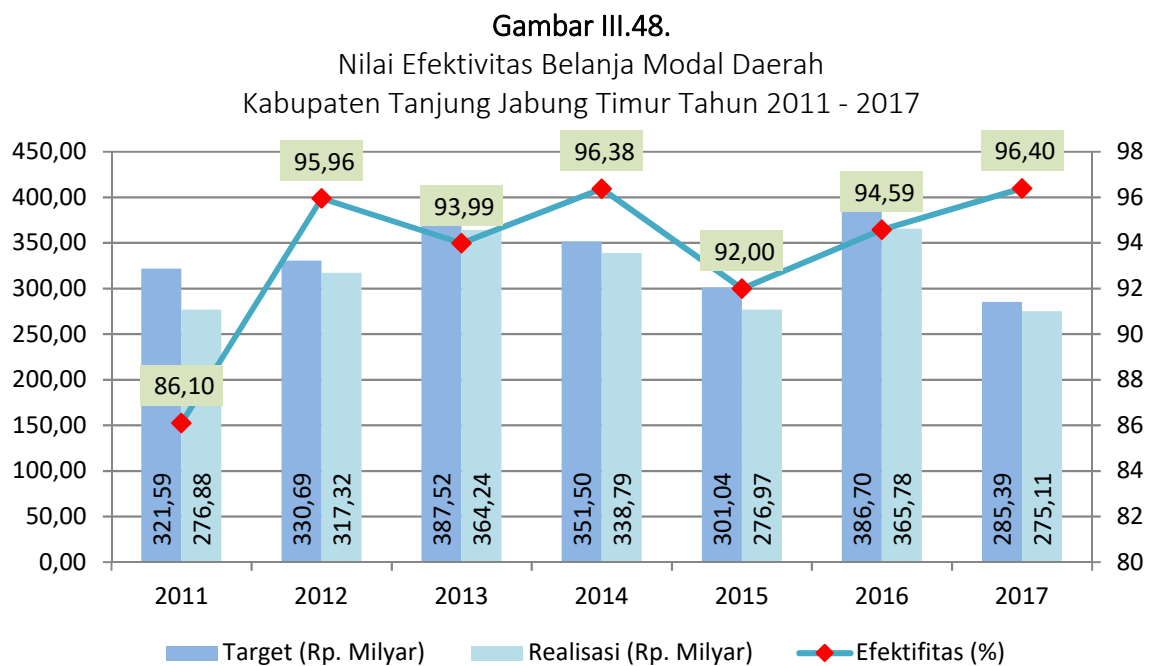
Perkembangan Belanja Modal Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2017



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode yang sama realisasinya berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 mengalami penurunan berturut-turut sebesar minus 14,36 persen, 18,25 persen dan 24,79 persen. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara rata-rata sebesar 1,91 persen per tahun.

Tingkat efektivitas Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011 - 2017 secara umum efektif dengan rata-rata 96,40 persen.



Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

3.1.2. Neraca Daerah

3.1.2.1. Analisis Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah merupakan neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan deskripsi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan deskripsi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Paparan neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2010 - 2017 disajikan seperti berikut ini.

Tabel III.5.
Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
1	ASET	5.1.1									
2	ASET LANCAR	1									
3	<i>Kas Di Kas Daerah</i>	A	171.969.080.506,30	138.354.849.119,20	122.557.455.991,14	89.329.358.104,72	66.012.802.645,87	29.574.112.863,08	34.774.707.353,87	63.732.542.101,70	(5,50)
4	<i>Kas Di Bendahara Pengeluaran</i>	B	215.631.810,00	404.135.798,00	17.476.014,00	48.072.878,00	21.056.250,00	10.300.000,00	49.297.577,00	63.397.724,00	66,68
5	<i>Kas Lainnya dibendahara Pengeluaran</i>	c	7.348.085,00	3.181.534,00	175.108.741,27	969.533.055,00	57.785.589,00	28.913.889,76	35.355.140,94	0,00	797,02
6	<i>Kas Di Bendahara Penerimaan</i>	d	1.235.500,00	21.713.462,00	272.506.324,23	83.896.654,31	810.157.674,04	64.294.169,08	8.289.187,14	352.808.000,00	1.083,71
7	<i>Piutang Pajak</i>	e	-	-	119.914.385,00	42.873.301,00	227.382.193,00	2.462.557.435,00	2.138.698.797,31	1.960.362.710,31	265,53
8	<i>Piutang Retribusi</i>	f	248.267.953,72	305.218.544,32	895.952.690,36	1.013.421.148,00	1.216.260.183,00	669.407.965,00	1.415.422.788,00	339.620.188,00	34,30
9	<i>Piutang Lainnya</i>	g	3.984.159.959,00	6.517.877.711,00	7.379.378.387,89	9.741.353.161,43	7.903.041.177,00	1.104.029.999,00	1.102.029.999,00	7.425.354.880,15	82,50
	<i>Penyisihan Piutang</i>	h				-	-718.530.628,10	-1.168.504.040,08	-1.308.512.766,30	-1.818.965.077,88	37,87
10	<i>Persediaan</i>	i	4.321.700.476,00	4.548.132.750,92	5.562.373.452,00	6.842.111.286,00	9.215.743.693,00	5.766.862.645,33	6.824.418.994,45	6.245.496.327,04	8,24
11	JUMLAH ASET LANCAR		180.747.424.290,02	150.155.108.919,44	136.980.165.985,89	108.070.619.588,46	84.745.698.776,81	38.511.974.926,17	45.039.707.071,41	78.300.616.853,32	(4,59)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	2									
13	Investasi Non Permanen	a									
14	Investasi non Permanen Lainnya	b	450.000.000,00	11.295.234.217,39	24.982.961.201,36	29.726.452.611,00	25.153.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	348,34
15	Jumlah Investasi Non Permanen		450.000.000,00	11.295.234.217,39	24.982.961.201,36	29.726.452.611,00	25.153.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	348,34
16	Investasi Permanen	b									

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1	10.133.000.000,00	15.133.000.000,00	20.133.000.000,00	30.890.130.513,41	34.491.011.312,41	36.514.357.000,00	38.514.357.000,00	40.014.357.000,00	23,24
18	Jumlah Investasi Permanen		10.133.000.000,00	15.133.000.000,00	20.133.000.000,00	30.890.130.513,41	34.491.011.312,41	36.514.357.000,00	38.514.357.000,00	40.014.357.000,00	23,24
19	JUMLAH INVETASI JANGKA PANJANG		10.583.000.000,00	26.428.234.217,39	45.115.961.201,36	60.616.583.124,41	59.644.011.312,41	37.414.357.000,00	39.414.357.000,00	40.914.357.000,00	32,15
20	ASET TETAP	3									
21	Tanah	1	13.959.743.881,00	15.562.283.781,00	15.324.077.556,50	16.137.193.624,50	17.820.681.224,50	20.170.103.944,50	20.037.904.062,28	21.001.721.038,28	6,15
22	Peralatan dan mesin	2	-	-	-	259.790.566.217,86	269.125.135.573,86	261.340.473.217,04	262.730.563.280,39	299.605.445.854,39	3,82
23	Gedung dan Bangunan	3	-	-	-	446.550.485.745,00	499.441.370.792,14	508.700.025.995,00	499.381.838.320,28	530.753.805.463,33	4,54
24	Jalan, irigasi dan Jaringan	4	-	-	-	1.653.129.352.006,35	1.911.136.516.264,97	2.109.978.927.561,40	2.432.667.057.163,58	2.495.124.701.617,42	10,97
25	Aset tetap lainnya	5	-	-	-	39.189.554.303,67	40.442.726.345,67	26.495.371.130,08	11.765.623.979,00	15.770.600.850,00	(13,21)
26	Kontruksi dalam pengerjaan	6	-	-	-	11.368.188.379,00	9.283.709.385,86	10.268.173.237,77	17.382.814.843,07	14.327.571.537,78	11,00
27	Akumulasi Penyusutan	7				-	-1.017.577.427.142,11	-1.310.818.699.868,29	-1.552.114.065.533,76	-1.840.491.303.154,49	21,94
28	JUMLAH ASET TETAP		13.959.743.881,00	15.562.283.781,00	15.324.077.556,50	2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	1.626.134.375.217,50	1.691.851.736.114,84	1.536.092.543.206,71	2.243,21
29	Peralatan dan Mesin	b									
30	Alat-alat Berat	1	6.879.867.842,00	14.662.725.842,00	23.271.113.142,00	-	-	-			85,92
31	Alat-alat Angkutan	2	32.612.646.712,00	44.641.982.712,00	50.277.139.851,00	-	-	-			24,75
32	Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur	3	1.443.720.448,00	1.559.525.448,00	1.543.553.550,00	-	-	-			3,50
33	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4	11.507.626.910,00	12.560.378.010,00	8.471.667.674,00	-	-	-			(11,70)
34	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5	88.283.718.329,84	102.753.760.342,84	108.090.656.417,93	-	-	-			10,79
35	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6	4.834.919.021,01	6.164.670.983,01	6.262.684.983,01	-	-	-			14,55
36	Alat-alat Kedokteran	7	31.811.076.184,05	33.658.565.329,05	32.541.074.909,05	-	-	-			1,24

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
37	Alat-alat Laboratorium	8	9.788.764.155,87	15.121.248.642,87	14.984.198.778,87	-	-	-			26,78
38	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	9	474.155.200,00	477.353.200,00	856.003.200,00	-	-	-			40,00
39	Jumlah Peralatan dan Mesin		187.636.494.802,77	231.600.210.509,77	246.298.092.505,86	-	-	-			14,89
40	Gedung dan Bangunan	c									
41	Bangunan Gedung	1	319.812.227.559,00	346.833.669.288,00	396.001.064.605,00						(25,79)
42	Monumen	2	1.339.836.000,00	1.435.771.000,00	1.895.295.600,00						(20,28)
43	Jumlah Gedung dan Bangunan		321.152.063.559,00	348.269.440.288,00	397.896.360.205,00	-	-	-			11,35
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	d									
45	Jalan dan Jembatan	1	623.160.477.564,00	753.688.634.053,00	1.094.699.073.794,00	-	-	-			33,10
46	Bangunan Air (Irigasi)	2	120.253.741.611,00	152.603.185.386,00	200.881.563.366,00	-	-	-			29,27
47	Instalasi Listrik dan Telepon	3	21.754.036.476,60	28.062.685.224,60	29.555.714.749,60	-	-	-			17,16
48	Jaringan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4	40.271.352.454,75	40.499.881.454,75	46.923.499.454,75	-	-	-			8,21
49	Jaringan Komputer E- Government	5	4.997.602.114,00	4.997.602.114,00	5.126.489.114,00	-	-	-			1,29
50	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan		810.437.210.220,35	979.851.988.232,35	1.377.186.340.478,35	-	-	-			30,73
51	Aset Tetap Lainnya	e									
52	Buku/Kepustakaan	1	24.563.964.597,06	27.588.113.353,06	27.973.281.948,06	-	-	-			6,85
53	Barang Brercorak Kesenian dan Kebudayaan	2	1.703.507.305,61	1.947.482.305,61	2.027.182.005,61	-	-	-			9,21
54	Hewan/Ternak dan Tanaman	3	8.758.855.175,00	8.768.793.675,00	8.266.803.675,00	-	-	-			(2,81)
55	Jumlah Aset Tetap Lainnya (47 s/d 49)		35.026.327.077,67	38.304.389.333,67	38.267.267.628,67	-	-	-			4,63

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	f									
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	147.276.830.078,00	177.428.123.074,00	6.814.972.510,00	-	-	-			(37,84)
58	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		147.276.830.078,00	177.428.123.074,00	6.814.972.510,00	-	-	-			(37,84)
59	JUMLAH ASET TETAP		1.515.488.669.618,79	1.791.016.435.218,79	2.081.787.110.884,38	2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	1.626.134.375.217,50	1.691.851.736.114,84	1.536.092.543.206,71	3,38
60	ASET LAINNYA	4									
61	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	a	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Kemitraan dengan pihak ketiga					7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	-
63	Aset Tak Berwujud	b	-	-	-	1.246.900.000,00	1.585.310.000,00	1.610.310.000,00	1.803.910.000,00	2.229.346.000,00	16,08
64	Aset Lain - lain	c	12.718.125.592,00	8.445.121.750,00	21.153.530.006,00	12.921.605.736,00	5.769.174.900,00	39.633.226.301,00	158.823.450.408,28	153.893.685.755,12	129,60
	Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-	-1.151.945.900,00	-1.234.456.400,00	-1.427.218.800,00	11,39
65	JUMLAH ASET LAINNYA		12.718.125.592,00	8.445.121.750,00	21.153.530.006,00	21.248.505.736,00	14.434.484.900,00	47.171.590.401,00	166.472.904.008,28	161.775.812.955,12	80,31
66	JUMLAH ASET		1.719.537.219.500,81	1.976.044.900.105,62	2.285.036.768.077,63	2.616.101.048.725,25	1.888.496.907.434,11	1.749.232.297.544,67	1.942.778.704.194,53	1.817.083.330.015,15	3,49
67	KEWAJIBAN	5.1.2									
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1									
69	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	a	8.878.585,00	3.181.534,00	-	41.120.395,00	42.424.309,00	113.711.529,61	81.633.826,00	0,00	(4,23)
70	Utang Bunga	b	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan diterima dimuka		-	-	-	-	-	1.624.121.600,33	281.760.064,00	187.007.113,00	(58,14)
	Utang Belanja		-	-	-	-	-	8.241.524.142,00	5.679.416.013,00	1.942.384.032,00	(48,44)

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	c	-	-	174.217.141,27	921.745.000,00			-	-	164,54
72	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.878.585,00	3.181.534,00	174.217.141,27	962.865.395,00	42.424.309,00	9.979.357.271,94	6.042.809.903,00	2.129.391.145,00	4.141,05
73	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2									
74	Kewajiban Jangka Panjang	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	JUMLAH KEWAJIBAN		8.878.585,00	3.181.534,00	174.217.141,27	962.865.395,00	42.424.309,00	9.979.357.271,94	6.042.809.903,00	2.129.391.145,00	4.141,05
77	EKUITAS DANA	5.1.3									
78	EKUITAS DANA LANCAR	1									
79	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	a	172.183.181.816,30	138.758.984.917,20	122.574.932.005,14	89.377.430.982,72	66.033.858.895,87	-			(21,07)
80	Pendapatan yang ditangguhkan	b	1.235.500,00	21.713.462,00	273.397.924,23	90.564.314,31	825.518.954,04	-			890,31
81	Cadangan Piutang	c	4.232.427.912,72	6.823.096.255,32	8.395.245.463,25	10.797.647.610,43	8.628.152.924,90	-			23,19
82	Cadangan Persediaan	d	4.321.700.476,00	4.548.132.750,92	5.562.373.452,00	6.842.111.286,00	9.215.743.693,00	-			21,31
83	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	e	-	-	-			-			
84	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		180.738.545.705,02	150.151.927.385,44	136.805.948.844,62	107.107.754.193,46	84.703.274.467,81	-			(17,11)
85	EKUITAS DANA INVESTASI	2									

NO	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2010 (Rp)	31 DESEMBER 2011 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	GROWTH (%)
86	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	a	10.583.000.000,00	26.428.234.217,39	45.115.961.201,36	60.616.583.124,41	59.644.011.312,41	-			63,30
87	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	b	1.515.488.669.618,79	1.791.016.435.218,79	2.081.787.110.884,38	2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	-			5,56
88	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	c	12.718.125.592,00	8.445.121.750,00	21.153.530.006,00	21.248.505.736,00	14.434.484.900,00	-			21,32
89	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	d	-	-	-			-			
90	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		1.538.789.795.210,79	1.825.889.791.186,18	2.148.056.602.091,74	2.508.030.429.136,79	1.803.751.208.657,30	-			6,24
91	EKUITAS DANA CADANGAN	3									
92	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	a	-	-	-						
93	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	-	-	-	-	-			
	Ekuitas Dana		1.719.528.340.915,81	1.976.041.718.571,62	2.284.862.550.936,36	2.615.138.183.330,25	1.888.454.483.125,11	1.778.337.999.806,08	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	2,14
94	JUMLAH EKUITAS DANA		1.719.528.340.915,81	1.976.041.718.571,62	2.284.862.550.936,36	2.615.138.183.330,25	1.888.454.483.125,11	1.778.337.999.806,08	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	2,14
95	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.719.537.219.500,81	1.976.044.900.105,62	2.285.036.768.077,63	2.616.101.048.725,25	1.888.496.907.434,11	1.788.317.357.078,02	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	2,13

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

3.1.2.2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2010 - 2017 dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Keempat rasio keuangan tersebut adalah.

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Quick (*Quick Ratio*) merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek.
- c. Rasio Hutang terhadap Asset merupakan rasio kewajiban terhadap asset.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal merupakan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana.

Hasil perhitungan keempat rasio keuangan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.6.
Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017

No	Uraian	Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Lancar	20.358	47.196	786	112	1.998	4	7	37
2	Rasio Quick	19.871	45.766	754	105	1.780	3	6	34
3	Rasio Hutang terhadap Asset	0	0	0,0001	0,0004	0	0,0057	0,0031	0,0012
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0	0	0	0,0003	0	0	0,0031	0,0012

Sajian keempat rasio keuangan diatas dapat pula dianalisis sebagai berikut :

a. Rasio Lancar

Rasio lancar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 tahun menunjukkan trend yang berfluktuasi dimana tahun 2010 rasio lancar sebesar 20.358 kemudian menurun menjadi 47.196 untuk tahun 2011 dan 786 untuk tahun 2012 selanjutnya mengalami penurunan kembali sebesar 112 tahun 2013, di tahun 2014 naik menjadi 1.998, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4, akan tetapi kembali

naik pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 7 dan 37. Ini dapat diartinya kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan asset lancar masih berfluktuasi.

b. Rasio Quick

Rasio Quick pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menunjukkan trend yang sama dengan rasio lancar yaitu cenderung berfluktuasi tetapi masih rendah dan aman dimana rasio quick masih diatas 2,5. Artinya, kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memenuhi kewajiban jangka pendek minus persediaan dengan jaminan asset lancar masih amat baik.

c. Rasio Hutang Terhadap Asset

Rasio hutang terhadap asset pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode yang sama mendekati nol. Berarti, hutang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif amat kecil dibandingkan jumlah asset yang dimilikinya.

d. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mendekati nol. Artinya adalah jumlah hutang yang dimiliki amat kecil dibanding jumlah modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan tetapi harus pula dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja. Ini berarti kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang terlihat dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dari segi proporsi penggunaan anggaran maka proporsi belanja langsung cenderung naik dan turun. Pada tahun 2011, belanja langsung mendapat proporsi sebesar 60,01 persen kemudian naik menjadi 61,85 persen pada tahun 2012. Naik lagi di tahun 2013 menjadi 63,30 persen dan sedikit turun proporsinya sehingga menjadi 60,79 persen pada tahun 2014. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 proporsinya kembali turun hingga masing-masing berurutan menjadi 51,28 persen, 53,19 persen dan 54,99 persen.

Proporsi penggunaan belanja langsung oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan dimana yang diinginkan adalah proporsi belanja langsung diatas 60%. Akan tetapi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kembali dibawah 60 persen atau dibawah standar.

Sedangkan belanja tidak langsung, proporsinya juga telah menunjukkan proporsi yang ideal terutama tahun 2011-2014 dimana belanja tidak langsung mendapat proporsi dibawah 40 persen. Kecuali tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kembali diatas 40 persen proporsi belanja tidak langsungnya.

Deskripsi proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung atas penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 2011-2017 dimuat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.7.
Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017

Uraian	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A Belanja Tidak Langsung							
- Belanja Pegawai	83,17%	89,92%	88,70%	88,15%	81,17%	70,56%	69,70%
- Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Belanja Hibah	5,82%	0,83%	1,64%	0,85%	4,40%	3,45%	4,56%
- Belanja Bantuan Sosial	0,60%	0,23%	1,11%	1,27%	1,31%	0,02%	0,02%
- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,35%	0,36%
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	9,81%	8,91%	8,49%	9,61%	12,75%	25,43%	25,08%
- Belanja Tidak Terduga	0,60%	0,10%	0,07%	0,12%	0,12%	0,19%	0,28%
Total Belanja Tidak Langsung	39,99%	38,15%	36,70%	39,21%	48,72%	46,81%	45,01%
B Belanja Langsung							
- Belanja Pegawai	6,50%	7,42%	7,52%	7,89%	10,11%	10,86%	9,95%
- Belanja Barang dan Jasa	27,56%	29,48%	31,43%	33,88%	31,32%	40,94%	34,70%
- Belanja Modal	65,94%	63,10%	61,05%	58,23%	58,57%	48,20%	55,35%
Total Belanja Langsung	60,01%	61,85%	63,30%	60,79%	51,28%	53,19%	54,99%
C Total Belanja (A+B)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Untuk sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Mengacu kepada konsep pembiayaan tersebut maka analisis pembiayaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011 - 2017 dapat dilakukan. Hasil perhitungan komponen pembiayaan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.8.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2017 (Dalam Jutaan)

No	Deskripsi Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Penerimaan							
1.1	SILPA tahun lalu	172.183,20	138.758,98	122.574,93	89.377,43	61.454,16	61.665,84	86.832,29
1.2	Piutang Daerah	0	0	0	7.392,10	0	0	0
	Total Penerimaan Pembiayaan	172.183,20	138.758,98	122.574,93	96.769,53	61.454,16	61.665,84	86.832,29
II	Pengeluaran							
2.1	Penyertaan Modal Investasi Daerah	16.900,00	5.000,00	11.250,00	4.000,00	0	2.000,00	1.500,00
2.2	Badan Usaha Kelompok/ Anggota Masyarakat	0	7.900,00	0	0	0	0	0
	Total Pengeluaran Pembiayaan	16.900,00	12.900,00	11.250,00	4.000,00	0	2.000,00	1.500,00
	Pembiayaan Netto	155.283,20	125.858,98	111.324,93	92.769,53	61.454,16	59.165,84	85.332,29

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama 7 tahun tersebut pembiayaan netto pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah positif atau surplus. Namun SILPA setiap tahun terus mengalami penurunan. Penurunan SILPA setiap tahun dapat dinilai juga semakin optimalnya penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Seperti yang tergambar pada SILPA tahun 2011 sebesar Rp 172,18 milyar, lalu menurun menjadi Rp 138,76 milyar pada tahun 2012 dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2013 hingga menjadi Rp 122,57 milyar. Kemudian tahun 2014 SILPA turun lagi menjadi Rp 89,38 milyar dan tahun 2015 - turun pula menjadi Rp 61,45 milyar dan 61,66 milyar. Tahun 2017, penerimaan pembiayaan dari SILPA kembali naik menjadi Rp. 85,33 Milyar.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan cenderung berfluktuasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama tahun 2011 hingga 2017 terjadi fluktuasi setiap tahunnya penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari Rp 21,90 milyar pada tahun 2011 dan tahun 2012 turun setoran penyertaan modal menjadi sebesar Rp 5,00 milyar. Kemudian tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 11,25 milyar, lalu turun menjadi Rp 4,00 milyar di tahun 2014 dan tahun 2016-2017 kembali turun menjadi sebesar Rp. 2,00 milyar dan Rp.1,50 milyar. Khusus untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengeluaran pembiayaan daerah hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 7,90 milyar.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Belanja

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung pada periode 2011 - 2015, trendnya terus meningkat dari 39,99 persen tahun 2011 menjadi 47,48 persen tahun 2016, dimana pengeluaran wajib untuk belanja tidak langsung, sebagian besar untuk belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 40,30 persen dari belanja total. Sedangkan belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa relatif kecil yaitu rata-rata hanya 5,69 persen selama periode 2011 - 2015. Dengan dasar perhitungan tersebut, maka pertumbuhan belanja tidak langsung untuk periode 2016 - 2021 yang semula diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,49 persen pertahun terkoreksi menjadi 27,87 persen. Hal ini lebih dikarenakan adanya kewajiban memenuhi rati ideal belanja bantuan keuangan pemerintah desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK, pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, pemberian Tambahan Pendapatan Pegawai, selain peningkatan belanja gaji pegawai setiap tahun didasarkan pada perkiraan kenaikan gaji atas kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.

Sebagai akibat adanya regulasi yang menyebabkan kenaikan secara signifikan terhadap Belanja Tidak Langsung tersebut diatas mengakibatkan pertumbuhan rata-rata belanja langsung menjadi sebesar minus 12,25 persen pertahun, dimana belanja pegawai tumbuh sebesar minus 10,26 persen, belanja barang dan jasa sebesar 3,49 persen dan belanja modal sebesar minus 5,48 persen.

Tabel. III.9.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

Uraian Belanja	Tahun Anggaran						GR (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	445.288.783.710,26	465.479.364.431,15	479.981.637.456,23	556.950.215.905,32	568.581.174.725,29	581.253.737.309,86	27,87
1. Belanja Pegawai	388.937.334.284,05	398.660.767.641,15	408.627.286.832,18	410.115.293.999,03	422.418.752.819,00	435.091.315.403,57	2,27
2. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0,00
3. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	0,00
4. Belanja Hibah	13.523.667.500,00	10.332.612.500,00	10.302.612.500,00	6.372.500.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10,44
5. Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-23,85
5.1. Santunan Kematian	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00				-33,33
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	1.055.932.926,21	2.014.135.290,00	2.095.373.508,30	1.936.402.000,00	2.136.402.000,00	2.136.402.000,00	19,50
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	34.871.849.000,00	49.471.849.000,00	53.956.364.615,75	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	40,38
8. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	20,00
B. BELANJA LANGSUNG	666.189.595.499,74	622.738.845.423,05	624.460.491.720,06	575.264.931.968,74	534.996.735.970,11	543.191.212.678,44	-12,25
1. Belanja Pegawai	99.928.439.324,96	93.410.826.813,46	93.669.073.758,01	57.242.673.351,79	52.837.694.458,42	53.653.099.200,54	-10,26
2. Belanja Barang dan Jasa	166.547.398.874,94	155.684.711.355,76	156.115.122.930,01	199.627.175.863,91	188.265.323.512,59	191.108.952.859,80	3,49
3. Belanja Modal	399.713.757.299,85	373.643.307.253,83	374.676.295.032,03	318.395.082.753,03	293.893.717.999,10	298.429.160.618,10	-5,48
C. TOTAL BELANJA	1.111.478.379.210,00	1.088.218.209.854,20	1.104.442.129.176,28	1.132.215.147.874,06	1.103.577.910.695,40	1.124.444.949.988,30	15,62

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur anggaran lima tahun yang akan datang yaitu Tahun 2016 - 2021.

3.3.2.1. Rencana Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan dalam APBD Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 1.052.478.379.210,00 dan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.091.444.949.988,30 atau meningkat rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan meningkat dari Rp 34.802.786.219,00 tahun 2016 menjadi Rp 48.521.211.797,00 tahun 2021 atau PAD diperkirakan meningkat rata-rata 7,27 persen pertahun. Dana perimbangan diperkirakan akan tetapi akan lebih rendah target dari tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 0,63 persen pertahun yaitu dari Rp 935.082.991.750,00 tahun 2016 meningkat menjadi Rp 904.983.177.714,65 tahun 2021.

Sejalan dengan pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa dan pelaksanaan pajak progresif untuk pajak kendaraan bermotor maka transfer pemerintah provinsi dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yaitu dari Rp 35.390.270.241,00 tahun 2016 menjadi Rp 39.073.717.993,15 tahun 2021 atau meningkat rata-rata sebesar 2,04 persen pertahun.

Tabel III.10.
 Proyeksi Pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 (Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran						Growth Rerata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	PENDAPATAN DAERAH	1.052.478.379.210,00	1.040.718.209.854,20	1.061.942.129.176,28	1.088.715.147.874,06	1.070.577.910.695,40	1.091.444.949.988,30	0,75
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.802.786.219,00	35.689.105.003,38	36.812.442.228,45	46.530.390.039,00	47.621.211.797,00	48.521.211.797,00	7,27
1.1	Hasil Pajak Daerah	13.006.520.000,00	13.656.702.900,00	14.339.392.083,00	17.808.350.000,00	17.998.350.000,00	18.273.350.000,00	7,36
1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.357.500.000,00	6.484.650.000,00	6.614.343.000,00	1.702.020.000,00	2.149.441.758,00	2.299.441.758,00	-7,40
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.800.000.000,00	4.896.000.000,00	4.993.920.000,00	6.500.000.000,00	6.650.000.000,00	6.850.000.000,00	7,89
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.638.766.219,00	10.651.752.103,38	10.864.787.145,45	20.520.020.039,00	20.823.420.039,00	21.098.420.039,00	18,76
2	DANA PERIMBANGAN	935.082.991.750,00	920.784.651.585,00	939.200.344.616,70	909.197.091.792,85	886.676.218.888,45	904.983.177.714,65	-0,63
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	106.431.891.750,00	108.560.529.585,00	110.731.740.176,70	156.265.318.062,85	125.205.302.479,84	130.509.408.529,44	5,90
2.2	Dana Alokasi Umum (Dau)	533.829.506.000,00	511.506.096.120,00	521.736.218.042,40	540.400.531.000,00	542.814.361.251,31	553.670.648.476,34	0,77
2.3	Dana Alokasi Khusus (Dak)	294.821.594.000,00	300.718.025.880,00	306.732.386.397,60	212.531.242.730,00	218.656.555.157,30	220.803.120.708,87	-4,57
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	82.592.601.241,00	84.244.453.265,82	85.929.342.331,14	132.987.666.042,21	136.280.480.009,95	137.940.560.476,65	12,49
3.1	Dana Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya	35.390.270.241,00	36.098.075.645,82	36.820.037.158,74	35.899.831.042,21	38.307.566.659,95	39.073.717.993,15	2,04
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	47.202.331.000,00	48.146.377.620,00	49.109.305.172,40	88.507.835.000,00	89.392.913.350,00	90.286.842.483,50	17,25
3.5	Bant. Keuangan Dari Propinsi Atau Pemda Lainnya	-	-	-	8.580.000.000,00	8.580.000.000,00	8.580.000.000,00	0,00
	JUMLAH	1.052.478.379.210,00	1.040.718.209.854,20	1.061.942.129.176,28	1.088.715.147.874,06	1.070.577.910.695,40	1.091.444.949.988,30	26,46

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada proporsi kerangka pendanaan sumber pendapatan utama diperkirakan masih berasal dari dana perimbangan yaitu dari 88,85 persen tahun 2016 ditargetkan turun menjadi 82,92 persen tahun 2021, agar kemandirian pembiayaan terus meningkat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Disisi lain proporsi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan yaitu dari 3,31 persen tahun 2016 meningkat menjadi 4,45 persen tahun 2021. Demikian juga proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan juga terus meningkat yaitu dari 7,85 persen tahun 2016 menjadi 12,64 persen tahun 2021.

Tabel III.11.
Share Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 (%)

NO	Uraian	Tahun Anggaran						Share Rerata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,31	3,43	3,47	4,27	4,45	4,45	3,89
1.1	Hasil Pajak Daerah	1,24	1,31	1,35	1,64	1,68	1,67	1,48
1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,6	0,62	0,62	0,16	0,20	0,21	0,40
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,46	0,47	0,47	0,60	0,62	0,63	0,54
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,01	1,02	1,02	1,88	1,95	1,93	1,47
2	DANA PERIMBANGAN	88,85	88,48	88,44	83,51	82,82	82,92	85,83
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	10,11	10,43	10,43	14,35	11,70	11,96	11,50
2.2	Dana Alokasi Umum (Dau)	50,72	49,15	49,13	49,64	50,70	50,73	50,01
2.3	Dana Alokasi Khusus (Dak)	28,01	28,9	28,88	19,52	20,42	20,23	24,33
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	7,85	8,09	8,09	12,22	12,73	12,64	10,66
3.1	Dana Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya	3,36	3,47	3,47	3,30	3,58	3,58	3,46
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	4,48	4,63	4,62	8,13	8,35	8,27	6,41
3.5	Bant. Keuangan Dari Propinsi Atau Pemda Lainnya	-	-	-	0,79	0,80	0,79	0,79
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,39

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur , 2018

Pada kerangka alokasi pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 1.052.478.379.210,00, pendapatan ini akan digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari sisi belanja tidak langsung meliputi : belanja gaji pegawai, tunjangan penghasilan guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 388.937.334.284,05, dan belanja bantuan keuangan pemerintah desa (ADD) sebesar Rp. 34.871.849.000,00, alokasi ADD akan terus ditingkatkan untuk mencapai rasio ideal yaitu 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Peningkatan belanja gaji pegawai setiap tahun didasarkan pada perkiraan kenaikan gaji atas kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 398.660.767.641,15 karena meliputi juga Tunjangan Kesejahteraan Daerah. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan visi misi Bupati Tanjung Jabung Timur 2016 - 2021 untuk mewujudkan Tanjung Jabung Timur yang “Merakyat”. Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD. Berkenaan dengan itu progam di sektor pendidikan merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Demikian juga untuk bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air minum, listrik dan sanitasi harus cukup signifikan untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi. Program prioritas lain yang terkait dengan perwujudan dari visi misi Bupati adalah program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.3.2.2. Rencana Anggaran Belanja Daerah

Rencana anggaran belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari Tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.12.

Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 (Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran (Rp Jutaan)						Growth Rerata (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1. Pendapatan Daerah	1.052.478.379.210,00	1.040.718.209.854,20	1.061.942.129.176,28	1.088.715.147.874,06	1.070.577.910.695,40	1.091.444.949.988,30	0,75
2. Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	61.000.000.000,00	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-10,05
3. Pencairan Dana Cadangan							
4. Belanja Tidak langsung periode yang wajib dan mengikat serta Prioritas utama	445.288.783.710,26	465.479.364.431,15	479.981.637.456,23	556.950.215.905,32	568.581.174.725,29	581.253.737.309,86	27,87
a. Gaji Pegawai	388.937.334.284,05	398.660.767.641,15	408.627.286.832,18	410.115.293.999,03	422.418.752.819,00	435.091.315.403,57	2,27
b. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	13.523.667.500,00	10.332.612.500,00	10.302.612.500,00	6.372.500.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10,44
e. Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-23,85
e.1.Santunan Kematian (Rp 1 juta/Jiwa) (Rp Jt)	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	1.055.932.926,21	2.014.135.290,00	2.095.373.508,30	1.936.402.000,00	2.136.402.000,00	2.136.402.000,00	19,50
g. Belanja Bantuan Keuanganl Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	34.871.849.000,00	49.471.849.000,00	53.956.364.615,75	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	40,38
h. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	20,00
5. Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	418.550.920.838,76	296.145.129.538,20	357.125.676.444,66	351.548.328.637,68	321.572.207.348,20	326.586.907.541,89	-25,15
a. Sektor Pendidikan	39.392.733.050,00	38.512.590.407,09	43.858.209.934,98	65.185.052.000,00	60.093.819.092,63	61.036.256.170,94	10,81
b. Sektor Infrastruktur	290.853.466.624,20	157.564.736.971,93	160.778.038.357,29	231.049.082.000,00	213.269.228.789,97	216.560.453.781,65	-1,25
c. Sektor Kesehatan	75.260.261.164,56	36.604.480.459,18	52.353.746.968,39	41.540.531.230,00	38.343.874.739,77	38.935.607.168,95	-7,03
d. Pembangunan Jembatan Multiyears	0,000	48.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6,67

URAIAN	Tahun Anggaran (Rp Jutaan)						Growth Rerata (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
e. Dak non fisik	8.744.460.000,00	8.919.349.200,00	9.097.736.184,00	9.279.690.907,68	9.465.284.725,83	9.654.590.420,35	2,00
f. Penyediaan Alat Berat	3.800.000.000,00	6.043.972.500,00	10.537.945.000,00	4.493.972.500,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-3,01
g. Kredit Modal Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
6. Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib dan Mengikat	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,67
a. Pembentukan Dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal/Investasi	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,67
Total Langsung	666.189.595.499,74	622.738.845.423,05	624.460.491.720,06	575.264.931.968,74	534.996.735.970,11	543.191.212.678,44	-40,84

Sumber : Data diolah , 2018

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2016 sebesar Rp 447.288.783.710,26 dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp 583.253.737.309,86 atau meningkat rata-rata sebesar 4,17 persen pertahun, kemudian pertumbuhan rata-rata penerimaan sebesar 0,25 persen pertahun, sedangkan total pertumbuhan rata-rata Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar minus 3,92 persen pertahun. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan masih relatif kecil. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.

Tabel III.13.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi						Growth Rata-rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pendapatan	1.052.478.379.210,00	1.040.718.209.854,20	1.061.942.129.176,28	1.088.715.147.874,06	1.070.577.910.695,40	1.091.444.949.988,30	0,75
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	61.000.000.000,00	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-10,05
	Total Penerimaan	1.113.478.379.210,00	1.090.718.209.854,20	1.106.942.129.176,28	1.133.715.147.874,06	1.105.577.910.695,40	1.126.444.949.988,30	0,25
	Dikurangi :							
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	666.189.595.499,74	622.738.845.423,05	624.460.491.720,06	575.264.931.968,74	534.996.735.970,11	543.191.212.678,44	-3,92
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	447.288.783.710,26	467.979.364.431,15	482.481.637.456,23	558.450.215.905,32	570.581.174.725,29	583.253.737.309,86	4,17

Sumber: Data diolah (2018)

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2016 sebesar Rp 447.288.783.710,26, tahun 2017 sebesar Rp 467.979.364.431,15, tahun 2018 sebesar Rp 482.481.637.456,23, tahun 2019 sebesar 558.450.215.905,32 dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 570.581.174.725,29 serta tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 583.253.737.309,86 atau diprediksi meningkat rata-rata sebesar 4,17 persen. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2016 - 2021 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong **program** prioritas dan program utama untuk mewujudkan Tanjung Jabung Timur “Merakyat 2016 - 2021” melalui Lima Misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Tabel III.14.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi						Growth Rerata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	447.288.783.710,26	467.979.364.431,15	482.481.637.456,23	558.450.215.905,32	570.581.174.725,29	583.253.737.309,86	5,57
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (IIa-IIb-IIc)							
II.a	Belanja Langsung	666.189.595.500	622.738.845.423	624.460.491.720	575.264.931.969	534.996.735.970	543.191.212.678	-3,92
II.b	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	-
	Dikurangi:							
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	418.550.920.838,76	296.145.129.538,20	357.125.676.444,66	351.548.328.637,68	321.572.207.348,20	326.586.907.541,89	-3,44
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,67
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	245.638.674.660,98	324.093.715.884,85	264.834.815.275,40	222.216.603.331,06	211.424.528.621,91	214.604.305.136,55	-1,16
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	201.650.109.049,28	143.885.648.546,30	217.646.822.180,83	336.233.612.574,26	359.156.646.103,39	368.649.432.173,31	17,31
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II							
III.a	Belanja Tidak Langsung	445.288.783.710,26	465.479.364.431,15	479.981.637.456,23	556.950.215.905,32	568.581.174.725,29	581.253.737.309,86	5,60
	Dikurangi:							
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	410.416.934.710,26	416.007.515.431,15	426.025.272.840,48	421.524.195.999,03	433.155.154.819,00	445.827.717.403,57	1,68
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb)	34.871.849.000,00	49.471.849.000,00	53.956.364.615,75	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	40,38
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	166.778.260.049,28	94.413.799.546,30	163.690.457.565,08	200.807.592.667,97	223.730.626.197,10	233.223.412.267,02	13,66

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan data diatas, maka kemampuan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menambah program dan kegiatan diluar dari program wajib dan prioritas relatif sangat kecil. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 54 Tahun 2010, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 42 SKPD (termasuk kecamatan) yang menjalankan program dan kegiatan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan dan sekitar 9 SKPD lainnya yang menjalankan program dan kegiatan urusan pilihan. Namun dengan kemampuan kapasitas riil sebesar Rp 166.778.260.049,28 tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 94.413.799.546,30 tahun 2017, Rp 163.690.457.565,08 tahun 2018 dan Rp. 153.860.448.441,27 tahun 2019 dan kemudian menjadi Rp. 223.730.626.197,10 pada tahun 2020 namun tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 233.223.412.267,02 yang harus dibagi diluar Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka harus dipilih dan dipilah program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian Visi Misi Bupati mewujudkan Tanjung Jabung Timur untuk Meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Berkenaan dengan itu, karena sempit dan terbatasnya anggaran yang tersedia berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan, maka penentuan skala prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD harus diseleksi dengan baik berdasarkan instrumen evaluasi perencanaan yang baik. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus dapat memberikan *multiplier effect* yang besar kepada masyarakat, sehingga dapat meningkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan.

B

A

B

IV

Permasalahan
dan Isu-Isu
Strategis
Daerah

BAB IV

Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Analisis tersebut akan menghasilkan rumusan kebijakan atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada data kondisi riil sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dalam dokumen RPJMD ini. Hal tersebut kemudian dianalisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

1. Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah dalam pembangunannya. Terbatasnya APBD menjadi kendala dalam pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan dimana konstruksi yang digunakan adalah struktur tiang beton bertulang yang memerlukan biaya tinggi. Hingga tahun 2017, masih terdapat ruas jalan sepanjang 88,02km dengan kondisi jalan rusak dan sepanjang 105,02 km dengan kondisi jalan rusak berat.
2. Belum optimalnya irigasi yang mengairi pada lahan tanaman pangan, dimana kondisi rehabilitasi irigasi mengalami kondisi pertumbuhan minus 42,72 persen di tahun 2017 (Gambar 2.34)
3. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik, hal ini didukung dengan data perbandingan jumlah dermaga kayu sebanyak 39 unit dan jumlah dermaga permanen sebanyak 33 unit pada tahun 2017 (Gambar 2.36).
4. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
5. Rasio kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mencapai angka 88,89 persen masih rendah dibandingkan rasio kelistrikan Provinsi Jambi dan nasional yang sudah diatas angka 90 persen; dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih masih tergolong rendah dengan angka pertumbuhan 13,52 persen.
6. Belum adanya data daya dukung dan daya tampung lingkungan.

7. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana karhutla yang menimbulkan asap.

4.1.2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

1. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, dari sebanyak 28.300 jiwa pada tahun 2013 menjadi 27.220 jiwa di tahun 2017, akan tetapi masalah kemiskinan masih merupakan permasalahan kompleks yang harus memperoleh penanganan serius dalam menindaklanjutinya.
2. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena daya dukung infrastruktur terbatas.
3. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani dikarenakan harga hasil produksi pertanian lebih kecil dibandingkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Banyak program yang hanya dikhususkan untuk peningkatan produksi tetapi tidak dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.
6. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan sawit.
7. Masih adanya infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi, sehingga sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
9. Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Even-even peribadatan apabila ini dikemas dan dipertunjukkan dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

4.1.3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

1. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik yang perlu dilakukan perbaikan.
2. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid SD/ sederajat pada tahun 2017 hanya sebesar 49,82 persen dan rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat hanya mencapai angka 54,25 persen di tahun 2017.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut jenjang pendidikan SD/ sederajat mencapai angka 98 persen dan untuk APM SMP/ sederajat hanya 79,40 persen dimana kondisi ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
4. Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 mengalami peningkatan, kecuali jumlah dokter dan perawat yang mengalami penurunan (Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2018).
5. Perlunya peningkatan kompetensi keahlian tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat.
6. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.
7. Perlunya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah.
8. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan daerah.

4.1.4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

1. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, kurangnya infrastruktur pendukung menuju obyek wisata, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata.
2. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
3. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

4. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah yang berimbas kepada tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.

4.1.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain: masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas pada tahun 2016 masih pada level "CC". Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat memperoleh Opini WTP. Upaya ini membuahkan hasil sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk penilaian LKD Tahun 2017. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good and clean government* dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka ada beberapa pokok persoalan pada tata kelola pemerintahan daerah yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada perangkat daerah masih rendah sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM.

2. Perlunya pengoptimalan dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam sistem pelayanan perizinan perlu ditingkatkan dengan efektif dan efisien.
4. Peningkatan peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui berbagai aplikasi dan teknologi yang terbaru.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam mentaati peraturan daerah sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi peraturan daerah.
6. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.
7. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena belum tergalinya potensi yang dari berbagai sektor yang dapat meningkatkan PAD oleh Badan Keuangan Daerah.
8. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
9. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang akan menghasilkan capaian opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan.

4.2. Isu - Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

1. Kondisi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.2.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah

1. Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.

2. Keberadaan UMKM dan koperasi belum dapat berperan signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Potensi pariwisata daerah belum tergali dikarenakan terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

4.2.3. Isu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

1. Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .
3. Peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek bidang kehidupan.
4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya saing.

4.2.4. Isu - isu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

1. Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.
2. Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

4.2.5. Isu - isu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah daerah termasuk pemerintah desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
2. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.

3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

4.2.6. Isu - isu strategis Global, Nasional dan Regional

1. Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara penyelesaian batas kabupaten dan batas desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

B

A

B

V

Visi, Misi,
Tujuan Dan
Sasaran

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **‘Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)’**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

5.2 Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

5.3 Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 (lima) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan **Delapan Pilar Utama** yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa-desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian provinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

5.4 Tujuan dan Sasaran

5.4.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan;

4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK ;
5. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib ;
6. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Pada dasarnya tidak ada perubahan tujuan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021. Perubahan jumlah tujuan dari sebelumnya berjumlah 21 tujuan menjadi 6 tujuan lebih disebabkan oleh penajaman kalimat tujuan serta penggabungan tujuan-tujuan yang dapat ditunjukkan dengan satu indikator menjadi satu. Adapun tujuan-tujuan yang mengalami penggabungan tersebut dapat dilihat pada Tabel V.1. sedangkan visi, misi, tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel V.2.

Tabel V.1. Penajaman dan Penggabungan Beberapa Tujuan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan peternakan	3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan
4. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	
5. Meningkatkan daya saing produksi perikanan	
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	

7 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara	
8 Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	
9 Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	4 Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK
10 Meningkatkan sarana pendidikan dasar	
11 Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	
12 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	
13 Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	
14 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi	
15 Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	5 Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib
16 Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	
17 Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	
18 Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	
19 Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	6 Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah
20 Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	
21 Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	

5.4.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW;
4. Mengurangi permukiman kumuh;
5. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi;
6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
8. Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis;
9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
10. Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan;
11. Meningkatnya investasi industri kecil menengah;
12. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan;
13. Pengembangan destinasi wisata;
14. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat;
15. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
16. Menekan laju pertumbuhan penduduk;
17. Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
18. Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya;
19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
20. Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa;
21. Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan;
22. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government;
23. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah.

Tabel V.2.
Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir 2021	
					2016		2017		2018	2019		2020
1	2	3	4	5	Target	Realisasi	Target	Realisasi	8	9	10	11
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)												
I Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan												
1.1.	Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah	Nilai Komponen Daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) dengan kondisi awal sebesar 0,3915 dan target akhir 0,1)									
1.1.a		Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap	NA	-	-	-	-	-	61,29%	73,12%	84,94%
1.1.b		Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	NA	-	-	-	-	-	36,00%	38,00%	40,00%
1.1.c		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.d		Mengurangi permukiman kumuh	Persentase pengurangan permukiman kumuh	5,16%	5,15%	5,15%	5,13%	0,03%	5,11%	5,12%	5,11%	5,09%
1.1.e		Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	52,86%	53,00%	61,12%	55,00%	69,65%	57,00%	58,00%	60,00%	63,00%
			Persentase sanitasi layak	NA	-	-	-	-	69,89%	66,90%	67,00%	67,23%
1.1.f		Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,57%	56,67%	74,50%	57,70%	79,29%	60,90%	63,10%	65,50%	65,50%
1.2.	Tujuan	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas dengan kondisi awal 0,39 dan target capaian akhir 0,25									
1.2.a		Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	NA	-	-	-	-	-	0,35	0,3	0,25
			Persentase penurunan kecelakaan air	NA	-	-	-	-	-	0,04	0,02	0

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir 2021	
					2016		2017		2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)												
II Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)												
II.1	Tujuan	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dengan kondisi awal 6,57% dan target capaian akhir 8%									
II.1.a		Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	NA	97,5	-	98,8	-	99,8	100	101,3	101,4
II.1.b		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	NA 2031 (Kkal/Kap/ Hari)	81,5 2071 (Kkal/Kap/ Hari)	77 2031 (Kkal/Kap/ Hari)	77,3 2121 (Kkal/Kap/ Hari)	78,0 2.805,48 (Kkal/Kap/ Hari)	78,0 2161 (Kkal/Kap/ Hari)	80,0 2070 (Kkal/Kap/ Hari)	82,5 2075 (Kkal/Kap/ Hari)	84,2 2080 (Kkal/Kap/ Hari)
II.1.c		Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase koperasi sehat Persentase UKM sehat	NA NA	- -	- -	- -	- -	- -	18,51% 9,10%	20,13% 10,30%	21,75% 11,50%
II.1.d		Meningkatnya investasi industri kecil menengah	Persentase IKM produktif	78,00%	78,00%	-	88,00%	87,70%	88,00%	92,00%	96,00%	100,00%
II.1.e		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan	Nilai Tukar Nelayan	NA	-	-	-	-	-	113,37	114	114,10
II.1.f		Pengembangan destinasi wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	-2,91	2,01	-	2,00	-	1,96	1,94	1,91	1,90
III Misi III : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK												
III.1.	Tujuan	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kondisi awal 61,02 dan target capaian akhir 64,12									
III.1.a		Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	Usia Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah	65,33 11,28	65,45 11,3	65,43 11,32	65,5 11,34	65,43 11,34	65,55 11,36	65,6 11,36	65,65 11,38	65,7 11,4
III.1.b		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	59,06%	59,81%	-	60,56%	47,50%	61,31%	62,06%	62,81%	63,56%
III.1.c		Menekan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,94	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75
III.1.d		Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	NA	60%	-	70%	-	75%	80%	90%	90%

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir 2021	
					2016		2017		2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)												
IV Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif												
IV.1	Tujuan	Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Kondisi Awal 71 dan target capaian Akhir 74									
IV.1.a		Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	
IV.1.b		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks aspek kebebasan sipil	85,45	86,08	-	88,85	-	90,55	93,75	97,4	97,85
			Persentase konflik yang difasilitasi	NA	60%	-	70%	-	75%	80%	80%	80%
V Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis												
V.1.	Tujuan	Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi Awal NA target capaian Akhir B)									
V.1.a		Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	A	A	A	A
			Persentase bumdes yang aktif	NA	-	-	-	-	-	89,04%	95,89%	100,00%
V.1.b		Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Nilai investasi (Juta Rupiah)	47.123	30.000	97.993	31.500	744.766	33.075	315.000	330.750	347.288
V.1.c		Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	NA	-	-	-	-	-	86%	95%	100%
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	NA	-	-	-	-	-	45%	61%	76%
V.1.d		Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	CC	B	CC	B	CC	B	B	B	BB
			Maturitas SPI	NA	-	-	-	-	-	3	3	3
			Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat EPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

B

A

B

VI

Strategi, Arah
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
Daerah

BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten;
2. Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;
3. Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten;
4. Perbaikan permukiman kumuh padat penduduk;
5. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat;
6. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi;
8. Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air;
9. Peningkatan produksi tanaman pangan;
10. Peningkatan produksi daging;
11. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan;
12. Peningkatan pemasaran hasil pertanian;
13. Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat;
14. Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM;
15. Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing;
16. Peningkatan produksi perikanan (perairan umum, kolam dan air laut);

17. Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan menarik;
18. Peningkatan mutu pendidikan dasar;
19. Peningkatan sarana pendidikan dasar;
20. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat;
21. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
22. Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;
24. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;
25. Pengendalian kebijakan daerah;
26. Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
27. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang baik;
28. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
29. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government;
30. Peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.
3. Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 - 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1. Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis;
2. Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
3. Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
5. Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh;
6. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
7. Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah;
8. Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas;
9. Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala;
10. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan;
11. Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija;
12. Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan;
13. Pengembangan tanaman hortikultura;
14. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian;
15. Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan;
16. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan;

17. Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian;
18. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
19. Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan;
20. Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM;
21. Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
22. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut;
23. Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
24. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
25. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
26. Memperkuat upaya kesehatan melalui pendekatan keluarga;
27. Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak;
28. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana;
29. Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
30. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan;
31. Pemantauan kebijakan daerah;
32. Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
33. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
34. Meningkatkan kemandirian desa;
35. Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
36. Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
37. Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP;
38. Meningkatkan kapabilitas internal audit;
39. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 disajikan pada Tabel VI.1. dan arah kebijakan pembangunan daerah dimuat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.1.

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	1. Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten
	2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	2. Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat
	3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	3. Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten
	4. Mengurangi permukiman kumuh	4. Perbaiki permukiman kumuh padat penduduk
	5. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	5. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat
	6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	6. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	7. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	7. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi
		8. Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<p>MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan</p>		
<p>3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan</p>	<p>8. Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis</p>	<p>9. Peningkatan produktivitas tanaman pangan 10. Peningkatan produksi daging 11. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 12. Peningkatan pemasaran hasil pertanian</p>
	<p>9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>13. Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat</p>
	<p>10. Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan</p>	<p>14. Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM</p>
	<p>11. Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah</p>	<p>15. Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing</p>
	<p>12. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan</p>	<p>16. Peningkatan produksi perikanan (perairan umum, kolam dan air laut)</p>
	<p>13. Pengembangan destinasi wisata</p>	<p>17. Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik</p>

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK		
4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	14. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	18. Peningkatan mutu pendidikan dasar
		19. Peningkatan sarana pendidikan dasar
		20. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
	15. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	21. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak
	16. Menekan laju pertumbuhan penduduk	22. Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah
	17. Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	23. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif		
5. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	18. Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	24. Peningkatan peran masyarakat dalam Pembangunan
	19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	25. Pengendalian Kebijakan Daerah
		26. Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAHYAT)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi		
6. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	20. Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	27. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang baik
	21. Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	28. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah
	22. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	29. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis e-government
	23. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	30. Peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan

Tabel VI.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Membangun jalan dan jembatan ke akses sentra-sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru	Membangun jalan dan jembatan ke akses sentra-sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru	Membangun jalan dan jembatan ke akses sentra-sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru	Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis	Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis	Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis
Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
Mendukung percepatan pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung	Mendukung percepatan pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung	Mendukung percepatan pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung			
Membangun jaringan irigasi dalam kondisi baik	Membangun jaringan irigasi dalam kondisi baik	Membangun jaringan irigasi dalam kondisi baik	Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian	Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian	Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian
Memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik			
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh	Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh	Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh
			Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
			Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah	Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah	Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas	Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas	Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas
			Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala	Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala	Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala
			Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan	Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan	Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan
Mengembangkan intensifikasi tanaman padi	Mengembangkan intensifikasi tanaman padi	Mengembangkan intensifikasi tanaman padi	Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija	Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija	Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija
Mengembangkan intensifikasi tanaman palawija	Mengembangkan intensifikasi tanaman palawija	Mengembangkan intensifikasi tanaman palawija			
			Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan	Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan	Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan
Mengembangkan komoditas buah-buahan	Mengembangkan komoditas buah-buahan	Mengembangkan komoditas buah-buahan	Pengembangan tanaman hortikultura	Pengembangan tanaman hortikultura	Pengembangan tanaman hortikultura
			Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian	Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian	Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian
Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak	Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak	Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak	Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan	Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan	Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan
Meningkatkan produksi daging	Meningkatkan produksi daging	Meningkatkan produksi daging			
			Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan	Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan	Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan
			Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian	Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian	Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatkan pendapatan petani			

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat
			Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut
Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan			
Meningkatkan pola konsumsi ikan di masyarakat	Meningkatkan pola konsumsi ikan di masyarakat	Meningkatkan pola konsumsi ikan di masyarakat			
Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM	Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM	Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM
Memberikan bantuan hibah koperasi untuk modal kerja masyarakat miskin	Memberikan bantuan hibah koperasi untuk modal kerja masyarakat miskin	Memberikan bantuan hibah koperasi untuk modal kerja masyarakat miskin			
Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah
Meningkatkan sarana dan prasarana pasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar			
Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya	Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya	Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya			
Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan pemasaran pariwisata pada setiap segmen pasar pariwisata	Meningkatkan pemasaran pariwisata pada setiap segmen pasar pariwisata	Meningkatkan pemasaran pariwisata pada setiap segmen pasar pariwisata			
Meningkatkan atlet yang berdaya saing dan berprestasi	Meningkatkan atlet yang berdaya saing dan berprestasi	Meningkatkan atlet yang berdaya saing dan berprestasi			
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar
Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan keluarga	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan keluarga	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan keluarga
Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)	Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)	Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)			
Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan			
Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat			
Penguatan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat			

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana
Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak
Mengembangkan fasilitas teknologi informasi sampai ke desa/kelurahan	Mengembangkan fasilitas teknologi informasi sampai ke desa/kelurahan	Mengembangkan fasilitas teknologi informasi sampai ke desa/kelurahan			
Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja
			Meningkatkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan	Meningkatkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan	Meningkatkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan
			Pemantauan kebijakan daerah	Pemantauan kebijakan daerah	Pemantauan kebijakan daerah
Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi	Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi	Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi			
Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni	Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni	Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni			
Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat
Pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran			

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah			
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah			
Meningkatkan TC MTQ	Meningkatkan TC MTQ	Meningkatkan TC MTQ			
Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia	Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia	Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia			
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas			
Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa
			Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian desa
Melaksanakan pemilihan kepala desa	Melaksanakan pemilihan kepala desa	Melaksanakan pemilihan kepala desa			
Meningkatkan nilai investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	Meningkatkan nilai investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	Meningkatkan nilai investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu

Arah Kebijakan					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
			Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja
Meningkatkan capaian penilaian SAKIP	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP
			Meningkatkan kapabilitas internal audit	Meningkatkan kapabilitas internal audit	Meningkatkan kapabilitas internal audit
Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah			
Peningkatan tindaklanjut temuan	Peningkatan tindaklanjut temuan	Peningkatan tindaklanjut temuan			
Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa			
Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah

6.3 Prioritas Pembangunan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 - 2021 tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan maka perlu difokuskan pula pelaksanaan pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2016 - 2021 adalah:

1. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**, dengan fokus:
 - a. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan;
 - c. Peningkatan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW;
 - d. Pengurangan permukiman kumuh;
 - e. Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi;
 - f. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan;
 - g. Peningkatan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air.

2. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)**, dengan fokus:
 - a. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. Peningkatan peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan;
 - d. Peningkatan investasi industri kecil menengah;
 - e. Pemberdayaan masyarakat nelayan;
 - f. Pengembangan destinasi wisata.

3. **Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK, dengan fokus:**
 - a. Peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - b. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - c. Menekan laju pertumbuhan penduduk;
 - d. Peningkatan akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK.
4. **Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif, dengan fokus:**
 - a. Peningkatan kualitas masyarakat berbudaya;
 - b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis, dengan fokus:**
 - a. Peningkatan mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa;
 - b. Peningkatan nilai investasi pembangunan;
 - c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government;
 - d. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah.

6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2016 - 2021 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

- I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
 - a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 1. Program pembangunan jalan dan jembatan;
 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 3. Program pengendalian tata ruang;
 4. Program pemanfaatan tata ruang.

- b) Urusan Perumahan dan Permukiman, melalui program antara lain :
 - 1. Program penataan lingkungan permukiman;
 - 2. Program penyediaan sarana dan prasarana air bersih;
 - 3. Program penyediaan sarana prasarana sanitasi.
 - c) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
 - 1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - d) Urusan Perhubungan, melalui program antara lain :
 - 1. Peningkatan pelayanan angkutan;
 - 2. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
 - 3. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
- a) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
 - 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - 2) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian;
 - 4) Program peningkatan kesejahteraan petani;
 - 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak;
 - 6) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
 - b) Urusan Pangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program peningkatan ketahanan pangan.
 - c) Urusan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain:
 - 1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - 2) Program pengembangan budidaya perikanan;
 - 3) Program pengembangan perikanan tangkap.
 - d) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui program antara lain:
 - 1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - 2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.
 - e) Urusan Industri, melalui program antara lain :

- 1) Program pengembangan dan peningkatan industri kecil dan menengah;
- f) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
 - 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 2) Program pengembangan destinasi pariwisata.

III. Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu **Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain:
 - 1) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun;
 - 2) Program pendidikan anak usia dini;
 - 3) Program pendidikan non formal;
 - 4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain:
 - 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak;
 - 2) Program upaya kesehatan masyarakat;
 - 3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
 - 5) Program pengembangan lingkungan sehat;
 - 6) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 7) Program perbaikan gizi masyarakat.
- c) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
 - 1) Program pengendalian penduduk;
 - 2) Program Keluarga Berencana.
- d) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain :
 - 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- e) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

- IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, melalui program antara lain:
 - 1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - 2) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
 - 3) Program pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman umum, serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
 - b) Urusan Perumahan dan Permukiman, melalui program antara lain:
 - 1) Program penyediaan sarana prasarana air bersih;
 - c) Urusan Pertanian, melalui program antara lain:
 - 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- V. Untuk mewujudkan misi kelima, yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
- a) Urusan Pemerintahan Daerah, melalui program antara lain :
 - 1) Program penataan pelayanan publik.
 - b) Urusan Pemerintahan Desa, melalui program antara lain:
 - 1) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
 - c) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
 - 1) Program e-Government;
 - 2) Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
 - d) Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
 - 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - 2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

- d) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
 - 1) Program perencanaan pembangunan daerah.
- e) Urusan Keuangan, melalui program antara lain:
 - 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

6.5 Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD

Untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021, maka diperlukan program lintas bidang SKPD untuk percepatannya. Disamping melaksanakan program urusan wajib dan pilihan, maka program lintas bidang SKPD diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang meliputi :

1. Program Pengembangan Kawasan Khusus Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung Serta Sarana Pendukung Pelabuhan Pengumpan Mendahara dan Nipah Panjang;
2. Program Peningkatan Aksesibilitas Menuju Pelabuhan Ujung Jabung Melalui Pembangunan Jembatan Nipah Panjang dan Koneksitas Mendahara-Tanjung Jabung Barat;
3. Program Pembangunan Sirkuit Mini;
4. Program Pengembangan Technopark dan Kebun Buah Skala Orchard;
5. Program Pengembangan Hutan Kota
6. Program Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan
7. Program Kerjasama dengan Kabupaten Tetangga (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan)

Program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Merakyat, dapat dilihat pada tabel VI.3. berikut :

Tabel VI.3.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
1 Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan																		
1.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah																		
1.1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap																		
1.1.1.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
				208.751.551		122.049.897		137.512.333		169.620.750		156.576.735		158.992.895		953.504.162		
	a. Panjang jalan kabupaten (Km)	993,88 Km	993,88 Km	-	995,88 Km	-	997,88 Km	-	1.177,77 Km	-	1.177,77 Km	-	1.177,77 Km	-	1.177,77 Km			Dinas PUPR
	b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,43%	76,75%	-	78,64%	-	80,07%	-	81,42%	-	82,68%	-	83,87%	-	83,87%			Dinas PUPR
	c. Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap	NA	-	-	-	-	-	-	61,29%	-	73,12%	-	84,94%	-	84,94%			Dinas PUPR
	d. Persentase jalan kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap	54,05%	54,05%	-	58,34%	-	62,64%	-	66,93%	-	71,23%	-	75,52%	-	75,52%			Dinas PUPR
	e. Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	20,40%	23,43%	-	26,29%	-	29,58%	-	32,85%	-	36,45%	-	38,78%	-	38,78%			Dinas PUPR
	f. Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD peralatan dan perbekalan (Km)	NA	-	-	-	-	-	-	50 Km	-	50 Km	-	28 Km	-	128 Km			Dinas PUPR
1.1.2 Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan																		
1.1.2.2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya																		
				42.361.980		19.740.987		4.256.604		28.028.500		25.873.108		26.273.554		146.534.733		
	a. Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	532,26 Km	129,00 Km	-	130,00 Km	-	135,00 Km	-	59,00 Km	-	63,00 Km	-	66,00 Km	-	582,00 Km			Dinas PUPR
	b. Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	NA	-	-	-	-	-	-	36,00%	-	38,00%	-	40,00%	-	40,00%			Dinas PUPR
	c. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,61%	66,79%	-	71,03%	-	74,45%	-	75,95%	-	77,45%	-	78,95%	-	78,95%			Dinas PUPR
1.1.3 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota																		
1.1.3.3 Program Pemanfaatan Tata Ruang																		
				-		-		-		149.324		137.841		139.964		427.130		
	a. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%			Dinas PUPR
1.1.3.4 Program Pengendalian Tata Ruang																		
				-		250.133		197.300		373.136		340.442		345.684		1.506.695		
	a. Persentase kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%			Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
1 Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan																		
1.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah																		
1.1.4 Mengurangi permukiman kumuh																		
1.1.4.5	Program Penataan Lingkungan Permukiman			-	149.178		149.590		2.500.000		2.160.000		1.660.000		6.618.768			
	a. Persentase pengurangan permukiman kumuh	5,16%	5,15%	5,13%	5,11%	5,12%	5,11%	-	5,09%									Dinas Perkim
1.1.6 Meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi																		
1.1.6.6	Program Penyediaan Sarana dan prasarana air bersih			-	-		-		8.037.609		6.328.844		7.021.817		21.388.271			
	a. Persentase layanan air bersih	NA	-	-	-	28,09%	28,65%	29,22%	29,22%									Dinas Perkim
	b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	NA	-	-	-	75,15%	-	77,90%	-	80,65%	-	80,65%						Dinas Perkim
1.1.6.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			159.536	732.861		734.888		653.772		603.463		612.776		3.497.295			
	a. Cakupan rumah tangga dengan air bersih	52,86%	53%	55%	57%	58,0%	60,0%	63,0%	63,0%									Dinas Kesehatan
1.1.6.8	Program Penyediaan sarana prasarana sanitasi			-	-		-		1.615.800		1.615.800		1.532.749		4.764.349			
	a. Persentase sanitasi layak	NA	-	-	-	66,90%	67,00%	67,23%	67,50%									Dinas Perkim
1.1.9 Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan																		
1.1.9.9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			2.515.107	964.813		1.242.650		1.176.475		1.117.500		1.128.750		8.145.295			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,57%	56,67%	57,70%	60,90%	63,10%	65,50%	65,50%	65,50%									Dinas Lingkungan Hidup
	b. Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	NA	-	-	-	50%	60%	75%	75%									Dinas Lingkungan Hidup
	c. Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	NA	-	-	-	48,2%	50,0%	51,2%	51,2%									Dinas Lingkungan Hidup
	d. Persentase hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	NA	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%									Dinas Lingkungan Hidup
1.2 Tujuan : Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi																		
1.2.1 Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air																		
1.2.1.10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			2.078.201	877.983		1.935.000		532.518		471.677		495.105		6.390.483			
	a. Persentase penurunan kecelakaan darat	NA	-	-	-	0,35	0,30	0,25	0,25									Dinas Perhubungan
	b. Persentase penurunan kecelakaan air	NA	-	-	-	0,04	0,02	0,00	0,00									Dinas Perhubungan
	c. Persentase pemasangan perlengkapan keselamatan	NA	-	-	-	16,39%	1,00%	82,61%	100%									Dinas Perhubungan
	d. Persentase tingkat pelanggaran lalu lintas	NA	-	-	-	44,11%	37,26%	14,63%	100%									Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
1 Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan																		
1.2 Tujuan : Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi																		
1.2.1 Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air																		
1.2.1.11	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			60.690		76.608		60.000		57.437		50.875		52.852		358.462		
	a. Persentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	NA	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		Dinas Perhubungan
1.2.1.12	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan			1.422.825		92.448		319.788		42.351		37.513		38.971		1.953.896		
	a. Persentase ketersediaan terminal	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-			Dinas Perhubungan
2 Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)																		
2.1 Tujuan : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan																		
2.1.1 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis																		
2.1.1.13	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan			3.885.834		4.529.774		4.417.456		8.495.112		8.107.494		8.341.414		37.777.085		
	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :																	
	a. Padi	NA	-	-	-	-	0,48%	-	0,71%	-	0,95%	-	0,95%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	b. Jagung	NA	-	-	-	-	0,65%	-	0,97%	-	1,12%	-	1,12%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	c. Kedele	NA	-	-	-	-	0,77%	-	2,29%	-	3,37%	-	3,37%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	d. Nanas	NA	-	-	-	-	0,20%	-	0,39%	-	0,58%	-	0,58%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	e. Semangka	NA	-	-	-	-	5,26%	-	7,50%	-	9,30%	-	9,30%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	f. Cabe	NA	-	-	-	-	1,26%	-	1,65%	-	2,03%	-	2,03%	-				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	Produktivitas tanaman perkebunan																	
	a. Kelapa dalam	1.158 Kg/Ha	-	-	-	-	1.165 Kg/Ha	-	1.167 Kg/Ha	-	1.169 Kg/Ha	-	1.169 Kg/Ha	-				Dinas Perkebunan dan Peternakan
	b. Pinang	440 Kg/Ha	-	-	-	-	486 Kg/Ha	-	499 Kg/Ha	-	512 Kg/Ha	-	512 Kg/Ha	-				Dinas Perkebunan dan Peternakan
	c. Kopi	473 Kg/Ha	-	-	-	-	502 Kg/Ha	-	510 Kg/Ha	-	517 Kg/Ha	-	517 Kg/Ha	-				Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-										Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)																		
2.1 Tujuan : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan																		
2.1.1 Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agribisnis																		
2.1.1.14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian																		
				265.487		278.197		278.966		135.686		121.952		121.952		1.202.240		
Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian :																		
	a. Hand traktor rotari (Unit)	22 Unit	-	-		12 Unit		-		-		-		12 Unit				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	b. Rice transplanter (Unit)	18 Unit	-	-		5 Unit		-		-		-		5 Unit				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	c. Mesin pemotong rumput (Unit)	31 Unit	12 Unit	12 Unit		15 Unit		-		-		-		39 Unit				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	d. Hands sprayer electric (Unit)	-	48 Unit	16 Unit		20 Unit		-		-		-		84 Unit				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
2.1.1.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																		
				156.111		3.638.727		3.648.778		1.293.047		1.193.047		1.193.047		11.122.757		
Persentase peningkatan kelas kelompok tani :																		
	a. Pemula	NA	-	-		-		42%		30%		24%		24%				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	b. Lanjut	NA	-	-		-		40%		47%		54%		54%				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	c. Madya	NA	-	-		-		17%		19%		20%		20%				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	d. Utama	NA	-	-		-		0,68%		0,78%		0,98%		0,98%				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	e. Penyuluh berprestasi	NA	-	-		-		3		3		3		12				Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
2.1.1.16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																		
	a. Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	NA	-	-		-		4.268.202 Ekor		4.446.468 Ekor		4.624.734 Ekor		4.624.734 Ekor				Dinas Perkebunan dan Peternakan
	b. Jumlah peningkatan produksi daging ruminansia (Kg)	NA	-	-		-		251.105 Kg		261.568 Kg		272.031 Kg		272.031 Kg				Dinas Perkebunan dan Peternakan
	c. Jumlah peningkatan produksi daging unggas (Kg)	NA	-	-		-		998.901 Kg		1.113.774 Kg		1.241.858 Kg		1.241.858 Kg				Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)																		
2.1 Tujuan : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan																		
2.1.1 Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agribisnis																		
2.1.1.17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak																		
				475.827		576.928		578.523		532.880		486.857		506.857		3.157.873		
	a. Persentase penurunan angka kematian ternak (%)	3,0%	2,9%		2,8%		2,6%		2,4%		2,2%		-		2,0%			Dinas Perkebunan dan Peternakan
	b. Tercapainya pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	NA	-		-		-		115 sampel		130 sampel		150 sampel		150 sampel			Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.1.1.18 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																		
	a. Terlaksananya promosi / pameran luar daerah / luar provinsi	5 & 4 kali	5 & 4 kali		5 & 4 kali		5 & 4 kali		5 kali		6 kali		5 kali		28 kali			
	b. Persentase produk pertanian unggulan daerah :																	
	a) Beras Merah	NA	-		-		-		85%		95%		100%		100%			Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	b) Semangka	NA	-		-		-		90%		97%		100%		100%			Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	c) Nanas	NA	-		-		-		92%		96%		100%		100%			Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
2.1.2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat																		
2.1.2.19 Program peningkatan ketahanan pangan																		
				2.422.597		2.756.240		2.788.521		1.749.469		1.519.772		1.519.772		12.756.371		
	a. Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2031 (Kkal/Kap/Hari)	2071 (Kkal/Kap/Hari)		2121 (Kkal/Kap/Hari)		2161 (Kkal/Kap/Hari)		2070 (Kkal/Kap/Hari)		2075 (Kkal/Kap/Hari)		2080 (Kkal/Kap/Hari)		2080 (Kkal/Kap/Hari)			Dinas Ketahanan Pangan
	b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	NA	82		77		78		80		83		84		84			Dinas Ketahanan Pangan
	c. Persentase penanganan Daerah Rawan Pangan,	NA	-		-		-		93%		100%		100%		100%			Dinas Ketahanan Pangan
	d. Persentase ketersediaan pangan utama	NA	-		-		-		90,65%		95,18%		99,95%		99,95%			Dinas Ketahanan Pangan
	e. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	-		-		-		60%		65%		65%		65%			Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-										Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)																		
2.1 Tujuan : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan																		
2.1.3 Meningkatkan peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan																		
2.1.3.20 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM																		
				446.613	576.564		597.908		252.765		235.075		237.695		2.346.620			
	a. Persentase UKM sehat	NA	-	-	-	-	9,10%	10,30%	11,50%	11,50%								Dinas Koperasi dan UKM
2.1.3.21 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																		
				182.650	364.649		348.253		416.732		399.042		401.662		2.112.988			
	a. Persentase koperasi sehat	NA	-	-	-	-	18,51%	20,13%	21,75%	21,75%								Dinas Koperasi dan UKM
2.1.4 Meningkatkan investasi industri kecil menengah																		
2.1.4.22 Program Pengembangan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah																		
				-	-	-	-	1.752.523	1.860.760	1.702.523				5.315.806				
	a. Persentase IKM produktif	78,00%	78,00%	88,00%	88,00%	92,00%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%								Dinas Perindag
2.1.5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan																		
2.1.5.23 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir																		
				5.234.730	106.660		164.154		848.140		748.140		812.140		7.913.964			
	a. Nilai Tukar Nelayan	NA	-	-	-	113,37	114	114,1	114,1									Dinas Perikanan
2.1.5.24 Program Pengembangan Budidaya Perikanan																		
				3.190.579	3.148.503		1.311.251		1.173.600		1.023.600		990.047		10.837.580			
	a. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-67,44%	-	56,17%	2,04%	2,04%	2,05%	2,10%	64,38%									Dinas Perikanan
2.1.5.25 Program Pengembangan Perikanan Tangkap																		
				1.216.732	1.643.750		2.176.075		1.104.508		1.002.975		1.002.827		8.146.867			
	a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,30%	3,30%	-	0,30%	0,42%	0,45%	0,47%	2,88%									Dinas Perikanan
2.1.6 Pengembangan destinasi wisata																		
2.1.6.26 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
				898.408	1.726.611		1.731.384		1.148.250		1.033.425		1.041.425		7.579.503			
	a. Jumlah kunjungan wisatawan domestik	NA	10.000 Orang	10.200 Orang	10.400 Orang	10.600 Orang	10.800 Orang	11.000 Orang	11.000 Orang									Dinas Parbudpora
	b. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	NA	60 Orang	70 Orang	80 Orang	90 Orang	100 Orang	110 Orang	110 Orang									Dinas Parbudpora
2.1.6.27 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
				147.740	1.094.385		1.097.411		303.750		273.375		279.375		3.196.036			
	a. Persentase KSPD dan KPPD yang dikelola	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%									Dinas Parbudpora

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
3 Misi III : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK																		
3.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK																		
3.1.1 Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat																		
3.1.1.28 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.860.196		44.851.611		43.428.248		45.995.733		43.495.733		44.438.171		243.069.692		
	a. Angka rata-rata lama sekolah	6,26 Tahun	6,42 Tahun		6,58 Tahun		6,64 Tahun		6,80 Tahun		6,96 Tahun		7,10 Tahun		7,10 Tahun			Dinas Pendidikan
	b. Harapan Lama Sekolah	11,28%	11,30%		11,32%		11,34%		11,36%		11,38%		11,40%		11,40%			Dinas Pendidikan
	c. APM SD /Sederajat	97,08%	97,09%		97,10%		97,11%		97,12%		97,13%		97,14%		97,14%			Dinas Pendidikan
	d. APM SMP /Sederajat	84,23%	84,24%		84,25%		84,26%		84,27%		84,28%		84,29%		84,29%			Dinas Pendidikan
	e. APK SD /Sederajat	112,87%	112,89%		112,92%		112,95%		112,97%		112,99%		113,01%		113,01%			Dinas Pendidikan
	f. APK SMP /Sederajat	92,27%	92,28%		92,29%		92,31%		92,32%		92,34%		92,36%		92,36%			Dinas Pendidikan
	g. Angka Partisipasi Sekolah SD	104,39%	104,41%		104,42%		104,44%		104,45%		104,47%		104,48%		104,48%			Dinas Pendidikan
	h. Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,89%	84,90%		84,91%		84,92%		84,93%		84,95%		84,96%		84,96%			Dinas Pendidikan
	i. Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	33,01%	33,98%		34,95%		35,92%		36,89%		37,86%		38,83%		38,83%			Dinas Pendidikan
	j. Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	33,11%	35,56%		40,00%		44,44%		48,89%		53,33%		57,78%		57,78%			Dinas Pendidikan
3.1.1.29 Program Pendidikan Anak Usia Dini				5.555.207		3.807.610		3.950.871		4.316.550		3.316.550		3.316.550		24.263.338		
	a. APK PAUD	54,11%	55,91%		57,71%		59,51%		60,31%		62,11%		63,91%		63,91%			Dinas Pendidikan
3.1.1.30 Program Pendidikan Non Formal				1.565.000		1.620.000		1.920.000		2.548.123		2.548.123		2.548.123		12.749.369		
	a. Angka Melek Huruf	97,30%	97,32%		97,35%		97,38%		97,40%		97,43%		97,45%		97,45%			Dinas Pendidikan
3.1.1.31 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				3.980.000		4.860.000		6.520.000		6.007.890		5.507.890		5.507.890		32.383.670		
	a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	90,82%	90,83%		90,84%		90,85%		90,86%		90,87%		90,88%		90,88%			Dinas Pendidikan
3.1.1.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak				225.406		597.685		599.338		565.985		522.431		530.493		3.041.338		
	a. Jumlah Kematian Ibu	5	5		5		5		4		4		4		4			Dinas Kesehatan
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,35 / 1000 KH	22 / 1000 KH		21,5 / 1000 KH		21 / 1000 KH		20,5 / 1000 KH		20 / 1000 KH		19 / 1000 KH		19 / 1000 KH			Dinas Kesehatan
	c. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	NN	-		-		-		95,0%		95,5%		96,0%		96,0%			Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-										Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
3 Misi III : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK																		
3.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK																		
3.1.1 Meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat																		
3.1.1.33 Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
				159.536		732.861		734.888		653.772		603.463		612.776		3.497.295		
	a. Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	52,86%	53,00%		55,00%		57,00%		58,00%		60,00%		63,00%		63,00%	Dinas Kesehatan		
	b. Cakupan desa terhadap sanitasi layak	24,70%	26,70%		28,70%		30,70%		33,70%		35,00%		35,00%		35,00%	Dinas Kesehatan		
3.1.1.34 Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
				4.197.201		10.058.540		10.086.348		19.082.600		17.614.142		17.885.968		78.924.799		
	a. Jumlah penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS	0	1000 Orang		1500 Orang		2000 Orang		1500 Orang		3000 Orang		3500 Orang		3500 Orang	Dinas Kesehatan		
3.1.1.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																		
				835.060		966.977		969.650		862.622		796.241		808.529		5.239.079		
	a. Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA+	76,0%	76,5%		77,0%		80,0%		82,0%		84,0%		85,0%		85,0%	Dinas Kesehatan		
	b. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	Dinas Kesehatan		
	c. Cakupan desa/kelurahan UCI	95,7%	95,8%		96,0%		96,0%		96,2%		96,5%		97,0%		97,0%	Dinas Kesehatan		
	d. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96,78%	96,8%		97,0%		97,5%		97,7%		98,0%		98,0%		98,0%	Dinas Kesehatan		
	e. Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	Dinas Kesehatan		
3.1.1.36 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular																		
				-		-		-		392.693		362.474		368.068		1.123.235		
	a. Prevalensi tekanan darah tinggi	24,6%	24,2%		24,0%		23,9%		23,6%		23,5%		23,4%		23,4%	Dinas Kesehatan		
	b. Prevalensi obesitas pada penduduk 18+ tahun	12,3%	12,0%		11,7%		11,3%		11,0%		10,6%		10,3%		10,3%	Dinas Kesehatan		
	c. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	22,9%	22,0%		21,0%		20,0%		18,0%		16,0%		15,4%		15,4%	Dinas Kesehatan		
3.1.1.37 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
				193.042		749.944		752.017		669.011		617.529		627.059		3.608.601		
	a. Persentase Rumah Tangga PHBS	51,1%	52,0%		53,0%		55,0%		56,0%		57,0%		58,0%		58,00%	Dinas Kesehatan		
3.1.1.38 Program Perbaikan gizi masyarakat																		
				214.024.952		599.263.520		600.920.265		534.592.015		493.453.710		501.068.814		2.943.323.276		
	a. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	83%	80%		80%		75%		1%		1%		1%		1%	Dinas Kesehatan		
	b. Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita	13%	13%		13%		12%		12%		11%		10%		10%	Dinas Kesehatan		
	c. Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan		
	d. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	63,09%	64%		65%		67%		70%		72%		75%		75%	Dinas Kesehatan		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-										Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
3 Misi III : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK																		
3.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK																		
3.1.1 Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat																		
3.1.1.38 Program Perbaikan gizi masyarakat																		
				214.024.952		599.263.520		600.920.265		534.592.015		493.453.710		501.068.814		2.943.323.276		
	e. Persentase ASI Eksklusif	54,7%	55%		56%		57%		58%		59%		60%		60%		Dinas Kesehatan	
	f. Prevalensi pendek dan sangat pendek	37,9%	37%		35%		33%		31%		29%		28%		28%		Dinas Kesehatan	
3.1.2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan																		
3.1.2.39 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak																		
				21.030		625.937		430.000		394.488		357.109		370.000		2.198.563		
	a. Indeks Pembangunan Gender	59,06%	59,81%		60,56%		61,31%		62,06%		62,81%		63,56%		63,56%		Dinas Sosial PPPA	
	b. Jumlah pembentukan kecamatan layak anak	NA						2 Kecamatan		2 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan				
	c. Persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	NA	-		-		-		9,86%		11,30%		12,00%		12,00%		Dinas Sosial PPPA	
3.1.3 Menekan laju pertumbuhan penduduk																		
3.1.3.40 Program Pengendalian Penduduk																		
				-		-		587.823		99.490		85.800		85.800		858.913		
	a. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,94%	0,78%		0,78%		0,78%		0,77%		0,76%				0,75%		Dinas PPKB	
3.1.3.41 Program Keluarga Berencana																		
				-		2.865.741		2.774.271		1.503.605		1.374.710		1.374.710		9.893.036		
	a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	4,5%	4,4%		4,3%		4,2%		4,0%		3,8%		3,5%		3,5%		Dinas PPKB	
	b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65,0%	65,5%		66,0%		66,5%		67,0%		67,5%		68,0%		68,0%		Dinas PPKB	
	c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,0%	13,0%		12,0%		11,0%		10,0%		9,0%		8,0%		8,0%		Dinas PPKB	
	d. TFR (TOTAL FERTILITY RATE)	NA	-		-		-		2,58 Anak		2,56 Anak		2,50 Anak		2,50 Anak		Dinas PPKB	
3.1.4 Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK																		
3.1.4.42 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
				305.340		2.054.332		1.288.554		274.857		479.270		290.053		4.692.405		
	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	NA	60%		70%		75%		90%		95%		100%		100%		Dinas Nakertrans	
	b. Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	NA	60%		70%		75%		80%		90%		90%		90%		Dinas Nakertrans	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
4 Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif																		
4.1 Tujuan : Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib																		
4.1.1 Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya																		
4.1.1.43 Program Pengembangan Kawasan Kebangsaan																		
		Persentase swadaya masyarakat a. terhadap program pemberdayaan masyarakat	NA	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	851.862		Badan Kesbangpol, Dinas Perkim
4.1.2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat																		
4.1.2.46 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan																		
		a. Cakupan rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	NA	20%	20%	25%	30%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	799.048		Satpol PP dan Damkar
4.1.2.47 Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah																		
		a. Persentase penegakan Perda,	NA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	1.806.444		Satpol PP dan Damkar
		b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	NA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%			Satpol PP dan Damkar
4.1.2.48 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan																		
		a. Presentase konflik yang difasilitasi	NA	67%	70%	75%	71%	73%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	2.079.147		Badan Kesbangpol	
5 Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis																		
5.1 Tujuan : Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah																		
5.1.1 Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa																		
5.1.1.49 Program Penataan Pelayanan Publik																		
		a. Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	749.139		Sekretariat Daerah, DPMPPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
5.1.1.50 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																		
		a. Persentase Bumdes yang aktif	NA	-	-	-	89,04%	95,89%	100%	100%	100%	100%	100%	2.563.207		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-										Kondisi Akhir 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
5 Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis																		
5.1 Tujuan : Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah																		
5.1.2 Meningkatnya nilai investasi pembangunan																		
5.1.2.51 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																		
	a. Nilai Investasi PMDN (IDR)	625.002	-	-	541.060	-	430.099	-	585.061	-	585.061	-	586.000	-	2.727.281	-		
	b. Nilai Investasi PMA (\$)	8.178.878	-	-	-	-	-	5.100.000	-	5.202.000	-	5.306.040	-	15.608.040	-	0	DPMPTSP	
5.1.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government																		
5.1.3.52 Program e government																		
	a. Persentase akses internet yang terlayani	NA	-	69%	-	77,42%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Kominfo	
	b. Persentase peningkatan jangkauan TIK	NA	-	-	-	-	-	86%	-	95%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Kominfo	
	c. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	NA	-	-	-	-	-	45%	-	61%	-	76%	-	76%	-	76%	Dinas Kominfo	
5.1.3.53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa																		
	a. Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat desa/kecamatan	NA	-	-	-	-	-	10,8%	-	12,9%	-	15,1%	-	15,1%	-	15,1%	Dinas Kominfo & Bagian Humas Setda	
	b. Persentase layanan telekomunikasi di desa/kecamatan	NA	-	-	-	-	-	86%	-	95%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Kominfo & Bagian Humas Setda	
5.1.3.54 Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	a. Persentase keselarasan pembangunan	70%	75%	78%	84%	89%	93%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	Bappeda	
5.1.3.55 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
	a. Persentase peningkatan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakeuda	
5.1.3.56 Program Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah																		
	a. Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakeuda	
5.1.3.57 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																		
5.1.4 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah																		
5.1.4.58 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDF																		
	a. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	56%	71%	75%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	
	b. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	Sekretariat Daerah	
	c. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai " B "	CC	40%	50%	60%	65%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Inspektorat	
5.1.4.59 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																		
	a. Meningkatnya level IACM (Internal Auditor Capability Model)	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
5.1.4.60 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
	a. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Bakeuda	

B

A

B

VII

Kerangka
Pendanaan
Pembangunan
dan Program
Perangkat
Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel VII.1. Untuk mengaplikasikan program prioritas, maka SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas guna melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut. Adapun program prioritas yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan tersebut beserta target pendanaan pembangunan dimuat pada tabel VII.2 berikut ini:

Tabel VII.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode	Uraian Belanja	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	447.288.783.710,26	467.979.364.431,15	482.481.637.456,23	558.450.215.905,32	570.581.174.725,29	583.253.737.309,86
	BELANJA	1.111.478.379.210,01	1.088.218.209.854,20	1.104.442.129.176,28	1.132.215.147.874,05	1.103.577.910.695,40	1.124.444.949.988,30
	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>445.288.783.710,26</i>	<i>465.479.364.431,15</i>	<i>479.981.637.456,23</i>	<i>556.950.215.905,32</i>	<i>568.581.174.725,29</i>	<i>581.253.737.309,86</i>
	Belanja Pegawai	388.937.334.284,05	398.660.767.641,15	408.627.286.832,18	410.115.293.999,03	422.418.752.819,00	435.091.315.403,57
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	13.523.667.500,00	10.332.612.500,00	10.302.612.500,00	6.372.500.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.900.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil	1.055.932.926,21	2.014.135.290,00	2.095.373.508,30	1.936.402.000,00	2.136.402.000,00	2.136.402.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	34.871.849.000,00	49.471.849.000,00	53.956.364.615,75	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	<i>Belanja Langsung</i>	<i>666.189.595.499,75</i>	<i>622.738.845.423,05</i>	<i>624.460.491.720,05</i>	<i>575.264.931.968,73</i>	<i>534.996.735.970,11</i>	<i>543.191.212.678,44</i>
	Belanja Pegawai	99.928.439.324,96	93.410.826.813,46	93.669.073.758,01	57.242.673.351,79	52.837.694.458,42	53.653.099.200,54
	Belanja Modal	399.713.757.299,85	373.643.307.253,83	374.676.295.032,03	318.395.082.753,03	293.893.717.999,10	298.429.160.618,10
	Belanja Barang dan Jasa	166.547.398.874,94	155.684.711.355,76	156.115.122.930,01	199.627.175.863,91	188.265.323.512,59	191.108.952.859,80

Tabel VII.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
BELANJA LANGSUNG																		
Fokus Layanan Urusan Wajib																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Dinas Pendidikan																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	2.287.628.747	100%	2.957.300.000	100%	2.878.500.000	100%	2.083.811.600	100%	1.583.811.600	100%	1.583.811.600	100%	13.374.863.547	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	793.070.000	100%	1.306.000.000	100%	947.000.000	100%	2.524.900.000	100%	2.433.667.000	100%	2.433.667.000	100%	10.438.304.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	36.770.566	100%	240.000.000	100%	50.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	431.770.566	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	225.000.000	100%	240.000.000	100%	255.000.000	100%	787.009.000	100%	787.009.000	100%	787.009.000	100%	3.081.027.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	70.550.000	B	76.000.000	B	82.000.000	-	19.000.000	-	19.000.000	-	19.000.000	B	285.550.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NN	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	42.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	130.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	54,11%	55,91%	5.555.206.739	57,71%	3.807.610.000	59,51%	3.950.871.000	60,31%	4.316.550.000	62,11%	3.316.550.000	63,91%	3.316.550.000	63,91%	24.263.337.739	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah	6,26 th	6,42 th	20.860.195.524	6,58 Th	44.851.611.043	6,64 th	43.428.247.687	7 Tahun	45.995.733.400	7 Tahun	43.495.733.493	7 Tahun	44.438.170.575	7 Tahun	243.069.691.721	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah	11,28%	11,30%		11,32%		11,34%		11,36%		11,38%		11,40%		11,40%			
	APM SD /Sederajat	97,08%	97,09%		97,10%		97,11%		97,12%		97,13%		97,14%		97,14%			
	APM SMP /Sederajat	84,23%	84,24%		84,25%		84,26%		84,27%		84,28%		84,29%		84,29%			
	APK SD /Sederajat	112,87%	112,89%		112,92%		112,95%		112,97%		112,99%		113,01%		113,01%			
	APK SMP /Sederajat	92,27%	92,28%		92,29%		92,31%		92,32%		92,34%		92,36%		92,36%			
	Angka Partisipasi Sekolah SD	104,39%	104,41%		104,42%		104,44%		104,45%		104,47%		104,48%		104,48%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,89%	84,90%		84,91%		84,92%		84,93%		84,95%		84,96%		84,96%			
	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,22%	89,23%		89,24%		89,25%		-		-		-		-			
	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	95,56%	96,63%		97,37%		98,11%		-		-		-		-			
	Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demontrasi dan eksperimen peserta didik	13,33%	15,55%		17,77%		19,99%		-		-		-		-			
	Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	21,08%	21,57%		22,06%		22,55%		-		-		-		-			
	Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	40,00%	42,22%		44,44%		46,66%		-		-		-		-			
	Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	60,80%	71,16%		71,75%		72,47%		-		-		-		-			
	Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	61,13%	61,83%		62,89%		63,30%		-		-		-		-			
	Sekolah Rujukan SD	-	1 Unit		2 Unit		4 Unit		-		-		-		-			
	Sekolah Rujukan SMP	-	-		1 Unit		2 Unit		-		-		-		-			
	Persentase penjarangan siswa SD setingkat	100%	100%		100%		100%		-		-		-		-			
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	-	25%		50%		75%		-		-		-		-			
	Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	33,01%	33,98%		34,95%		35,92%		36,89%		37,86%		38,83%		38,83%			
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	33,11%	35,56%		40%		44,44%		48,89%		53,33%		57,78%		57,78%			
Program Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi	Meningkatnya kualitas lulusan SMU/ sederajat	100%	100%	4.666.825.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666.825.650	Dinas Pendidikan		
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	97,30%	97,32%	1.565.000.000	97,35%	1.620.000.000	97,38%	1.920.000.000	97,40%	2.548.123.000	97,43%	2.548.123.000	97,45%	2.548.123.000	97,45%	12.749.369.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD	488 orang	122 orang	100 orang	84 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP	985 orang	561 orang	125 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA	2.176 orang	859 orang	402 orang	360 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya mutu pendidikan luar biasa	100%	100%	438.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.000.000	Dinas Pendidikan	
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,82%	90,83%	3.980.000.000	90,84%	4.860.000.000	90,85%	6.520.000.000	90,86%	6.007.890.000	97,87%	5.507.890.000	90,88%	5.507.890.000	90,88%	32.383.670.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio guru/murid SD sederajat	61,11%	61,14%	870.000.000	61,19%	1.185.000.000	61,21%	1.280.000.000	61,24%	852.035.000	61,27%	352.035.000	61,31%	352.035.000	61,31%	4.891.105.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rasio guru/murid SMP sederajat	59,43%	59,44%		59,46%		59,47%		59,49%		59,50%		59,52%		59,52%			
	Rasio guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar	NN	-		-		-		61,24%		61,27%		61,31%		61,31%			
Kesehatan																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	7.888.317.875	100%	8.108.723.136	100%	8.789.604.794	100%	8.427.174.870	100%	8.678.905.179	100%	9.254.203.771	100%	51.146.929.626	Dinkes; RSUD	Dinkes; RSUD
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	9.346.109.972	100%	6.062.809.521	100%	4.477.620.225	100%	5.120.280.757	100%	4.121.425.675	100%	4.258.396.601	100%	33.386.642.752	Dinkes; RSUD	Dinkes; RSUD
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	209.537.150	100%	214.360.400	100%	244.538.333	100%	273.414.735	100%	302.996.515	100%	353.814.371	100%	1.598.661.504	Dinkes; RSUD	Dinkes; RSUD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	653.075.774	100%	889.701.922	100%	921.380.021	100%	889.348.623	100%	889.721.622	100%	933.485.056	100%	5.176.713.018	Dinkes; RSUD	Dinkes; RSUD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	51.768.154	100%	-	100%	-	100%	1.449.464.441	100%	1.337.924.223	100%	1.358.571.409	100%	4.197.728.226	Dinkes; RSUD	Dinkes; RSUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	95%	95%	2.786.933.679	95%	4.711.790.758	96%	4.729.775.675	96%	4.189.921.050	97%	3.867.495.267	97%	3.927.179.437	97%	24.213.095.865	Dinkes; RSUD	Dinkes
	Persentase Pemberian Informasi Obat (PIO)	100%	100%		100%		100%		-	-	-	-	-	-	-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS	0	1000	4.197.201.141	1500	10.058.539.528	2000	10.111.347.729	2500	19.232.599.985	3000	17.791.942.185	3500	18.096.328.108	3500	79.487.958.676	Dinkes	Dinkes
	Jumlah komite rumah sakit	NA	-		-		-		-		-		-		-		RSUD	RSUD
	Jumlah media promosi di RSU	NA	-		-		-		4		4		4		4			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Kematian ibu karena persalinan disebabkan perdarahan < 1%	NA	-			-		<1%		<1%		<1%		<1%				
	Kematian ibu karena persalinan disebabkan pre-eklampsia < 30 %	NA	-		-	-		<30%		<30%		<30%		<30%				
	Kematian ibu karena persalinan disebabkan sepsis < 0,2 %	NA	-		-	-		<0.2%		<0.2%		<0.2%		<0.2%				
	Persentase pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / Health care Associated infection (HAI) di rumah sakit	NA	-		-	-		0,75		0,75		0,75		0,75				
	Persentase penulisan resep sesuai formularium	NA	-		-	-		0,79		0,8		0,81		0,81				
	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis sesuai dengan standar	NA	-		-	-		0,75		0,76		0,77		0,77				
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga PHBS	51,10%	52%	221.442.320	53%	774.943.577	55%	783.266.898	56%	669.010.935	57%	617.528.730	58%	627.058.591	58%	3.693.251.050	Dinkes	Dinkes
	Jumlah desa siaga aktif	42	45		48		51		-		-		-		51			
	Jumlah posyandu	277	280		280		282		-		-		-		282			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,05%	72,07%		72,08%		72,09%		-		-		-		72,09%		RSUD	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,83%	0,8%	214.024.952	0,8%	599.263.520	0,75%	600.920.265	0,75%	534.592.015	0,70%	493.453.710	0,70%	501.068.814	0,70%	2.943.323.276	Dinkes	Dinkes
	Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita	13,20%	13,00%		12,50%		12,00%		11,50%		11,00%		10,00%		10,00%			
	Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	63,09%	64%		65%		67%		70,00%		72,00%		75,00%		75,00%			
	Persentase ASI eksklusif	54,7%	55%		56%		57%		58,00%		59,00%		60,00%		60,00%			
	Prevalensi pendek dan sangat pendek	37,90%	37,00%		35,00%		33,00%		31,00%		29,00%		28,00%		28,00%			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	52,86%	53%	159.535.777	55%	732.861.431	57%	734.887.526	58,0%	653.772.266	60,0%	603.462.718	63,0%	612.775.508	63,0%	3.497.295.227	Dinkes	Dinkes

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)				
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
	Cakupan desa terhadap sanitasi layak	24,70%	26,70%		28,70%		30,70%		33,7%		35,0%		35,0%		35,0%				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA+	76%	76,5%	835.060.437	77%	966.976.648	80%	969.649.987	82%	862.622.165	84%	796.241.051	85%	808.528.846	85%	5.239.079.135	Dinkes	Dinkes	
	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Cakupan desa/kecamatan UCI	95,7%	95,8%		96%		96%		96%		97%		97%		97%				
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96,78%	96,8%		97%		97,5%		98%		98%		98%		98%				
	Cakupan desa/kecamatan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	31,20 %	35 %	228.739.062	38 %	489.948.872	40 %	491.303.403	-	-	-	-	-	-	40 %	1.209.991.337	Dinkes		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18,5 %	20 %		21,5%		23%		-		-		-		23%				
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas	17 unit	17 unit	19.290.415.623	17 unit	6.424.210.836	18 unit	6.441.971.441	-	5.730.920.878	-	5.289.910.980	-	5.371.546.232	18 unit	48.548.975.990	Dinkes	Dinkes	
	Jumlah Puskesmas rawat inap	8 unit	8 unit		9 unit		9 unit		-		-		-		9 unit				
	Jumlah Pustu	59 unit	59 unit		59 unit		60 unit		-		-		-		60 unit				
	Jumlah Polindes	28 unit	28 unit		28 unit		29 unit		-		-		-		29 unit				
	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan	NN	-		-		-		96,7%		97,5%		100,0%		100,0%				
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,02%	93,5%	299.000.000	94%	497.893.542	94,5%	544.107.694	-	760.000.000	-	831.000.000	-	850.000.000	94,5%	3.782.001.236	Dinkes	RSUD	
	Persentase cakupan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dan Balita	Angka Harapan Hidup	65,43	65,45	52.325.243	65,50	36.208.053	65,55	36.308.155	65,65	32.300.541	65,65	29.814.927	65,70	30.275.038	65,70	217.231.957	Dinkes	Dinkes	
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan	Persentase meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	40%	40%	73.148.693	45%	206.426.393	55%	206.997.086	60%	184.149.206	65%	169.978.425	70%	172.601.575	70%	1.013.301.378	Dinkes	Dinkes	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak	Jumlah kematian ibu	5	5	225.405.955	5	597.685.411	5	599.337.794	4	565.984.757	4	522.430.696	4	530.492.979	4	3.041.337.592	Dinkes	Dinkes
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	2,35 / 1.000 KH	22,00 / 1.000 KH		21,50 / 1.000 KH		21,00 / 1.000 KH		20,50 / 1.000 KH		20,00 / 1.000 KH		19,00 / 1.000 KH		19,00 / 1.000 KH			
	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	NN	-		-		-		95,0%		95,5%		96,0%		96,0%			
Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ketersediaan profil kesehatan	100%	100%	1.103.010.168	100%	2.348.437.329	100%	1.922.925.861	-	423.500.000	-	212.800.000	-	233.500.000	100%	6.244.173.357	Dinkes	
	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD	RSUD
Program Pengembangan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	-	11,76%	427.866.030	29,41%	1.274.231.493	47,00%	1.277.754.279	64,70%	1.136.718.587	70,58%	1.049.245.010	76,50%	1.065.437.226	76,50%	6.231.252.625	Dinkes	Dinkes
Program Pertizinan Praktek Kesehatan	Jumlah izin praktek yang diterbitkan	20 izin	20 izin	12.661.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 izin	12.661.028	Dinkes	
Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan (JKN)	76.401	77.100	6.803.343.962	77.800	10.402.403.335	78.500	10.431.162.195	-	-	-	-	-	-	78.500	27.636.909.491	Dinkes	
Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	17 puskesmas	17 puskesmas	4.304.749.373	17 puskesmas	440.198.496	17 puskesmas	441.415.485	-	-	-	-	-	-	17 puskesmas	5.186.363.354	Dinkes	
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,02%	93,5%	622.554.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5%	622.554.809	Dinkes	
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	100%	100%	252.500.000	100%	216.489.000	100%	259.786.800	-	311.000.000	-	374.000.000	-	400.000.000	100%	1.813.775.800	Dinkes; RSUD	RSUD
	BOR (Bed Occupancy Rate)	29,72	29,72		29,98		30,24		30,49		31,01		31,27		31,27			
	ALOS (Average Length Of Stay)	2,20	2,20		2,23		2,76		2,78		3,09		3,11		3,11			
	BTO (Bed Turn Over)	34,16	34,16		37,73		38,67		39,62		40,56		41,5		41,5			
	TOI (Turn Over Interval)	7,5	7,5		7,47		7,45		7,42		7,39		7,36		7,36			
	NDR (Net Death Rate)	0,0014	0,0014		0,0013		0,0012		0,0012		0,0012		0,0011		0,0011			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan			
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)					
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)		
	GDR (Gross Death Rate)	0,0008	0,0008		0,0007		0,0007		0,0007		0,0006		0,0006		0,0006		0,0006			
	Bab penilaian akreditasi RSUD yang terakreditasi	-	4		4		4		10		10		10		10		10			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)	-	-	-	-	-	-	-	392.693.020	-	362.474.227	-	368.068.022	-	1.123.235.269			Dinkes	Dinkes	
	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,60%	24,20%		24,00%		23,90%		23,60%		23,50%		23,40%		23,40%		23,40%			
	Prevalensi obesitas pada penduduk 18+ tahun	12,30%	12,00%		11,70%		11,30%		11,00%		10,60%		10,30%		10,30%		10,30%			
	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	22,90%	22,00%		21,00%		20,00%		18,00%		16,00%		15,40%		15,40%		15,40%			
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit kategori Kelas "C"	90%	91%	12.229.438.000	92%	9.061.133.171	93%	10.228.360.363	94%	8.809.446.400	95%	6.238.875.341	96%	4.767.000.000	96%	51.334.253.275		RSUD	RSUD	
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	70%	71%	2.267.648.000	72%	1.200.000.000	73%	1.252.185.369	74%	722.000.000	75%	750.000.000	76%	780.000.000	76%	6.971.833.369		RSUD	RSUD	
Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Persentase pelaksanaan PPI	NA	100%	36.547.805	100%	13.600.000	100%	14.960.000	-	-	-	-	-	100%	65.107.805		RSUD			
Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelaksanaan RSIB	NA	100%	15.690.000	100%	6.624.000	100%	7.286.400	-	-	-	-	-	100%	29.600.400		RSUD			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	Persentase peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap per tahun	NA	-	-	-	-	-	10%	5.700.000.000	12%	6.578.000.000	15%	7.564.700.000	15%	19.842.700.000		RSUD			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.871.636.892	100%	2.584.032.896	100%	2.585.132.312	100%	2.242.255.400	100%	2.069.825.900	100%	2.101.701.000	100%	13.454.584.400		Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	15.923.332.000	100%	7.585.229.000	100%	2.796.410.000	100%	6.450.152.313	100%	5.954.135.600	100%	6.045.829.000	100%	44.755.087.913		Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	52.560.000	100%	57.000.000	100%	57.000.000	100%	71.037.750	100%	65.574.950	100%	66.584.900	100%	369.757.600		Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	236.469.000	100%	140.000.000	100%	229.204.000	100%	154.640.000	100%	142.748.184	100%	144.946.600	100%	1.048.007.784		Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	208.361.000	B	7.000.000	B	14.000.000	-	29.768.200	-	27.479.100	-	27.902.300	B	314.510.600		Dinas PUPR	Dinas PUPR	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	196.160.000	100%	8.000.000	100%	20.000.000	100%	19.330.000	100%	17.843.500	100%	18.118.500	100%	279.452.000	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	993,88 Km	993,88 Km	208.751.551.000	995,88 Km	122.049.897.150	997,88 Km	137.512.333.000	1.177,77 Km	169.620.750.000	1.177,77 Km	156.576.735.406	1.177,77 Km	158.992.895.482	1.177,77 Km	953.504.162.038	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	74,43%	76,75%		78,64%		80,07%		81,42%		82,68%		83,87%		83,87%	-		
	Persentase jalan Kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap	54,05%	54,05%		58,34%		62,64%		66,93%		71,23%		75,52%		75,52%	-		
	persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	20,40%	23,43%		26,29%		29,58%		32,85%		36,45%		38,78%		38,78%	-		
	Persentase terhubungnya desa/keurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	NA	-		-		-		61,29%		73,12%		84,94%		84,94%	-		
	Jumlah Jembatan Penghubung Kecamatan Nipah Panjang - Kec. Sadu	-	-		-		-		0 Unit		1 unit		-		1 Unit	-		
	Panjang jalan alternatif menuju Ujung Jabung	-	-		-		-		-		-		5 km		5 km	-		
	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (Km)	NA	5 Km		75 Km		100 Km		-		-		-		180,0 Km	-		
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	176 Km	12 Km	4.371.645.000	12 Km	724.994.800	12 Km	6.832.653.000	-	6.454.473.500	-	5.958.124.500	-	6.049.879.700	36 Km	30.391.770.500	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Panjang saluran drainase perkotaan	8 Km	-		3,5 Km		7 Km		-		-		-		11 Km	-		
	Persentase Jalan yang memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air	NA	-		-		-		0,09%		0,09%		0,09%		0,27 Km	-		
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebnamargaan	Jumlah Pengadaan Alat Berat	NA	3 Unit	322.457.000	4 Unit	4.183.677.000	3 Unit	6.595.477.000	-	15.541.320.000	-	14.338.192.500	-	14.559.000.700	10 unit	55.540.124.200	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Persentase Alat Berat dalam kondisi baik	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD peralatan dan perbekalan (Km)	NA	-	-	-	-	50,0 Km	50,0 Km	27,5 Km	127,5 Km	-							
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	532,26 Km	129 Km	42.361.980.000	130 Km	19.740.986.650	135 Km	4.256.604.000	59 Km	28.028.500.000	63 Km	25.873.108.350	66 Km	26.273.554.200	582 Km	146.534.733.200	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	NA	-	-	-	-	36%	38%	40%	40%	-	-	-	-	-	-		
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,61%	66,79%	71,03%	74,45%	75,95%	77,45%	78,95%	78,95%	-	-	-	-	-	-	-		
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	52,86%	53%	59.117.000	55%	123.628.000	57%	123.969.000	-	-	-	-	-	-	57,0%	306.714.000	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				9.919.437.000		4.819.045.150		4.344.153.000		-		-		-		19.082.635.150	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Peningkatan Pengelolaan Air Bersih				-		2.818.732.000		2.462.676.365								5.281.408.365	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan kebutuhan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	5.367.170.000	100%	80.285.850	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.447.455.850	Dinas PUPR	
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani	NA	100%	278.143.338	100%	2.911.793.000	100%	1.177.065.000	100%	1.527.794.875	100%	1.410.307.500	100%	1.432.026.500	100%	8.737.130.213	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota	100%	100%	-	100%	4.061.546.000	100%	4.072.773.000	100%	149.324.250	100%	137.841.300	100%	139.964.000	100%	8.561.448.550	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%	-	100%	250.133.000	100%	197.300.000	-	373.135.712	-	340.441.600	-	345.684.400	100%	1.506.694.712	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Persentase Tindakanjuit Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	100%	100%	-	100%	3.238.702.000	100%	2.554.623.000	-	-	-	-	-	-	100%	5.793.325.000	Dinas PUPR	
Program evaluasi dan pengendalian dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan	100%	100%	-	100%	195.491.000	100%	154.200.000	-	-	-	-	-	-	100%	349.691.000	Dinas PUPR	
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	NA	-	-	80%	354.850.000	80%	279.900.000	80%	320.394.750	80%	295.756.400	80%	300.311.000	80%	1.551.212.150	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Bidang Jasa Konstruksi yang disertifikasi 100%	NA	100%	-	100%	1.610.958.000	100%	1.270.691.000	-	-	-	-	-	-	100%	2.881.649.000	Dinas PUPR	
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kecamatan yang dibina	-	-	-	2	1.102.047.000	2	869.273.000	-	66.205.250	-	61.114.000	-	62.055.500	4,00	2.160.694.750	Dinas PUPR	Dinas PUPR
	Persentase terlaksananya sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan	NA	-	-	-	-	-	64%	-	82%	-	100%	-	100%				
Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	-	100%	1.735.343.161	100%	1.740.135.000	100%	2.547.202.000	100%	2.353.380.100	100%	2.364.681.436	100%	10.740.741.697	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	-	100%	3.699.220.000	100%	3.873.310.000	100%	3.131.810.000	100%	3.131.810.000	100%	3.131.810.000	100%	16.967.960.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	-	100%	33.256.000	100%	33.347.000	100%	60.500.000	100%	54.050.000	100%	54.050.000	100%	235.203.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	41.209.000	100%	41.322.000	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	257.531.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	-	B	98.902.000	B	99.175.000	-	92.800.000	-	92.800.000	-	97.800.000	B	481.477.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	-	100%	13.186.000	100%	13.221.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	54.007.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman	Persentase pengurangan permukiman kumuh	5,16%	5,15%	-	5,13%	149.178.000	5,11%	149.590.000	5,12%	2.500.000.000	5,11%	2.160.000.000	5,09%	1.660.000.000	5,09%	6.618.768.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan Permukiman	Ketersediaan rencana permukiman penduduk	100%	100%	-	100%	86.945.000	100%	87.185.000	-	-	-	-	-	100%	174.130.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	63,48%	63,86%	-	64,33%	1.000.000.000	65,09%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	65,09%	2.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Fasilitasi, Bantuan Teknis dan sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi, bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenaan	100%	100%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	100%	2.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	60,34%	60,34%	-	60,81%	1.000.000.000	61,75%	1.000.000.000	62,29%	500.000.000	62,73%	112.353.614	63,07%	112.353.614	63,07%	2.724.707.228	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan lingkungan kondisi baik (%)	19%	23,24%	27.282.458.000	27,43%	10.807.024.280	31,63%	8.417.826.280	36,70%	12.996.529.986	40,59%	13.082.719.107	44,22%	13.104.707.239	44,22%	85.691.264.892	Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 11 Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 11 Kecamatan
	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100%	100%		100%		100%		-		-		-	100%				
	Persentase Pelayanan alat berat kecamatan								70%		80%		85%		85%			
Program Penyediaan sarana prasarana air bersih	Persentase layanan air bersih	NA	-		-		-		28,09%	8.037.609.044	28,65%	6.328.844.026	29,22%	7.021.817.438	29,22%	21.388.270.508		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	NA	-		-		-		75,15%		77,90%		80,65%		80,65%			
Program Pengelolaan RTH	Persentase taman yang terbangun	NA	-		-		-		77,00%	2.467.628.770	88,00%	2.467.628.770	100,00%	2.467.628.770	100,00%	7.402.886.310		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penerangan Lampu Kota	Persentase LPJU yang terpasang	NA	-		-		-		66,00%	2.898.012.400	83,00%	2.898.012.400	100,00%	3.264.492.800	100,00%	9.060.517.600		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyediaan sarana prasarana sanitasi	Persentase sanitasi layak	NA	NA		-		-		66,90%	1.615.800.000	67,00%	1.615.800.000	67,23%	1.532.748.504	67,23%	4.764.348.504		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan Strategis Provinsi	Persentase ketersediaan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	100%	100%		100%		100%	3.000.000.000	-		-		-		100%	3.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Panjang jalan lingkungan	442,51	18,40		21,35		19,87		-		-		-		19,87			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Persentase jalan lingkungan kondisi baik (%)	19,04%	23,20%		28,02%		32,51%		-		-		-		32,51%			
Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	3.290.396.674	100%	5.186.770.720	100%	4.886.497.761	100%	3.863.248.400	100%	3.812.336.364	100%	3.835.519.365	100%	24.874.769.284	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	643.561.780	100%	867.202.865	100%	1.174.413.500	100%	584.105.600	100%	493.944.256	100%	543.000.000	100%	4.306.228.001	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	151.099.209	100%	45.707.224	100%	169.000.000	100%	49.600.000	100%	95.500.000	100%	119.782.819	100%	630.689.252	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	152.298.954	100%	372.715.099	100%	455.024.000	100%	333.450.000	100%	217.000.000	100%	222.000.000	100%	1.752.488.053	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	195.560.599	-	271.760.662	-	276.758.000	100%	127.415.000	100%	119.815.000	100%	131.815.000	100%	1.123.124.261	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
	Nilai SAKIP	CC	CC		B		B		-		-		-		B	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	NA	100%	97.788.923	100%	111.401.255	100%	124.960.000	100%	116.500.000	100%	123.750.000	100%	133.703.268	100%	708.103.446	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar	BPBD; Kesbangpol; Satpol PP Damkar
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	NA	20%	-	20%	159.222.000	25%	296.722.000	30%	103.104.000	40%	120.000.000	50%	120.000.000	50%	799.048.000	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar
	Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	NA	15%		20%		25%		-		-		-		50%			
	Indeks rasa aman	NA	NA		NA		NA		0,5		0,5		0,5		0,5			
Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketertarikan Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakan Perda	NA	50%	495.104.000	50%	636.142.000	50%	253.803.161	50%	175.395.000	50%	123.000.000	50%	123.000.000	50%	1.806.444.161	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertarikan, ketertarikan, keindahan)	NA	50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%			
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	91%	91%	-	93%	265.251.000	95%	286.349.000	60%	272.833.000	60%	128.000.000	63%	128.000.000	63%	1.080.433.000	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Persentase cakupan layanan kebakaran	NA	80%		85%		90%		60%		60%		63%		63%			
Program Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5 desa	6 desa	51.524.078	3 desa	59.153.255	3 desa	50.420.000	3 desa	28.658.000	-	-	-	-	15 desa	189.755.333	BPBD	
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	NA	-	168.097.468	-	182.815.938	-	388.730.111	3	120.333.000	3	161.992.000	3	140.865.800	14	1.162.834.317	BPBD	BPBD
Program Tanggap Darurat	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%	409.208.614	100%	671.316.002	100%	482.248.500	100%	276.292.000	100%	200.000.000	100%	193.000.000	100%	2.232.065.116	BPBD	BPBD
Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%	63.370.282	100%	80.638.038	100%	84.995.000	100%	54.000.000	100%	48.100.000	100%	51.100.000	100%	382.203.320	BPBD	BPBD
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	85,45%	86,08%	297.061.000	88,85%	514.500.000	90,55%	516.000.000	93,75%	171.862.000	97,40%	340.000.000	97,85%	340.000.000	97,85%	2.179.423.000	Kesbangpol	Kesbangpol
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	71	72		88,85%		76		-		-		-		76			
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah konflik antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan yang akan diselesaikan	87,66%	88,85%	509.604.807	88,85%	697.000.000	93,85%	697.000.000	96,62%	189.143.000	-		-		96,62	2.092.747.807	Kesbangpol	Kesbangpol
	Indeks kebebasan dari diskriminasi	NA	87,15		88,85%		83,89		-		-		-		83,89		Kesbangpol	
	Indeks kebebasan berkeyakinan	87,66	88,85		91,75		93,85		-		-		-		93,85		Kesbangpol	
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase konflik yang difasilitasi	NA	67,00%	368.000.000	70,00%	410.000.000	75,00%	800.000.000	71,42%	172.542.000	73,33%	164.302.473	71,42%	164.302.473	71,42%	2.079.146.946	Kesbangpol	Kesbangpol
	Nilai RAD	62,70	60,35		65,00		65,15		-		-		-		-		Kesbangpol	Kesbangpol
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang difasilitasi	NA	67%	207.000.410	70,00%	385.000.000	-		-		-		-		67,00%	592.000.410	Kesbangpol	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat	15,81%	15,00%	77.487.590	-		-		14,00%	36.041.000	13,50%	30.000.000	12,50%	30.000.000	12,50%	173.528.590	Kesbangpol	Kesbangpol
Program Perwujudan Penguatan Demokrasi yang Makin Kokoh	Meningkatnya jumlah masyarakat yang ikut pemilu	NA	NA		-		-		100%	122.187.000	100%	100.187.000	100%	100.187.000	100%	322.561.000		Kesbangpol

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Aspek Hak-Hak Politik	57,90	58,30	356.586.000	62,55	414.000.000	63,25	419.000.000	68,15	107.517.000	-	95.000.000	-	95.000.000	68,15	1.487.103.000	Kesbangpol	Kesbangpol
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	71,00%	-	-	-	-	-	-	-	72,00%	-	-	74,00%	74,00%	-			
	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	NA	78,68	-	79,77	-	82,55	-	-	-	-	-	-	82,55	-			
Sosial																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	662.912.100	100%	810.073.200	100%	644.041.120	100%	366.078.611	100%	359.393.152	100%	362.184.700	100%	3.204.682.882	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	554.660.000	100%	397.500.000	100%	532.840.000	100%	205.032.417	100%	194.422.476	100%	194.695.039	100%	2.079.149.931	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	-	100%	25.800.000	100%	30.729.580	100%	15.525.790	100%	14.331.039	100%	14.552.199	100%	100.938.607	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	26.010.000	100%	26.010.000	100%	19.116.387	100%	21.838.384	100%	13.434.025	100%	106.408.796	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	4.296.000	B	202.425.000	B	221.913.000	-	115.810.387	-	112.380.112	-	111.229.025	B	768.053.524	Dissos PPPA	Dissos PPPA
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	10.330.390	100%	9.290.953	100%	9.592.306	100%	89.213.649	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial	24%	39%	115.748.000	54%	554.555.000	39%	578.340.000	-	294.445.193	-	274.510.968	-	267.788.412	-	2.085.387.573	Dissos PPPA	Dissos PPPA
	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan	2 orang	50 orang	-	100 orang	-	150 orang	-	-	-	-	-	-	150	-			
	Persentase rumah tangga sasaran sangat miskin yang menerima bantuan sosial	NA	-	-	-	-	-	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%			
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10 orang	25 orang	618.246.000	40 orang	1.106.905.300	55 orang	1.177.434.800	-	796.163.740	-	716.704.610	-	740.334.730	55	5.155.789.181	Dissos PPPA	Dissos PPPA

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	NA	-	-	-	-	80%	90%	100%	100%								
	Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang mendapatkan pendampingan pelayanan	NA	-	-	-	-	80%	90%	100%	100%								
	Persentase anak korban tindak kekerasan dan penelantaran yang mendapatkan pelayanan pendampingan dan pembinaan	NA	-	-	-	-	80%	80%	100%	100%								
	Persentase korban perdagangan orang yang dibina	NA	-	-	-	-	80%	80%	100%	100%								
	Persentase korban bencana sosial penerima bantuan sosial	NA	-	-	-	-	80%	80%	100%	100%								
	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan sosial	10 orang	20 orang	30 orang	40 orang	-	-	-	-	-	40 orang							
	Jumlah korban tindak kekerasan dan penelantaran yang dibina	30 orang	50 orang	70 orang	90 orang	-	-	-	-	-	90 orang							
	Jumlah korban perdagangan orang yang di bina	-	5 orang	10 orang	15 orang	-	-	-	-	-	15 orang							
	Jumlah penerima bantuan sosial bagi korban bencana sosial	-	5 orang	10 orang	15 orang	-	-	-	-	-	15 orang							
	Jumlah penerima bantuan sosial bagi korban bencana alam	200 orang	250 orang	300 orang	250 orang	-	-	-	-	-	250 orang							
	Jumlah kampung siaga bencana yang dibentuk	13%	24%	35%	46%	-	-	-	-	-	46%							
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental	71 orang	173 orang	273 orang	373 orang	-	-	-	-	-	373 orang							
	Jumlah lanjut usia tidak potensial	83 orang	150 orang	200 orang	250 orang	-	-	-	-	-	250 orang							
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	60 orang	80 orang	28.447.000	100 orang	120 orang	-	-	-	-	120 orang					28.447.000	Dissos PPPA	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pembinaan	10 orang	10 orang	63.948.000	10 orang	96.400.000	10 orang	208.375.000	-	-	-	-	-	10 orang	368.723.000	Dissos PPPA		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang dibina	11 orang	11 orang		11 orang	174.762.381	11 orang	183.000.000	-	94.523.069	-	85.012.217	-	87.769.602	11 orang	625.067.269	Dissos PPPA	Dissos PPPA
	Persentase peningkatan kapasitas pendamping sosial dan LKS yang terlatih	NA	-		-		-		70%		85%		95%	95%				
	Jumlah PSM yang dibina	6 orang	6 orang		25 orang		15 orang		-		-		-		15 orang			
	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) yang di bina	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		-		-		-		1 lembaga			
	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dibina	49 orang	49 orang		49 orang		49 orang		-		-		-		49 orang			
	Pendamping PKH yang dibina	7 orang	12 orang		23 orang		-		-		-		-		23 orang			
	Jumlah operator dan Korkap PKH yang dibina	1 orang	2 orang		4 orang		-		-		-		-		4 orang			
	Persentase Karang Taruna yang dibina	7 Kelompok	20 Kelompok		15 Kelompok		11 Kelompok		-		-		-		11 Kelompok			
	Persentase ORSOS yang dibina	2 organisasi	30 organisasi		45 organisasi		65 organisasi		-		-		-		65 organisasi			
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial/Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan Lainnya	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina	-	10 orang		10 orang	151.600.000	10 orang	112.379.055	-	-	-	-	-	10 orang	263.979.055	Dissos PPPA		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
Tenaga Kerja																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	865.002.484	100%	1.510.806.300	100%	1.711.733.000	100%	1.505.507.200	100%	1.111.115.178	100%	1.166.438.466	100%	7.870.602.628	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	1.534.875.000	100%	1.411.164.000	100%	1.523.682.000	100%	489.077.000	100%	405.754.414	100%	353.108.759	100%	5.717.661.173	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	19.290.000	100%	31.796.000	100%	58.750.000	100%	39.400.000	100%	34.621.290	100%	35.886.368	100%	219.743.658	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	83.216.000	100%	100.146.000	100%	90.000.000	100%	40.000.000	100%	42.610.818	100%	44.167.838	100%	400.140.656	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	130.864.000	B	299.563.000	B	321.375.000	-	142.925.000	-	108.604.323	-	112.572.776	B	1.115.904.099	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	111.636.000	100%	-	100%	39.600.000	100%	23.750.000	100%	28.449.823	100%	61.540.521	100%	264.976.343	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	N	75%	305.340.000	80%	2.054.332.000	85%	1.288.553.701	-	274.856.500	-	479.269.794	-	290.052.546	100%	4.692.404.540	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	N	60%	-	70%	75%	90%	95%	100%	100%								
	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	N	-	-	-	80%	90%	90%	90%									
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	N	60%	-	70%	75%	-	-	-	75%								
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	N	60%	84.056.000	75%	313.659.000	80%	485.000.100	-	255.350.800	-	276.970.318	-	198.019.139	80%	1.613.055.358	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	NA	-	-	-	-	85%	90%	100%	100%								
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMR (IDR)	1.800.000	1.800.000	178.619.000	2.000.000	198.001.000	2.200.000	430.000.000	-	-	-	-	-	2.200.000,00	806.620.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Program Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah pertemuan	4 kali	4 kali	31.521.000	4 kali	204.599.000	4 kali	459.700.276	-	202.910.000	-	191.038.502	-	321.166.479	4 kali	1.410.935.257	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	jumlah perusahaan yang telah membentuk Lembaga Bipartit	3 lembaga	5 lembaga	-	7 lembaga	9 lembaga	-	-	-	-	-	-	-	9 lembaga				
	jumlah Lembaga Tripartit yang dibentuk	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-	1 lembaga				
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	4 kasus	4 kasus	-	10 kasus	10 kasus	-	-	-	-	-	-	-	10 kasus				
	Persentase peningkatan lembaga tripartit yang dibentuk	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	59,06	59,81	352.257.100	60,56	1.081.290.239	61,31	886.603.000	62,06	1.133.487.666	62,81	1.149.108.818	63,56	1.171.999.659	63,56	5.774.746.482	Dissos PPPA; 11 Kecamatan	Dissos PPPA; 11 Kecamatan
	Jumlah pembentukan kecamatan layak anak	NA	-		-		-	2 Kecamatan		2 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan				
	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan							10%		11%		12%		12%				
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	30%	35%	40.937.500	50%	185.000.000	60%	203.000.000	-	105.886.498	-	96.161.360	-	97.841.523	60%	728.826.881	Dissos PPPA	Dissos PPPA
	Persentase partisipasi perempuan dalam bidang pekerjaan	30%	35%		50%		60%		-		-		-		60%			
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	35%		46,7%		58%		67,3%		75,0%		85,0%		85,0%			
	Cakupan korban tindak kekerasan yang telah diberikan konseling dan pendampingan	57%	59%		60%		63%		-		-		-		63%			
	Persentase wanita yang mengikuti kegiatan KIE tentang hak-hak perempuan	30%	37%		49%		58%		-		-		-		58%			
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	30%	35%		46,7%		58%		-		-		-		58%			
	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan	NA	13%		20%		29%		-		-		-		29%			
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	NA	16%	365.913.334	19%	795.860.461	21%	845.000.000	23%	413.215.602	26%	371.638.107	28%	383.692.248	28%	3.175.319.752	Dissos PPPA	Dissos PPPA
Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah penyuluhan PUG yang telah dilakukan	NA	-	60.000.000	2	70.423.462	5	70.423.462	-		-		-		5 orang	200.846.924	Dissos PPPA	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%	30%	35%	39.655.833	46,7%	343.826.929	58%	319.039.195	-	-	-	-	-	-	58%	702.521.957	Dissos PPPA	
	Cakupan korban tindak kekerasan anak yang telah mendapat konseling dan pendampingan	57%	59%		60%		63%		-		-		-		63%			
	Persentase anak yang mengikuti kegiatan KIE tentang hak-hak anak	30%	37%		49%		58%		-		-		-		58%			
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	30%	35%		46,7%		58%		-		-		-		58%			
	Cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	N	13%		20%		29%		-		-		-		29%			
	Jumlah Forum Anak Daerah yang telah dibentuk	1	1		3		5		-		-		-		5			
Pangan																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.165.560.601	100%	1.943.494.961	100%	1.932.916.879	100%	1.037.805.500	100%	1.037.805.500	100%	1.079.435.979	100%	8.197.019.420	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	406.845.000	100%	463.820.000	100%	457.705.038	100%	96.300.000	100%	103.100.000	100%	103.100.000	100%	1.630.870.038	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	19.535.000	100%	39.942.000	100%	39.416.209	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	172.893.209	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	21.119.000	100%	42.402.000	100%	41.843.110	100%	10.000.000	100%	-	100%	-	100%	115.364.110	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	-	-	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	14.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	23.466.000	100%	-	100%	-	100%	4.950.000	100%	4.950.000	100%	4.950.000	100%	38.316.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	81,5%	82,2%	18.536.677.000	82,9%	16.843.758.718	84%	16.904.983.059	-	1.749.468.500	-	1.519.772.356	-	1.519.772.356	83,6%	57.074.431.988	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2031 (Kkal / Kap / Hari)	2071 (Kkal / Kap / Hari)		2121 (Kkal / Kap / Hari)		2161 (Kkal / Kap / Hari)		2070 (Kkal / Kap / Hari)		2075 (Kkal / Kap / Hari)		2080 (Kkal / Kap / Hari)		2080 (Kkal / Kap / Hari)				
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	NA	81,5		77,3		78		80		82,50		84,20		84,20				
Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	54,16 (Gram / Kap / Hari)	54,25 (Gram / Kap / Hari)		54,35 (Gram / Kap / Hari)		54,50 (Gram / Kap / Hari)		-		-		-		54,50 (Gram / Kap / Hari)				
Stabilitas harga pangan (Gabah) tingkat produsen	Sesuai HPP	Sesuai HPP		Sesuai HPP		Sesuai HPP		-		-		-		Sesuai HPP				
Stabilitas harga pangan (Beras) tingkat konsumen	CV < 10%	CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%		-		-		-		CV < 10%				
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	9 desa	9 desa		10 desa		11 desa		-		-		-		11 desa				
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	NA	-		78,0		80,0		0,0		0,0		0,0		80,0				
Jumlah Lembaga Keuangan Desa (LKD) Desa Mandiri Pangan menjadi Koperasi Unit Desa (Unit)	NA	-		1 Unit		2 Unit		-		-		-		2 Unit				
Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan)	1 Kawasan	1 Kawasan		1 Kawasan		2 Kawasan		-		-		-		2 Kawasan				
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen				
Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	2 gapoktan	2 gapoktan		3 gapoktan		4 gapoktan		-		-		-		4 gapoktan				
Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan	5 Unit	5 Unit		6 Unit		7 Unit		-		-		-		7 Unit				
Persentase penanganan daerah rawan pangan.	NA	-		-		-		93,3%		100,0%		100,0%		100,0%				
Persentase ketersediaan pangan utama	NA	-		-		-		90,65%		95,18%		99,95%		99,95%				
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	-		-		-		60,0%		65,0%		65,0%		65,0%				
Jumlah & jenis alat pasca panen :	NA	-		-		-		-		-		-		-				
Powertresher (unit)	17 Unit	9 Unit		7 Unit		9 Unit		-		-		-		9 Unit				
Alat panen padi (unit)	4 Unit	-		5 Unit		6 Unit		-		-		-		6 Unit				
Corn Seler (unit)	18 Unit	2 Unit		2 Unit		3 Unit		-		-		-		3 Unit				
Terpal plastik (lembar)	440 lembar	260 lembar		300 lembar		350 lembar		-		-		-		350 lembar				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Produksi padi (Ton)	77.500 ton	80.934 ton		84.378 ton		87.956 ton		-		-		-		87956,4 ton			
	Luas Tanam Padi (Hektar)	17.766 Ha	19.315 Ha		20.281 Ha		20.498 Ha		-		-		-		20.498 Ha			
	Luas panen Padi (Hektar)	18.531 Ha	19.740 Ha		20.332 Ha		20.942 Ha		-		-		-		20.942 Ha			
	Provititas Tanaman padi (Ton/Ha)	4,09 Ton/Ha	4,1 Ton/Ha		4,15 Ton/Ha		4,2 Ton/Ha		-		-		-		4,2 Ton/Ha			
	Produksi benih padi (ton)	300 ton	310 ton		320 ton		330 ton		-		-		-		330 ton			
	Produksi benih kedelai (Kg)	37.500 Kg	37.500 Kg		37.500 Kg		37.500 Kg		-		-		-		37500 Kg			
	Perencanaan pra desain lahan cadangan (Hektar)	Ha	Ha		1.600 Ha		1.650 Ha		-		-		-		1650 Ha			
	Produksi tanaman palawija :	NA	-		-		-		-		-		-		-			
	Produksi Tanaman jagung (Ton)	7.317 ton	9.386 ton		10.091 ton		10.535 ton		-		-		-		10535 ton			
	Luas Tanam jagung (Hektar)	1.623 Ha	1.700 Ha		1.725 Ha		1.750 Ha		-		-		-		1750 Ha			
	Luas panen jagung (Hektar)	1.350 Ha	1.462 Ha		1.484 Ha		1.505 Ha		-		-		-		1505 Ha			
	Provititas Tanaman jagung (Ton/ Ha)	5 ton/Ha	6 ton/Ha		7 ton/Ha		7 ton/Ha		-		-		-		7 ton/Ha			
	Produksi Tanaman kedelai (ton)	1044 Unit	925 Unit		963 Unit		1004 Unit		-		-		-		1004Unit			
	Luas Tanam kedelai (Hektar)	743 Ha	750 Ha		770 Ha		800 Ha		-		-		-		800 Ha			
	Luas panen kedelai (Hektar)	696 Ha	675 Ha		693 Ha		712 Ha		-		-		-		712 Ha			
	Provititas Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1,35 ton/Ha	1,37 ton/Ha		1,39 ton/Ha		1,41 ton/Ha		-		-		-		1,41 ton/Ha			
	Jumlah Dam Parit (unit)	12 Unit	28 Unit		30 Unit		30 Unit		-		-		-		30 Unit			
	Persentase peningkatan ketahanan pangan	96,61%	100%		100%		100%		-		-		-		100%			Dinas Perkebunan dan Peternakan
Pertanahan																		
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyelesaian sengketa lahan	70 %	100%	386.142.000	100%	197.606.000	100%	213.296.800	100%	569.276.000	100%	460.000.000	100%	610.000.000	100%	2.436.320.800	Bagian Adm Pemerintahan Setda	Bagian Adm Pemerintahan Setda
	Penyelesaian batas antar kecamatan	NA	1		1		1		1		1		4		4			
Lingkungan Hidup																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	873.030.552	100%	3.041.295.121	100%	1.837.454.748	100%	2.439.422.000	100%	2.206.871.793	100%	2.241.314.361	100%	12.639.388.575	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	153.708.000	100%	712.049.000	100%	1.120.000.000	100%	749.210.000	100%	674.289.000	100%	687.810.000	100%	4.097.066.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat	NA	100%	11.105.000	100%	49.109.000	100%	35.000.000	100%	49.250.000	100%	44.325.000	100%	45.000.000	100%	233.789.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparat	NA	100%	81.256.000	100%	109.132.000	100%	80.000.000	100%	65.000.000	100%	58.500.000	100%	58.500.000	100%	452.388.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	-	B	46.548.000	B	31.297.500	-	13.000.000	-	13.000.000	-	13.000.000	B	116.845.500	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	27.084.000	100%	-	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	73.084.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	56,67	353.737.000	57,70	282.392.000	60,90	439.665.003	-	223.725.000	-	201.355.000	-	201.355.000	60,90	1.702.229.003	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase data dan informasi lingkungan yang dapat diakses	NA	-	-	-	-	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%			
	Pemulihan terhadap kerusakan lahan dan/atau tanah	NA	N	-	15 Ha	25 Ha	25 Ha	-	-	-	-	-	-	-	25 Ha			
	Pemulihan wilayah pesisir	NA	N	-	5 Kec	5 Kec	5 Kec	-	-	-	-	-	-	-	5 Kec			
	Status lingkungan hidup	NA	92	-	95	98	98	-	-	-	-	-	-	-	98			
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	-	2.515.107.000	40,00	964.813.000	45,00	1.242.650.000	-	1.176.475.000	-	1.117.500.000	-	1.128.750.000	45,00	8.145.295.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,57	56,670	-	57,70	60,90	60,90	63,10	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50			
	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	NA	-	-	-	-	-	50%	60%	75%	75%	75%	75%	75%	75%			
	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	NA	-	-	-	-	-	48,2%	50,0%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2%			
	Persentase hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	NA	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	Dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai SOP	NA	45 Dok	-	55 Dok	65 Dok	65 Dok	-	-	-	-	-	-	-	65 Dok			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (UKP-UPL)	NA	30 Hari Kerja		30 Hari Kerja		30 Hari Kerja		-		-		-		30 Hari Kerja			
	Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (SPPL)	NA	7 hari		6 hari		6 hari		-		-		-		6 hari			
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	NA	1 Kelompok	-	5 Kelompok	1.078.357.000	7 Kelompok	355.000.000	-	-	-	-	-	-	7 Kelompok	1.433.357.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah TPS yang dibangun	NA	N		N		1 TPS		-		-		-		1 TPS			
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA	NA	25%		40%		55%		-		-		-		55%			
	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah cair dan B3	NA	100%		100%		100%		-		-		-		100%			
	Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian lingkungan	NA	50 Usaha/kegiatan		70 Usaha/kegiatan		90 Usaha/kegiatan		-		-		-		90 Usaha/kegiatan			
	Tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup	NA	30%		40%		50%		-		-		-		50%			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan pengangkutan persampahan	NA	-		-	1.150.000.000	-	15%	473.050.000	20%	473.050.000	25%	487.250.000	25%	2.583.350.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase layanan persampahan	NA	-		-		-	55%		64%		73%		73%				
	Penanganan timbunan sampah per-hari (M3)	NA	NA		65		70		-		-		-		70			
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.520.710.000	100%	1.806.060.000	100%	1.811.050.000	100%	961.531.000	100%	788.911.382	100%	780.380.000	100%	7.668.642.382	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	2.226.190.000	100%	1.651.100.000	100%	1.655.660.000	100%	108.700.000	100%	98.500.199	100%	105.125.000	100%	5.845.275.199	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	19.910.000	100%	36.300.000	100%	36.400.000	100%	-	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	146.610.000	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	71.450.000	100%	75.110.000	100%	75.320.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	281.880.000	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	36.570.000	B	233.680.000	B	234.320.000	-	2.250.000	-	2.250.000	-	2.250.000	B	511.320.000	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	21.012.680	100%	26.454.347	100%	26.537.274	100%	6.450.000	100%	6.450.000	100%	6.450.000	100%	93.354.301	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	73,0	-	75,0	1.952.500.000	77,0	1.957.900.000	-	752.991.000	-	766.300.000	-	794.586.656	77,0	6.224.277.656	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
	Banyak dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	NA	75%	-	80%	-	82%	-	-	-	-	-	-	0,8				
	Banyak dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai dengan SOP	NA	25%	-	20%	-	18%	-	-	-	-	-	-	0,2				
	Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)	NA	14 hari kerja	-	13 hari kerja	-	12 hari kerja	-	-	-	-	-	-	12,0				
	Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	NA	6 hari kerja	-	5 hari kerja	-	4 hari kerja	-	-	-	-	-	-	4,0				
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	94,53%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	1,0				
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	NA	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	61,22%	65%	-	68,78%	-	72,54%	-	-	-	-	-	-	72,54%				
	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	NA	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	NA	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	NA	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	NA	-		-		-		76,3%		80,05%		83,79%		83,79%			
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Unit Pelayanan Publik	NA	-	-	-	-	-	-	B	975.488.000	A	975.488.001	A	975.488.000	A	2.926.464.001	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	421.306.265	100%	1.069.736.781	100%	597.350.160	100%	616.014.500	100%	606.014.500	100%	615.248.329	100%	3.925.670.535	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	322.735.000	100%	1.240.533.000	100%	1.509.000.000	100%	408.350.000	100%	358.350.021	100%	407.524.038	100%	4.246.492.059	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	18.115.000	100%	33.810.000	100%	16.500.000	100%	15.250.000	100%	15.250.000	100%	15.250.000	100%	114.175.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	31.968.000	100%	105.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	356.968.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	9.377.000	B	24.150.000	B	32.400.000	-	17.600.000	-	17.600.000	-	17.600.000	B	118.727.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	28.024.000	100%	20.580.000	100%	25.000.000	100%	10.600.000	100%	10.600.000	100%	10.600.000	100%	105.404.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah posyantek yang berfungsi secara maksimal	NA	-	627.599.000	2 posyantek	640.017.000	4 posyantek	695.000.000	-	131.735.000	-	101.735.000	-	95.735.000	6 posyantek	2.291.821.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh posyantek	NA	-		-		-	8		10		11		29				
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUM Desa terbentuk	-	10 BUMDes	232.195.000	25 BUMDes	673.680.000	40 BUMDes	690.000.000	-	319.110.500	-	319.110.500	-	329.110.500	40 BUMDes	2.563.206.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah BUM Desa yang berfungsi	-	5 BUMDes		10 BUMDes		15 BUMDes		-		-		-	15 BUMDes				
	Persentase Bumdes yang aktif	NA	-						89,04%		95,89%		100%		100%			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	NA	3,00	687.864.000	3,00	1.255.724.000	3,00	958.400.000	-	1.493.375.000	-	1.418.375.000	-	1.408.375.000	3,00	7.222.113.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Jumlah kelompok binaan PKK di kecamatan	NA	11 Kec		11 Kec		11 Kec		-		-		-		11 Kec			
	Rata-rata jumlah binaan PKK	NA	-		-		-		93		104		104		104			
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti bintek perencanaan desa	NA	-	1.359.094.000	135 aparatur	1.689.500.000	255 aparatur	1.865.484.000	-	949.630.000	-	757.477.872	-	753.596.949	255 aparatur	7.374.782.821	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bag. Adm Pemerintahan Desa Setda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bag. Adm Pemerintahan Desa Setda
	Jumlah aparatur desa yang mengikuti bintek pengelolaan keuangan desa	NA	146 aparatur		236 aparatur		-		-		-		-		236 aparatur			
	Jumlah desa yang telah melaksanakan PilkaDes serentak	NA	45 Desa		-		58 Desa		-		-		-		58 Desa			
	Persentase aparatur desa yang mengikuti bintek pengelolaan keuangan desa	NA	-		-		-		20%		20%		20%		60%			
	Persentase kepemilikan profil desa/kelurahan	NA	-		-		-		80%		90%		100%		100%			
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan desa	NA	100%	799.209.000	100%	2.100.001.000	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	3.899.210.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan Dan Lingkungan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang telah dilakukan penataan wilayah	NA	2 Desa	64.469.000	2 Desa	-	2 Desa	150.000.000	-	-	-	-	-	-	6 Desa	214.469.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah desa online	NA	-		2 Desa		2 Desa		-		-		-		4 Desa			
Program Penguatan Otonomi Desa	Terpenuhinya tapal batas desa/kelurahan	NA	100%	142.365.000	100%	1.241.672.000	100%	1.730.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	3.114.037.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memahami kelembagaan perdesaan	NA	100%	138.529.000	100%	-	100%	1.041.853.500	-	-	-	-	-	-	100%	1.180.382.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	-	100%	1.378.095.000	100%	1.183.350.000	100%	1.035.990.000	100%	1.028.990.000	100%	1.028.990.000	100%	5.655.415.000	Dinas Dulkan dan KB	Dinas Dulkan dan KB
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	-	100%	1.069.515.000	100%	1.033.004.288	100%	427.700.000	100%	381.618.922	100%	369.884.843	100%	3.281.723.052	Dinas Dulkan dan KB	Dinas Dulkan dan KB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	-	100%	67.000.000	100%	35.000.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	100%	175.500.000	Dinas Dulkan dan KB	Dinas Dulkan dan KB

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	65.000.000	100%	35.000.000	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	170.000.000	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	-	B	15.000.000	B	15.000.000	-	10.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	B	54.000.000	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	-	-	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	60.000.000	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
Program Keluarga Berencana	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,94%	0,78%	2.184.127.200	0,78%	2.865.740.692	0,78%	2.774.270.692	-	1.503.605.000	-	1.374.710.000	-	1.374.710.000	0,78%	12.077.163.584	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	4,50%	4,40%		4,30%		4,20%		4,00%		3,80%		3,50%		3,50%			
	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	66%		66%		66,50%		67%		67,50%		68%		68%			
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	14%	13%		12%		11%		10%		9%		8%		8%			
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80%	80%		81%		82%		-		-		-		82%			
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	85%	85%		86%		87%		-		-		-		87%			
	Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	1/desa-kel	1/desa-kel		1/desa-kel		1/desa-kel		-		-		-		1/desa-kel			
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	15%	16%		30%		30%		-		-		-		30%			
	TFR (TOTAL FERTILITY RATE)	NA	-		-		-		2,58 anak		2,56 anak		2,50 anak		2,50 anak			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan KRR	5%	10%	42.675.000	15%	152.725.000	20%	132.050.000	-	242.870.000	-	196.070.000	-	242.870.000	20%	1.009.260.000	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
	- Miks Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	NA	-	-	-	-	15,35%	15,40%	15,45%	15,45%								
	- Jumlah PIK-R	NA	-	-	-	45	50	55	55									
Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah peserta KB baru yang dilayani menggunakan kontrasepsi	100%	100%	31.825.000	100%	147.980.000	100%	107.980.000	-	-	-	-	-	100%	287.785.000	Dinas Dulduk dan KB		
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Persentase jumlah peserta KB mandiri	30%	35%	167.987.500	40%	667.581.024	45%	645.110.000	-	-	-	-	-	45%	1.480.678.524	Dinas Dulduk dan KB		
Program Pengembangan Pusat-Pusat Informasi Dan Konseling (Pik)	Jumlah PIK-R	32	32	16.925.000	35	82.000.000	40	58.000.000	-	-	-	-	-	40	156.925.000	Dinas Dulduk dan KB		
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Dan Hiv Aids	Persentase jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	10%	10%	21.914.000	15%	115.800.000	20%	75.800.000	-	-	-	-	-	20%	213.514.000	Dinas Sosial dan PPA		
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase jumlah kelompok BKB yang mendapatkan bahan informasi	30%	30%	5.000.000	35%	95.000.000	40%	68.000.000	-	-	-	-	-	40%	168.000.000	Dinas Dulduk dan KB		
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase jumlah kader bina keluarga terlatih	15%	15%	28.625.000	20%	118.277.500	25%	108.277.500	-	130.550.000	-	115.550.000	-	130.550.000	25%	631.830.000	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
	Persentase Kelompok Bina Keluarga Aktif	NA	-	-	-	30%	35%	40%	40%									
Program Pengendalian Penduduk	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan	1/desa-kel	1/desa-kel	-	1/desa-kel	-	1/desa-kel	587.822.527	-	99.490.000	-	85.800.000	-	85.800.000	1/desa-kel	858.912.527	Dinas Dulduk dan KB	Dinas Dulduk dan KB
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%		100%		100%		-		-		-	100%				
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	NA	-		-		-		0,77%		0,76%		0,75%	0,75%				
Perhubungan																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.881.955.085	100%	2.085.132.606	100%	1.524.900.000	100%	1.090.792.439	100%	969.231.824	100%	1.007.433.097	100%	8.559.445.050	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	2.914.054.000	100%	900.519.000	100%	1.361.391.815	100%	1.214.477.563	100%	1.075.720.908	100%	1.117.534.274	100%	8.583.697.560	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	88.360.000	100%	123.546.000	100%	50.000.000	100%	40.828.823	100%	84.029.299	100%	89.148.541	100%	475.912.663	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	77.148.000	100%	103.875.000	100%	100.000.000	100%	55.361.116	100%	30.647.494	100%	31.838.765	100%	398.870.375	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	70.668.000	B	42.848.000	B	15.000.000	-	20.021.348	-	21.453.246	-	22.287.135	B	192.277.729	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	20.572.000	100%	-	100%	10.000.000	100%	7.542.952	100%	9.194.248	100%	9.551.629	100%	56.860.830	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	1.155	215	2.078.201.000	150	877.983.000	100	1.935.000.000	-	532.517.883	-	471.676.578	-	495.104.890	100	6.390.483.351	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	- Jumlah halte	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Jumlah cermin tikung	34 buah	-	-	4 buah	-	4 buah	-	-	-	-	-	-	-	4 buah			
	- Jumlah Penerangan Jalan Umum	-	-	-	30 titik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	5 APILL	3 APILL	-	3 APILL	-	2 APILL	-	-	-	-	-	-	-	2 APILL			
	- Jumlah Pos LLASDP	8 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit			
	- Persentase pembersihan alur sungai	6,38%	2,73%	-	2,73%	-	2,73%	-	-	-	-	-	-	-	2,73%			
	- Panjang marka jalan (satuan KM)	6 Km	2 Km	-	-	-	10 Km	-	-	-	-	-	-	-	10 Km			
	- Panjang pita gaduh (satuan M)	30 M	-	-	40 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Persentase penurunan kecelakaan darat	NA	-	-	-	-	-	0,35	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
	Persentase penurunan kecelakaan air	NA	-	-	-	-	-	0,04	0,02	0	0	0	0	0	0			
	Persentase pemasangan perlengkapan keselamatan	NA	-	-	-	-	-	16,39%	1,00%	82,61%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Persentase tingkat pelanggaran lalu lintas	NA	-	-	-	-	-	44,11%	37,26%	14,63%	100%	100%	100%	100%	100%			
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase dermaga dalam kondisi baik	35,5 %	39,8%	2.461.554.000	43,0%	1.752.895.000	43,0%	950.000.000	44,1%	265.646.440	45,2%	300.230.865	46,2%	254.710.118	46,2%	5.985.036.422	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	- Panjang pagar pengaman jalan (satuan M)	300 M	-		124 M		124 M		-		-		-		124 M			
	Persentase ketersediaan terminal tipe C	18,18%	9,09%		9,09%		9,09%		-		-		-		9,09%			
	- Kegiatan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-	-		2 Keg		2 Keg		-		-		-		2 Keg			
	- Persentase terlaksananya kegiatan pengujian kendaraan	100%	100%		100%		100%		-		-		-		100%			
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	- Kapal Pengawasan Perairan	1 Unit	-	720.824.000	2 Unit	706.999.000	2 Unit	450.000.000	-	442.750.525	-	429.064.915	-	413.903.941	4 Unit	3.163.542.382	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	NA	-		-		-		16,67 %		66,67 %		100,00 %		100 %			
Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	60.690.000	100%	76.608.000	100%	60.000.000	-	57.437.158	-	50.874.840	-	52.852.349	100%	358.462.347	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Persentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor	-	-	1.422.825.000	-	92.448.000	-	319.788.464	-	42.351.254	-	37.512.533	-	38.970.648	-	1.953.895.899	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Persentase kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	100%		100%		100%		-		-		-		100%			
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jaringan perhubungan	100%	100%		100%		100%		-		-		-		100%			
	Persentase ketersediaan terminal	NA	-		-		-		-		-		100%		100%			
Komunikasi dan Informatika																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	-	100%	1.105.732.000	100%	1.078.982.300	100%	1.087.804.500	100%	796.800.000	100%	838.250.000	100%	4.907.568.800	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	-	100%	975.200.000	100%	766.850.000	100%	156.580.000	100%	320.000.000	100%	355.000.000	100%	2.573.630.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	-	100%	24.575.000	100%	14.650.000	100%	24.200.000	100%	15.550.000	100%	16.000.000	100%	94.975.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	45.935.000	100%	52.000.000	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	137.935.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	-	B	25.264.000	B	36.313.231	-	14.800.000	-	15.000.000	-	15.000.000	B	106.377.231	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	-	100%	-	100%	20.000.000	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	9.000.000	100%	36.500.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jaringan Internet Hotspot / Wifi	-	-	2.827.112.000	2	1.637.498.000	2	1.681.771.000	-	248.662.500	-	245.000.000	-	246.000.000	2	6.886.043.500	Dinas Kominfo; Bag. Humas Setda; Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo
	Peningkatan cakupan jaringan	34,00	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
	Pengembangan website	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Pembentukan KIM	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat desa/kel	NA	-	-	-	-	-	10,8%	12,9%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%
	Persentase layanan telekomunikasi di desa/kel	NA	-	-	-	-	-	86%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi	Pengelolaan Data Elektronik	-	-	251.452.000	6	-	7	119.397.874	-	-	-	-	-	-	13	370.849.874	Dinas Kominfo; Dinas Perhubungan	
Program Penataan Pelayanan Publik	Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	100%	100%	248.359.998	100%	478.261.000	100%	431.408.000	-	125.000.000	-	125.000.000	-	125.000.000	100%	1.533.028.998	Seluruh OPD	Setda
	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	B	B	-	B	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	-	-
Program Pengembangan e-Government	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan e-Gov	93,02	100%	5.094.403.426	100%	6.429.769.118	100%	2.939.670.826	-	1.549.292.000	-	1.459.563.222	-	1.420.890.724	100%	18.893.589.316	Dinas Kominfo dan Bag. Pengadaan Setda	Dinas Kominfo
	Persentase akses internet yang terlayani	NA	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)				
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
	Persentase peningkatan jangkauan TIK	NA	-		-		-		86,00%		95,00%		100,00%		100,00%				
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	NA	-		-		-		45,00%		61,00%		76,00%		76,00%				
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase operator OPD yang mengikuti pelatihan	100%	100%	-	100%	244.737.661	100%	561.850.000	-	-	-	-	-	100%	806.587.661		Dinas Kominfo		
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase aktivitas Pemda yang tersebutkan melalui media massa	100%	100%	6.044.054.000	100%	5.718.620.070	100%	5.957.143.185	100%	4.118.682.000	100%	4.368.682.000	100%	3.909.700.000	100%	30.116.881.255	Dinas Kominfo, Sekretariat DPRD dan Bagian Humas Setda	Bagian Humas Setda	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	456.630.911	100%	764.716.607	100%	717.241.661	100%	490.241.600	100%	461.544.649	100%	464.164.308	100%	3.354.539.737	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	111.466.000	100%	213.263.000	100%	203.678.000	100%	104.545.400	100%	90.393.479	100%	93.013.138	100%	816.359.017	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	11.662.000	100%	26.257.000	100%	25.073.000	100%	16.550.000	100%	14.977.564	100%	17.597.224	100%	112.116.788	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	146.751.000	B	247.161.000	B	236.053.000	-	102.626.000	-	84.936.099	-	87.555.758	B	905.082.857	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.014.000	100%	8.441.564	100%	11.061.224	100%	69.516.788	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Ketersediaan peraturan bupati tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM (1 Perbup)	N	1 perbup	84.738.000	-	144.280.000	-	231.689.000	-	77.759.000	-	63.607.079	-	66.226.738	1 perbup	668.299.817	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	
	Sertifikat kesehatan (4 produk)	N	N		5 Produk		5 Produk		-		-		-		10 Produk				
	Sertifikat halal (4 produk)	N	N		5 Produk		5 Produk		-		-		-		10 Produk				
	Sertifikat HAKI (1 produk)	N	N		N		1 Produk		-		-		-		1 Produk				
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi (4 kali/tahun)	N	4 kali		4 kali		4 kali		-		-		-		4 kali				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Persentase peningkatan pendapatan UKM	NA	-	-	-	-	-	25%	-	25%	-	30%	-	80%	-			
	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	15 kali	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	4 kali	-			
	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui magang dan studi komperatif	3 kali	N	N	N	1 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-	1 kali	-			
	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	15 kali	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	8 kali	-			
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM	N	N	234.712.000	15 Koperasi	346.069.000	15 Koperasi	330.509.000	-	-	-	-	-	30 Koperasi	911.290.000	Dinas Koperasi UKM		
	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	15 kali	2 kali		2 kali		4 kali		-	-	-	-	-	8 kali				
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Koperasi yang dapat bantuan permodalan	17 Koperasi	5 Koperasi, 30 UMKM	446.613.000	5 Koperasi, 30 UMKM	576.564.000	5 Koperasi, 30 UMKM	597.908.000	-	252.765.000	5 Koperasi, 30 UMKM	235.075.099	5 Koperasi, 30 UMKM	237.694.758	47 Koperasi, 180 UMKM	2.346.619.857	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM
	Persentase UKM sehat	NA	-		-		-	9,10%		10,30%		11,50%		11,50%				
	Rumah tangga miskin yang mendapat bantuan modal usaha dari koperasi untuk difasilitasi menjadi UMKM	N	-		-		-	-		-		-		-				
	Revitalisasi pasar tradisional	2 Koperasi	N		1 Koperasi		1 Koperasi		-		-		-		2 Koperasi			
	SHAT bagi pelaku UMKM	520 persil	70 persil		100 persil		100 persil		-		-		-		270 persil			
	Koperasi yang mendapatkan hibah	N	N		2 Koperasi		2 Koperasi		-		-		-		4 Koperasi			
	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UMKM	19 proposal	20 proposal		20 proposal		20 proposal		-		-		-		60 proposal			
	Sosialisasi Skim Kredit	10 kali	3 kali		3 kali		4 kali		-		-		-		10 kali			
Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit	19 proposal	20 proposal		20 proposal		20 proposal		-		-		-		60 proposal				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UMKM	N	N		5 koperasi		10 koperasi		-		-		-		15 koperasi			
	Promosi produk unggulan koperasi dan UMKM	10 kali	2 kali		2 kali		3 kali		-		-		-		7 kali			
	Penyusunan database UMKM melalui sistem informasi kredit program	16.063 UMKM	16.035 UMKM		20.250 UMKM		20.250 UMKM		-		-		-		20.250 UMKM			
	Kerjasama UMKM dengan Badan Usaha	N	N		1 Mitra Usaha		1 Mitra Usaha		-		-		-		2 Mitra Usaha			
	Kerjasama kemitraan antar lembaga	N	N		1 lembaga		1 lembaga		-		-		-		2 lembaga			
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penghargaan bagi koperasi dan UMKM berprestasi	6 Koperasi Prestasi	6 Koperasi Prestasi	182.650.000	6 Koperasi Prestasi	364.649.000	6 Koperasi Prestasi	348.253.000	-	416.732.000	-	399.042.099	-	401.661.758	18 Koperasi Prestasi	2.112.987.857	Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM
	Persentase koperasi sehat	NA	-		-		-		18,51%		20,13%		21,75%		21,75%			
	Jumlah koperasi yang memiliki NIK	42 koperasi	20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		-		-		-		60 koperasi			
	Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi	22 koperasi	5 koperasi		5 koperasi		5 koperasi		-		-		-		15 koperasi			
Penanaman Modal																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	486.401.732	100%	1.157.802.096	100%	1.273.311.536	100%	764.911.000	100%	643.400.000	100%	640.082.960	100%	4.965.909.325	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	175.621.000	100%	1.063.387.000	100%	765.177.000	100%	218.282.500	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	2.662.467.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	28.500.000	100%	68.341.000	100%	55.012.000	100%	46.922.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	100%	294.775.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	9.319.000	100%	26.383.000	100%	70.016.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	147.718.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	13 Buku	13 Buku	35.841.000	13 Buku	384.405.000	13 Buku	305.069.000	-	94.396.000	-	80.000.000	-	80.000.000	39%	979.711.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Dokumen pendataan perizinan lingkup kabupaten	11 Dok	11 Dok		11 Dok		11 Dok		-		-		-		33 Dok			
	Nilai SAKIP	CC	B		B		B		-		-		-		B			
	Persentase tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Nilai mutu kepuasan masyarakat	80,272 (baik)	78,699 (baik)		78,75 (baik)		79,1 (baik)		-		-		-		79,1 (baik)			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	20.710.000	100%	10.949.000	100%	15.003.000	100%	4.900.000	100%	5.000.000	100%	8.000.000	100%	64.562.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	Jumlah informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan (Sektor)	-	-	-	1 Sektor	392.315.000	1 Sektor	585.134.000	-	-	-	-	-	-	1 Sektor	977.449.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten dan penyaluran informasi pembangunan yang diikuti	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	-		
	Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan pengusaha (kali)	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	-		
	Jumlah bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	-	-	-	1 Bimtek	-	1 Bimtek	-	-	-	-	-	-	-	1 Bimtek	-		
	Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal	12 Keg	12 Keg	-	12 Keg	-	12 Keg	-	-	-	-	-	-	-	36 Keg	-		
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Persentase (%) terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal meliputi : Izin Prinsip PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA	40%	40%	-	60%	541.060.000	80%	430.099.000	-	585.060.500	-	585.061.394	-	586.000.000	100%	2.727.280.894	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	47.123	30.000	-	31.500	-	33.075	-	-	-	-	-	-	-	94.575			
	Nilai Investasi PMDN (IDR)	NA	-	-	-	-	-	315.000	-	330.750	-	347.288	-	993.038				
	Nilai Investasi PMA (\$)	NA	-	-	-	-	-	5.100.000	-	5.202.000	-	5.306.040	-	15.608.04				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Jumlah sosialisasi penanaman modal dan perizinan (kali)	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kali				
	Jumlah pelayanan perizinan di tempat yang dilaksanakan (kali)	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	16 kali				
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase (%) implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	-	33,33%	204.312.000	100%	123.825.000	100%	140.032.000	-	-	-	-	-	-	468.169.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	100%	100%	435.533.000	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	435.533.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah	-	-	-	473.015.000	-	853.727.000	-	919.986.000	-	-	-	-	-	-	2.246.728.000	Bagian SDA Setda; 11 Kecamatan		
Kepemudaan dan Olahraga																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	895.304.863	100%	2.130.961.957	100%	2.136.853.292	100%	1.039.423.000	100%	1.039.423.000	100%	1.046.923.000	100%	8.288.889.112	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	147.824.063	100%	273.834.170	100%	274.591.222	100%	181.300.000	100%	182.430.000	100%	191.630.000	100%	1.251.609.455	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	26.057.550	100%	35.969.318	100%	36.068.760	100%	24.100.000	100%	26.500.000	100%	26.800.000	100%	175.495.628	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	33.622.645	100%	53.411.516	100%	53.559.180	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	310.593.341	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	163.209.733	B	-	B	-	B	-	-	-	-	-	B	163.209.733	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	21.014.153	100%	13.019.057	100%	13.055.050	100%	13.500.000	100%	14.800.000	100%	20.800.000	100%	96.188.260	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang diperdanakan dan difasilitasi	1,00	1 Organisasi	1.101.144.960	5 Organisasi	1.961.300.942	28 Organisasi	1.966.723.225	-	1.013.430.000	-	1.013.430.000	-	1.019.430.000	28 Organisasi	8.075.459.127	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	NA	-	-	-	-	-	43%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	-	-	-

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Jumlah Paskibraka yang berkompeten	NA	36 orang		36 orang		38 orang		38 orang		38 orang		38 orang		38 orang			
	Jumlah pemuda kader terbaik	NA	10 orang		25 orang		30 orang		-		-		-		30 orang			
	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui kegiatan pekan kreatifitas pemuda	NA	18 orang		36 orang		36 orang		-		-		-		36 orang			
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pelatihan pengelolaan usaha	NA	-	206.280.711	40 kali	341.533.267	40 kali	342.477.483	-	116.600.000	-	104.940.000	-	110.940.000	80 kali	1.222.771.461	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Persentase wirausaha muda	NA	-		-		-		10%		10%		10%		30%			
	Jumlah usaha pemuda yang dibina dan difasilitasi	NA	-		22 KWP		32 KWP		-		-		-		57 KWP			
Program Pembinaan Dan Permasalahakan Olah Raga	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	1.204.335.592	peringkat 4	3.124.375.528	peringkat 4	3.133.013.289	peringkat 3	489.025.000	peringkat 3	439.195.968	peringkat 2	451.923.561	peringkat 2	8.841.868.938	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Jumlah atlet yang berprestasi yang mengikuti even di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	NA	10 orang		15 orang		25 orang		-		-		-		50 orang			
	Jumlah atlet penyandang cacat berprestasi yang mengikuti even olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional	NA	6 orang		10 orang		15 orang		-		-		-		31 orang			
	Prestasi atlet sepak bola di tingkat PORPROV	NA	-		-		peringkat 1		-		-		-		peringkat 1			
	Peringkat PORPROV yang dicapai	-	-		-		peringkat 1		-		-		peringkat 1		peringkat 1			
	Cakupan pembinaan olah raga	NA	-		-		-		98%		99%		99%		99%			
	Jumlah atlet festival olah raga tradisional yang di fasilitasi dalam rangka pembudayaan olah raga	NA	15 orang		15 orang		15 orang		-		-		-		45 orang			
	Jumlah atlet invitasi olah raga tradisional	NA	-		10 orang		10 orang		-		-		-		20 orang			
	Peringkat atlet olah raga tradisional tingkat Provinsi	NA	Peringkat 1		Peringkat 1		Peringkat 1		-		-		-		peringkat 1			
	Even olah raga tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	NA	1 kali		2 kali		2 kali		-		-		-		2 kali			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)				
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)	
	Jumlah CABOR yang dibina dan dilatih	NA	-		2 Cabor		4 Cabor		-		-		-		6 Cabor				
	Jumlah atlet yang dibina dan dilatih	NA	-		15 orang		25 orang		-		-		-		40 orang				
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	NA	6 Unit	2.971.862.059	14 Unit	4.127.259.719	22 Unit	4.138.670.082	32 Unit	908.000.000	42 Unit	817.200.000	47 Unit	823.200.000	163 Unit	13.786.191.860	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora	
	Sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik	9 unit	14 Unit		17 Unit		22 Unit		-		-		-		22 Unit				
	Persentase sarana prasarana olah raga dalam kondisi baik	NA	-		-		-		49%		49%		50%		50%				
	Jumlah peralatan dan perlengkapan cabor	NA	-		5 set		28 set		-		-		-		33 set				
Kebudayaan																			
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya	22,00	22 situs	698.226.775	23 situs	446.653.809	23 situs	447.888.644	-	246.300.000	-	221.670.000	-	227.670.000	23 situs	2.288.409.228	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora	
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	NA	-		-		-		47%		49%		49%		49%				
	Jumlah kawasan konservasi dan peninggalan sejarah yang dilindungi	22,00	22 kawasan		22 kawasan		22 kawasan		-		-		-		22 kawasan				
	Jumlah museum peninggalan sejarah dan cagar budaya	NA	-		1 Unit		1 Unit		-		-		-		1 Unit				
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan fungsi sanggar seni	NA	8	1.140.917.240	10	5.757.427.693	10	5.773.344.885	-	953.720.000	-	858.348.000	-	869.348.000	10	15.353.105.818	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora	
	Pembinaan budaya tradisional di masyarakat	NA	11 kali		12 kali		15 kali		-		-		-		15 kali				
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi	NA	-		-		-		16		18		20		20				
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5 Kali	6 kali		7 kali		7 kali		-		-		-		7 kali				
	Jumlah pelatihan seni	NA	-		7 kali		7 kali		-		-		-		7 kali				
Perpustakaan																			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	728.684.795	100%	1.558.024.414	100%	1.562.331.784	100%	915.095.870	100%	844.676.762	100%	857.712.029	100%	6.466.525.655	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	277.061.109	100%	184.709.474	100%	185.220.129	100%	293.601.918	100%	271.008.455	100%	275.190.726	100%	1.486.791.811	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	12.608.492	100%	28.481.009	100%	28.559.749	100%	33.199.809	100%	30.644.994	100%	31.117.915	100%	164.611.968	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	23.640.923	100%	23.833.481	100%	23.899.371	100%	63.739.965	100%	58.835.002	100%	59.742.958	100%	253.691.699	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	10.507.077	B	8.997.139	B	9.022.013	-	20.671.925	-	19.081.165	-	19.375.630	B	87.654.948	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%							
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	10.507.077	100%	8.997.139	100%	9.022.013	100%	11.885.898	100%	10.971.246	100%	11.140.557	100%	62.523.931	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca	Jumlah pengunjung	3.500 Eks	11.850 Eks	39.779.162	14.520 Eks	246.245.683	17.160 Eks	246.926.463	-	-	-	-	-	17.160 Eks	532.951.309	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan	Terkelolanya perpustakaan dengan baik	-	-	235.673.418	20 Perpus	629.673.406	20 Perpus	631.414.223	-	-	-	-	-	20 Perpus	1.496.761.047	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Jumlah alat peraga IPTEK	1 Unit	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	-	-	-	-	2 Unit	-				
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan / tahun	NA	-	-	-	-	-	19,07 %	850.634.028	21,62 %	785.175.434	21,62 %	797.292.461	100%	2.433.101.923	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Persentase koleksi buku tersedia	NA	-	-	-	-	-	17,92 %	-	19,78 %	19,78 %	100%	100%					
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	IKM layanan perpustakaan	80,10%	80,25%	-	80,98%	69.474.596	81,15%	69.666.668	-	-	-	-	-	81,15%	139.141.263	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	a. Perpustakaan Desa	-	-	-	50 Desa	-	43 Desa	-	-	-	-	-	93 Desa					
	b. Perpustakaan Sekolah	-	-	-	50 Desa	-	50 Desa	-	-	-	-	-	100 sekolah					
Kearsipan																		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah pengelola arsip :	-	-	68.453.605	-	483.139.209	-	484.474.913	-	267.352.485	-	246.778.986	-	250.587.342	-	1.800.786.541	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	a. SKPD Kabupaten	-	-	-	2 OPD	-	2 OPD	-	-	-	-	-	2 OPD					
	b. Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	50 Desa/Kel	-	-	-	-	-	50 Desa/Kel					
	c. Sekolah	-	-	-	-	-	50 sekolah	-	-	-	-	-	50 sekolah					
	d. Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah arsip yang terselamatkan	NA	-	166.453.111	-	95.333.922	-	95.597.486	20%	16.960.101	20%	15.654.976	20%	15.896.567	60%	405.896.163	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
	Jumlah arsip dinamis	-	-		100 Dok		200 Dok		-		-		-		300 Dok			
Usuran Pemerintahan Pilihan																		
Kelautan dan Perikanan																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.139.154.416	100%	1.440.011.203	100%	1.430.644.335	100%	1.381.000.000	100%	1.381.000.000	100%	1.381.000.000	100%	8.152.809.954	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	167.441.000	100%	229.583.000	100%	353.339.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	1.185.363.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	42.906.000	100%	50.011.000	100%	76.970.000	100%	45.200.000	100%	45.200.000	100%	45.200.000	100%	305.487.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	105.545.000	B	109.195.000	B	168.056.000	-	139.750.000	-	139.750.000	-	139.750.000	B	802.046.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	66.557.000	100%	21.047.000	100%	32.392.000	100%	48.685.000	100%	48.518.000	100%	49.983.000	100%	267.182.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase penguatan ekonomi masyarakat pesisir	100%	100%	5.234.730.000	100%	106.660.000	100%	164.154.000	-	848.140.000	-	748.140.000	-	812.140.000	100%	7.913.964.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Nilai Tukar Nelayan	NA	-		-		-		113,37		114		114,1		114,1			
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100%	100%	536.229.000	100%	672.966.000	100%	601.899.000	-	-	-	-	-	-	100%	1.811.094.000	Dinas Perikanan	
Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Persentase masyarakat nelayan yang memiliki dokumen perijinan	100%	100%	57.558.000	100%	106.660.000	100%	164.154.000	-	-	-	-	-	-	100%	328.372.000	Dinas Perikanan	
Program Pengembangan Budaya Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-67,44%	-	3.190.579.000	56,17%	3.148.503.000	2,04%	1.311.251.000	2,04%	1.173.600.000	2,05%	1.023.600.000	2,10%	990.046.715	64,38%	10.837.579.715	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan	124,10%	124,10%	1.343.145.000	-	578.334.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	124,10%	2.421.479.000	Dinas Perikanan	
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	33,9 kg/Kapita	33,9 kg/Kapita		34,4 kg/Kapita		34,9 kg/Kapita			-	-	-	-	-	102,3 kg/Kapita			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	5%	6%	-	7%	-	8%	1.150.198.000	0,42%	854.000.000	0,45%	764.000.000	0,48%	814.000.000	2,89%	3.582.198.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,3%	3,3%	1.216.732.000	-	1.643.750.000	0,3%	2.176.075.000	0,42%	1.104.508.000	0,45%	1.002.975.443	0,47%	1.002.826.642	2,88%	8.146.867.085	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Pariwisata																		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	NA	10.000 orang	898.407.611	10.200 orang	1.726.610.737	10.400 orang	1.731.384.187	10.600 orang	1.148.250.000	10.800 orang	1.033.425.000	11.000 orang	1.041.425.000	11.000 orang	7.579.502.535	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	NA	60 orang		70 orang		80 orang		90 orang		100 orang		110 orang		110 orang			
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	-2,91	2,01		2,0		1,96		1,94		1,91		1,90		1,90			
	Jumlah even pariwisata	NA	5 kali		5 kali		6 kali		-		-		-		6 kali			
	Jumlah promosi pariwisata	NA	3 kali		4 kali		4 kali		-		-		-		4 kali			
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah KSPD yang telah terbentuk	NA	-	147.740.007	2 KSPD	1.094.385.288	2 KSPD	1.097.410.873	-	303.750.000	-	273.375.000	-	279.375.000	2 KSPD	3.196.036.168	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Jumlah KPPD yang dikembangkan	NA	-		-		-		-		-		-		3 KPPD			
	Persentase KSPD dan KPPD yang dikelola	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
	Pemberdayaan masyarakat pada objek dan daya tarik wisata	NA	-		30 orang		30 orang		-		-		-		60 orang			
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan dengan stakeholder pariwisata	NA	1 Mitra	97.137.925	2 Mitra	304.003.331	3 Mitra	304.843.790	3 Mitra	227.827.000	4 Mitra	123.348.500	4 Mitra	129.348.500	17 Mitra	1.186.509.047	Dinas Parbudpora	Dinas Parbudpora
	Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata	NA	25 orang		30 orang		35 orang		40 orang		40 orang		45 orang		215 orang			
Pertanian																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	1.999.066.717	100%	5.275.532.661	100%	5.190.806.342	100%	4.057.584.000	100%	4.016.316.000	100%	4.027.585.000	100%	24.566.890.719	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	1.729.003.625	100%	1.643.006.500	100%	1.972.938.797	100%	1.095.080.000	100%	813.900.000	100%	814.350.000	100%	8.068.278.922	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	113.968.202	100%	223.370.108	100%	223.987.064	100%	165.975.000	100%	168.975.000	100%	168.975.000	100%	1.065.250.374	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	26.558.000	100%	45.127.000	100%	45.251.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000	100%	221.936.000	Dinas TP dan Holtikultura	Dinas TP dan Holtikultura
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	331.274.000	B	552.294.871	B	553.792.510	-	357.498.000	-	357.498.000	-	377.498.000	B	2.529.855.381	Dinas TP dan Holtikultura	Dinas TP dan Holtikultura
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	46.558.000	100%	-	100%	10.000.000	100%	29.500.000	100%	29.500.000	100%	36.500.000	100%	152.058.000	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	-	3 angkatan	969.944.045	2 angkatan	3.964.704.164	2 angkatan	3.975.656.372	-	2.053.249.000	-	1.929.353.000	-	1.781.239.000	2 angkatan	14.674.145.581	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani, :	NA	-	-	-	-	-	-	42%	30%	24%	24%	24%	24%	24%	24%		
	1) Pemula	NA	-	-	-	-	-	-	40%	47%	54%	54%	54%	54%	54%	54%		
	2) Lanjut	NA	-	-	-	-	-	-	17%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
	3) Madya	NA	-	-	-	-	-	-	0,68%	0,78%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%		
	4) Utama	NA	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3		
	5) Penyuluh Berprestasi (orang)	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah LKM yang dievaluasi (Kelompok)	6 Kelompok	6 Kelompok	-	56 Kelompok	66 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 Kelompok		
	Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(Pratama ke madya)	-	-	-	1 madya	1 madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 madya		
	Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(madya ke aditama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 utama		
	Cakupan bina kelompok petani	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	0,63%	0,73%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%		
Mendorong motivasi kelompok peternak (Kelompok)	2 Kelompok	1 Kelompok	-	3 Kelompok	3 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Kelompok			
NTUP	NA	-	-	-	-	-	-	100	101,3	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4			
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tertelaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi	5 & 4 kali	5 & 4 kali	560.784.088	5 & 4 kali	2.146.118.549	5 & 4 kali	2.052.050.864	5 kali	315.288.000	6 kali	248.958.000	5 kali	315.288.000	28 kali	5.638.487.501	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah : a) Beras Merah	NA	-	-	-	-	-	-	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah : b) Semangka	NA	-	-	-	-	-	90%	-	97%	-	100%	-	100%	-	-		
	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah : c) Nenas	NA	-	-	-	-	-	92%	-	96%	-	100%	-	100%	-	-		
	Jumlah Komoditas Unggulan yang dipasarkan	5	5	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-		
	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan	5	5	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-		
	Jumlah operasional hari pasar	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-		
	Jumlah pelaku usaha ternak lokal yang dibina (Kelompok)	-	-	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	2 Kelompok	-		
	Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk perkebunan	-	-	-	-	-	-	5 Kali	-	6 Kali	-	5 Kali	-	16 Kali	16 Kali	-		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Tersedianya alsintan pra panen :	-	-	265.487.000	-	278.197.000	-	278.966.000	-	121.482.000	-	121.952.000	-	121.952.000	-	1.188.036.000	Dinas TP dan Holtikultura	Dinas TP dan Holtikultura
	Hand Traktor rolari (Unit)	22 Unit	-	-	-	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	-		
	Rice Transplanter (Unit)	18 Unit	-	-	-	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	-		
	Mesin Pemotong Rumput (Unit)	31 Unit	12 Unit	-	12 Unit	15 Unit	-	-	-	-	-	-	-	39 Unit	39 Unit	-		
	Hand Sprayer Elektrik (unit)	-	48 Unit	-	16 Unit	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-	84 Unit	84 Unit	-		
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 1) Hand Tractor	NA	-	-	-	-	-	58%	-	78%	-	100%	-	100%	100%	-		
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 2) Alat tanam jagung manual	NA	-	-	-	-	-	61%	-	65%	-	100%	-	100%	100%	-		
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 3) Mesin pemotong rumput	NA	-	-	-	-	-	50%	-	68%	-	100%	-	100%	100%	-		
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 4) Hand sprayer elektrik	NA	-	-	-	-	-	55%	-	76%	-	100%	-	100%	100%	-		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Semangka (Ton)	1.613 ton	1.980 ton	3.885.834.003	2.200 ton	4.529.773.966	2.420 ton	4.417.456.026	-	7.582.065.000	-	7.152.932.768	-	7.362.540.129	2.420 ton	34.930.601.893	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas TP dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	7,50 ton/Ha	109,80 ton/Ha		7,70 ton/Ha		7,80 ton/Ha		-		-		-		8 ton			
	Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	225 Ha	258 Ha		350 Ha		365 Ha		-		-		-		365 ton			
	Luas Tanam Nanas (Hektar)	32 Ha	16 Ha		16 Ha		16 Ha		-		-		-		48 Ha			
	Luas Panen Nanas (Hektar)	4 Ha	4 Ha		16 Ha		16 Ha		-		-		-		36 Ha			
	Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0,035 Kwintal/rumpun	0,036 Kwintal/rumpun		0,037 Kwintal/rumpun		0,038 Kwintal/rumpun		-		-		-		0,038 Kwintal/rumpun			
	Produk 1 Nanas (Ton)	200 ton	280 ton		400 ton		416 ton		-		-		-		416 ton			
	Produksi benih padi (ton)	300 ton	310 ton		320 ton		330 ton		-		-		-		330 ton			
	Produksi beras merah (Ton)	89,47	50,57		68,58		84,04		-		-		-		203,19			
	Luas Panen Beras Merah (hektar)	23 Ha	13 Ha		18 Ha		22 Ha		-		-		-		22 Ha			
	Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	3,89	3,89		3,81		3,82		-		-		-		3,82			
	Jalan Usaha tani (Km)	4 km	4 km		4 km		4 km		-		-		-		12 km			
	Dam Parit (unit)	12 unit	28 unit		30 unit		30 unit		-		-		-		88 unit			
	Pra/disain lahan cadangan pangan dan pemetaan lahan (Hektar)	-	800 Ha		600 Ha		700 Ha		-		-		-		2.100 Ha			
	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : a. Padi	NA	-		-		-		0,48%		0,71%		0,95%		0,95%			
	b. Jagung	NA	-		-		-		0,65%		0,97%		1,12%		1,12%			
	c. Kedele	NA	-		-		-		0,77%		2,29%		3,37%		3,37%			
	d. Nenas	NA	-		-		-		0,20%		0,39%		0,58%		0,58%			
	e. Semangka	NA	-		-		-		5,26%		7,50%		9,30%		9,30%			
	f. Cabe	NA	-		-		-		1,26%		1,65%		2,03%		2,03%			
	Pengembangan budidaya ternak potong (Kelompok)	2 Kelompok	0 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		-		-		-		2 Kelompok			
	Pengembangan budidaya ternak unggas (Ekor)	4.000 Ekor	500 Ekor		500 Ekor		500 Ekor		-		-		-		1.500 Ekor			
	Jumlah akseptor IB (akseptor)	1.950 Akseptor	2.000 Akseptor		2.050 Akseptor		2.100 Akseptor		-		-		-		2.100 Akseptor			
	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.555.138 Ekor	3.733.404 Ekor		3.911.670 Ekor		4.089.936 Ekor		-		-		-		4.089.936 Ekor			
	Jumlah peningkatan produksi daging (Kg)	-	-		-		-		-		-		-		-			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	a. Ruminansia	209.253 Kg	219.716 Kg		230.179 Kg		240.642 Kg		-		-		-		240.642 Kg			
	b. Unggas	248.907 Kg	1.311.352 Kg		1.373.797 Kg		1.436.242 Kg		-		-		-		1.436.242 Kg			
	Pengembangan hijauan pakan ternak	7,5 Ha	0,5 Ha		0,5 Ha		0,5 Ha		-		-		-		9,0 Ha			
	Jumlah sentra usaha peternakan rakyat	1 SPR	1 SPR		1 SPR		1 SPR		-		-		-		1 SPR			
	Jumlah populasi ternak unggulan	53 Ekor	73 Ekor		93 Ekor		113 Ekor		-		-		-		113 Ekor			
	Produktivitas Kelapa Dalam	NA	-		-		-		1.165 Kg/Ha		1.167 Kg/Ha		1.169 Kg/Ha		1.169 Kg/Ha			
	Produktivitas Pinang	NA	-		-		-		486 Kg/Ha		499 Kg/Ha		512 Kg/Ha		512 Kg/Ha			
	Produktivitas Kopi	NA	-		-		-		502 Kg/Ha		510 Kg/Ha		517 Kg/Ha		517 Kg/Ha			
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang handal & profesional	9 Paket	11 paket	-	6 paket	1.070.854.000	6 paket	1.073.813.000	-	-	-	-	-	6 paket	2.144.667.000	Dinas TP dan Holtikultura		
	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	2 paket	6 paket		6 paket		6 paket		-		-		-	6 paket				
	Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	3 paket	3 paket		8 paket		8 paket		-		-		-	8 paket				
Pengembangan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Pertanian	Tersedianya sampel ubinan	217 Sampel	300 Sampel	560.951.000	300 Sampel	523.723.000	300 Sampel	525.170.000	-	-	-	-	-	300 Sampel	1.609.844.000	Dinas TP dan Holtikultura		
Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian/Peternakan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pertanian (%)	25%	27%	1.217.147.541	29%	322.805.855	31%	323.698.296	-	-	-	-	-	31%	1.863.651.692	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bidang industri berkelanjutan	1 Program	1 Program		1 Program		1 Program		-		-		-	1 Program		Dinas Perkebunan dan Peternakan		
	Jumlah sampel	45 sampel	60 sampel	-	80 sampel	516.898.300	100 sampel	518.327.335	-	-	-	-	100 sampel	1.035.225.635				
	Pembinaan tempat pemotongan hewan (Kali)	8 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		-		-		-	9 Kali				
Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Persentase penurunan tingkat kebakaran dan hama penyakit perkebunan	0,28%	0,26%	296.000.000	0,21%	1.583.169.936	0,16%	1.587.546.825	-	-	-	-	-	0,16%	3.466.716.761	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman	3,0%	2,0%		2,0%		2,0%		-		-		-	0,02				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	NA	-	-	-	-	-	4.268.202 Ekor	1.283.623.000	4.446.468 Ekor	928.064.318	4.624.734 Ekor	969.923.047	4.624.734 Ekor	3.181.610.365		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Jumlah peningkatan produksi daging ruminansia (Kg)	NA	-	-	-	-	251.105 Kg		261.568 Kg		272.031 Kg		272.031 Kg					
	Jumlah peningkatan produksi daging unggas (Kg)	NA	-	-	-	-	998.901 Kg		1.113.774 Kg		1.241.858 Kg		1.241.858 Kg					
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Persentase teknologi dan inovasi pertanian industri berkelanjutan	1 Program	1 Program	-	1 Program	431.000.000	1 Program	431.000.000	1 Program	156.500.000	1 Program	150.000.000	1 Program	156.500.000	1 Program	1.325.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Penerapan teknologi	NA	-	-	-	-	-	1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		3 Inovasi				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak (%)	3,0%	2,9%	475.827.461	2,8%	576.927.838	2,6%	578.522.833	2,4%	532.880.000	2,2%	465.000.000	2,0%	488.380.000	2,0%	3.117.538.132	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Tercapainya pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	NA	-	-	-	-	-	115 Sampel		130 Sampel		150 Sampel		150 Sampel				
Perdagangan																		
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	NA	2 kali	370.282.000	2 kali	238.045.000	4 kali	363.000.000	-	-	-	-	-	-	4 kali	971.327.000	Disperindag	
	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	NA	2 kali		2 kali		2 kali		-		-		-		2 kali			
Program Kemetrolgian, Pengawasan dan Tertib Niaga	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	NA	-	-	-	-	-	66 kali	825.456.000	99 kali	858.906.000	132 kali	968.906.000	132 kali	2.653.268.000		Disperindag	
	Pelaksanaan Tera / Tera Ulang	NA	-	-	-	-	-	33 kali		66 kali		99 kali		99 kali				
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang dibangun	NA	3 Unit	5.649.924.000	-	4.341.096.000	-	4.061.420.000	-	6.571.079.460	-	5.363.508.000	-	6.000.088.605	3 Unit	31.987.116.065	Disperindag	Disperindag
	Jumlah pasar yang direvitalisasi	NA	-		1 Unit		1 Unit		-		-		-	2 Unit				
	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	5 kali	-		-		-	6 kali		7 kali		8 kali		21 kali				
	Persentase peningkatan pasar yang dibangun	NA	-		-		-	75%		88%		100%		100%				
	Persentase peningkatan pasar yang direvitalisasi	NA	-		-		-	40%		60%		100%		100%				
Program Peningkatan Manajemen Pasar	Persentase peningkatan jumlah pasar yang dibina	NA	-	-	-	-	-	82%	956.525.981	91%	1.056.525.981	100%	909.139.242	100%	2.922.191.204		Disperindag	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditi ekspor	3 Komoditi	-	-	-	-	1 Komoditi	-	-	-	-	-	-	-	1 Komoditi	-	Disperindag	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpasaran	Persentase peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	100%	100%	-	100%	-	100%	395.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	395.000.000	Disperindag	
Perindustrian																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	805.415.875	100%	1.014.732.825	100%	885.181.142	100%	1.134.142.300	100%	1.104.142.300	100%	904.142.300	100%	5.847.756.741	Disperindag	Disperindag
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	536.114.000	100%	578.784.000	100%	775.264.000	100%	339.428.000	100%	432.428.000	100%	359.428.000	100%	3.021.446.000	Disperindag	Disperindag
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	21.226.000	100%	25.086.000	100%	21.900.000	100%	27.150.000	100%	22.700.000	100%	22.700.000	100%	140.762.000	Disperindag	Disperindag
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	57.275.000	100%	50.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	362.275.000	Disperindag	Disperindag
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	138.905.000	B	302.059.000	B	255.490.000	-	83.095.044	-	83.095.044	-	83.095.044	B	945.739.132	Disperindag	Disperindag
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	25.326.000	100%	23.574.000	100%	20.579.700	100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%	118.679.700	Disperindag	Disperindag
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang memanfaatkan TTG	5 KUB	-	58.903.000	7 KUB	42.051.000	9 KUB	41.672.000	-	-	-	-	-	9 KUB	142.626.000	Disperindag		
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	NA	553 IKM	599.678.000	750 IKM	406.333.000	1.000 IKM	407.950.000	-	-	-	-	-	1.000 IKM	1.413.961.000	Disperindag		
Program Pengembangan dan Peningkatan IKM	Persentase IKM produktif	NA	-	-	-	-	92%	1.752.522.985	96%	1.860.760.439	100%	1.702.522.985	100%	5.315.806.409	Disperindag			
	Persentase produk IKM yang memiliki daya saing	NA	-	-	-	-	68%	-	89%	-	100%	100%						
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pelaku IKM yang menerima bantuan mesin dan peralatan IKM	NA	5 orang	37.146.000	7 orang	-	9 orang	-	-	-	-	-	9 orang	37.146.000	Disperindag			
	Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan pelatihan	NA	5 orang	-	7 orang	-	9 orang	-	-	-	-	9 orang						
Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM formal	23 IKM	40 IKM	62.405.000	35 IKM	878.276.000	100 IKM	525.000.000	-	-	-	-	-	100 IKM	1.465.681.000	Disperindag		
Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra IKM	4 sentra	-	1.591.851.000	5 sentra	162.834.000	6 sentra	240.000.000	-	-	-	-	-	6 sentra	1.994.685.000	Disperindag		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Pengembangan sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan	Persentase peningkatan produk kerajinan	100%	100%	359.252.000	100%	-	100%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	409.252.000	Disperindag	
Transmigrasi																		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi baru yang terbangun	-	-	577.888.000	-	1.244.237.000	-	980.279.900	-	279.017.500	-	324.048.224	-	465.864.869	-	3.871.335.493	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang di revitalisasi	2 Kawasan	2 Kawasan		2 Kawasan		2 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan					
Urusan Penunjang Pemerintahan																		
Perencanaan																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	858.801.261	100%	1.395.522.091	100%	1.399.380.202	100%	801.600.930	100%	739.915.565	100%	751.334.130	100%	5.946.554.180	Bappeda	Bappeda
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	873.831.866	100%	403.065.004	100%	404.179.333	100%	231.524.305	100%	213.707.882	100%	217.005.876	100%	2.343.314.267	Bappeda	Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	15.760.615	100%	37.638.428	100%	37.742.485	100%	21.619.865	100%	19.956.158	100%	20.264.126	100%	152.981.677	Bappeda	Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	15.760.615	100%	25.036.649	100%	25.105.866	100%	14.381.285	100%	13.274.606	100%	13.479.463	100%	107.038.483	Bappeda	Bappeda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	48.736.025	B	57.033.485	B	57.191.162	-	32.760.567	-	30.239.552	-	30.706.217	B	256.667.009	Bappeda	Bappeda
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Pengembangan Data Dan Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100%	100%	510.416.455	100%	794.134.951	100%	796.330.445	100%	456.158.536	100%	421.055.900	100%	427.553.742	100%	3.405.650.030	Bappeda	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan kebutuhan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	152.504.966	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	152.504.966	Bappeda	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan pembangunan	70%	75%	1.188.101.896	78%	2.088.682.403	84%	2.094.456.849	89%	1.199.758.690	93%	1.107.434.006	97%	1.124.524.209	97%	8.802.958.053	Bappeda	Bappeda

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	30%	25%	392.116.227	22%	1.102.091.569	16%	1.105.138.451	11%	633.051.696	7%	584.336.652	3%	593.354.284	3%	4.410.088.878	Bappeda	Bappeda
Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	30%	25%	493.074.682	22%	1.317.392.810	16%	1.321.034.921	11%	756.722.740	7%	698.490.874	3%	709.270.163	3%	5.295.986.190	Bappeda	Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Dan LH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang infrastruktur wilayah	30%	25%	511.915.290	22%	1.130.613.319	16%	1.133.739.054	11%	649.434.856	7%	599.459.083	3%	608.710.088	3%	4.633.871.689	Bappeda	Bappeda
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama antar daerah yang disepakati	NA	1	209.130.230	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	209.130.230	Bappeda		
Pengawasan																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	591.521.900	100%	609.826.280	100%	590.317.594	100%	647.356.406	100%	622.206.955	100%	607.940.000	100%	3.669.169.135	Inspektorat	Inspektorat
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	538.697.829	100%	208.555.282	100%	264.131.862	100%	87.350.000	100%	87.350.000	100%	87.350.000	100%	1.273.434.972	Inspektorat	Inspektorat
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	13.921.877	100%	25.036.649	100%	25.105.866	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	109.064.391	Inspektorat	Inspektorat
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	-	-	-	-	-	-	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	42.000.000		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	14.709.908	B	23.367.539	B	23.432.141	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	B	91.509.588	Inspektorat	Inspektorat
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	21.014.154	100%	16.691.099	100%	16.737.244	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	114.442.496	Inspektorat	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	4.915.773.804	WTP	5.706.064.221	WTP	5.526.086.479	-	3.587.416.294	-	3.001.904.894	-	3.273.686.521	WTP	26.010.932.212	Inspektorat,	Inspektorat,

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Hasil evaluasi SAKIP kabupaten	CC	B		B		B		B		B		BB		BB		Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan SDA	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan SDA
	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	56%	71%		75%		82%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai "B"	CC	40%		50%		60%		65%		75%		80%		80%			
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	Level 1	Level 1	230.527.163	Level 2	352.400.000	Level 2	370.000.000	Level 2	241.785.000	Level 3	306.070.000	Level 3	306.070.000	Level 3	1.806.852.163	Inspektorat	Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penyelesaian penataan kelembagaan, kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3 SOP	-	-	1 SOP	45.000.000	3 SOP	135.000.000	-	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	9 SOP	270.000.000	Inspektorat	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur	Persentase terselesainya SOP dan kebijakan daerah terkait pengawasan	NA	-	-	5 keg	288.385.500	5 keg	228.385.500	-	-	-	-	-	-	5 keg	516.771.000	Inspektorat	
Keuangan																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	4.374.815.720	100%	5.109.126.889	100%	5.139.377.500	100%	6.274.977.721	100%	5.924.977.721	100%	5.966.835.197	100%	32.790.110.748	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	678.455.000	100%	1.938.496.290	100%	1.787.864.000	100%	491.432.000	100%	391.432.000	100%	441.432.000	100%	5.729.111.290	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	35.250.000	100%	80.500.000	100%	125.253.000	100%	52.300.000	100%	55.631.800	100%	52.300.000	100%	401.234.800	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	40.828.000	100%	161.656.000	100%	178.225.740	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	520.709.740	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	87.557.000	B	456.392.500	B	467.469.500	-	108.141.800	-	105.160.000	-	107.991.800	B	1.332.712.600	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)				
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)	
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	7.500.000	100%	2.850.000	100%	2.500.000	100%	3.000.000	100%	50.850.000	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WDP	WDP	4.448.770.150	WDP	7.876.595.153	WTP	7.787.570.557	WTP	4.209.910.479	WTP	3.845.524.143	WTP	3.905.524.143	WTP	32.073.894.626	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%		100%		100%	-		100%	-		100%	-		100%			
	Persentase peningkatan PAD	100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%			
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase transparansi evaluasi realisasi anggaran OPD	100%	100%	89.075.000	100%	80.850.000	100%	270.350.000	-	-	-	-	-	-	100%	440.275.000	Badan Keuangan Daerah		
Program Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100%	100%	299.299.000	100%	556.026.000	100%	556.026.000	100%	173.033.000	100%	123.033.000	100%	123.033.000	100%	1.830.450.000	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan																			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	943.125.376	100%	1.394.652.231	100%	1.398.507.937	100%	837.947.397	100%	832.947.397	100%	832.947.397	100%	6.240.127.736	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	298.843.733	100%	375.883.550	100%	376.922.731	100%	427.885.000	100%	422.885.000	100%	422.885.000	100%	2.325.305.014	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	209.442.151	100%	159.938.284	100%	160.380.455	100%	99.450.000	100%	98.443.637	100%	98.443.637	100%	826.098.164	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	22.268.033	B	57.584.292	B	57.743.491	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	B	167.595.816	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	24.047.552	100%	16.691.099	100%	16.737.244	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	129.475.894	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	72.773.903	100%	115.627.588	100%	115.947.257	100%	1.253.596.353	100%	1.153.596.353	100%	1.153.596.353	100%	3.865.137.807	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	NA	5 orang	497.754.259	60 orang	866.852.227	260 orang	869.248.758	-	180.522.000	-	180.522.000	-	180.522.000	325 orang	2.775.421.244	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan pelatihan formal	NA	-	-	-	-	65%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat struktural	NA	-	-	-	65%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar	NA	15 orang	25 orang	35 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	75 orang				
	Jenis Diklat, BinteK, Sosialisasi dan Rakor yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi bidang teknis, fungsional dan keahlian.	NA	2 jenis	10 jenis	11 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jenis				
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	Jumlah PNS yang pensiun	NA	44 orang	96.190.206	65 orang	141.874.342	70 orang	142.266.573	-	-	-	-	-	70 orang	380.331.121	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah		
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier.	430 jabatan	430 jabatan	2.292.515.138	460 jabatan	4.892.491.938	490 jabatan	4.906.017.898	-	1.208.125.000	-	1.008.125.000	-	1.065.695.324	490 jabatan	15.372.970.298	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
	Persentase terbitnya Kartu Pegawai	NA	90%		91%		92%		-		-		-		92%			
	Persentase terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala	NA	90%		91%		92%		-		-		-		92%			
	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat	NA	90%		91%		92%		-		-		-		92%			
	Persentase terbitnya SK Fungsional	NA	90%		91%		92%		-		-		-		92%			
	Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa	NA	50 orang		100 orang		100 orang		-		-		-		100 orang			
	Jumlah PNS yang menerima penghargaan bagi PNS Teladan	NA	4 orang		4 orang		4 orang		-		-		-		5 orang			
	Persentase terprosesnya Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	NA	93%		94%		95%		-		-		-		198%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Jumlah terselesainya status hukum aparatur	NA	5 kali		5 kali		5 kali		-		-		-		6 kali			
	Persentase PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan	NA	90%		91%		92%		-		-		-		92%			
	Persentase jumlah ASN tersandung masalah hukum yang mendapat bantuan hukum	NA	100%		100%		100%		-		-		-		100%			
	Jumlah data ASN yang akurat dan terkini	4.515 orang	4.515 orang		4.670 orang		4.790 orang		-		-		-		4.790 orang			
	Jumlah aparatur pengelola yang berkompeten	-	-		2 orang		1 orang		-		-		-		1 orang			
	Persentase terprosesnya ASN yang melanggar disiplin, masalah hukum dan penyelesaiannya	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam tugas	NA	-		-		-		65%		70%		75%		75%			
	Jumlah pelayanan bagi aparatur kepegawaian yang transparan, akuntabel dan partisipatif	NA	-		-		-		17 Jenis		17 Jenis		17 Jenis		17 Jenis			
	Jumlah Aplikasi	-	1 aplikasi		-		1 aplikasi		-		-		-		2 aplikasi			
Penelitian dan Pengembangan																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	324.659.876	100%	475.778.893	100%	475.778.046	100%	621.465.500	100%	543.252.537	100%	565.697.556	100%	3.006.632.408	Balitbangda	Balitbangda
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	70.922.000	100%	60.000.000	100%	510.000.000	100%	98.920.000	100%	98.920.000	100%	98.920.000	100%	937.682.000	Balitbangda	Balitbangda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	3.992.000	100%	10.750.000	100%	10.750.000	100%	12.700.000	100%	12.700.000	100%	12.700.000	100%	63.592.000	Balitbangda	Balitbangda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	158.919.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	338.919.000	Balitbangda	Balitbangda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	21.014.000	100%	4.900.000	100%	4.900.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	71.314.000	Balitbangda	Balitbangda
Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase rekomendasi kajian perencanaan sosial budaya yang diaplikasikan SKPD	-	-	179.319.000	33	351.458.000	40	280.860.000	-	-	-	-	-	-	40	811.637.000	Balitbangda	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Penelitian Dan Pengembangan	Jumlah kajian ilmiah bidang sosial dan pemerintahan	19 kajian	2 kajian	152.307.000	3 kajian	959.563.984	3 kajian	766.814.984	-	733.039.500	-	700.000.000	-	700.000.000	8 kajian	4.011.725.468	Balitbangda	Balitbangda
	Jumlah kajian ilmiah bidang ekonomi dan pembangunan	20 kajian	1 kajian		2 kajian		4 kajian		-		-				7 kajian			
	Persentase penelitian dan pengembangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
	Jumlah kajian ilmiah bidang inovasi dan teknologi	1 kajian	-		-		1 kajian		-		-		-		1 kajian			
Program Kelembagaan Dan Pelaksanaan	Jumlah Tim Dewan Riset Daerah	-	-	120.383.000	1 Kegiatan/ Tahun	522.687.000	1 Kegiatan/ Tahun	417.695.000	-	66.050.000	-	66.050.000	-	66.050.000	1 Kegiatan/ Tahun	1.258.915.000	Balitbangda	Balitbangda
	Persentase kelembagaan dan pelaksanaan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
	Jumlah Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Penelitian	1 Kegiatan/ Tahun	1 Kegiatan/ Tahun		1 Kegiatan/ Tahun		1 Kegiatan/ Tahun		-		-		-		1 Kegiatan/ Tahun			
Program Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan	Persentase rekomendasi kajian database potensi daerah yang diaplikasikan SKPD	NA	100%	187.698.000	100%	367.882.000	100%	293.985.000	-	-	-	-	-	-	100%	849.565.000	Balitbangda	
Pendukung Staf Kepala Daerah																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	14.457.147.246	100%	13.377.646.415	100%	11.855.744.100	100%	8.455.837.864	100%	8.691.853.103	100%	9.087.465.296	100%	65.925.694.024	Bagian Umum & Bagian Keuangan Setda	Bagian Umum & Bagian Keuangan Setda
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	10.736.474.000	100%	4.333.730.000	100%	3.947.866.000	100%	1.866.145.000	100%	1.603.963.000	100%	1.927.484.000	100%	24.415.662.000	Bagian Umum Setda	Bagian Umum Setda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	401.662.000	100%	400.342.000	100%	391.988.000	100%	305.166.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.999.158.000	Bagian Umum Setda	Bagian Umum Setda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	109.819.000	100%	181.500.000	100%	204.400.000	100%	184.150.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	979.869.000	Bagian Umum Setda	Bagian Umum Setda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	232.107.000	B	142.464.000	B	977.140.000	-	142.298.000	-	142.298.000	-	142.298.000	B	1.778.605.000	Bagian Keuangan & Bagian Organisasi Setda	Bagian Keuangan & Bagian Organisasi Setda
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-		-		-		100%		100%		100%		100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	1 Dok	41.652.000	1 Dok	22.546.000	1 Dok	75.000.000	100%	90.000.000	100%	45.000.000	100%	190.612.193	100%	464.810.193	Bagian Umum Setda	Bagian Umum Setda
Program Peningkatan Kualitas Iman Dan Taqwa Generasi Qur'Ani	Peringkat anak sholeh Indonesia	2	-	7.981.048.000	-	6.312.646.000	-	6.522.714.000	1	4.636.538.636	1	3.440.892.500	1	3.440.892.500	1	32.334.731.636	Bagian Kesra Setda	Bagian Kesra Setda

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Peringkat MTQ tingkat Provinsi Jambi	NA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian kasus	NA	-	478.532.000	-	492.101.000	-	532.116.000	85%	309.750.000	90%	309.750.000	100%	400.750.000	100%	2.522.999.000	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100%	100%	1.214.424.000	100%	700.853.000	100%	883.540.000	85%	488.287.300	90%	516.985.700	100%	529.681.000	100%	4.333.771.000	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda dan DPMPSTSP	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda dan DPMPSTSP
	Jumlah regulasi yang diterbitkan	4 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	100%	100%	2.006.782.000	100%	1.069.468.000	100%	1.144.820.200	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	6.981.070.200	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Program Penataan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang menerapkan Anjab dan ABK	100%	100%	801.881.000	100%	638.565.000	100%	914.900.901	80%	788.428.000	85%	768.428.000	100%	768.428.000	100%	4.680.630.901	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
Program Penyusunan Dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	-	100%	100%	185.023.000	100%	111.292.000	100%	325.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	621.315.000	Bagian Organisasi Setda	
Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan Dan Profesi	Persentase omas, keagamaan dan profesi yang di fasilitasi	100%	100%	1.012.868.000	100%	313.002.000	100%	468.110.000	100%	816.200.000	100%	902.700.000	100%	903.700.000	100%	4.416.580.000	Bagian Kesra Setda	Bagian Kesra Setda; 11 Kecamatan
Program Pembinaan Generasi Muda	Peringkat MTQ tingkat Provinsi Jambi	5	-	-	-	212.896.000	-	372.000.000	-	-	-	-	-	-	1	584.896.000	Bagian Kesra Setda	
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah bantuan yang di fasilitasi	66 UMKM	70 UMKM	6.371.470.000	75 UMKM	11.089.242.000	80 UMKM	11.360.839.000	-	11.179.323.750	-	12.245.800.613	-	12.420.360.871	80%	64.667.036.234	Bagian Adm Pemerintahan Desa Setda; 11 Kecamatan	11 Kecamatan
	Persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	NA	-	-	-	-	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%				
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering	100%	100%	-	100%	-	100%	2.636.560.000	100%	2.519.948.000	100%	1.950.000.000	100%	1.500.000.000	100%	8.606.508.000	Bagian Pengadaan Setda	Bagian Pengadaan Setda
	Tingkat efisiensi penghematan atas proses e-tendering	NA	-	-	-	-	-	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%			
	Anggota pokja permanen	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	14 orang	-	14 orang	-	14 orang	-	14 orang		
	Meningkatnya level kematangan UKPBJ (Level 5 tertinggi)	NA	-	-	-	-	-	-	Level 2	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3			
Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi	Persentase PNWL yang melaporkan LHKPN	100%	100%	114.722.000	100%	-	100%	200.000.000	80%	100.000.000	90%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	574.722.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Pendukung Staf DPRD																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	100%	9.163.394.304	100%	11.060.186.511	100%	11.090.763.902	100%	7.132.150.800	100%	5.896.051.500	100%	5.896.051.500	100%	50.238.598.517	Setwan	Setwan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	7.686.651.947	100%	4.915.278.293	100%	4.928.867.248	100%	2.070.070.000	100%	2.365.338.444	100%	2.603.025.133	100%	24.569.231.065	Setwan	Setwan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	511.904.782	100%	838.560.814	100%	840.879.130	100%	604.605.000	100%	261.405.000	100%	261.405.000	100%	3.318.759.726	Setwan	Setwan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	540.505.256	100%	779.223.957	100%	781.378.228	100%	348.250.000	100%	348.250.000	100%	348.250.000	100%	3.145.857.441	Setwan	Setwan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	240.612.059	B	382.391.663	B	383.448.837	-	54.650.000	-	54.650.000	-	54.650.000	B	1.170.402.559	Setwan	Setwan
	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	NA	100%	40.028.307	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	100%	60.300.000	100%	60.300.000	100%	60.300.000	100%	240.928.307	Setwan	Setwan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100%	100%	6.593.547.944	100%	10.154.430.671	100%	10.182.503.977	100%	6.415.947.200	100%	6.415.947.200	100%	6.415.947.200	100%	46.178.324.192	Setwan	Setwan
Urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	NA	100%	5.055.168.043	100%	8.769.133.999	100%	13.126.352.035	100%	5.530.355.020	100%	6.049.770.807	100%	6.127.217.500	100%	44.657.997.405	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	100%	1.744.531.000	100%	7.700.047.000	100%	3.078.725.000	100%	1.220.714.430	100%	1.474.076.612	100%	1.479.755.014	100%	16.697.849.056	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	NA	100%	135.527.000	100%	225.966.000	100%	226.585.000	100%	184.438.000	100%	208.561.000	100%	209.561.000	100%	1.190.638.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	100%	-	100%	49.767.000	100%	49.903.000	100%	170.000.000	100%	195.000.000	100%	220.404.000	100%	685.074.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	16.809.000	B	43.893.000	B	44.012.000	-	68.750.000	-	84.000.000	-	89.000.000	B	346.464.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab setelah Perubahan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada akhir periode (2021)			
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	NA	100%	344.196.000	100%	301.555.000	100%	302.269.000	100%	188.425.000	100%	217.150.000	100%	209.650.000	100%	1.563.245.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase tercapainya Target PAD	100%	100%	-	100%	810.794.000	100%	813.031.000	100%	181.220.600	100%	301.595.600	100%	305.700.000	100%	2.412.341.200	11 Kecamatan	11 Kecamatan
Peningkatan Peran Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan				-		118.258.000		118.584.000	-	-	-	-	-	-	100%	236.842.000	11 Kecamatan	

B

A

B

VIII

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD.

Indikator kinerja program adalah gambaran berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama memperlihatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi deskripsi tentang prestasi organisasi di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi syarat, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel VIII.1.

Tabel VIII.1.
Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA								
	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018	2019	2020	2021
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi				
Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	NA	-	-	-	-	-	61,29%	73,12%	84,94%
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	NA	-	-	-	-	-	36,00%	38,00%	40,00%
Indeks kualitas lingkungan hidup	56,57	56,57	56,67	57,7	79,29	60,9	63,1	65,5	65,5
NTUP	NA	97,5	-	98,8	-	99,8	100	101,3	101,4
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	NA	81,5	-	77,30	77,30	78,00	80,00	82,50	84,20
Nilai Tukar Nelayan	NA	-	-	-	-	-	113,37	114	114,1
Indeks Pembangunan Manusia	61,02	61,52%	61,88%	62,02%	62,61%	62,52%	63,12%	63,62%	64,12%
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,94	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75
Indeks Kebebasan Sipil	85,45	86,08	-	88,85	-	90,55	93,75	97,4	97,85
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	A	A	A	A
Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Predikat SAKIP	CC	B	CC	B	CC	B	B	B	BB

Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 bertujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021. Indikator kinerja daerah tersebut di kategorikan atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2016 - 2021 disajikan pada Tabel VIII.2.

Tabel VIII.2.

Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi									
1.	Seluruh Urusan Pemerintah Daerah								
1.1	Pertumbuhan PDRB	1,78%	1,89%	1,92%	2,7%	3%	3,5%	4,1%	4,1%
1.2	Laju inflasi	3,5%	4,5%	4,75%	3,5%	3,75%	3,2%	3,00%	3,00%
1.3	Indek Gini	0,270	0,358	0,356	0,355	0,354	0,353	0,350	0,350
1.4	Pendapatan perkapita (Juta)	92,2	95	96,5	98	99,5	101	102,5	102,5
1.5	Angka kemiskinan	14,17%	13,5%	13%	12%	11%	10%	9%	9,00%
1.6	IPM	61,02	61,52	62,02	62,52	63,12	63,62	64,12	64,12
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf	97,30%	97,32%	97,35%	97,38%	97,40%	97,43%	97,45%	97,45%
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	6,26 %	6,42 %	6,58 %	6,64 %	6,80 %	6,96 %	7,10 %	7,10 %
1.3	Harapan lama sekolah	11,28 %	11,30 %	11,32 %	11,34 %	11,36 %	11,38 %	11,40 %	11,40 %
1.4	APK PAUD	54,11%	55,91%	57,71%	59,51%	60,31%	62,11%	63,91%	63,91%
1.5	APM SD / sederajat	97,08%	97,09%	97,10%	97,11%	97,12%	97,13%	97,14%	97,14%
1.6	APM SMP / sederajat	84,23%	84,24%	84,25%	84,26%	84,27%	84,28%	84,29%	84,29%
1.7	APK SD / sederajat	112,87%	112,89%	112,92%	112,95%	112,97%	112,99%	113,01%	113,01%
1.8	APK SMP / sederajat	92,27%	92,28%	92,29%	92,31%	92,32%	92,34%	92,36%	92,36%

2	Kesehatan								
2.1	Angka usia harapan hidup	65,43%	65,45%	65,50%	65,55%	65,60%	65,65%	65,70%	65,70%
2.2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	22,35/1.000 KH	22,00 /1.000 KH	21,50 /1.000 KH	21,00 /1.000 KH	20,50 /1.000 KH	20,00 /1.000 KH	19,00 /1.000 KH	19,00 /1.000 KH
2.3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	22,87 /1.000 KH	22,87 /1.000 KH	22,0 /1.000 KH	21,5 /1.000 KH	21,0 /1.000 KH	20,5 /1.000 KH	20 /1.000 KH	20 /1.000 KH
2.4	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21,83 /1.000 KH	21,83 /1.000 KH	19,46 /1.000 KH	17,09 /1.000 KH	14,72 /1.000 KH	12,35 /1.000 KH	10 /1.000 KH	10 /1.000 KH
2.5	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,76%	0,76%	0,66%	0,56%	0,46%	0,36%	0,25%	0,25%
2.6	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,83%	0,80%	0,76%	0,70%	0,65%	0,60%	0,50%	0,50%
2.7	Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita	13,2%	13%	12,5%	12%	11,5%	11%	10%	10%
2.8	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita	37,9%	37%	35%	33%	31%	29%	28%	28%
2.9	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,6%	24,2%	24%	23,9%	23,6%	23,5%	23,4%	23,4%
2.10	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	12,3%	12%	11,7%	11,3%	11%	10,6%	10,3%	10,3%
2.11	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	22,9%	22%	21%	20%	18%	16%	15,4%	15,4%
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan TB Paru BTA+	76%	76,5%	77%	80%	82%	84%	85%	85%
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Prevalensi Penyakit Kusta	3,7 / 1.000	3,5 / 1.000	3 / 1.000	2,5 / 1.000	2 / 1.000	1,5 / 1.000	1 / 1.000	1 / 1.000
2.15	Angka Kesembuhan TB Paru BTA+	92,3%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	98%

3	Ketenagakerjaan								
3.1	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	NA	60%	70%	75%	80%	90%	90%	90%
Fokus Seni, Budaya dan Olah raga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian	54 Group	78 Group	85 Group	92 Group	99 Group	106 Group	112 Group	112 Group
1.2	Jumlah gedung	2 unit	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit	8 unit	12 unit	12 unit
2	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah klub olahraga	96 klub	96 klub	99 klub	100 klub	105 klub	108 klub	110 klub	110 klub
2.2	Jumlah gedung olahraga	12 unit	17 unit	18 unit	21 unit	24 unit	25 unit	28 unit	28 unit
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD	104,39%	104,41%	104,42%	104,44%	104,45%	104,47%	104,48%	104,48%
1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,89%	84,90%	84,91%	84,92%	84,93%	84,95%	84,96%	84,96%
1.3	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,22%	89,23%	89,24%	89,25%	89,27%	89,28%	89,30%	89,30%
1.4	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	95,56%	96,63%	97,37%	98,11%	98,85%	99,59%	100%	100%
1.5	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	98,30%	98,34%	98,38%	98,42%	98,47%	99,01%	99,05%	99,05%
1.6	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	67,51%	67,52%	67,53%	67,56%	67,57%	67,59%	67,60%	67,60%

1.7	Rasio guru/murid SD sederajat	61,11%	61,14%	61,19%	61,21%	61,24%	61,27%	61,31%	61,31%
1.8	Rasio guru/murid SMP sederajat	59,43%	59,44%	59,46%	59,47%	59,49%	59,50%	59,52%	59,52%
1.9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,27%	0,26%	0,25%	0,23%	0,24%	0,22%	0,23%	0,23%
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,35%	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,28%	0,28%
1.11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,60%	99,62%	99,64%	99,67%	99,69%	99,73%	99,80%	99,80%
1.12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,05%	97,07%	97,09%	97,13%	97,14%	97,17%	97,20%	97,20%
1.13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,02%	97,04%	97,05%	97,07%	97,08%	97,11%	97,13%	97,13%
1.14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	79,95%	79,96%	79,98%	79,99%	80,02%	80,03%	80,05%	80,05%
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,82%	90,83%	90,84%	90,85%	90,86%	97,87%	90,88%	90,88%
2	Kesehatan								
2.1	Jumlah Puskesmas	17 unit	17 unit	17 unit	18 unit	18 unit	18 unit	19 unit	19 unit
2.2	Jumlah Puskesmas rawat inap	8 unit	8 unit	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	11 unit	11 unit
2.3	Jumlah Pustu	59 unit	59 unit	59 unit	60 unit	60 unit	60 unit	61 unit	61 unit
2.4	Jumlah Polindes	28 unit	28 unit	28 unit	29 unit	29 unit	30 unit	30 unit	30 unit
2.5	Jumlah Posyandu	277 unit	280 unit	280 unit	282 unit	283 unit	284 unit	285 unit	285 unit
2.6	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	-	11,76%	29,41%	47%	64,7%	70,58%	76,5%	76,5%

2.7	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	7	7	7	9	11	13	14	14
2.8	Persentase RS yang terakreditasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	97%
2.10	Jumlah kematian ibu	5	5	5	5	4	4	4	4
2.11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4)	93,18	93,5	94%	95%	96%	97%	98%	98%
2.12	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	NA	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.13	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,46%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%	99,00%	99,00%	99,00%
2.14	Persentase anak usia 0-59 bln yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	87,60%	88%	89%	90%	92%	94%	95%	95%
2.15	Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	94,57%	95%	95,5	96%	96,5	97%	97,5	98%
2.16	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	NA	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.17	Persentase WNI usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	82,25	83%	85%	86%	88%	89%	90%	90%

2.18	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.19	Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.20	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan	NA	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.21	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96,78%	96,8%	97%	97,5%	97,7%	98%	98%	98%
2.22	Persentase penderita TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	NA	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%	85,0%
2.23	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar	NA	20,0%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	45,0%
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	31,2	35,0	38,0	40,0	43,0	46,0	50,0	50,0
2.25	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18,5	20,0	21,5	23,0	23,5	24,0	25,0	25,0
2.26	Persentase ASI eksklusif	62,4	63,0%	65,0%	68,0%	70,0%	72,0%	75,0%	75,0%
2.27	Persentase keluarga yang mengikuti program keluarga berencana (KB)	79,3%	80,0%	82,0%	84,0%	86,0%	88,0%	90,0%	90,0%
2.28	Persentase balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan	NA	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	80,0%
2.29	Persentase penderita hipertensi mendapat pengobatan secara teratur	NA	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%

2.30	Persentase penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantarkan	NA	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%
2.31	Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	NA	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%
2.32	Persentase keluarga yang sudah menjadi anggota JKN	36,23%	40,0%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	65,0%
2.33	Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	50,00%	53,0%	55,0%	57,0%	58,0%	60,0%	60,3%	60,3%
2.34	Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	25,0%	26,0%	28,0%	30,0%	32,0%	33,5%	35,0%	35,0%
2.35	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit kategori Kelas "C"	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
2.36	Jumlah dokter spesialis dasar	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
2.37	Jumlah dokter spesialis penunjang	2 orang	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
2.38	Jumlah dokter umum	7 orang	7 orang	8 orang	9 orang	10 orang	10 orang	11 orang	11 orang
2.39	Jumlah dokter gigi	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
2.40	Jumlah apoteker	1 orang	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
2.41	BOR (Bed Occupancy Rate)	29,72	29,72	29,98	30,24	30,49	31,01	31,27	31,27
2.42	ALOS (Average Length Of Stay)	2,20	2,20	2,23	2,76	2,78	3,09	3,11	3,11
2.43	BTO (Bed Turn Over)	34,16	34,16	37,73	38,67	39,62	40,56	41,50	41,50
3	Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang								
3.1	Panjang jalan kabupaten (Km)	993,88 Km	993,88 Km	995,88 Km	997,88 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km

3.2	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,43%	76,75%	78,64%	80,07%	81,42%	82,68%	83,87%	83,87%
3.3	Persentase jalan kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap	54,05%	54,05%	58,34%	62,64%	66,93%	71,23%	75,52%	75,52%
3.4	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	20,40%	23,43%	26,29%	29,58%	32,85%	36,45%	38,78%	38,78%
3.5	Peningkatan jumlah infrastruktur Irigasi	532,26 Km	129 Km	130 Km	135 Km	59 Km	63 Km	66 Km	582,00 Km
3.6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,61%	66,79%	71,03%	74,45%	75,95%	77,45%	78,95%	78,95%
3.7	Luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	176 Km	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	248 Km
3.8	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	N	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	60,34%	60,34%	60,81%	61,75%	62,69%	62,73%	63,07%	63,07%
4.2	Rehab rumah tidak layak huni	4200 unit	471 unit	382 unit	382 unit	382 unit	382 unit	382 unit	6.581 unit
4.3	Persentase jalan lingkungan kondisi baik (%)	19,04%	23,20%	28,02%	32,51%	36,70%	40,59%	44,22%	44,22%
4.4	Panjang jalan lingkungan	442,51 Km	18,40 Km	21,35 Km	19,87 Km	18,51 Km	17,24 Km	16,07 Km	553,95 Km
4.5	Persentase layanan air bersih	NA	-	-	-	28,09%	28,65%	29,22%	29,22%
4.6	Persentase pengurangan permukiman kumuh	5,16%	5,15%	5,13%	5,11%	5,12%	5,11%	5,09%	5,09%
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase konflik yang difasilitasi	NA	60%	70%	75%	80%	80%	80%	80%

5.2	Indeks Demokrasi Indonesia	71%	-	-	-	-	72%	74%	74%
5.3	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	85,45%	86,08%	88,85%	90,55%	93,75%	97,40%	97,85%	97,85%
5.4	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat (Pekat)	15,81%	15%	0	0	14%	13,5%	12,5%	12,5%
5.5	Persentase cakupan layanan kebakaran	NA	80%	85%	90%	60%	60%	63%	63%
6	Sosial								
6.1	Persentase rumah tangga sasaran sangat miskin yang menerima bantuan sosial.	NA	-	-	-	0,5%	1,0%	1,0%	1,1%
6.2	Persentase peningkatan penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial.	NA	-	-	-	80%	90%	100%	100%
6.3	Persentase peningkatan kapasitas pendamping sosial dan LKS yang terlatih	NA	-	-	-	70%	85%	95%	95%
7	Penanggulangan Bencana								
7.1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5 desa	6 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	26 desa
7.2	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fokus Pelayanan Urusan Wajib Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Persentase peningkatan lembaga tripartit yang dibentuk	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1.2	Jumlah penduduk usia kerja (15-58 th)	156.616	115.533	120.492	123.616	126.862	130.234	135.256	135.256
1.3	Tingkat pengangguran	1,44%	1,55%	1,31%	1,11%	0,91%	0,74%	0,71%	0,71%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak								
2.1	Indeks Pembangunan Gender	59,06	59,81	60,56	61,31	62,06	62,81	63,56	63,56
2.2	Jumlah pembentukan kecamatan layak anak	NA	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan
2.3	Persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	NA	-	-	-	30,0%	40,0%	45,0%	45,0%
3	Pangan								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	NA	81,5	77,3	78	80	82,5	84,2	84,2
3.3	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2031 (Kkal/Kap/Hari)	2071 (Kkal/Kap/Hari)	2121 (Kkal/Kap/Hari)	2161 (Kkal/Kap/Hari)	2070 (Kkal/Kap/Hari)	2075 (Kkal/Kap/Hari)	2080 (Kkal/Kap/Hari)	2080 (Kkal/Kap/Hari)
3.4	Persentase penanganan Daerah Rawan Pangan	NA	-	-	-	93,30%	100%	100%	100%
3.5	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	-	-	-	60,00%	65%	65%	65%
3.6	Persentase ketersediaan pangan utama	NA	-	-	-	90,65%	95,18%	99,95%	99,95%
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,57	56,67	57,70	60,90	63,10	65,50	65,50	65,50

4.2	Persentase layanan persampahan	NA	-	-	-	55%	64%	73%	73%
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%
5.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun	NA	-	-	-	76,30%	80,05%	83,79%	83,79%
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh posyantek	NA	-	-	-	8	10	11	29
6.2	Persentase Bumdes yang aktif	NA	-	-	-	89,04%	95,89%	100,00%	100,00%
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Persentase penurunan Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,94%	0,78%	0,78%	0,78%	0,77%	0,76%	0,75%	0,75%
7.2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%	4,0%	3,8%	3,5%	3,5%
7.3	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65,0%	66,0%	66,0%	66,5%	67,0%	67,5%	68,0%	68,0%
7.4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	14%	13%	12%	11%	10%	9%	8%	8%
8	Perhubungan								
8.1	Persentase penurunan kecelakaan darat	NA	-	-	-	0,35%	0,30%	0,25%	0,25%
8.2	Persentase penurunan kecelakaan air	NA	-	-	-	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%

8.3	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	NA	-	-	-	16,67%	66,67%	100,00%	100,00%
8.4	Persentase ketersediaan terminal	NA	-	-	-	-	-	100,00%	54,55%
8.5	Persentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%
8.6	Persentase dermaga dalam kondisi baik	35,5%	39,8%	43,0%	43,0%	44,1%	45,2%	46,2%	46,2%
8.7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	153.615	154.383	155.155	155.931	156.711	157.494	158.282	158.282
8.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:23	1:25	1:26	1:27	1:28	1:29	1:30	1:30
8.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	76.808	77.192	77.578	77.966	78.355	78.747	79.141	79.141
8.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	199.021	200.016	201.016	202.021	203.031	204.046	205.066	205.066
9	Komunikasi dan informatika								
9.1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	NA	-	-	-	45%	61%	76%	76%
9.2	Persentase peningkatan jangkauan TIK	NA	-	-	-	86%	95%	100%	100%
9.3	Persentase layanan telekomunikasi di desa/kel	NA	-	-	-	86%	95%	100%	100%
9.4	Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat desa/kel	NA	-	-	-	10,8%	12,9%	15,1%	15,1%
9.5	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
10.1	Persentase koperasi sehat	NA	-	-	-	18,51%	20,13%	21,75%	21,75%
10.2	Persentase UKM sehat	NA	-	-	-	9,1%	10,3%	11,5%	11,5%
11	Penanaman Modal								
11.1	Nilai Investasi PMDN (dalam Juta rupiah)	47.123	30.000	31.500	33.075	315.000	330.750	347.288	1.134.736
11.2	Nilai Investasi PMA (\$)	NA	-	-	-	5.100.000	5.202.000	5.306.040	15.608.040
12	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	NA	-	-	-	43%	45%	45%	45%
12.2	Persentase wirausaha muda	NA	-	-	-	10%	10%	10%	30%
12.3	Peringkat POPDA	peringkat 5	peringkat 5	peringkat 4	peringkat 4	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 2	peringkat 2
13	Statistik								
13.1	Buku "Tanjung Jabung Timur dalam Angka"	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
13.2	Buku "PDRB Kabupaten"	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
13.3	Buku "IPM Kabupaten"	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
14	Kebudayaan								
14.1	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	NA	-	-	-	47%	49%	49%	49%
14.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	NA	-	-	-	16	18	20	20
15	Perpustakaan								
15.1	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan / tahun	NA	-	-	-	19,07%	21,62%	21,62%	100,00%
15.2	Persentase koleksi buku tersedia	NA	-	-	-	17,92%	19,78%	19,78%	100,00%

16	Kearsipan								
16.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	-	-	-	20,0%	20,0%	20,0%	100,0%
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-67,44%	0,00	56,17%	2,04%	2,04%	2,05%	2,10%	64,38%
1.2	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,30%	3%	0,00%	0,30%	0,42%	0,45%	0,47%	2,88%
1.3	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	5,00%	6%	7,00%	8,00%	0,42%	0,45%	0,48%	2,89%
2	Pariwisata								
2.1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	-2,91	2,01	2,00	1,96	1,94	1,91	1,90	1,90
3	Pertanian								
3.1	Persentase peningkatan kelas kelompok tani, :	NA	-	-	-	42,0%	30,0%	24,0%	24,0%
	1) Pemula	NA	-	-	-	40,0%	47,0%	54,0%	54,0%
	2) Lanjut	NA	-	-	-	17,0%	19,0%	20,0%	20,0%
	3) Madya	NA	-	-	-	1,1%	1,3%	1,5%	1,5%
	4) Utama	NA	-	-	-	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
	5) Penyuluh Berprestasi	NA	-	-	-				
3.2	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah :	NA	-	-	-	85%	95%	100%	100%
	a) Beras Merah	NA	-	-	-	90%	97%	100%	100%
	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah :	NA	-	-	-				
	b) Semangka	NA	-	-	-				

	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah : c) Nenas	NA	-	-	-	92%	96%	100%	100%
3.3	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 1) Hand Tractor	NA	-	-	-	58%	78%	100%	100%
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 2) Alat tanam jagung manual	NA	-	-	-	61%	65%	100%	100%
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 3) Mesin pemotong rumput	NA	-	-	-	50%	68%	100%	100%
	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian : 4) Hand sprayer elektrik	NA	-	-	-	55%	76%	100%	100%
3.4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : a. Padi	NA	-	-	-	0,48%	0,71%	0,95%	0,95%
	b. Jagung	NA	-	-	-	0,65%	0,97%	1,12%	1,12%
	c. Kedele	NA	-	-	-	0,77%	2,29%	3,37%	3,37%
	d. Nenas	NA	-	-	-	0,20%	0,39%	0,58%	0,58%
	e. Semangka	NA	-	-	-	5,26%	7,50%	9,30%	9,30%
	f. Cabe	NA	-	-	-	1,26%	1,65%	2,03%	2,03%
3.5	Produktivitas kelapa dalam	NA	-	-	-	1.165 Kg/Ha	1.167 Kg/Ha	1.169 Kg/Ha	1.169 Kg/Ha
3.6	Produktivitas pinang	NA	-	-	-	486 Kg/Ha	499 Kg/Ha	512 Kg/Ha	512 Kg/Ha
3.7	Produktivitas kopi	NA	-	-	-	502 Kg/Ha	510 Kg/Ha	517 Kg/Ha	517 Kg/Ha
3.8	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	3.555.138 ton	3.733.404 ton	3.911.670 ton	4.089.936 ton	4.268.202 Ekor	4.446.468 Ekor	4.624.734 Ekor	4.624.734 Ekor
3.9	Jumlah peningkatan produksi daging (Kg)								
	a. Ruminansia	209.253 ton	219.716 ton	230.179 ton	240.642 ton	251.105 Kg	261.568 Kg	272.031 Kg	272.031 Kg
	b. Unggas	1.248.907 ton	1.311.352 ton	1.373.797 ton	1.436.242 ton	998.901 Kg	1.113.774 Kg	1.241.858 Kg	1.241.858 Kg

4	Perdagangan								
4.1	Persentase peningkatan pasar yang dibangun	NA	-	-	-	75	88	100	100
5	Perindustrian								
5.1	Persentase IKM produktif	NA	-	-	-	92%	96%	100%	100%
5.2	Persentase produk IKM yang memiliki daya saing	NA	-	-	-	68%	89%	100%	100%
6	Transmigrasi								
6.1	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang di revitalisasi	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan								
1.1	Persentase keselarasan pembangunan	70%	75%	78%	84%	89%	93%	97%	97%
2	Pengawasan								
2.1	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B	BB	BB
2.2	Penyelesaian tindaklanjut temuan	56%	71%	75%	82%	100%	100%	100%	100%
2.3	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	1	1	2	2	2	3	3	3
3	Kepegawaian dan Diklat								
3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan pelatihan formal	NA	-	-	-	65%	70%	75%	75%
3.2	Jumlah pelayanan bagi aparatur kepegawaian yang transparan, akuntabel dan partisipatif	NA	-	-	-	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis

4	Keuangan								
4.1	Persentase peningkatan PAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.3	Capaian opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Persentase penelitian dan pengembangan	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Nilai Tukar Petani / NTUP	NA	97,5	98,8	99,8	100	101,3	101,4	101,4
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Bidang Perhubungan								
1.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
	a. Melalui terminal	153.615	155.152	156.703	158.270	159.853	161.451	163.066	163.066
	b. Melalui dermaga	45.405	45.859	46.318	46.781	47.249	47.721	48.198	48.198
1.2	Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga dan terminal	15.913	15.200	15.352	15.506	15.661	15.817	15.975	15.975
1.3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,31%	3,97%	3,69%	3,69%	3,70%	3,71%	3,71%	3,71%
2	Bidang Penataan ruang								
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang								
	a. Bank Pemerintah	10 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	12 unit	12 unit
	b. Bank swasta	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
3.2	Jumlah restoran/rumah makan	56 unit	61 unit	66 unit	70 unit	75 unit	80 unit	85 unit	85 unit
3.3	Jumlah hotel/penginapan	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit

4	Bidang Lingkungan Hidup								
4.1	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	52,86%	53,00%	55,00%	57,00%	58,00%	60,00%	63,00%	63,00%
5	Komunikasi dan Informasi								
5.1	Persentase akses internet yang terlayani	NA	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Indeks kriminalitas	10,90	10,80	10,70	10,60	10,50	10,40	10,30	10,30
2	Jumlah demo (kali)	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali
3	Jenis pajak dan retribusi	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 30 Retribusi Daerah
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Rasio ketergantungan	0,270	0,358	0,356	0,355	0,354	0,353	0,350	0,350

B

A

B

IX

PENUTUP

BAB IX

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jambi selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pendorong bagi upaya mewujudkan visi dan misi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kerjasama yang baik antar perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian, kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi, pelaku dunia usaha dan masyarakat Tanjung Jabung Timur melalui kemitraan juga sangat diperlukan.

9.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021, maka, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kondisi ini diselaraskan dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya terselesaikan sampai dengan tahun 2021 dan masalah pembangunan daerah yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 ini dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Guna memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Semua pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021.
3. Guna melaksanakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan penjabaran RPJMD, diawali dengan menyusun dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari renstra Perangkat Daerah.
 - b. Tahapan partisipatif dilakukan untuk mendapatkan masukan guna Penyempurnaan Rencana Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c. Tahapan Penyusunan Akhir RKPD dilakukan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman pada hasil forum Perangkat Daerah.
4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJMD pada tahun ke 3 (tiga) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Kelurahan Rano, Muara Sabak Barat
Jambi, Indonesia

Telp. (0740) 7370006 Fax. (0740) 7370006
Website : www.tanjabtinkab.go.id